

WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NO 1 TAHUN 2025

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA TERNATE
TAHUN 2025-2029

BAPPELITBANGDA, TAHUN 2025

WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NO 1 TAHUN 2025

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA TERNATE
TAHUN 2025-2029

BAPPELITBANGDA, TAHUN 2025

WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA TERNATE TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

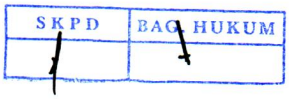
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

SKPD	BAG. HUKUM

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

SKPD | BAG. HUKUM

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2023);
25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

SKPD	BAG. HUKUM

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Maluku Utara 2025-2045 (Lembaran daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024-2043 (Lembaran daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 113);
33. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 154) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);
34. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2024 Nomor 232, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 164).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALI KOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2025-2029.

SKPD	BAG HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Ternate.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Ternate, sebagai lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan penunjang perencanaan di Kota Ternate.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJMN Tahun 2025-2029.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.

SKPD	BAG. HUKUM

12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dari RPJMD adalah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai:
    a. Pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
    b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD dan Renja PD; dan
    c. Pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

RPJMD Kota Ternate 2025-2029 terdiri atas sistematika sebagai berikut:
a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
e. BAB V : Penutup.

Pasal 4

Penjabaran dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

SKPD	BAG. HUKUM

BAB IV
PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 5

(1) RPJMD dilaksanakan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan RKPD, dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra PD, Renja PD serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan umum APBD atau prioritas dan plafon anggaran sementara setiap tahunnya yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama pada bulan Mei minggu ke-4 (empat) setiap tahunnya.
(3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang dijadikan landasan untuk penyusunan Renja PD setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun.
(4) Ketentuan mengenai Tahapan dan tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan dan dokumen perencanaan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Kepala Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD dapat dicapai untuk mewujudkan visi RPJPD dan visi RPJMN.
(3) Pengendalian dan evaluasi oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala BAPPELITBANGDA selaku Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan penunjang perencanaan.
(4) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis perangkat daerah.
(5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan evaluasi terhadap pencapaian target dan indikator masing-masing program dan kegiatan setiap tahunnya.
(6) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala BAPPELITBANGDA.

SKPD	BAG. HUKUM

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan tata cara pelaksanaan pengendalian dan evaluasi, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

(1) RPJMD dapat diubah minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pada:
    a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan dokumen RPJMD tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
    b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai sebagaimana substansi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; dan
    c. Terjadi perubahan yang mendasar, seperti mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan perubahan kebijakan nasional.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dalam hal terjadi kondisi yang berpengaruh terhadap pencapaian target tahunan pada indikator, sasaran dan program dalam RPJMD, tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah daerah, maka penyesuaian dapat dilaksanakan pada saat penyusunan RKPD, kebijakan umum APBD atau prioritas dan plafon anggaran sementara.

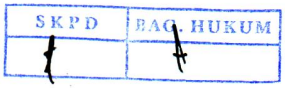
Pasal 9

Dalam hal RTRW dan RPJPD yang menjadi pedoman penyusunan RPJMD mengalami perubahan, maka RPJMD dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan yang perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RKPD Kota Ternate Tahun 2025 dan perubahan RKPD Kota Ternate Tahun 2025 serta RKPD Kota Ternate Tahun 2026 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.



(2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Kepala Daerah pada tahun terakhir masa jabatan menyusun RKPD tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJMD, RPJPD dan RPJMN.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun KUA-PPAS dan RAPBD/APBD tahun pertama periode pemerintahan atau masa jabatan Kepala Daerah berikutnya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 210), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 27 Agustus 2025

WALIKOTA TERNATE,

M.TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 27 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

RIZAL MARSAOLY

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2025 NOMOR 235
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA : (1/ 2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA TERNATE TAHUN 2025-2029

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Pasal 258 ayat (2) dan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah diamanatkan bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, maka daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Ternate Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Ternate paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.

Selanjutnya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dijabarkan kedalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan dan dijabarkan kedalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk masa 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen Renstra PD selanjutnya dijabarkan kedalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 273 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

SKPD	BAG. HUKUM

Untuk optimalisasi pencapaian target kinerja pelaksanaan RPJMD, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau BAPPELITBANGDA Kota Ternate sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 260, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, berkewajiban mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan RPJMD, serta melakukan pembinaan, fasilitasi pemantauan dan supervisi kepada seluruh perangkat daerah dalam melakukan penyusunan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

Dalam implementasi selanjutnya, dokumen RPJMD Pemerintah Kota Ternate Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi landasan bagi seluruh pemangku kepentingan, antara lain: seluruh perangkat daerah, masyarakat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pakar dan akademis, serta kalangan dunia dalam permumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pemantauan dalam upaya terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang transparan, adil, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, melalui beberapa langkah, yaitu:

1. Menjadi pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan baik Pemerintah daerah, masyarakat dan *stake holder* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah dalam upaya pencapaian target Visi, Misi dan program kerja pemerintahan daerah;
2. Mendorong tercapainya konsistensi, sinkronisasi dan sinergi, serta keselarasan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan daerah, maupun antara pusat, provinsi dan Pemerintah Kota Ternate;
3. Mendorong tercapainya keserasian, konsistensi dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pembinaan dan pengawasan;
4. Mendorong terlaksananya pengendalian pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
5. Mendorong terwujudnya peran serta dan partisipasi masyarakat secara optimal dalam pengendalian, pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Dokumen RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Perumusan

SKPD	BAG. HUKUM

Visi dan Misi dimaksudkan dalam upaya memberdayagunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Ternate untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka menengah.

Visi Pemerintahan Kota Ternate yang dituangkan kedalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 adalah *"Mewujudkan Ternate Yang Mandiri dan Berkeadilan"*. Untuk mewujudkan capaian target Visi secara maksimal, maka perlu dirumuskan kedalam beberapa Misi, dimana antara misi yang satu dengan yang lain saling terkait sebagai satu kesatuan yang utuh, sebagai berikut:

1. Menumbuh-Kembangkan Kelembagaan Sosial Dalam Bingkai 7 Nilai Dasar Kebudayaan Ternate (*Kie Se Gam Magogugu Matiti Tomdi*);
2. Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Dasar Dan Infrastruktur Strategis;
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing;
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Bersih, Transparan, Dan Akuntabel Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik;
5. Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Yang Tangguh Dan Unggul Berbasis Kepulauan; dan
6. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan, Asri Dan Lestari.

Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Ternate Tahun 2025-2029 terdiri dari 9 (sembilan) Bab dan 12 (dua belas) Pasal yang menguraikan tentang (1) ketentuan Umum; (2) Maksud dan Tujuan; (3) Sistematika RPJMD; (4) Pelaksanaan RPJMD; (5) Pengendalian dan Evaluasi; (6) Perubahan RPJMD; (7) Ketentuan Lain-lain; (8) Ketentuan Peralihan; dan (9) Ketentuan Penutup.

Selanjutnya untuk menjamin agar dokumen RPJMD yang akan dirumuskan berkesinambungan dengan dokumen RPJMD ini, maka selama belum ada kebijakan baru dari pemerintah pusat, Peraturan Daerah ini masih dapat dijadikan pedoman untuk perumusan kebijakan penyusunan Dokumen RPJMD periode Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih berikutnya. Hal ini dalam upaya untuk menjamin agar Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Kota Ternate Tahun 2025-2045 untuk mensejahterakan masyarakat Kota Ternate dapat dicapai secara maksimal.

SKPD	BAG. HUKUM

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 235



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI xvii

DAFTAR TABEL xviii

DAFTAR GAMBAR xxii

DAFTAR GRAFIK xxiii

BAB I PENDAHULUAN 1
- 1.1 Latar Belakang 1
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 5
- 1.4 Maksud dan Tujuan 6
- 1.5 Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 9
- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi 10
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 61
- 2.3 Aspek Daya Saing Daerah 82
- 2.4 Aspek Pelayanan Umum 100
- 2.5 Gambaran Keuangan Daerah 135
- 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis 159

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 193
- 3.1 Visi dan Misi 193
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 197
- 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Ternate 204
- 3.4 Program Pembangunan 222

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 255
- 4.1 Kerangka Pendanaan 255
- 4.2 Agenda Prioritas 255
- 4.3 Program Perangkat Daerah 256
- 4.4 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 318

BAB V PENUTUP 333
- 5.1 Pedoman Transisi 333
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan 333

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kecamatan di Kota Ternate	10
Tabel 2.2	Ketinggian dari Permukaan Laut (DPL) serta Banyaknya Pantai dan Bukan Pantai di Kota Ternate	11
Tabel 2.3	Luas Kawasan Hutan dan Perairan menurut Fungsi Hutan (Ha) Kota Ternate Tahun 2020-2024	18
Tabel 2.4	Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Kota Ternate Tahun 2020-2024	22
Tabel 2.5	Luas Areal dan Produksi Tanaman Pangan Kota Ternate Tahun 2020-2024	22
Tabel 2.6	Luas Areal dan Produksi Tanaman Hortikultura Kota Ternate Tahun 2020-2024	23
Tabel 2.7	Luas Areal dan Produksi Tanaman Biofarmaka Kota Ternate Tahun 2020-2024	24
Tabel 2.8	Populasi Ternak dan Unggas Kota Ternate Tahun 2020-2024	24
Tabel 2.9	Produksi Daging dan Telur Kota Ternate Tahun 2020-2024	25
Tabel 2.10	Indeks Jasa Lingkungan Kota Ternate	30
Tabel 2.11	Tabulasi dan Diagram Persentase Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Kota Ternate Berdasarkan Kecamatan	31
Tabel 2.12	Tabulasi dan Diagram Persentase Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kota Ternate Berdasarkan Kecamatan	33
Tabel 2.13	Tabulasi dan Diagram Persentase Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Air Kota Ternate Berdasarkan Kecamatan	34
Tabel 2.14	Tabulasi dan Diagram Persentase Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Iklim Kota Ternate Berdasarkan Kecamatan	36
Tabel 2.15	Tabulasi dan Diagram Persentase Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Banjir Kota Ternate Berdasarkan Kecamatan	37
Tabel 2.16	Tabulasi dan Diagram Persentase Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Longsor Kota Ternate Berdasarkan Kecamatan	39
Tabel 2.17	Tabulasi dan Diagram Persentase Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Ternate Berdasarkan Kecamatan	40
Tabel 2.18	Konsumsi Listrik per Kapita Kota Ternate Tahun 2020-2024	43
Tabel 2.19	Kapasitas Air Baku dan Akses Rumah Tangga Kota Ternate Tahun 2020-2024	44
Tabel 2.20	Produksi Air Bersih Perumda Ake Gaale Kota Ternate 2020-2024	45
Tabel 2.21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Ternate Tahun 2020-2024	45
Tabel 2.22	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kota Ternate Tahun 2020-2024	48
Tabel 2.23	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kota Ternate Tahun 2020-2024	48
Tabel 2.24	Neraca Pengelolaan Sampah Kota Ternate Tahun 2024	49
Tabel 2.25	Komponen Akses Sanitasi Layak	51
Tabel 2.26	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Kota Ternate 2020-2024	51
Tabel 2.27	Indeks Risiko Bencana Kota Ternate Tahun 2020-2024	52
Tabel 2.28	Penurunan Intensitas Emisi GRK Kota Ternate Tahun 2020-2030	53
Tabel 2.29	Perkembangan Jumlah Penduduk, Distribusi Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Ternate Tahun 2020-2024	56
Tabel 2.30	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Ternate Tahun 2024	57
Tabel 2.31	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Ternate Tahun 2025-2030	59
Tabel 2.32	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Ternate Tahun 2025-2030.	60
Tabel 2.33	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Ternate Tahun 2025-2030	60
Tabel 2.34	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Ternate Tahun 2020-2024	61
Tabel 2.35	Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB ADHB Kota Ternate Tahun 2020-2024	62
Tabel 2.36	PDRB Kota Ternate Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 (Miliar Rupiah)	63

Tabel 2.37 PDRB Kota Ternate Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 (miliar rupiah) 63
Tabel 2.38 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2, dan Garis Kemiskinan Kota Ternate Tahun 2020-2024 65
Tabel 2.39 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Status Pekerjaan Utama, Jenis Kelamin di Kota Ternate, 2024 67
Tabel 2.40 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kota Ternate Tahun 2020-2024 67
Tabel 2.41 Indeks Keluarga Sehat Kota Tenate Tahun 2020-2024 69
Tabel 2.42 Jumlah Bayi Lahir dan Balita Gizi Buruk di Kota Ternate Tahun 2020-2024 70
Tabel 2.43 Pola Penyakit Tidak Menular per Puskesmas Kota Ternate Tahun 2024 71
Tabel 2.44 Penyakit Menular Kota Ternate Tahun 2020-2024 71
Tabel 2.45 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Ternate Tahun 2024 72
Tabel 2.46 Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Kota Ternate 2024 73
Tabel 2.47 Angka Putus Sekolah Kota Ternate Tahun 2020-2024 74
Tabel 2.48 Angka Literasi/Numerasi Kota Ternate Tahun 2020-2024 74
Tabel 2.49 Angka Partisipasi Anak Usia Dini (PAUD) Kota Ternate Tahun 2020-2024 75
Tabel 2.50 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Ternate Tahun 2020-2024 75
Tabel 2.51 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Ternate Tahun 2020-2024 76
Tabel 2.52 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Kota Ternate Tahun 2020-2024 77
Tabel 2.53 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Ternate Tahun 2020-2024 77
Tabel 2.54 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kota Ternate Tahun 2020-2024 80
Tabel 2.55 Indeks Perlindungan Anak Kota Ternate Tahun 2020-2024 81
Tabel 2.56 Indeks Pembangunan Pemuda Kota Ternate Tahun 2020-2024 81
Tabel 2.57 Jumlah Grup Kesenian dan Museum Kota Ternate Tahun 2020-2024 82
Tabel 2.58 Jumlah Klub Olahraga dan Gedung Olahraga Kota Ternate Tahun 2020-2024 82
Tabel 2.59 Profil Penduduk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Kota Ternate Tahun 2024 83
Tabel 2.60 Perkembangan Rasio Ketergantungan Kota Ternate Tahun 2020-2024 84
Tabel 2.61 Indeks Pendidikan Kota Ternate Tahun 2020-2024 84
Tabel 2.62 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kota Ternate Tahun 2020-2024 85
Tabel 2.63 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kota Ternate Tahun 2020-2024 85
Tabel 2.64 Indeks Inovasi Daerah Kota Ternate Tahun 2020-2024 87
Tabel 2.65 Rata-rata Pengeluaran per-Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (Rupiah) Kota Ternate Tahun 2020-2024 87
Tabel 2.66 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang Kota Ternate 2024 88
Tabel 2.67 Komponen Hunian Layak 91
Tabel 2.68 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau Kota Ternate Tahun 2020-2024 91
Tabel 2.69 Jumlah Desa/Kelurahan Mandiri Kota Ternate Tahun 2020-2024 91
Tabel 2.70 Jumlah Kendaraan Menurut Jenisnya di Kota Ternate Tahun 2020-2024 92
Tabel 2.71 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Ternate Tahun 2024 92
Tabel 2.72 Jumlah Pelanggan dan Produksi Listrik yang Diusahakan oleh PT PLN (Persero) di Kota Ternate Tahun 2020-2024 94
Tabel 2.73 Persentase Penduduk dalam Penggunaan Teknologi Informasi Kota Ternate Tahun 2020-2024 94
Tabel 2.74 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Ternate 2020-2024 95
Tabel 2.75 Indeks Harga Konsumen (IHK), Inflasi (*year on year*), Andil Inflasi (*year on year*) Kota Ternate Menurut Kelompok Pengeluaran Desember 2024 96
Tabel 2.76 Perkembangan Inflasi Kota Ternate Menurut Bulan (2012=100) Tahun 2020-2024 96
Tabel 2.77 Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah) 98
Tabel 2.78 Kinerja Keuangan Perumda Ake Gaale Kota Ternate 2020 - 2024 99
Tabel 2.79 Kinerja Keuangan PT. BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate 2020-2024 100
Tabel 2.80 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Ternate Tahun 2020-2024 101
Tabel 2.81 Indeks Pelayanan Publik Kota Ternate Tahun 2020-2024 101
Tabel 2.82 Indeks Survei Penilaian Integritas Kota Ternate Tahun 2020-2024 102

Tabel 2.83 Jumlah Peraturan Daerah Kota Ternate Tahun 2020-2024 102
Tabel 2.84 Kinerja Penegakan Perda Kota Ternate Tahun 2020-2024 103
Tabel 2.85 Persentase Capaian Aksi HAM Kota Ternate Tahun 2021-2024 105
Tabel 2.86 Rasio Penduduk Terkena Tindak Kejahatan Kota Ternate Tahun 2020-2024 107
Tabel 2.87 Angka Kriminalitas Kota Ternate Tahun 2020-2024 107
Tabel 2.88 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi Maluku Utara, dan Nasional Tahun 2024 108
Tabel 2.89 Capaian SPM Bidang Pendidikan Kota Ternate Tahun 2020-2024 109
Tabel 2.90 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Ternate dengan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 109
Tabel 2.91 Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Ternate dengan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 109
Tabel 2.92 Capaian Indikator Kinerja Bidang Pendidikan Kota Ternate Tahun 2020-2024 110
Tabel 2.93 Capaian SPM Bidang Kesehatan Kota Ternate Tahun 2020-2024 111
Tabel 2.94 Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis Kota Ternate Tahun 2020-2024 114
Tabel 2.95 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate Tahun 2020-2024 115
Tabel 2.96 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Kota Ternate Tahun 2020-2024 115
Tabel 2.97 Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik Kota Ternate Tahun 2020-2024 115
Tabel 2.98 Persentase Penduduk Berakses Air Limbah Kota Ternate Tahun 2020-2024 116
Tabel 2.99 Rasio Bangunan ber- IMB Persatuan Bangunan Kota Ternate Tahun 2020-2024 117
Tabel 2.100 Capaian SPM Bidang PERKIM Kota Ternate Tahun 2020- 2024 117
Tabel 2.101 Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Ternate Tahun 2020-2024 117
Tabel 2.102 *Backlog* Perumahan Kota Ternate Tahun 2017-2024 118
Tabel 2.103 Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Kota Ternate Tahun 2020-2024 119
Tabel 2.104 Capaian Kinerja Satpol PP Kota Ternate Tahun 2020-2024 119
Tabel 2.105 Capaian SPM Bidang Sosial Kota Ternate Tahun 2021-2024 119
Tabel 2.106 PMKS Kota Ternate Tahun 2020-2024 120
Tabel 2.107 Rasio Penduduk Bekerja Kota Ternate Tahun 2020-2024 120
Tabel 2.108 Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan Anak Kota Ternate Tahun 2020-2024 121
Tabel 2.109 Skor Pola Pangan Harapan Kota Ternate Tahun 2020-2024 121
Tabel 2.110 Capaian Kinerja Bidang Pertanahan Kota Ternate Tahun 2020-2024 121
Tabel 2.111 Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Kota Ternate Tahun 2020-2024 122
Tabel 2.112 Capaian Kinerja Dukcapil Kota Ternate Tahun 2020-2024 122
Tabel 2.113 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Ternate Tahun 2020- 2024 123
Tabel 2.114 Capaian Kinerja Perhubungan Kota Ternate Tahun 2020-2024 123
Tabel 2.115 Indeks Konektivitas Kota Ternate Tahun 2020-2024 124
Tabel 2.116 Capaian Kinerja Kominfo Kota Ternate Tahun 2020-2024 124
Tabel 2.117 Capaian Kinerja UMKM Kota Ternate Tahun 2020-2024 125
Tabel 2.118 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Kota Ternate Tahun 2020-2024 125
Tabel 2.119 Capaian Realisasi Investasi Kota Ternate Tahun 2020-2024 126
Tabel 2.120 Capaian Kinerja PMDN Kota Ternate Tahun 2020-2024 126
Tabel 2.121 Capaian Kinerja Pemuda dan Indeks Olahraga Kota Ternate Tahun 2020-2024 126
Tabel 2.122 Capaian Kinerja Statistik Kota Ternate Tahun 2020-2024 126
Tabel 2.123 Indeks Keamanan Informasi Kota Ternate Tahun 2020-2024 127
Tabel 2.124 Capaian Kinerja Seni dan Budaya Kota Ternate Tahun 2020-2024 127
Tabel 2.125 Capaian Kinerja Perpustakaan Daerah Kota Ternate Tahun 2020-2024 128
Tabel 2.126 Capaian Kinerja Kearsipan Kota Ternate Tahun 2020-2024 128
Tabel 2.127 Capaian Kinerja Sektor Perikanan terhadap PDRB Kota Ternate Tahun 2020-2024 128
Tabel 2.128 Capaian Kinerja Pariwisata Tahun 2020-2024 129
Tabel 2.129 Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB Kota Ternate Tahun 2020-2024 129
Tabel 2.130 Capaian Kinerja Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Ternate Tahun 2020-2024 129
Tabel 2.131 Pertumbuhan Sektor Industri terhadap PDRB Kota Ternate Tahun 2020-2024 130

Tabel 2.132 Proporsi Jumlah Industri Kecil pada Level Kota Ternate Tahun 2020-2024 130
Tabel 2.133 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Ternate Tahun 2020-2024 131
Tabel 2.134 Persentase Rekomendasi DPRD yang Ditindaklanjuti Kota Ternate Tahun 2020-2024 131
Tabel 2.135 Persentase Terpenuhinya Kualitas dalam Perencanaan Kota Ternate Tahun 2020-2024.. 132
Tabel 2.136 Capaian Kinerja Kelitbangan dalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kota Ternate Tahun 2020-2024 132
Tabel 2.137 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kota Ternate Tahun 2020-2024 132
Tabel 2.138 Realisasi Kinerja Kepegawaian Kota Ternate Tahun 2020-2024 133
Tabel 2.139 Tingkat Maturitas SPIP dan Tingkat Kapabilitas APIP Kota Ternate Tahun 2020-2024 133
Tabel 2.140 Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Ternate Tahun 2020- 2024 134
Tabel 2.141 Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kota Ternate Tahun 2020-2024 134
Tabel 2.142 Persentase Penurunan Konflik Antar Masyarakat Kota Ternate Tahun 2020-2024 134
Tabel 2.143 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Ternate Tahun 2020-2024.... 136
Tabel 2.144 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2020-2024 139
Tabel 2.145 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Ternate Tahun 2020-2024 ... 141
Tabel 2.146 Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kota Ternate Tahun 2020-2024 143
Tabel 2.147 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Ternate Tahun 2020-2024 147
Tabel 2.148 Neraca Daerah Kota Ternate Tahun 2020-2024 149
Tabel 2.149 Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Ternate Tahun 2026-2030 151
Tabel 2.150 Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2026-2030 153
Tabel 2.151 Proyeksi Anggaran Pembiayaan Daerah Kota Ternate Tahun 2026-2030 155
Tabel 2.152 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Ternate Tahun 2026-2030 .. 157
Tabel 2.153 Matriks Hasil Sintesis TPB Prioritas Multi Dimensi 174
Tabel 3.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2025-2029 199
Tabel 3.2 Keselarasan Indikator Utama Pembangunan RPJMD Kota Ternate, RPJMD Provinsi Maluku Utara dan RPJMN Tahun 2025-2029 202
Tabel 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Ternate Tahun 2025-2029 206
Tabel 3.4 Keselarasan Tujuan RPJMD dengan Prioritas Nasional dan Sasaran Utama RPJMN Tahun 2025-2029 211
Tabel 3.5 Program Prioritas Pembangunan Daerah 224
Tabel 3.6 Rencana Implementasi Kebijakan Prioritas Daerah Tahun 2025-2029 243
Tabel 3.7 Dukungan Program RPJMD Kota Ternate terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) 253
Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah 275
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Kota Ternate 319
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci 320

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Hubungan RPJMD Kota Ternate dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	6
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Ternate	10
Gambar 2.2	Peta Kelerengan Kota Ternate	12
Gambar 2.3	Peta Geologi Kota Ternate	14
Gambar 2.4	Peta Hidrologi Kota Ternate	15
Gambar 2.5	Peta Curah Hujan Kota Ternate	16
Gambar 2.6	Peta Penggunaan Lahan Kota Ternate	18
Gambar 2.7	Peta Jasa Lingkungan Penyedia Air	32
Gambar 2.8	Peta Jasa Lingkungan Penyedia Pangan	33
Gambar 2.9	Peta Jasa Lingkungan Pengatur Air	35
Gambar 2.10	Peta Jasa Lingkungan Pengatur Iklim	36
Gambar 2.11	Peta Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Banjir	38
Gambar 2.12	Peta Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Tanah Longsor	39
Gambar 2.13	Peta Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Perlindungan Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan	41
Gambar 2.14	Peta Rute Pengangkutan Sampah Kota Ternate	50
Gambar 2.15	Penyerahan Sertifikat HAKI *City Branding* Ternate Kota Rempah	89
Gambar 2.16	Dokumen Kota Ternate Dalam Angka 2006 dan 2025	127
Gambar 2.17	Kerangka Metodologi Sintesis Multi Dimensi TPB Prioritas	173
Gambar 2.18	Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Ternate	189
Gambar 2.19	Peta Sebaran Situs Warisan Geologi (*Geoheritage*) Kota Ternate	192
Gambar 3.1	Keselarasan Misi RPJMD dengan Misi RPJMN Tahun 2025-2029	196
Gambar 3.2	Keselarasan Misi RPJMD dengan Misi RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029	197
Gambar 3.3	Fokus RPJMD Tahun 2025-2029	222
Gambar 3.4	Pentahapan Agenda Prioritas RPJMD Kota Ternate Tahun 2025-2029	241
Gambar 3.5	Keselarasan Misi RPJMD Kota Ternate dengan 18 Agenda Prioritas Kota Ternate Tahun 2025-2029	242

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Curah Hujan Kota Ternate Tahun 2020-2024	16
Grafik 2.2	Suhu Kota Ternate Tahun 2024	22
Grafik 2.3	Kelembapan Udara Kota Ternate Tahun 2024	22
Grafik 2.4	Indeks Ketahanan Pangan Kota Ternate Tahun 2020-2024	42
Grafik 2.5	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Ternate Tahun 2020-2024	42
Grafik 2.6	*Baseline* dan Mitigasi GRK Kota Ternate Tahun 2010-2030	53
Grafik 2.7	Piramida Penduduk Kota Ternate Tahun 2024	57
Grafik 2.8	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Ternate Tahun 2014- 2024	58
Grafik 2.9	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Ternate Tahun 2020-2024	58
Grafik 2.10	Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kota Ternate Tahun 2024 (Jiwa/Km^2)	59
Grafik 2.11	PDRB per-Kapita Kota Ternate Tahun 2020-2024 (Juta Rp)	64
Grafik 2.12	Rasio Gini Kota Ternate Tahun 2020-2024	64
Grafik 2.13	Perbandingan Pengeluaran per-Kapita Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	66
Grafik 2.14	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dan Indonesia Tahun 2020-2024	66
Grafik 2.15	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ternate Tahun 2020-2024	68
Grafik 2.16	Perbandingan Usia Harapan Hidup Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2022-2024	69
Grafik 2.17	Angka Stunting Kota Ternate Tahun 2021-2024	70
Grafik 2.18	Angka Kesakitan Kota Ternate Tahun 2020-2024	70
Grafik 2.19	Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Kota Ternate Tahun 2020-2024	72
Grafik 2.20	Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 (tahun)	73
Grafik 2.21	Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	74
Grafik 2.22	Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kota Ternate Tahun 2022-2024	76
Grafik 2.23	Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Ternate Tahun 2020-2024	78
Grafik 2.24	Perbandingan IPG Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	79
Grafik 2.25	Perbandingan IDG Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	79
Grafik 2.26	Perbandingan IKG Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	80
Grafik 2.27	Rasio Kewirausahaan Kota Ternate Tahun 2020-2024	85
Grafik 2.28	Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dan Indonesia Tahun 2020-2024	86
Grafik 2.29	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Ternate Tahun 2020-2024	88
Grafik 2.30	Indeks Demokrasi Kota Ternate Tahun 2020-2024	105
Grafik 2.31	Indeks Rasa Aman Kota Ternate Tahun 2020-2024	106
Grafik 2.32	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kota Ternate Tahun 2020-2024	106
Grafik 2.33	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Ternate Tahun 2020-2024	112
Grafik 2.34	Jumlah Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Kota Ternate Tahun 2020-2024	113
Grafik 2.35	Persentase *Universal Child Immunization* (UCI) Kota Ternate Tahun 2020-2024	113
Grafik 2.36	Persentase *Annual Parasite Incidance* (API) Kota Ternate Tahun 2020-2024	114
Grafik 4.1	Proyeksi Belanja Kota Ternate Tahun 2026-2030	255

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus bersinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pada tanggal 27 November 2024 Kota Ternate melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Periode 2025-2030. Berdasarkan hasil pilkada, maka ditetapkan pasangan Mohammad Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Periode 2025-2030 serta telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Walikota dan Wakil Walikota terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Dengan demikian, visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD Kota Ternate Tahun 2025-2029 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya.

Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Ternate dilakukan dengan inovasi dan kolaborasi. Pelaksanaan pembangunan diharapkan tidak hanya sebatas proses atau cara yang selama ini telah dilakukan, namun disertai dengan berbagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demikian juga diharapkan terjalin kolaborasi yang intensif antara Pemerintah Daerah Kota Ternate dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah provinsi.

Dalam penyusunan RPJMD, Pemerintah Daerah Kota Ternate menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi:

1. **Pendekatan teknokratis** menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;

2. **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. **Pendekatan politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4. **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

RPJMD Kota Ternate Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan jangka menengah pertama pada periode RPJPD Kota Ternate Tahun 2025-2045. RPJMD Kota Ternate juga merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional, untuk itu RPJMD Kota Ternate juga berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029 dan memperhatikan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional. Perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah Kota Ternate dalam lima tahun ke depan adalah juga untuk mendukung pada pencapaian target pembangunan nasional.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Ternate, serta menghadapi isu kemiskinan, bonus demografi, dan daya saing ekonomi daerah, maka kebijakan pembangunan lima tahun ke depan akan lebih menempatkan manusia sebagai fokus pembangunan. Sumberdaya manusia tidak saja dipandang sebagai objek pembangunan, namun menempatkannya dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan. Pengembangan sumberdaya manusia dilakukan melalui pemberdayaan (*empowering*), serta peningkatan kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensi yang dimiliki dan menumbuhkan kesadaran diri (*self hood*). Sumberdaya manusia sebagai bagian dari masyarakat akan mampu memandang secara kritis situasi sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang melingkupinya. Dengan demikian diharapkan sumberdaya manusia Kota Ternate akan menjadi sumber dinamika dan motor penggerak pembangunan dalam upaya dalam mewujudkan kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

RPJMD Tahun 2025-2029 yang disusun selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan penyusunan dokumen RPJMD Kota Ternate Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
23. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2023);
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Maluku Utara 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 113);

33. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 154) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);
34. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2024 Nomor 232, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 164).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam lingkup Kota Ternate, dokumen RPJMD Kota Ternate 2025-2029 adalah satu kesatuan yang utuh dari pengelolaan pembangunan, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang di dalam berbagai dokumen perencanaan baik daerah maupun pusat. Hubungan antar RPJMD dengan dokumen perencanaan daerah lainnya adalah sebagai berikut:

1.3.1 RPJMD Kota Ternate dengan RPJPD Kota Ternate

Penyusunan RPJMD Kota Ternate 2025-2029 mengacu pada rancangan RPJPD Kota Ternate 2025-2045. Oleh karena itu substansi yang terkandung dalam RPJMD Kota Ternate 2025-2029, merupakan pelaksanaan dari RPJPD Kota Ternate 2025-2045 tahapan pertama. RPJPD Kota Ternate Tahun 2025-2045 menyebutkan bahwa pembangunan tahap pertama (RPJMD) Tahun 2025-2029 adalah sebagai penguatan pondasi transformasi.

1.3.2 RPJMD dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan RPJMD Kota Ternate memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Maluku Utara dan RTRW Kota Ternate sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kota Ternate.

Peran dan fungsi RTRW di dalam dokumen perencanaan daerah adalah; (1) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), (2) acuan dalam pemanfaatan dan pengembangan ruang wilayah kota, (3) acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota, (4) acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta, (5) pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota, (6) dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan dan atau pengembangan wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi, dan (7) sebagai acuan dalam administrasi pertanahan.

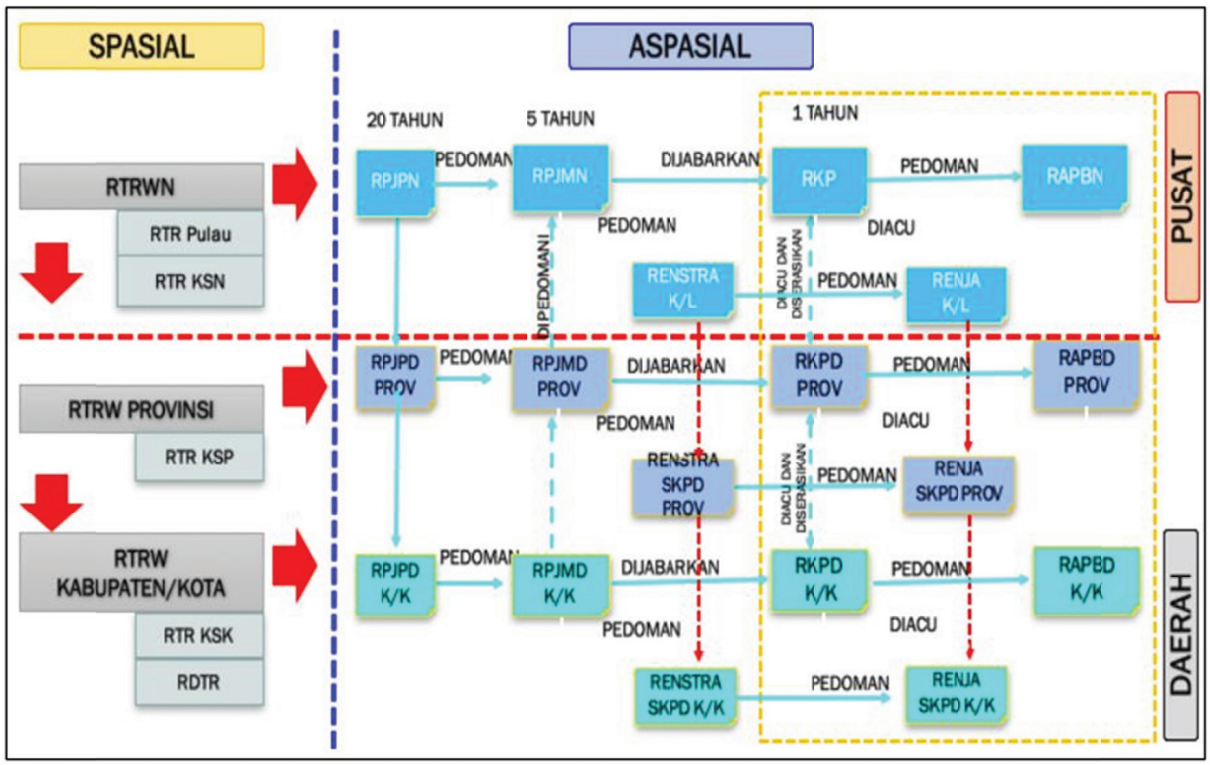
1.3.3 RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang memiliki jangka waktu 5 (lima) tahunan. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate. Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan PD disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Rencana Strategis PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

1.3.4 RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kota Ternate Tahun 2025-2029 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program

dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kota Ternate yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga tingkat Kota. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran; serta bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).



Gambar 1.1 Bagan Hubungan RPJMD Kota Ternate dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Ternate 5 (lima) tahun ke depan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial.

Tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kota Ternate Tahun 2025-2029 adalah:

a. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;

b. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

c. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota serta dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan.

d. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;

e. Mewujudkan penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RPJMD Kota Ternate Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi tentang kondisi Kota Ternate secara komprehensif sebagai basis atau dasar bagi perumusan perencanaan. Dalam bab ini terdapat beberapa bahasan yaitu (1) Aspek Geografi dan Demografi, (2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (3) Aspek Pelayanan Umum, serta (4) Aspek Daya Saing Daerah, (5) Gambaran Keuangan Daerah, dan (6) Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan (1) Visi, misi, (2) Tujuan dan sasaran yang telah disepakati, (3) Strategi dan arah kebijakan, (4) Program prioritas.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat (1) Program Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, (2) Indikator kinerja Daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan penutup RPJMD Kota Ternate Tahun 2025-2029 dan penjelasan tambahan yang dianggap perlu.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kota Ternate dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate, yang merupakan perubahan status dari Kota Administratif Ternate sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Ternate.

Sebagai daerah kepulauan, Kota Ternate memiliki potensi yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ternate terletak di wilayah yang kaya akan sumber daya alam, terutama di sektor perikanan dan pertanian. Ternate juga memiliki potensi pariwisata yang besar berkat keindahan alamnya yang menakjubkan, sejarah yang kaya, dan warisan budaya yang unik. Ditambah lagi Ternate memiliki warisan budaya yang kaya, termasuk tradisi musik, tarian, dan kerajinan lokal yang unik. Pemanfaatan keanekaragaman budaya ini sebagai daya tarik pariwisata dan sebagai sumber inspirasi bagi pengembangan industri kreatif lokal dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dan memperkuat identitas lokal.

Sebagai salah satu kota utama di Maluku Utara, Ternate memiliki potensi untuk menjadi pusat perdagangan dan jasa di wilayah tersebut. Keberadaan pelabuhan dan bandara memungkinkan Ternate untuk menjadi pusat logistik dan transportasi regional, sementara perkembangan sektor jasa seperti perbankan, pendidikan, dan kesehatan juga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah. Hal ini ditambah dengan potensi pusat pendidikan dan penelitian, dengan keberadaan institusi pendidikan tinggi, dapat menjadi basis untuk pengembangan sumber daya manusia dan inovasi teknologi yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Peran strategis daerah dalam penyusunan RPJMD sangatlah penting, karena ini adalah kesempatan bagi pemerintah daerah untuk merumuskan visi, misi, serta strategi pembangunan yang sesuai dengan mengingat karakteristik, potensi, geografis, sosial, ekonomi, dan lingkungan serta kebutuhan daerah.

Dengan pemanfaatan potensi strategis yang ada, maka peran strategis Kota Ternate dapat dilaksanakan melalui pengelolaan sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan, mengembangkan sektor pariwisata dan pengelolaan yang berkelanjutan untuk melestarikan keindahan alam dan warisan budaya; serta meningkatkan konektivitas antar-pulau, untuk kelancaran aksesibilitas dan fasilitasi pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat ekonomi lokal dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing; adaptasi perubahan iklim melalui mitigasi bencana dan tanggap darurat kebencanaan serta pelestarian lingkungan; peningkatan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Saat ini, Kota Ternate merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Maluku Utara yang memiliki luas wilayah hanya 3,88% dari luas wilayah Provinsi Maluku Utara. Kota Ternate merupakan salah satu simpul strategis sebagai pintu gerbang Provinsi Maluku Utara baik melalui jalur udara maupun laut. Jarak Kota Ternate ke Ibu Kota Sofifi adalah 21,10 Km. Secara umum, gambaran umum kondisi Kota Ternate dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Posisi dan peran strategis daerah meliputi gambaran mengenai lokasi, potensi pengembangan, dan kerentanan terhadap bencana pada wilayah perencanaan, untuk mengetahui karakteristik fisik wilayah yang sedang direncanakan.

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

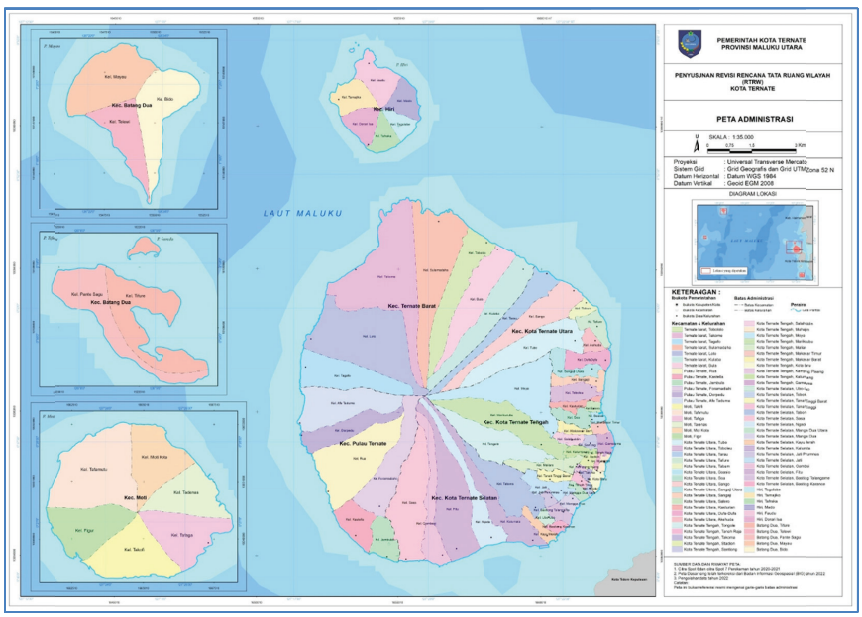
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi, dan Pulau, Kota Ternate dengan kode wilayah 82.71 memiliki luas wilayah luas wilayah 5.709,72 km^2 terdiri dari perairan 5.547,52 km^2 dan daratan 162,20 km^2, sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022. Keputusan tersebut juga menjabarkan bahwa Kota Ternate terdiri dari 8 Kecamatan dan 78 Kelurahan.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kota Ternate

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Kelurahan
			(Km^2)	(%)	
1	Pulau Ternate	Jambula	17,39	10,72	6
2	Moti	Moti Kota	24,78	15,28	6
3	Pulau Batang Dua	Mayau	29,03	17,90	6
4	Pulau Hiri	Faudu	9,72	5,99	6
5	Ternate Barat	Sulamadaha	33,88	20,89	7
6	Ternate Selatan	Kalumata	20,22	12,47	17
7	Ternate Tengah	Salahuddin	13,26	8,18	16
8	Ternate Utara	Dufa-dufa	13,92	8,58	14
Jumlah			**162,20**	**100**	**78**

Sumber: Kota Ternate Dalam Angka, 2025

Dari tabel di atas wilayah Kota Ternate dengan luas daratan 162,20 km^2, mencakup delapan kecamatan yaitu Kec. Pulau Ternate 17,39 km^2, Kec. Moti 24,78 km^2, Kec. Batang Dua 29,03 km^2, Kec. Pulau Hiri 9,72 km^2, Kec. Ternate Barat 33,88 km^2, Kec. Ternate Selatan 20,22 km^2, Kec, Ternate Tengah 13,26 km^2, dan Kec. Ternate Utara 13,92 km^2.



Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Ternate Tahun 2012-2032, 2025

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Ternate

Selain administrasi gambar di atas, batas-batas wilayah Kota Ternate secara geografis adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Maluku
- Sebelah Selatan : Kota Tidore Kepulauan dan Kab. Halmahera Selatan
- Sebelah Timur : Pulau Halmahera
- Sebelah Barat : Laut Maluku dan Pulau Sulawesi

B. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kota Ternate terletak pada posisi 02°28'54,51" Lintang Selatan, 02°39'28,76" Lintang Utara, dan berada di antara 124°16'58,62" - 129°40'57,62" Bujur Timur. Kota Ternate merupakan daerah kepulauan terdiri dari 8 (delapan) pulau, 5 (lima) pulau berpenghuni (Ternate, Moti, Hiri, Mayau dan Tifure), sedangkan 3 (tiga) pulau lainnya tidak berpenghuni yaitu Pulau Maka, Pulau Mano dan Pulau Gurida. Sebagaimana ciri daerah kepulauan yang banyak memiliki kelurahan yang memiliki pantai, wilayah ini juga memiliki ciri yang sama dimana dari 78 kelurahan yang tersebar di Kota Ternate, terdapat 56 kelurahan (71,79%) yang berada di daerah pesisir (*beach village*) dan 22 kelurahan lainnya (28,21%) berkarakter bukan daerah pesisir pantai (*non beach village*).

C. Kondisi Topografi

Kondisi topografi lahan kepulauan Ternate adalah berbukit-bukit dengan sebuah gunung berapi yang masih aktif dan terletak di tengah Pulau Ternate. Permukiman masyarakat secara intensif berkembang di sepanjang garis pantai kepulauan. Dari 5 (lima) pulau besar yang ada, umumnya masyarakat mengolah lahan perkebunan dengan produksi rempah-rempah sebagai produk unggulan dan perikanan laut yang diperoleh di sekitar perairan pantai. Pulau Ternate memiliki kelerengan fisik terbesar di atas 40% yang mengerucut kearah puncak Gunung Gamalama terletak di tengah-tengah pulau. Di daerah pesisir rata-rata kemiringan adalah sekitar 2% sampai 8%.

Kedalaman laut adalah bervariasi, pada beberapa lokasi di sekitar Pulau Ternate, terdapat tingkat kedalaman yang tidak terlalu dalam, sekitar 10 meter sampai pada jarak sekitar 100 m dari garis pantai sehingga memungkinkan adanya peluang reklamasi. Tetapi pada bagian lain terdapat tingkat kedalaman yang cukup dalam dan berjarak tidak jauh dari garis pantai yang ada. Selanjutnya dijelaskan bahwa kondisi topografi kota Ternate juga ditandai dengan keberagaman ketinggian dari permukaan laut (Rendah: 0-499 M, Sedang: 500-699 M, dan Tinggi lebih dari 700 M).

Tabel 2.2
Ketinggian dari Permukaan Laut (DPL) serta Banyaknya Pantai dan Bukan Pantai di Kota Ternate

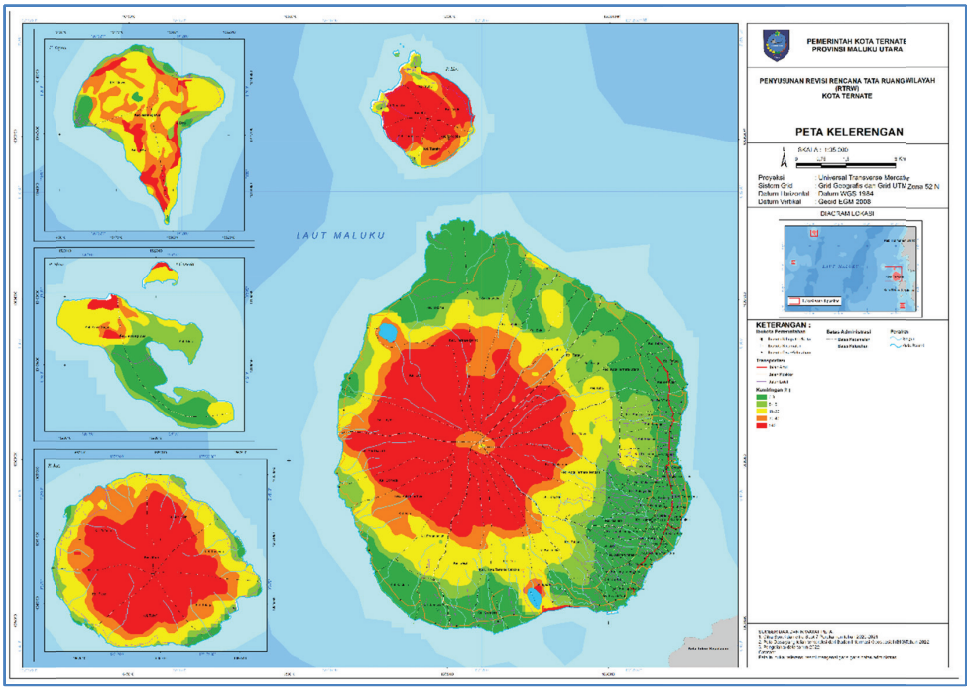
No	Nama Pulau	Kelurahan		Ketinggian (meter)		
		Pantai	Bukan Pantai	0 - 499	500 - 699	700 +
1	Pulau Ternate	5	1	6	-	-
2	Moti	6	-	6	-	-
3	Pulau Batang Dua	6	-	6	-	-
4	Ternate Selatan	11	6	17	-	-
5	Ternate Tengah	4	12	16	-	-
6	Ternate Utara	11	3	14	-	-
7	Ternate Barat	7	-	7	-	-
8	Pulau Hiri	6	-	6	-	-
Jumlah		**56**	**22**	**78**	**-**	**-**

Sumber: Kota Ternate Dalam Angka, 2025

Kemiringan lereng dan garis kontur merupakan kondisi fisik topografi suatu wilayah yang sangat berpengaruh dalam kesesuaian lahan dan banyak mempengaruhi penataan lingkungan alami. Untuk kawasan terbangun, kondisi topografi berpengaruh terhadap terjadinya longsor dan terhadap konstruksi bangunan.

Kemiringan lereng merupakan salah satu faktor utama yang menentukan fungsi kawasan, untuk diarahkan sebagai kawasan lindung atau kawasan budidaya. Penggunaan lahan untuk kawasan fungsional seperti ladang dan kawasan terbangun membutuhkan lahan dengan kemiringan di bawah 15%, sedangkan lahan dengan kemiringan di atas 40% akan sangat sesuai untuk penggunaan perkebunan, pertanian tanaman keras dan hutan. Karakteristik tiap kemiringan lereng diuraikan sebagai berikut:

1. Kelerengan 0% - 5% dapat digunakan secara intensif dengan pengelolaan kecil.
2. Kelerengan 5% - 10% dapat digunakan untuk kegiatan perkotaan dan pertanian, namun bila terjadi kesalahan dalam pengelolaannya masih mungkin terjadi erosi.
3. Kelerengan 10% - 30% merupakan daerah yang sangat mungkin mengalami erosi, terutama bila tumbuhan pada permukaannya ditebang, daerah ini masih dapat dibudidayakan namun dengan usaha lebih.
4. Kelerengan > 30% merupakan daerah yang sangat peka terhadap bahaya erosi, dan kegiatan di atasnya harus bersifat non budidaya. Apabila terjadi penebangan hutan akan membawa akibat terhadap lingkungan yang lebih luas.



Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Ternate Tahun 2012-2032, 2025

Gambar 2.2 Peta Kelerengan Kota Ternate

D. Kondisi Geologi

Pulau Ternate sebuah pulau yang terbentuk karena proses pembentukan gunung api yang muncul dari dasar laut, sebagian berada di bawah muka laut dan sebagian lagi muncul di permukaan laut. Pulau-pulau lain yang merupakan bagian dari gunung ini adalah Pulau Hiri, terletak di sebelah utara, Pulau Tidore dan Pulau Maitara, terletak bagian selatan. Bentuk Pulau Ternate yang merupakan bagian dari sebuah gunung, maka secara umum morfologinya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) satuan morfologi. Pembagian satuan morfologi tersebut sebagai berikut:

1. Morfologi Kaki Gunung Gamalama

Merupakan daerah kaki gunung api yang hampir datar, terletak di kaki timur, utara dan selatan dari Gunung Gamalama dan melampar memajang sejajar pantai. Dilihat dari bentuk pendataran pantai ini, proses awalnya adalah adanya proses erosi yang terjadi di permukaan tubuh gunung api tersebut, kemudian material yang tererosi diendapkan ke tempat yang kemiringan lerengnya agak landai, pada bagian tubuh gunung terjal material erosi akan masuk ke dalam laut sehingga terbentuk endapan.

Kemiringan lereng gunung api ini sangat berpengaruh terhadap terbentuknya pedataran di Pulau Ternate yaitu yang paling luas adalah pedataran Timur sekarang menjadi pusat Kota Ternate, pedataran Selatan dan Utara yang relatif kecil. Berikut kondisi pedataran di Pulau Ternate:

a. Pedataran Kota Ternate terletak di kaki Timur dengan kemiringan lereng relatif lebih kecil yaitu < 8%, sedangkan bagian Barat lebih terjal > 8%, hal ini memberi kesempatan pelapukan batuan terendapkan. Pedataran pantai di Timur terbentuk cukup luas memanjang sejajar pantai dengan arah Utara-Selatan, lebar sekitar 1.000 meter lebih. Karena kondisinya cukup strategis dari beberapa aspek maka dipilih sebagai pusat permukiman, perkantoran dan jasa perdagangan. Kota Ternate yang sudah berkembang sejak jaman dulu, perkembangan permukiman dan infrastruktur lainnya sekarang berkembang semakin ke Selatan dan Utara. Pedataran ini tersusun oleh material lumpur, lempung, pasir dan pelapukan dari batuan vulkanik.

b. Pedataran Kastela pedataran ini terletak di kaki Selatan Gunung Gamalama memanjang sempit sejajar pantai dengan lebar sekitar 500 meter, kemiringan lereng < 5%, merupakan pesisir pantai di sebelah Utaranya langsung berbatasan dengan perbukitan yang relatif terjal. Hal ini tersusun oleh batuan vulkanik jenis stufa.

c. Pedataran Sulamadaha, pedataran ini terletak di kaki Utara Gunung Gamalama, tidak terlalu luas hanya berupa pedataran mirip cekuk, di sekitarnya ke arah daratan membentuk perbukitan relatif bergelombang. Pedataran ini tersusun oleh batuan vulkanik breksi dan stufa.

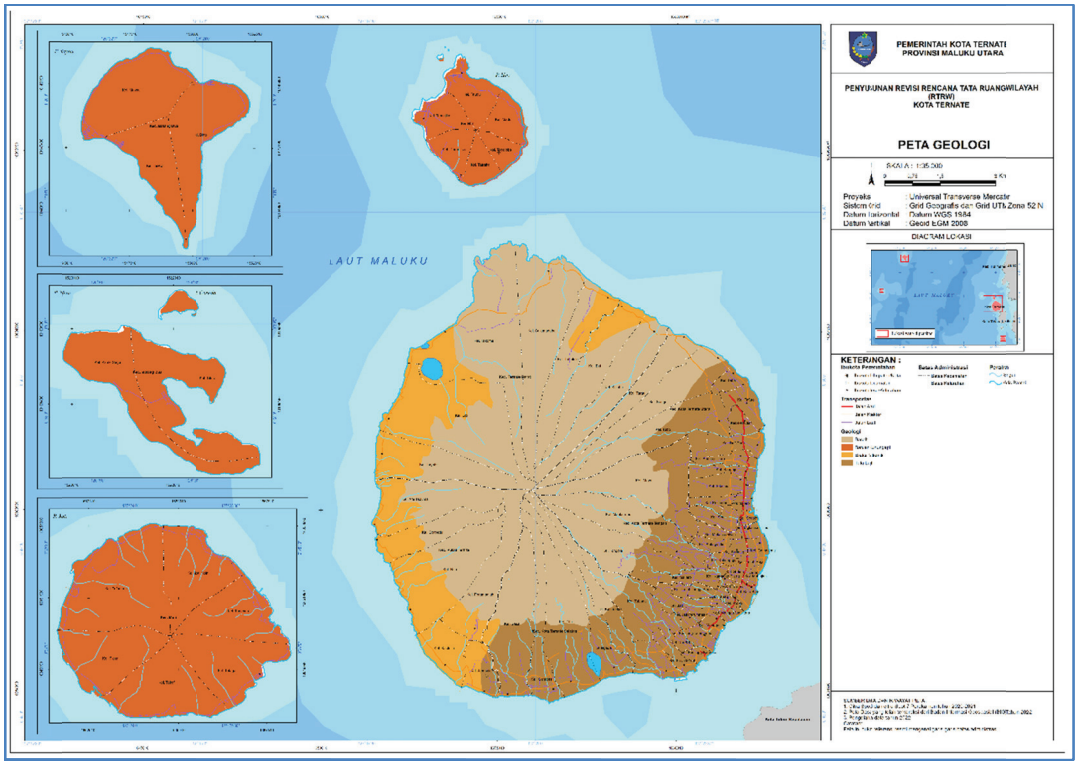
2. Morfologi Tubuh Gunung Gamalama

Satuan ini merupakan bagian terbesar dari morfologi gunung api di Pulau Ternate, mulai dari kaki hingga tubuh pada elevasi 1.000 meter, dengan kemiringan lereng antara 8% - 40%. Di bagian Timur – Utara tubuh Gunung Gamalama kemiringan lereng relatif lebih landai dibandingkan di bagian Barat. Pada morfologi ini dijumpai 2 (dua) buah kaldera yang dikenal dengan Danau Tolire dan Laguna, hal ini menunjukan bahwa Gunung Gamalama pernah terbentuk kawah-kawah lain selain di puncak gunung. Batuan pembentuk morfologi ini adalah endapan vulkanik yang berasal dari gunung api itu sendiri, yang terdiri dari breksi vulkanik, tufa dan pasir. Antara ketiga batuan tersebut dijumpai dalam keadaan selang seling.

3. Morfologi Puncak Gunung Gamalama

Satuan ini merupakan bagian paling atas puncak gunung, pada elevasi di atas 1.000 meter dengan kemiringan lereng > 40%, di daerah puncak memperlihatkan perpindahan titik kegiatan dari Selatan ke Utara. Menurut Bronto S, 1990, sejarah Gunung Gamalama awalnya dimulai terbentuknya pematang kawah terluar (tertua) berada di bagian Tenggara disebut Bukit Melayu. Kemudian pematang kawah tengah membuka ke arah utara dikenal dengan nama Bukit Keramat atau Bukit Mediana (+1.669m), selanjutnya terbentuk kawah baru berada di bagian Utara berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 300 meter, puncak setinggi +1.715 m dikenal dengan nama Gunung Arfat atau Piek van Ternate. Pulau Ternate dilihat dari statigrafinya, tersusun oleh Gunung Api Holosen terdiri dari breksi vulkanik, lava andesit, pasir dan tufa.

Jenis tanah mayoritas adalah tanah regosol di Pulau Ternate, Pulau Moti dan Pulau Hiri. Sedangkan jenis tanah rensina ada di Pulau Mayau, Pulau Tifure, Pulau Maka, dan Pulau Gurida. Kondisi tersebut merupakan ciri tanah pulau vulkanis dan pulau karang.



Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Ternate Tahun 2012-2032, 2025

Gambar 2.3 Peta Geologi Kota Ternate

E. Hidrologi

Kota Ternate memiliki 2 (dua) buah danau air tawar yaitu Danau Laguna yang terletak di pesisir pantai timur Pulau Ternate (sebelah Selatan pusat Kota Ternate) dan Danau Tolire Jaha terletak arah Barat Daya Kota Ternate. Keberadaan Danau Laguna dan Danau Tolire Jaha di Kota Ternate merupakan suatu anugerah bagi masyarakat Kota Ternate. Namun pemanfaatannya hingga kini belum semaksimal sebagaimana yang diharapkan.

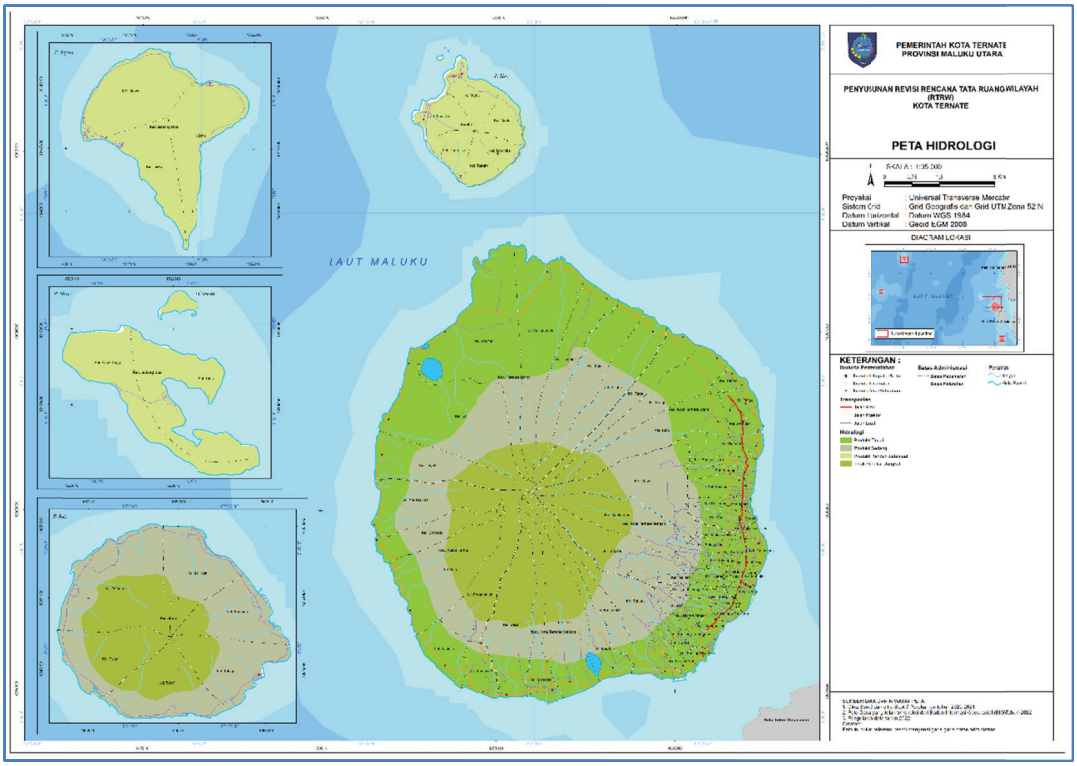
Dengan volume air yang begitu besar (data Danau Laguna ± 3.547,894 m^3 atau ± 3,55 Milyar Liter), maka Danau ini memiliki potensi sebagai sumber air bersih yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Ternate. Untuk Danau Laguna saat ini telah dilakukan eksplorasi pemanfaatannya sebagai sumber air bersih oleh pemerintah daerah dimana telah dibangun Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) yaitu instalasi Produksi, Transmisi dan Distribusi.

Sebagaimana diketahui bahwa sumber air bersih di Pulau Ternate saat ini masih mengandalkan sumber air tanah dalam (sumur dalam) dan sebagian kecil lagi berupa mata air. Hal ini cukup riskan di mana pertumbuhan pembangunan di Kota Ternate sangat pesat yang diikuti oleh laju pertambahan penduduk yang signifikan setiap tahun, dikhawatirkan 10 (sepuluh) tahun lagi lahan terbuka sebagai daerah resapan air telah berubah fungsi sebagai kawasan terbangun/hunian yang menyebabkan potensi air tanah akan semakin berkurang. Diharapkan setelah beroperasinya IPAM ini maka sebagian besar kebutuhan air bersih masyarakat Kota Ternate dapat terpenuhi saat ini maupun masa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah riil berupa tindakan penyelamatan untuk menjaga kelestarian ekosistem hutan di kawasan sekitar Danau Laguna dan Danau Tolire Jaha.

Selain potensi sumber daya air danau, Kota Ternate memiliki sumber Mata Air antara lain Mata Air Ake Gaale, Mata Air Santosa, Mata Air Tege-Tege, Mata Air Ake Rica, dan Mata Air Minta. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kecamatan Hiri, Moti dan Batang Dua, hingga saat ini masyarakat masih mengandalkan sumur dangkal dan sumur tadah hujan. Adapun untuk Kecamatan Moti terdapat potensi sumber Mata Air Jebubu di Kelurahan Tafaga, Mata Air Ake boki dan Ake Hula Kelurahan Tadenas.

Untuk memenuhi kebutuhan air di Kota Ternate maka dibutuhkan rencana sistem jaringan air baku atau air bersih. Adapun rencana sistem jaringan Air Baku untuk Air Minum, meliputi:

1. Membangun bangunan bak penangkap Mata Air (*broncaptering*) pada sumber air baku di Mata Air Jebubu di Kelurahan Tafaga, Mata Air Ake boki dan Ake Hula Kelurahan Tadenas (Moti);
2. Pengembangan sumber air baku Danau Laguna dan Danau Tolire sebagai sumber air bersih;
3. Jaringan transmisi dari sumber air baku (sumur bor dan Mata Air) ke instalasi pengolahan air minum;
4. Membangun jaringan transmisi baru untuk menambah kapasitas produksi air baku;
5. Pelestarian kawasan sekitar sumber mata air tanah dan air permukaan dengan melakukan penghijauan;
6. Membangun jaringan transmisi pipa bawah laut ke Pulau Hiri.



Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Ternate Tahun 2012-2032, 2025

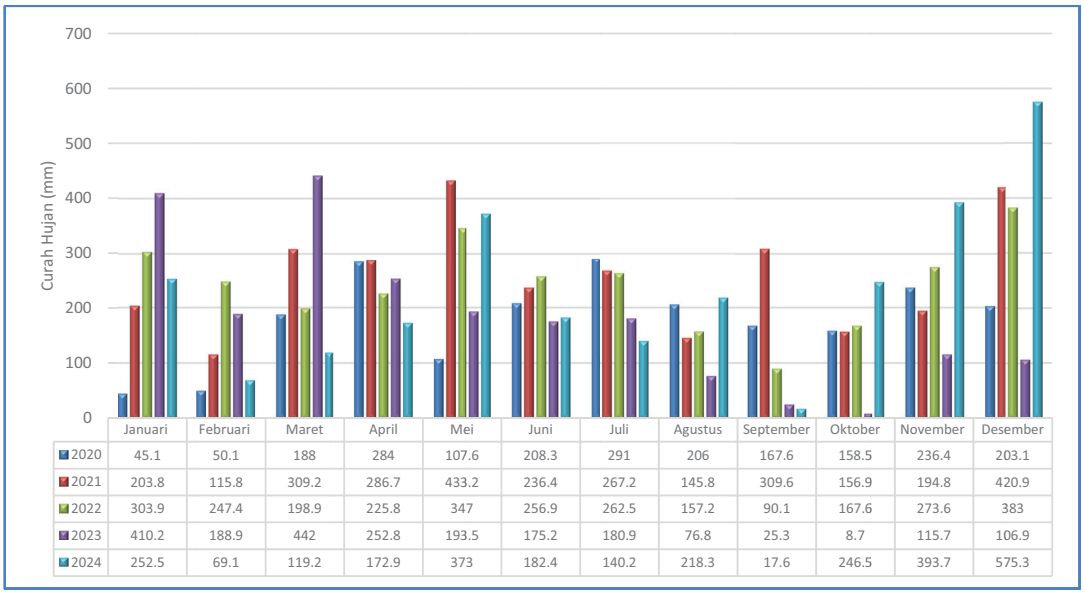
Gambar 2.4 Peta Hidrologi Kota Ternate

F. Kondisi Klimatologi

Kondisi klimatologi dapat diamati dari berbagai hal, beberapa di antaranya adalah curah hujan, suhu, dan kelembapan. Curah hujan di Kota Ternate dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok: kelompok pertama dengan curah hujan 1.500-2.000 mm berada di Kec. Batang Dua dan kelompok kedua dengan curah hujan 2.000-2.500 mm berada di Pulau Ternate, Kec. Pulau Hiri dan Kec. Moti. Berikut adalah peta curah hujan Kota Ternate.

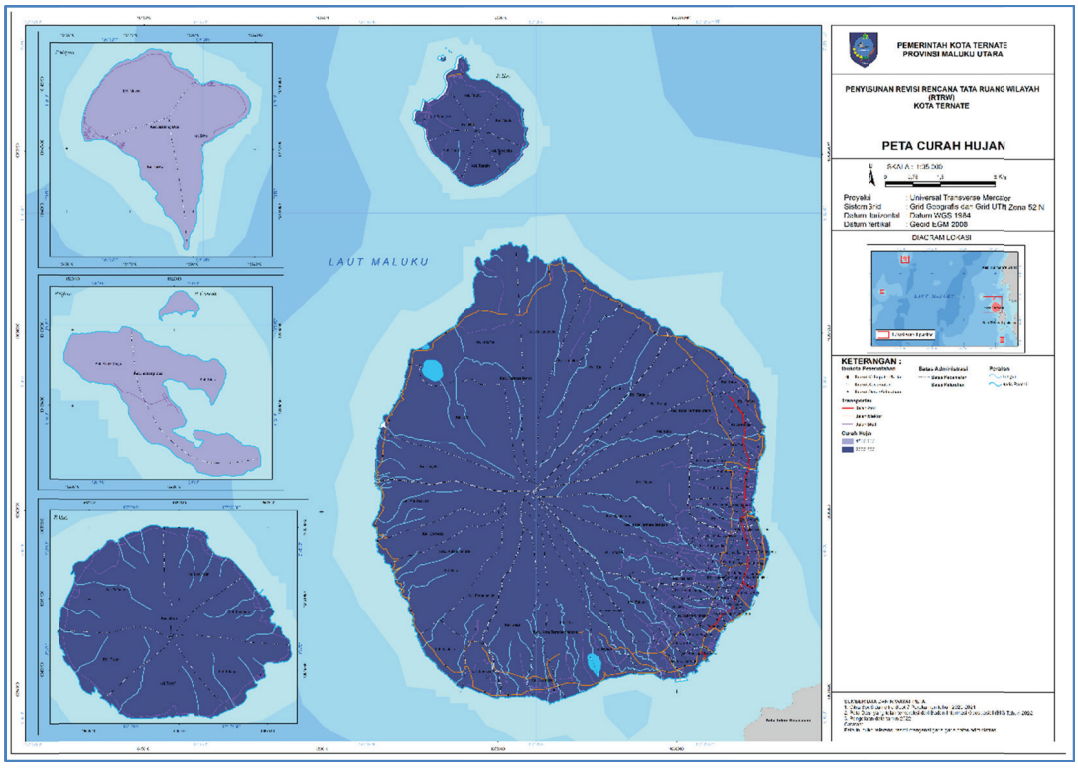
Dilihat berdasarkan tahun dan bulannya, curah hujan di Kota Ternate membentuk grafik yang fluktuatif di setiap tahun dan bulan. Setiap tahunnya curah tertinggi berada di bulan yang relatif berbeda: tahun 2019 dan tahun 2020 berada di bulan April, tahun 2021 berada di bulan Mei, tahun 2022 berada di bulan Desember, tahun 2023 berada di bulan Maret serta pada tahun 2024 berada pada bulan Desember. Untuk melihat lebih jelas, dapat digambarkan melalui gambar berikut ini.

Grafik 2.1
Curah Hujan Kota Ternate Tahun 2020-2024



	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2020	45.1	50.1	188	284	107.6	208.3	291	206	167.6	158.5	236.4	203.1
2021	203.8	115.8	309.2	286.7	433.2	236.4	267.2	145.8	309.6	156.9	194.8	420.9
2022	303.9	247.4	198.9	225.8	347	256.9	262.5	157.2	90.1	167.6	273.6	383
2023	410.2	188.9	442	252.8	193.5	175.2	180.9	76.8	25.3	8.7	115.7	106.9
2024	252.5	69.1	119.2	172.9	373	182.4	140.2	218.3	17.6	246.5	393.7	575.3

Sumber: Kota Ternate Dalam Angka, 2025

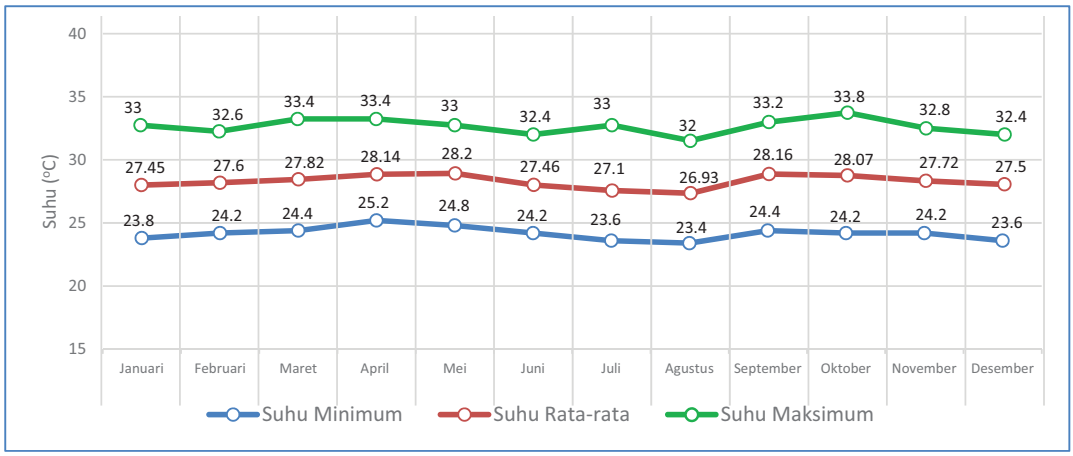


Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Ternate Tahun 2012-2032, 2025

Gambar 2.5 Peta Curah Hujan Kota Ternate

Musim di wilayah Kota Ternate beriklim tropis sehingga keadaan iklimnya sangat dipengaruhi oleh iklim laut, yang biasanya heterogen sesuai ciri indikasi umum iklim tropis. Di wilayah ini juga mengenal dua musim yaitu musim utara-barat dan musim timur-selatan yang biasanya diselingi dengan dua kali masa pancaroba di setiap tahun. Melalui Stasiun Meteorologi dan Geofisika Ternate, selama tahun 2024 diperoleh informasi tentang klimatologi yakni; temperatur rata-rata 25,33°C, dengan suhu maksimum 33,8°C dan suhu minimum 23,4°C.

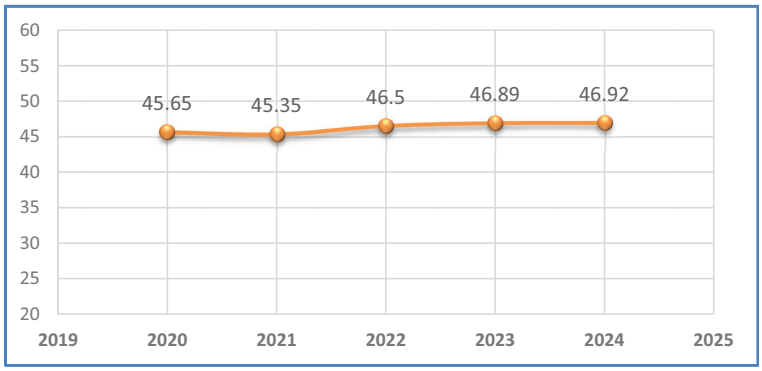
Grafik 2.2
Suhu Kota Ternate Tahun 2024



Sumber: Kota Ternate Dalam Angka, 2025

Kelembapan rata-rata pada tahun 2024 berkisar antara 87,61%. Kelembapan tertinggi adalah 100% yang terjadi di bulan Januari. Kelembapan terendah adalah 43% yang terjadi di bulan Mei.

Grafik 2.3
Kelembapan Udara Kota Ternate Tahun 2024



Sumber: Kota Ternate Dalam Angka, 2025

2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam merupakan salah satu kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan perekonomian daerah. Dengan adanya potensi sumber daya alam yang melimpah, daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah.

A. Pola Pemanfaatan Lahan

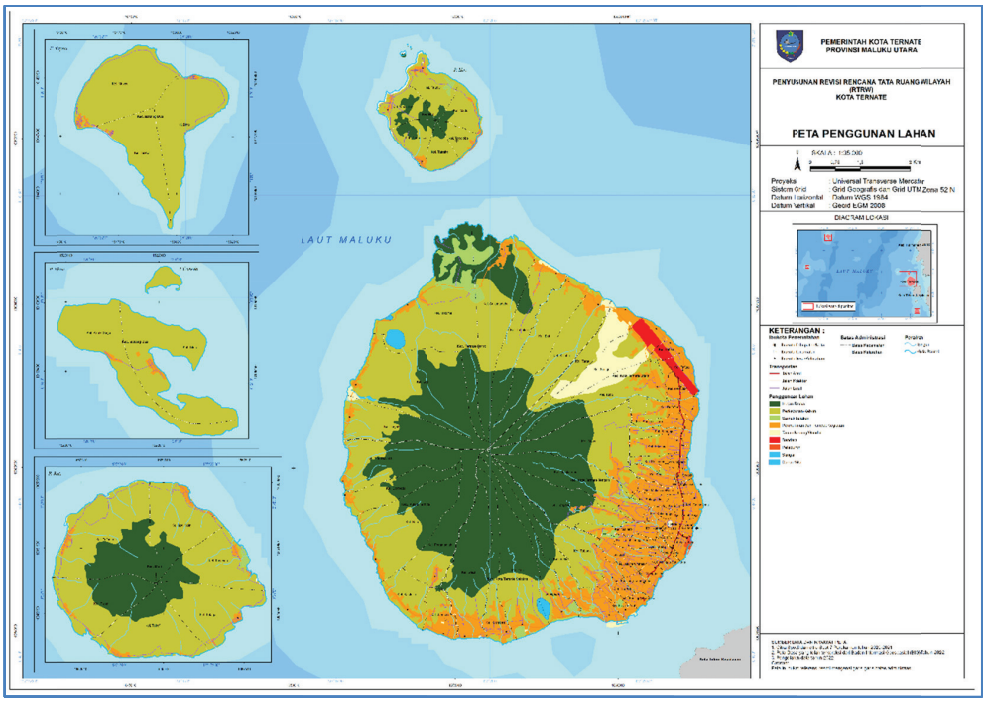
Pola pemanfaatan lahan pada suatu wilayah merupakan manifestasi hubungan antara manusia dengan lingkungan. Polarisasi dan intensitas penggunaan lahan tersebut juga merupakan indikator yang mencerminkan aktivitas utama dalam tingkat penguasaan teknologi penduduk dalam mengeksploitasi sumber daya lahan sekaligus mencerminkan karakteristik potensi wilayah yang bersangkutan.

Tabel 2.3
Luas Kawasan Hutan dan Perairan menurut Fungsi Hutan (Ha) Kota Ternate
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Hutan Lindung	4.392,01	4.392,01	4.392,01	4.392,01	4.392,01
Hutan Produksi Tetap	379,56	379,56	379,56	379,56	379,56
Hutan Produksi Dapat Dikonversi	5.366,65	5.339,94	5.339,94	5.339,94	5.339,94
Areal Penggunaan Lain/Tubuh Air	44,67	44,67	44,67	44,67	44,67
Jumlah Luas Hutan dan Perairan	**10.182,89**	**10.156,18**	**10.156,18**	**10.156,18**	**10.156,18**

Sumber: Kota Ternate Dalam Angka, 2025

Penggunaan lahan terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Bagian wilayah Kota Ternate selain merupakan kawasan lindung juga merupakan kawasan budidaya yang telah disesuaikan dengan penggunaan lahan eksisting wilayah Kota Ternate. Sumber daya lahan di Kota Ternate dapat terlihat dari kondisi tutupan lahan atau pemanfaatan lahan yang terbentuk. Pada dasarnya pembentukan pola pemanfaatan lahan dipengaruhi oleh faktor fisik lahan seperti letak geografis, struktur geologi dan tanah, klimatologi wilayah dan sektor kegiatan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan lahan yang terbentuk hingga saat ini di Kota Ternate terdiri atas lahan hutan, perkebunan rakyat, permukiman, padang rumput/alang-alang, danau dan lain sebagainya.



Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Ternate Tahun 2012-2032, 2025

Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan Kota Ternate

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Konsep pengembangan wilayah tidak bisa lepas dari penataan ruang/Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah disusun, terutama yang terkait dengan pola ruang. Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Bentukan kawasan lindung merupakan wilayah yang ditetapkan

dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan bentukan kawasan yang memiliki fungsi budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Metode-metode yang digunakan atau dikembangkan untuk maksud tersebut mengacu pada dua asas utama penataan ruang, yaitu: asas kesesuaian dan asas kelestarian lingkungan. Berdasarkan kedua asas tersebut, maka pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan tertentu seyogyanya dipertimbangkan dari sudut kesesuaiannya baik dari segi agro-ekologis (fisik), ekonomi, maupun sosial. Pemanfaatan Ruang Kota Ternate berdasarkan fungsi utamanya secara makro terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penetapan kawasan lindung di Kota Ternate pada dasarnya dijadikan titik tolak di dalam pengembangan tata ruang wilayah yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam pengertian ini deliniasi kawasan lindung diintegrasikan dengan tata ruang wilayah secara keseluruhan. Setelah kawasan lindung ditetapkan sebagai limitasi dan atau kendala di dalam pengembangan wilayah, barulah kemudian dapat direkomendasikan arahan kawasan budidaya untuk mengakomodasikan kebutuhan ruang baik bagi kegiatan budidaya pertanian maupun budidaya non pertanian. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032, Kawasan lindung di Kota Ternate terdiri dari:

1. Kawasan Hutan Lindung;
2. Kawasan yang Memberi Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
3. Kawasan Perlindungan Setempat;
4. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota;
5. Kawasan Cagar Budaya;
6. Kawasan Rawan Bencana Alam.

Sedangkan Kawasan Budidaya di Kota Ternate terdiri dari:

1. Kawasan hutan produksi;
2. Kawasan permukiman;
3. Kawasan jasa dan perdagangan;
4. Kawasan perkantoran;
5. Kawasan industri;
6. Kawasan pariwisata;
7. Kawasan perikanan;
8. Kawasan pertanian;
9. Kawasan ruang evakuasi bencana;
10. Kawasan terbuka non hijau; dan
11. Kawasan peruntukan lainnya.

Dari tinjauan aspek potensi pengembangan wilayah, ada beberapa potensi yang dimiliki oleh Kota Ternate memiliki nilai ekonomis yang tinggi, antara lain:

1. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor yang dapat diunggulkan untuk menyumbang perkembangan perekonomian di Kota Ternate. Potensi kegiatan wisata di Kota Ternate pada dasarnya berwujud obyek maupun atraksi kesenian. kegiatan wisata yang dikembangkan di Kota Ternate meliputi wisata peninggalan sejarah, wisata atraksi seni budaya, wisata alam, wisata buatan dan wisata kuliner.

a. Wisata Peninggalan Sejarah

Kota Ternate memiliki sejarah masa lampau yang gemilang. Ternate merupakan kerajaan Islam tertua di Indonesia bagian Timur yang terbesar dan terluas daerah kekuasaannya. Di masa lampau Ternate juga merupakan daerah penghasil rempah-rempah yang sangat terkenal hingga mancanegara, sehingga mengundang bangsa asing untuk menguasainya. Kebesaran Ternate di masa lampu dapat dilihat dari banyaknya peninggalan sejarah masa lampau dan budaya yang tersebar di seluruh penjuru kota yang menjadikan Kota Ternate sebagai Kota Pusaka (*Ternate The Heritage City*). Berikut jejak peninggalan sejarah sebagai objek dan daya tarik wisata di Kota Ternate, antara lain: Kedaton Sultan Ternate, Rumah ibadah (Mesjid Sultan Ternate, Gereja Santo

Willibrordus/Gereja Batu dan Klenteng Thian Hou King), benteng-benteng (peninggalan Portugis, Spanyol dan Belanda) dan Wisata Warisan Ilmu Pengetahuan, berupa jejak perjalanan Alfred Russel Wallace di Kota Ternate.

b. Wisata Atraksi Seni dan Budaya

Kebudayaan merupakan salah satu bagian dari kehidupan manusia. Di Kota Ternate kebudayaan tradisionalnya tumbuh dan berkembang dengan baik sebagai suatu tradisi budaya yang dipegang teguh masyarakatnya. Berikut adalah keindahan tradisi budaya dan religi di Kota Ternate yang dapat dilihat dalam bentuk atraksi wisata, antara lain: Legu Gam, Upacara Adat Kolano Uci Sabea, Penobatan Kapita/Fanyira, Baramasuwen (Bambu Gila), Badabus, Soya- Soya, Cakalele, Lagu dan Dadansa, Tide dan Ronggeng, Gala, Upacara Adat Perkawinan Malut, Lala, Dana-Dana, Salai Jin, Togal di Kelurahan Soa, Festival Ela-ela di seluruh Kota Ternate, Kololi Kie, Festival perahu Kora-kora.

c. Wisata Alam

Kota Ternate mempunyai sumber daya alam yang berpotensi serta mempunyai daya tarik bagi wisatawan, baik yang alami maupun yang sudah dibudidayakan, antara lain : Wisata Pantai/ Bahari (Pantai Hol dan Telaga Nita di Kelurahan Sulamadaha, Pantai Sulamadaha di Kelurahan Sulamadaha, Pantai pasir putih Tabanga di Kelurahan Tobololo, Pantai Ake Rica wisata di Kelurahan Rua, Pantai Bobane Ici di Kelurahan Rua, Pantai Kastela di Kelurahan Kastela dan Pantai Jikomalamo di Kelurahan Takome), Wisata Danau (Danau Laguna di Kelurahan Ngade dan Danau Tolire Kecil, Danau Tolire Besar di Kelurahan Takome), Wisata Bawah Laut, Wisata Pegunungan, Wisata *Geopark* dan lain-lain.

d. Wisata Buatan

Objek wisata buatan adalah objek wisata yang dibuat secara sengaja untuk menarik kunjungan wisatawan. Pengembangan objek wisata ini mulai marak dikembangkan di Kota Ternate, baik berupa agrowisata, taman kota, taman bermain, wahana permainan seperti *waterboom, outbond* dan lainnya serta wisata buatan yang terintegrasi dengan wisata alam yang dijadikan tempat makan, berkumpul maupun tempat foto/*selfi spot*.

Strategi peningkatan kinerja pariwisata di Kota Ternate yang telah dan dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Ternate, berdasarkan inisiatif nyata dan pendekatan pengembangan pariwisata berkelanjutan, dapat dilaksanakan dengan:

a. Penguatan Daya Tarik Wisata, melalui:

- Revitalisasi destinasi unggulan seperti Pantai Sulamadaha, Danau Tolire, Batu Angus, dan Benteng Tolukko.
- Penambahan atraksi wisata berbasis budaya dan sejarah (*tour* benteng dan festival adat).
- Pengembangan wisata bahari, agrowisata dan wisata sejarah Islam, mengingat Ternate sebagai pusat Kesultanan.

b. Pemberdayaan Masyarakat Lokal (*Community-Based Tourism*), melalui:

- Mendorong peran masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan objek wisata, seperti pemandu lokal, pengelola *homestay*, dan penjual kuliner khas.
- Pelatihan keterampilan kepariwisataan dan *hospitality* bagi warga sekitar objek wisata.
- Kolaborasi dengan UMKM dalam penyediaan suvenir dan kuliner lokal.

c. Penguatan Infrastruktur dan Aksesibilitas, melalui:

- Perbaikan sarana dan prasarana di lokasi wisata (toilet umum, parkir, pusat informasi).
- Peningkatan akses jalan menuju destinasi wisata, termasuk transportasi publik dan digitalisasi layanan.
- Penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan keluarga.

d. Digitalisasi dan Promosi Wisata, melalui:

- Pengembangan aplikasi informasi wisata Kota Ternate dan *website* pariwisata yang terintegrasi.
- Kampanye digital melalui media sosial, *travel vlogger*, dan *platform* pariwisata.
- Kolaborasi dengan agen perjalanan, komunitas fotografi, dan media nasional untuk memperluas promosi.

e. Penguatan *Event* dan Atraksi Tahunan

- Menyelenggarakan *event* tahunan seperti Festival Kora-Kora, Expo Segitiga Emas, Festival Danau Tolire, dan Karnaval Budaya.
- Meningkatkan kualitas *event* dengan menggandeng sponsor nasional, seniman lokal, dan pelaku industri kreatif.
- Menjadikan Ternate sebagai tuan rumah berbagai *event* nasional dan regional, seperti seminar pariwisata dan expo daerah.

f. Kolaborasi dan Kerja Sama Antar Daerah, melalui:

- Membangun jejaring kerja sama dengan daerah lain di Maluku Utara untuk integrasi destinasi dan rute wisata.
- Promosi paket wisata lintas wilayah.

g. *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Pariwisata, melalui:

- Pengumpulan data kunjungan wisatawan secara digital.
- Evaluasi berkala terhadap tingkat kepuasan wisatawan.
- Penetapan indikator kinerja utama (KPI) sektor pariwisata untuk mengukur capaian.

2. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/ perkebunan, perikanan dan peternakan. Komoditi hortikultura adalah jenis tanaman yang meliputi tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman hias dan aneka tanaman. Fungsi utama kawasan pertanian adalah menghasilkan bahan pangan, palawija dan tanaman keras/perkebunan. Kegiatan pemanfaatan kawasan pertanian sangat penting bagi upaya penyediaan lapangan kerja untuk masyarakat.

Kawasan pertanian tanaman pangan dan tanaman keras skala besar dapat berfungsi pula sebagai daerah resapan air hujan. Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertanian secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertanian yang dapat memberikan manfaat berikut:

a. Memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan nasional;
b. Meningkatkan daya dukung lahan melalui pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, hortikultura, dan pendayagunaan investasi;
c. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
d. Meningkatkan upaya pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk pertanian serta fungsi lindung;
e. Menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat;
f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
g. Mengendalikan adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian agar keadaan lahan tetap abadi;
h. Melestarikan nilai sosial budaya dan daya tarik kawasan perdesaan; dan/atau
i. Mendorong pengembangan sumber energi terbarukan.

Kondisi sektor pertanian di Kota Ternate cukup strategis selain karena *output*nya merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat serta sebagian besar tenaga di perdesaan bekerja pada sektor ini. Kontribusi pertanian di Kota Ternate cukup besar, hal ini terlihat dari peranannya terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah ini pada tahun 2024 sektor pertanian menempati posisi ke delapan setelah sektor perdagangan, transportasi, komunikasi, konstruksi, jasa-jasa dan administrasi, di samping itu yang tidak kalah penting andil sektor pertanian dalam perdesaan. Untuk itu perhatian Pemerintah Daerah terhadap pembangunan bidang pertanian semakin meningkat setiap tahun melalui berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi sektor pertanian sekaligus memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan petani. Produksi pertanian di Kota Ternate dibedakan:

a. Pertanian Tanaman Perkebunan

Jenis usaha tani komoditi tanaman perkebunan banyak diusahakan di Kota Ternate. Secara historis komoditi tanaman perkebunan terutama cengkeh dan pala di Kota Ternate sudah dikenal sejak zaman kolonial sehingga dulu Kota Ternate terkenal sebagai penghasil rempah-rempah. Sampai saat ini kedua produksi perkebunan tersebut masih menjadi bagian dari mata pencaharian sebagian penduduk. Produksi perkebunan tersebut tidak saja dipasarkan di dalam negeri tetapi juga merupakan komoditi ekspor yang mempunyai prospek ekonomi cukup potensial untuk dipasarkan ke luar negeri. Kegiatan pengembangan produksi tanaman perkebunan di Kota Ternate telah memberikan dampak positif pada penumbuhan ekonomi daerah dan penyediaan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan petani/pelaku usaha. Adapun jenis tanaman perkebunan yang diusahakan rumah tangga pertanian di daerah ini antara lain; cengkeh, kelapa, pala, kakao dan kayu manis.

Berdasarkan data yang diterbitkan BPS Kota Ternate Tahun 2020-2024, dapat disajikan data berikut:

Tabel 2.4
Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Areal (Ha)					
Kelapa	1.807,5	1.079,9	1.079,85	1.079,9	1.079,9
Cengkih	1.756	1.247,8	1.247,8	1.247,8	1.247,8
Pala	4.161	1.968,94	2.074,4	2.159	2.159
Produksi (Ton)					
Kelapa	566,1	436,42	599,6	599,6	599,6
Cengkih	330	352,23	482,65	482,61	482,61
Pala	1.006,0	328,9	357,44	357,36	357,44

Sumber: Kota Ternate dalam Angka, 2025

b. Pertanian Tanaman Pangan

Sektor pertanian tanaman pangan memiliki nilai tambah bagi masyarakat di Kota Ternate. Jenis tanaman yang diusahakan seperti jagung, kacang tanah, ubi jalar, singkong, dan lainnya. Produksi pertanian yang dihasilkan cukup terserap untuk konsumsi domestik masyarakat.

Arahan pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan:

1) Meliputi Pulau Ternate, Moti, Pulau Hiri, Tifure dan Pulau Mayau.
2) Untuk tanaman pangan jenis lainnya dapat dikembangkan atas dasar penelitian potensi lahan di setiap kawasan.
3) Peningkatan jumlah produksi dengan mempertahankan pemanfaatan lahan yang ada (intensifikasi lahan).

Selanjutnya potensi tanaman pangan seperti jagung dan ubi kayu. Kedua jenis tanaman ini diminati oleh masyarakat Kota Ternate sebagai makanan utama selain nasi.

Tabel 2.5
Luas Areal dan Produksi Tanaman Pangan Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Areal (Ha)					
Jagung	n/a	34,25	18,2	14,45	9,1
Ubi Kayu	n/a	99,5	93,5	34,25	41,2
Produksi (Ton)					
Jagung	83,3	95,5	45,04	38,43	29,9
Ubi Kayu	n/a	303,5	284,45	74,16	116,9

Sumber: Kota Ternate Dalam Angka, 2025

c. Pertanian Hortikultura

Tingkat sebaran tanaman pangan jenis hortikultura di Kota Ternate tidak merata pada setiap kecamatan. Sumber data yang diperoleh memperlihatkan terdapat beberapa jenis tanaman dapat dikembangkan pada beberapa kecamatan saja yaitu: di Kecamatan Pulau Ternate, Pulau Moti dan Kecamatan Batang Dua dengan luas kurang lebih 1.063 Ha, hal ini dipengaruhi oleh faktor fisik lahan untuk menunjang tumbuhnya jenis tanaman dan memiliki keterbatasan untuk tumbuh pada lahan tertentu.

Komoditas hortikultura di Kota Ternate dibedakan:

1) Tanaman Sayuran.
2) Tanaman Buah-buahan.

Berdasarkan data yang diterbitkan BPS Kota Ternate Tahun 2020-2024, tanaman Hortikultura dapat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Luas Areal dan Produksi Tanaman Hortikultura Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Panen (Ha)					
Bawang Merah	5	3,5	5,87	0,50	16,46
Cabai Keriting	25	25,3	27,35	28,00	45,55
Cabai Rawit	41	44,35	40,00	38,23	44,10
Ketimun	21	28,30	24,55	24,10	25,70
Kangkung	81	64,5	51,20	32,07	46,44
Tomat	46	42,25	46,90	47,15	50,90
Bayam	65	37,95	36,60	32,26	28,88
Kacang Panjang	40	37,1	23,85	19,69	26,90
Buncis	5	10,75	4,15	11,15	10,03
Terong	42	38,35	29,95	34,32	30,63
Petsai	48	40,35	38,90	27,34	28,93
Produksi (kuintal)					
Bawang Merah	21	48,00	19,65	1,00	297,00
Cabai Keriting	74	197,80	670,57	3.227,08	1.231,86
Cabai Rawit	279	1.354,81	768,37	2.311,20	2.055,75
Ketimun	378	1.096,11	2.334,35	2.256,71	2.149,67
Kangkung	651	1.967,86	1.287,64	7.620,42	6.678,72
Tomat	743	1.681,31	1.560,79	3.378,81	3.436,17
Bayam	352	364,62	843,09	1.636,90	1.389,34
Kacang Panjang	235	941,5	752,80	1.396,70	1.407,63
Buncis	374	199,15	463,15	679,37	732,19
Terong	588	2.202,00	1.848,25	2.374,51	2.521,99
Petsai	360	640,98	1.013,08	1.510,06	1.588,74

Sumber: Kota Ternate dalam Angka, 2025

Tabel 2.7
Luas Areal dan Produksi Tanaman Biofarmaka Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Panen (m²)					
Jahe	144	4.570	3.496	3.351	13.135
Laos/Lengkuas	571	9.835	2.605	18.554	10.064
Kencur	93	510	4	4	20
Kunyit	145	779	628	967	6.744
Serai	n/a	n/a	n/a	1.338	8.327
Jeruk Nipis	n/a	n/a	n/a	127	729
Produksi (Kg)					
Jahe	915	21.704	2.896	8.528	24.377
Laos/Lengkuas	2.127	63.467	3.089	90.988	10.744
Kencur	580	1.780	9	23	15
Kunyit	834	2.582	438	3.823	6.426
Serai	n/a	n/a	n/a	11.269	53.534
Jeruk Nipis	n/a	n/a	n/a	2.475	15.624

Sumber: Kota Ternate dalam Angka, 2025

d. Peternakan

Sektor peternakan memiliki nilai tambah bagi masyarakat di Kota Ternate. Ternak yang diusahakan oleh peternak dengan hasil seperti: Sapi, Kambing, Babi, Ayam dan lainnya. Potensi peternakan, di mana kebutuhan daging sampai saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga untuk memenuhinya pemerintah masih harus memasok pasokan daging dari luar wilayah Kota Ternate terutama dari Pulau Halmahera dan dari luar Maluku Utara, dari data BPS Kota Ternate Tahun 2020-2024 populasi dan produksi ternak dan unggas di Kota Ternate, dirinci pada data berikut.

Tabel 2.8
Populasi Ternak dan Unggas Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sapi	n/a	3.363	4.295	1.188	2.662
Kambing	n/a	3.037	16.296	8.148	18.164
Babi	n/a	555	583	291	306
Ayam Buras	n/a	39.126	40.312	20.156	21.164
Ayam Ras Petelur	n/a	2.400	3.100	3.500	3.675
Ayam Ras Pedaging	n/a	86.940	53.613	61.500	64.575
Itik	n/a	5.200	5.060	2.530	2.657
Itik Manila	n/a	1.510	1.586	793	809

Sumber: Kota Ternate dalam Angka, 2025

Tabel 2.9
Produksi Daging dan Telur Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Daging (ton)					
Daging Sapi	n/a	332.937	318.495	n/a	361.373
Daging Kambing	n/a	300.623	369.360	n/a	388.697
Daging Ayam Buras	n/a	11.101	27.000	n/a	27.720
Daging Ayam Ras Pedaging	n/a	395.661	400.000	n/a	579.219
Produksi Telur (butir)					
Telur Ayam Buras	n/a	398.727	410.688	181.484	418.900
Telur Ayam Ras Petelur	n/a	22.500	20.394	31.500	21.842
Telur Itik/Itik Manila	n/a	92.601	95.376	1.196	91.469

Sumber: Kota Ternate dalam Angka, 2025

3. Pengembangan Kawasan Peruntukan Perikanan

Potensi perikanan di Kota Ternate terdiri dari perikanan budidaya, perikanan tangkap serta potensi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kawasan budidaya perikanan di Kota Ternate terdiri atas budidaya laut dan budidaya darat. Kawasan perikanan budidaya darat sebagian besar terdapat di Kelurahan Tadenas (Kecamatan Moti), Kelurahan Ngade, Gambesi (Kecamatan Ternate Selatan). Jenis ikan meliputi ikan nila, mujair dan Mas. Khusus di Kelurahan Gambesi, Fitu dan Ngade merupakan budidaya (pembibitan) ikan air tawar. Rencana pengembangan kawasan budidaya perikanan darat berupa intensifikasi lahan dan peningkatan produksi. Khususnya untuk Danau Tolire pengembangan budidaya perikanan darat dapat dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut mengenai kualitas air danau dan jenis ikan yang akan dibudidayakan.

Kegiatan kawasan budidaya perikanan laut khususnya rumput laut terdapat pada Kecamatan Batang Dua dan Moti. Rencana pengembangan budidaya perikanan laut yang dapat dikembangkan di kawasan tersebut, mengingat potensi perikanan dan wilayah perairan memungkinkan untuk pengembangan budidaya perikanan laut. Kawasan perikanan tangkap tersebar pada seluruh wilayah kecamatan di Kota Ternate dengan jenis ikan yang ditangkap antara lain Pelagis besar antara lain jenis Tuna, Cakalang, Tenggiri, Kue (*giant traveling*) dan Cucut, sedangkan Pelagis Kecil antara lain jenis layang, kembung, teri, julung, dan Tembang. Untuk jenis Ikan Demersal antara lain kakap, ikan kerapu, baronang.

Sebagai wilayah kepulauan yang dikelilingi oleh lautan, laut merupakan sumber penghidupan yang menjanjikan. Banyak masyarakat Kota Ternate yang tinggal di pesisir pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Selain itu tradisi masyarakat Kota Ternate yang menjadikan ikan sebagai makanan pendamping nasi yang wajib dikonsumsi setiap hari, membuat nelayan menjadi salah satu mata pencaharian yang cukup menjanjikan. Untuk mendukung pengembangan potensi perikanan, di Kota Ternate terdapat dua pelabuhan perikanan yaitu pelabuhan Perikanan Bastiong, Ternate Selatan dan pelabuhan perikanan Dufa-Dufa, Ternate Utara. Kedua pelabuhan ini memasok hampir sebagian besar kebutuhan ikan masyarakat Ternate. Dalam konsep Minapolitan di Kota Ternate terbagi zona yaitu:

a. Zona inti kawasan Minapolitan terletak Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Bastiong;
b. Zona pendukung kawasan Minapolitan terletak Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dufa-Dufa; dan
c. Zona Hinterland sebagai kawasan penyangga terletak di Pulau Hiri, Moti dan gugus Pulau Batang Dua.

Hal-hal yang diinginkan terkait dengan pengembangan kawasan Minapolitan di Kota Ternate ke depan, yaitu:

a. Aspek Infrastruktur, untuk infrastruktur pendukung Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dufa-Dufa cukup memadai. Pemerintah Kota Ternate juga mengharapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Perikanan

Nusantara (PPN) naik status menjadi pelabuhan Samudera, sehingga dengan demikian akan terjadi pembagian kewenangan dalam hal pelayanan kepada nelayan dan pelaku usaha di bidang perikanan.

b. Aspek kelembagaan dan regulasi, yang ingin diwujudkan pada intinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan produksi komoditas perikanan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha.

c. Keinginan para pengusaha perikanan di Kota Ternate agar ekspor hasil-hasil perikanan dari Kota Ternate yang melalui laut dapat dilakukan langsung dari Pelabuhan Ternate ke negara tujuan ekspor tanpa harus melalui pelabuhan Bitung atau Surabaya. Selanjutnya Pemerintah Kota Ternate berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, untuk dapat membantu memperkuat kelembagaan koperasi nelayan dan memberdayakan kelompok-kelompok nelayan, sehingga dapat membantu para nelayan untuk memasarkan hasil produksinya. Selain itu melakukan reformasi regulasi dan kebijakan perizinan, bea masuk, serta menghilangkan peraturan yang dapat menghambat pengembangan sektor perikanan.

d. Aspek Pendanaan, tentunya Pemerintah Kota Ternate sangat mengharapkan bantuan dari kementerian terkait untuk dapat mewujudkan konsep pengembangan kawasan minapolitan di Kota Ternate diharapkan ada kerja sama dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat serta Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang terkait lewat program-program pembinaan ekonomi, dunia usaha, pengembangan investasi usaha serta fasilitas peluang-peluang dari lembaga keuangan dan perbankan.

e. Aspek Sosial Budaya, hal-hal yang ingin diwujudkan antara lain adanya peningkatan sarana sosial seperti pada pendidikan dan kesehatan, pembinaan tenaga kerja serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, begitu juga adat istiadat terus dipupuk.

Rencana kegiatan utama yang mendukung program Minapolitan antara lain:

a. Pembangunan pabrik es di Pulau Moti dan Pulau Batang Dua;
b. Pembangunan dan pengembangan dermaga di Pulau Hiri, Moti, Mayau dan Tafure;
c. Pembangunan Pos Pemantau Angkatan Laut di Batang Dua;
d. Pembangunan gedung pengolahan hasil perikanan;
e. Pembangunan BBM industri di PPN Bastiong;
f. Pembangunan dermaga tipe I (*lay by pier*) dan (*carrier pier*) di PPN Bastiong;
g. Pembangunan *cold storage* PPN Bastiong;
h. Pembangunan Prosesing Tuna di PPN Bastiong; dan
i. Pembangunan Dermaga Tipe T di Bastiong.

4. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Sebagai kota orde satu di wilayah Provinsi Maluku Utara, maka peran industrialisasi di Kota Ternate merupakan dukungan layanan bagi kawasan kota dan kabupaten sekitarnya. Pengelompokan kegiatan industri yang ada dan berpeluang dikembangkan di Ternate saat ini adalah tipologi industri kecil/ringan dan menengah.

Penetapan lokasi industri di suatu tempat tetap tergantung dari tipologi industri dalam hubungannya dengan kebutuhan keterdekatan pada pasar atau pada lokasi bahan baku. Dalam hubungannya dengan pasar dan bahan baku, maka dikenal istilah tipe industri primer (pengolah/pengambil bahan mentah primer), industri sekunder (pengolah bahan setengah jadi) dan industri tersier (kelompok jasa/servis/perantara dengan pengecer). Arahan pengembangan industri adalah disesuaikan dengan keadaan pertumbuhan dunia industri yang sudah ada, serta kemungkinan peluang pengembangan jenis-jenis baru mengikuti perkembangan kebutuhan layanan bagi kehidupan perkotaan. Sebagai kota bercirikan pesisir dan kepulauan, maka dibutuhkan dukungan layanan industri perkapalan kapasitas tertentu dan perbaikan permesinan kapal. Sedangkan sebagai kota jasa dan perdagangan yang juga mengandalkan transportrasi darat, maka dibutuhkan dukungan layanan industri pendukung transportasi darat seperti industri perbengkelan kendaraan, karoseri serta pencucian/perawatan kendaraan bermotor. Sebagai kota wisata dibutuhkan dukungan industri kerajinan barang seni/cendera mata. Sebagai kota yang berbasis perikanan (minapolitan) maka dukungan industri pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan kelautan sangat dibutuhkan sehingga memiliki nilai ekonomis tinggi.

Penetapan skala prioritas kawasan unggulan pertanian per kecamatan, difokuskan pada upaya pengembangan sentra pengembangan potensi sektor pertanian, meliputi:

a. Pewilayahan Komoditas Pertanian di Kecamatan Ternate Tengah

Sistem budidaya pertanian di Kecamatan Ternate Tengah merupakan sistem pertanian lahan kering dengan komposisi pengembangan pertanian tanaman perkebunan dan hortikultura. Pertanian berbasis tanaman perkebunan adalah budidaya tanaman pertanian yang dilakukan pada lahan-lahan yang sesuai untuk komoditas tanaman tahunan dengan komoditas utama adalah komoditas perkebunan. Pertanian berbasis tanaman perkebunan di Kecamatan Ternate Tengah dilaksanakan pada tipe lahan kering dengan kondisi drainase baik hingga agak cepat. Pengembangan komoditi perkebunan meliputi cengkeh dan pala, sedangkan tanaman hortikultura yaitu durian dan sukun, juga dikembangkan tanaman semusim baik tanaman pangan maupun hortikultura (jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, cabe merah dan tomat).

b. Pewilayahan Komoditas Pertanian di Kecamatan Ternate Selatan

Sistem budidaya pertanian di Kecamatan Ternate Selatan merupakan sistem pertanian lahan kering dengan komposisi pengembangan pertanian tanaman perkebunan dan hortikultura.

Pertanian berbasis tanaman perkebunan adalah budidaya tanaman pertanian yang dilakukan pada lahan-lahan yang sesuai untuk komoditas tanaman tahunan dengan komoditas utama adalah komoditas perkebunan. Pertanian berbasis tanaman perkebunan di Kecamatan Ternate Selatan dilaksanakan pada tipe lahan kering dengan kondisi drainase baik hingga agak cepat. Pengembangan komoditi perkebunan cengkeh, pala dan kelapa sedangkan tanaman hortikultura yaitu durian, sukun dan pala, juga dikembangkan tanaman semusim baik tanaman pangan maupun hortikultura (jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, cabe merah dan tomat).

c. Pewilayahan Komoditas Pertanian di Kecamatan Ternate Utara

Sistem budidaya pertanian hutan di Kecamatan Ternate Utara merupakan sistem pertanian lahan kering dengan komposisi pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Pertanian berbasis tanaman pangan di Kecamatan Ternate Utara merupakan sistem pertanian tanaman pangan lahan kering yaitu budidaya tanaman pangan yang dilakukan pada lahan-lahan yang mempunyai drainase tanah baik hingga agak cepat. Pertanian tanaman pangan lahan kering diprioritaskan untuk pengembangan tanaman pangan kacang tanah, ubi kayu, jagung, tanaman hortikultura, juga dapat dikembangkan tanaman tahunan hortikultura/ perkebunan.

d. Pewilayahan Komoditas Pertanian di Kecamatan Pulau Ternate

Pertanian berbasis tanaman pangan di Kecamatan Pulau Ternate merupakan sistem pertanian tanaman pangan lahan kering yaitu budidaya tanaman pangan yang dilakukan pada lahan-lahan yang mempunyai drainase tanah baik hingga agak cepat. Pertanian tanaman pangan lahan kering yang diprioritaskan untuk pengembangan tanaman pangan kacang tanah, ubi kayu/ubi jalar, jagung; tanaman hortikultura bawang, cabe merah dan tomat, juga dapat dikembangkan tanaman tahunan hortikultura/perkebunan meliputi sukun, pisang, pala dan kelapa.

e. Pewilayahan Komoditas Pertanian di Kecamatan Ternate Barat

Pertanian berbasis tanaman pangan di Kecamatan Ternate Barat merupakan sistem pertanian tanaman pangan lahan kering yaitu budidaya tanaman pangan yang dilakukan pada lahan-lahan yang mempunyai drainase tanah baik hingga agak cepat. Pertanian tanaman pangan lahan kering yang diprioritaskan untuk pengembangan tanaman pangan kacang tanah, ubi kayu/ubi jalar, jagung; tanaman hortikultura bawang, cabe merah dan tomat, juga dapat dikembangkan tanaman tahunan hortikultura/perkebunan meliputi sukun, pisang, pala dan kelapa.

f. Pewilayahan Komoditas Pertanian di Kecamatan Pulau Moti

Pertanian berbasis tanaman pangan di Kecamatan Pulau Moti merupakan sistem pertanian tanaman pangan lahan kering yaitu budidaya tanaman pangan yang dilakukan pada lahan-lahan yang mempunyai drainase tanah sedang sampai baik. Pertanian tanaman pangan lahan kering diprioritaskan untuk pengembangan tanaman pangan kacang tanah, ubi kayu/ubi jalar, jagung;

tanaman hortikultura bawang, cabe merah dan tomat. Pada zona ini juga dapat dikembangkan tanaman tahunan hortikultura/perkebunan meliputi sukun, pala, kakao, kelapa dan durian.

g. Pewilayahan Komoditas Pertanian di Kecamatan Pulau Hiri

Pertanian berbasis tanaman pangan di Kecamatan Pulau Hiri merupakan sistem pertanian tanaman pangan lahan kering yaitu budidaya tanaman pangan yang dilakukan pada lahan-lahan yang mempunyai drainase tanah baik sampai agak cepat. Prioritas pengembangan pertanian meliputi tanaman pangan kacang tanah, ubi kayu/ubi jalar, jagung; tanaman hortikultura cabe merah dan tomat.

h. Pewilayahan Komoditas Pertanian di Kecamatan Batang Dua

Pertanian berbasis tanaman pangan di Kecamatan Batang Dua merupakan sistem pertanian tanaman pangan lahan kering yaitu budidaya tanaman pangan yang dilakukan pada lahan-lahan yang mempunyai drainase tanah sedang sampai baik. Prioritas pengembangan tanaman pangan kacang tanah, ubi kayu/ubi jalar, jagung; tanaman hortikultura bawang merah, cabe dan tomat, juga dapat dikembangkan tanaman tahunan hortikultura/perkebunan meliputi sukun, pisang, pala dan kelapa.

Potensi berikutnya yang dimiliki oleh Kota Ternate adalah perikanan. Sebagai wilayah kepulauan yang dikelilingi oleh lautan, laut merupakan sumber penghidupan yang menjanjikan. Banyak masyarakat Kota Ternate yang tinggal di pesisir pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Selain itu tradisi masyarakat Kota Ternate yang menjadikan ikan sebagai makanan pendamping nasi yang wajib dikonsumsi setiap hari, membuat nelayan menjadi salah satu mata pencaharian yang cukup menjanjikan. Untuk mendukung pengembangan potensi perikanan, di Kota Ternate terdapat dua pelabuhan perikanan yaitu pelabuhan perikanan Bastiong, Ternate Selatan dan pelabuhan perikanan Dufa-Dufa, Ternate Utara. Kedua pelabuhan ini memasok hampir sebagian besar kebutuhan ikan masyarakat Ternate.

Sementara itu, sebagai kota yang mengusung moto sebagai kota jasa, memfokuskan pada pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Meskipun jenis industri yang ada sebagian besar berskala kecil tapi cukup mampu menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Kota Ternate. Sektor UMKM yang berkembang di Kota Ternate adalah sektor perdagangan, sektor industri, sektor jasa, perikanan, pertanian dan peternakan. UMKM yang tercatat pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Ternate selama 2024 untuk perdagangan merupakan UMKM yang paling banyak di Ternate sebanyak 9.798 unit, dengan 13.422 tenaga kerja, untuk sektor industri 3.265 unit dengan 6.028 tenaga kerja, sektor jasa 5.254 unit dengan 5.902 tenaga kerja, sektor perikanan 594 unit dengan 1.787 tenaga kerja, sektor pertanian 56 unit dengan 16 tenaga kerja, dan sektor perternakan 14 unit dengan 39 tenaga kerja.

Untuk jumlah unit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menurut Skala Usaha di Kota Ternate di tahun 2024 terdiri dari usaha mikro sebanyak 14.123 unit, usaha kecil sebanyak 3.534 unit dan usaha menengah sebanyak 807 unit. Dan untuk mendorong tumbuhnya sektor perdagangan, Pemerintah Kota Ternate berusaha membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang perdagangan tersebut, sehingga sarana perdagangan pun setiap tahunnya semakin meningkat. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam sektor perdagangan, maka selain dari segi sarana perlu juga dibantu dari segi permodalan.

2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kota Ternate memiliki potensi kekayaan sumber daya alam dan lingkungan yang sangat potensial. Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan

kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen. Salah satunya instrumen yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun kajian D3TLH berbasis keruangan (spasial) yang sehingga dapat menjadi dasar dalam menggambarkan kondisi daya dukung wilayah saat ini dan ke depannya dapat dimutakhirkan untuk menggambarkan kondisi daya dukungnya di masa yang akan datang.

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) merupakan salah satu instrumen yang diperlukan dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perencanaan pemanfaatan ruang. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 12 menyebutkan bahwa apabila Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selain itu, dalam Pasal 15, 16, dan 17 dijelaskan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan salah satu muatan kajian yang mendasari penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Kebijakan Rencana dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup, melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pendekatan metode perhitungan dan penentuan daya dukung daya tampung lingkungan hidup Kota Ternate terdiri dari 3 (tiga) tahapan umum:

1. Klasifikasi karakteristik Ekoregion (Bentang alam dan Tipe Vegetasi Alami), serta karakteristik Penutupan lahan;
2. Perhitungan dan pembuatan peta kinerja jasa lingkungan;
3. Perhitungan (Penentuan Status) Daya Dukung Daya Tampung Indikatif Jasa Penyediaan Pangan dan Air, dengan mempertemukan ketersediaan dan kebutuhan (*Supply and Demand*) menggunakan sistem *grid*.

Pendekatan Jasa Lingkungan merupakan salah satu di antara beberapa pendekatan yang digunakan dalam perhitungan secara indikatif kinerja fungsi-fungsi ekosistem untuk mengukur Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup suatu wilayah. Jasa lingkungan didefinisikan sebagai jasa yang diberikan oleh fungsi ekosistem alam maupun buatan yang nilai dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka membantu memelihara dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan (Sriyanto, 2007).

Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang di antaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya (PP 46 Tahun 2017).

1. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Ternate

Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Ternate untuk penyediaan pangan dan air dilakukan dengan menggunakan pendekatan perbandingan ketersediaan (*supply*) dengan kebutuhan (*demand*) menggunakan *system grid* 1" x 1" atau ± 30 m^2. Dengan perhitungan kebutuhan dasar perkapita penduduk secara keseluruhan yang kemudian didistribusikan dalam sebuah peta berdasarkan hasil kinerja/layanan jasa lingkungan penyediaan pangan dan air serta tingkat kepadatan penduduk.

2. Kinerja Jasa Lingkungan Kota Ternate

Penghitungan kinerja jasa lingkungan dilakukan untuk mengetahui *supply* (ketersediaan) dari alam. Secara operasional spasial, interaksi komponen biotik, abiotik dan modal sosial diterjemahkan dalam 3 (tiga) parameter yaitu bentang alam, tipe vegetasi alami dan penutupan lahan.

Perubahan penutupan lahan merupakan faktor koreksi kegiatan ekonomi yang mendominasi pengaruh terhadap perubahan pada komponen biotik dan abiotik. Hal ini tentu akan mempengaruhi fungsi ekosistem yang dihasilkan. Model matematik yang digunakan untuk mengetahui kinerja jasa lingkungan hidup tersebut adalah metode penjumlahan berbobot (*Simple Additive Weighting*), dengan penentuan bobot dan skor oleh pakar. Kapasitas daya dukung daya tampung lingkungan hidup

terhadap jasa lingkungan tertentu direpresentasikan dalam bentuk indeks. Indeks jasa lingkungan dihitung dengan melibatkan nilai bobot jasa lingkungan terhadap bentuk lahan, tipe vegetasi dan penutupan/penggunaan lahan. Hasil perhitungan indeks jasa lingkungan akan memiliki rentang nilai 1 (satu) sampai 5 (lima):

1,00 s/d 1,80 → Sangat Rendah
1,81 s/d 2,60 → Rendah
2,61 s/d 3,40 → Sedang
3,41 s/d 4,20 → Tinggi
4,21 s/d 5,00 → Sangat Tinggi

Indeks jasa lingkungan merupakan nilai relatif yang didapatkan dari nilai bobot jenis jasa lingkungan per kelas bentuk lahan yang dikalikan nilai bobot jenis jasa lingkungan per kelas tipe vegetasi dan penutupan/penggunaan lahan. Indeks jasa lingkungan merepresentasikan kemampuan suatu jenis lahan atau ekoregion dalam menyediakan beragam jasa lingkungan untuk mendukung perikehidupan makhluk hidup berdasarkan suatu rentang nilai. Nilai indeks ini dapat menggambarkan seberapa besar tingkat kinerja masing-masing kelompok jasa lingkungan di suatu wilayah baik dari sisi penyediaan, pengaturan maupun pendukung.

Ketiga komponen ini saling berpengaruh dan akan menggambarkan kondisi suatu wilayah secara menyeluruh. Suatu wilayah dapat dikatakan memiliki kondisi lingkungan hidup yang bagus, jika kemampuan wilayahnya dalam pengaturan sangat tinggi. Begitupun suatu wilayah akan memiliki kemampuan layanan penyediaan yang baik jika kemampuan pendukung wilayahnya juga tinggi. Adapun nilai eksisting indeks jasa lingkungan di Kota Ternate untuk masing-masing jasa lingkungan dirincikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.10
Indeks Jasa Lingkungan Kota Ternate

No	KECAMATAN	JASA LINGKUNGAN						
		Penyedia Air	Penyedia Pangan	Pengatur Air	Pengatur Iklim	Pengatur Mitigasi Banjir	Pengatur Mitigasi Longsor	Pengatur Mitigasi Karhutla
1	BATANG DUA	2,33	2,98	2,98	2,90	2,66	2,96	3,79
2	HIRI	2,33	3,35	3,35	3,23	3,04	3,43	3,79
3	MOTI	2,33	2,98	2,98	2,90	2,66	2,96	3,79
4	PULAU TERNATE	2,33	2,98	2,98	2,90	2,66	3,43	3,79
5	TERNATE BARAT	2,74	2,98	2,98	2,90	2,66	2,96	3,79
6	TERNATE SELATAN	2,74	2,98	2,81	2,90	2,66	3,43	3,79
7	TERNATE TENGAH	2,33	2,98	2,98	2,90	2,66	3,31	3,79
8	TERNATE UTARA	2,33	2,98	2,98	2,90	2,66	2,96	3,79
RERATA		**2,43**	**3,03**	**3,01**	**2,94**	**2,71**	**3,18**	**3,79**
		2,73		**3,12**				
		2,93						

Sumber: Laporan D3LH Kota Ternate, 2022

Berdasarakan tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata indeks jasa lingkungan Kota Ternate berada pada kisaran nilai 2,93 (sedang). Rata-rata nilai indeks untuk kelompok jasa lingkungan penyedia (*provinsioning*) 2,73 berada di kelas sedang, dan kelompok jasa lingkungan pengatur (*regulating*) 3,12 juga berada di kelas sedang. Dari hasil tersebut dapat dilihat kemampuan penyediaan jasa lingkungan di Kota Ternate termasuk dalam kategori kelas sedang yang dipengaruhi oleh pendukung jasa lingkungan penyediaan juga berada dalam kelas kategori sedang.

Berdasarkan kategori setiap jasa lingkungan, indeks rerata yang tertinggi yaitu jasa lingkungan pengatur mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan dengan nilai indeks 3,79 termasuk kategori tinggi. Dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Faktor tersebut antara lain kejadian secara alami dan perbuatan manusia. Kejadian secara alami yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan antara lain akibat-akibat petir, gunung berapi, reaksi SDA dan/atau gempa.

Sedangkan perbuatan manusia yang menyebabkan karhutla antara lain melakukan pembakaran hutan dan/atau lahan tanpa izin dan membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran. Meskipun beberapa faktor tersebut dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, tetapi faktor yang paling dominan penyebab terjadinya karhutla adalah karena tindakan manusia. Sebab terdapat suatu kebiasaan yang sangat buruk di masyarakat, khususnya pengusaha di bidang perkebunan yang dalam membuka perkebunan seringkali menjadikan pembakaran hutan sebagai pilihan utama. Indeks rerata terendah yaitu jasa lingkungan penyedia air dengan nilai rerata indeks 2,43 termasuk kategori rendah hal ini dipengaruhi oleh jenis tutupan lahan kantong-kantong air atau tubuh air di Kota Ternate yang hanya memiliki luas 0,51% dari total luas wilayah kajian. Dalam Batasan operasionalnya layanan penyedia air memberikan fungsi ketersediaan air yang siap untuk dimanfaatkan dengan indikator kinerja jumlah maksimum ekstraksi air yang dimanfaatkan secara berkelanjutan sehingga dalam perhitungannya layanan penyedia air hanya bergantung kepada tubuh-tubuh air saja.

a. Jasa Lingkungan Penyedia (*Provisioning*)

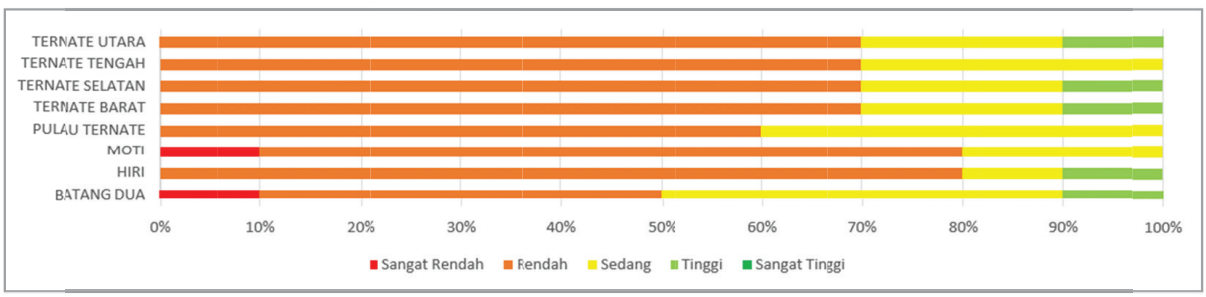
Jasa lingkungan penyediaan adalah barang yang dihasilkan oleh ekosistem dan dimanfaatkan secara langsung oleh manusia.

1) Jasa Lingkungan Penyedia Air

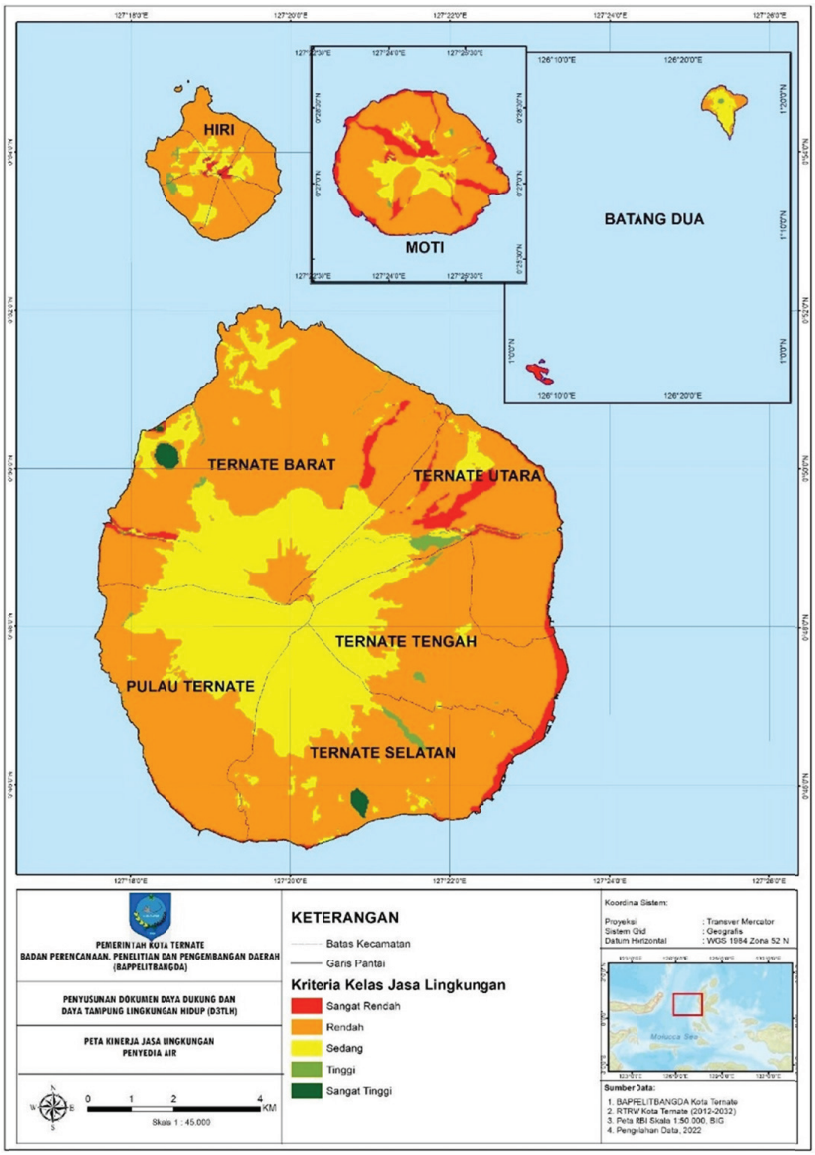
Peran ekosistem dalam penyediaan air bermakna manfaat yang diberikan untuk penyediaan air baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti bentang lahan. Berikut dapat dilihat bahwa secara umum layanan jasa lingkungan memberikan manfaat penyedia air di Kota Ternate berada pada kategori kelas berpotensi rendah (sangat rendah–rendah) dengan sebaran luas 71,06%, kelas berpotensi sedang seluas 27,52% dan kelas berpotensi tinggi (tinggi–sangat tinggi) hanya seluas 1,42% dari total luas Kota Ternate.

Tabel 2.11
Tabulasi dan Diagram Persentase Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Air Kota Ternate Berdasarkan Kecamatan

No.	KECAMATAN	KELAS KINERJA JASA LINGKUNGAN										TOTAL	
		Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi			
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1.	BATANG DUA	464,55	2,87	1.017,05	6,29	1.326,06	8,19	81,43	0,50	0,00	0,00	2.889,09	17,85
2.	HIRI	13,14	0,08	547,34	3,38	96,88	0,60	11,07	0,07	0,00	0,00	688,43	4,13
3.	MOTI	331,27	2,05	1.859,50	11,49	275,49	1,70	8,28	0,05	0,00	0,00	2.474,53	15,29
4.	PULAU TERNATE	9,19	0,06	1.023,10	6,32	697,11	4,31	2,48	0,02	0,00	0,00	1.731.88	10,70
5.	TERNATE BARAT	64,83	0,40	2.368,05	14,63	905,45	5,60	15,09	0,09	28,62	0,18	3.382,05	20,90
6.	TERNATE SELATAN	44,81	0,28	1.433,47	8,86	532,33	3,29	19,89	0,12	18,63	0,12	2.049,14	12,66
7	TERNATE TENGAH	45,53	0,28	1.025,80	6,34	325,71	2,01	8,75	0,05	0,00	0,00	1.405,79	8,69
8.	TERNATE UTARA	129,94	0,80	1.120,74	6,93	293,93	1,82	35.98	0,22	0,00	0,00	1.580,59	9,77
TOTAL		**1.103,27**	**6,82**	**10.395,05**	**64,24**	**4.452,98**	**27,52**	**182,97**	**1,13**	**47,25**	**0,29**	**16.181,51**	**100,00**



Sumber: Hasil Pengolahan, 2022



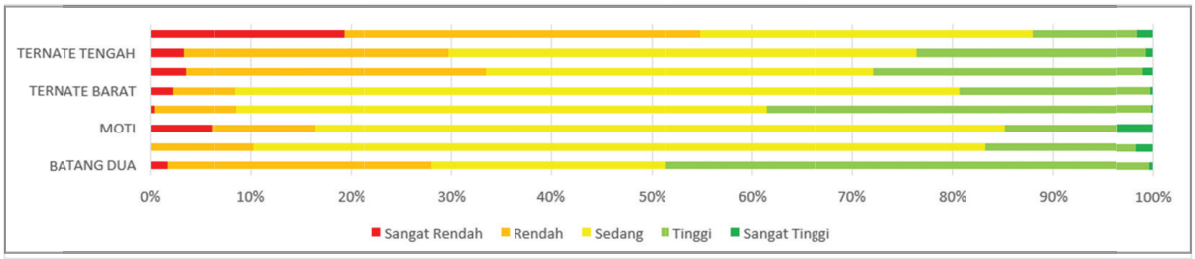
Gambar 2.7 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Air

2) Jasa Lingkungan Penyedia Pangan

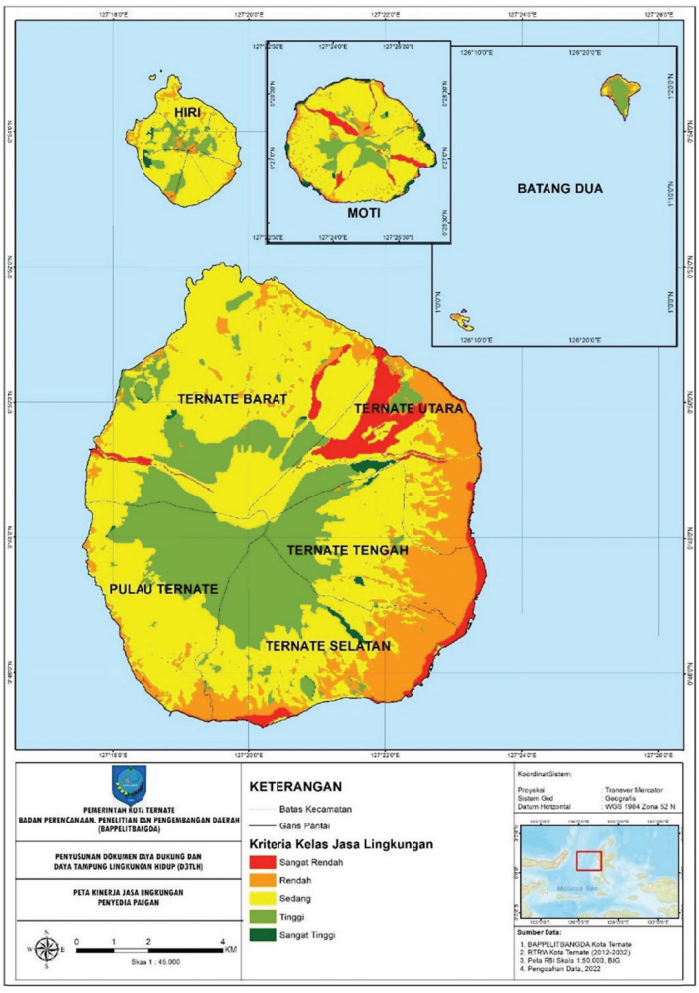
Jasa lingkungan penyediaan pangan menggambarkan tingkat kondisi ekosistem dalam memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Berdasarkan tabel dan gambar berikut, dapat dilihat bahwa secara umum layanan jasa lingkungan memberikan manfaat penyedia pangan di Kota Ternate berada di kategori kelas berpotensi sedang dengan sebaran luas 50,63%, kelas berpotensi rendah (sangat rendah–rendah) seluas 22,81% dan kelas berpotensi tinggi (tinggi–sangat tinggi) seluas 26,56% dari total luas Kota Ternate.

Tabel 2.12
Tabulasi dan Diagram Persentase Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kota Ternate Berdasarkan Kecamatan

No.	KECAMATAN	KELAS KINERJA JASA LINGKUNGAN										TOTAL	
		Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi			
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1.	BATANG DUA	46,63	0,29	761,65	4,71	647,96	4,17	1.397,23	8,63	8,62	0,05	2.889,09	17,85
2.	HIRI	0,00	0,00	69,14	0,43	487,56	3,01	100,66	0,62	11,07	0,07	668,43	4,13
3.	MOTI	149,49	0,92	257,29	1,59	1.703,12	10,53	278,96	1,72	85,67	0,53	2.474,53	15,29
4.	PULAU TERNATE	5,65	0,03	142,82	0,88	916,05	5,66	665,74	4,11	1,62	0,01	1.731,88	10,70
5.	TERNATE BARAT	75,62	0,47	210,81	1,30	2.439,90	15,08	647,62	4,00	8,10	0,05	3.382,05	20,90
6.	TERNATE SELATAN	71,76	0,44	614,08	3,79	792,55	4,90	550,41	3,40	20,34	0,13	2.049,14	12,66
7	TERNATE TENGAH	45,53	0,28	372,72	2,30	655,91	4,05	322,88	2,00	8,75	0,05	1.405,79	8,69
8.	TERNATE UTARA	304,46	1,88	563,61	3,48	522,95	3,23	164,93	1,02	24,64	0,15	1.580,59	9,77
TOTAL		**699,14**	**4,32**	**2.992,13**	**18,49**	**8.193,00**	**50,63**	**4.128,43**	**25,51**	**168,81**	**1,04**	**16.181,51**	**100,00**



Sumber: Hasil Pengolahan, 2022



Gambar 2.8 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Pangan

b. Jasa Lingkungan Pengatur (*Regulating*)

Jasa lingkungan pengaturan adalah manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem melalui pengaturan yang dilakukan oleh ekosistem. Siklus kehidupan dalam ekosistem menghasilkan barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan manusia.

1) Jasa Lingkungan Pengatur Air

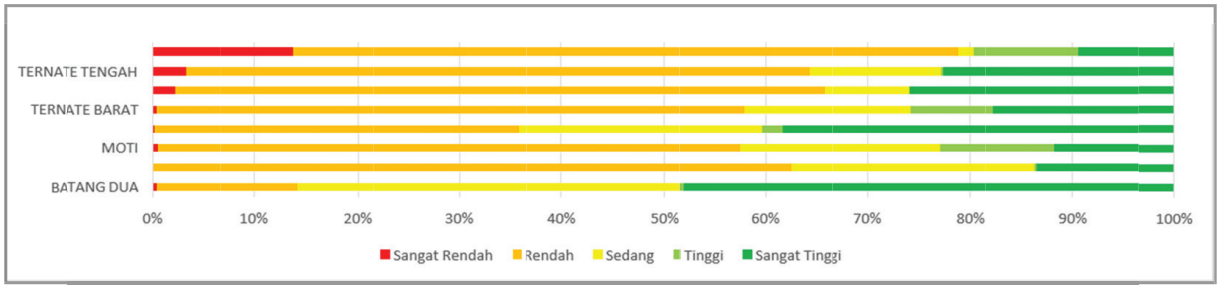
Siklus hidrologi (*hydrology cycle*), adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (*evaporasi*), pendinginan massa udara (*kondensasi*), hujan (*presipitasi*), dan pengaliran (*flow*).

Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan, terbentuknya hujan, dan evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi.

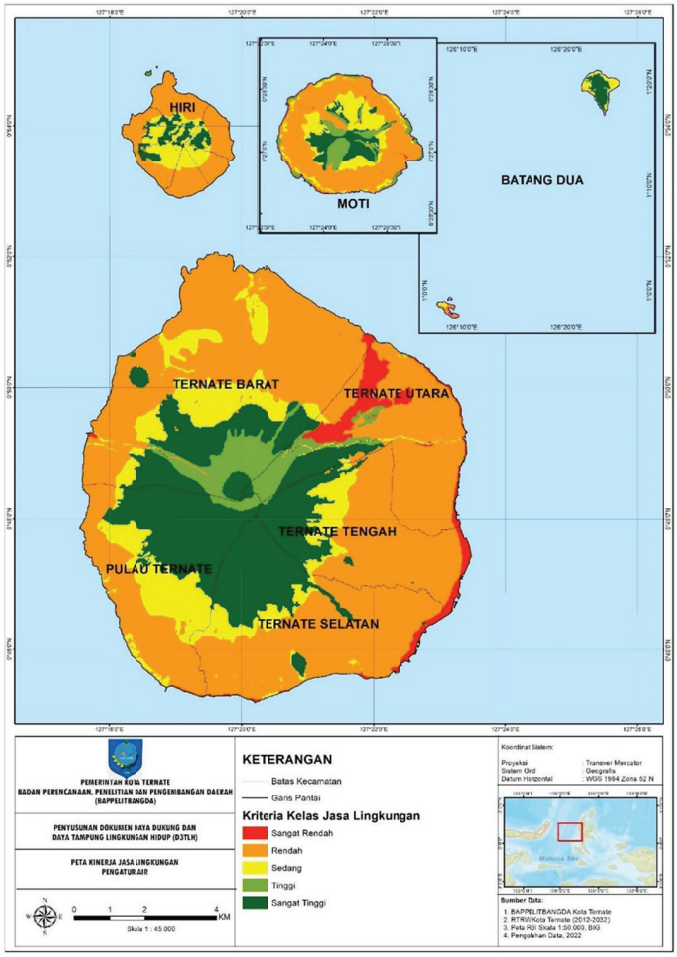
Secara umum layanan jasa lingkungan memberikan manfaat pengatur air di Kota Ternate berada di kategori kelas berpotensi rendah (sangat rendah–rendah) dengan sebaran luas 51,49%, kelas berpotensi tinggi (tinggi–sangat tinggi) seluas 29,60%, dan kelas berpotensi sedang seluas 18,91% dari total luas Kota Ternate. Berdasarkan tabel dan gambar berikut, dapat dilihat bahwa untuk kelas berpotensi sedang dalam memberikan manfaat jasa pengatur air di Kota Ternate sebesar 18,91% tersebar dominan di Kecamatan Batang Dua dengan luas sebesar 6,67% dan Kecamatan Ternate Barat dengan luas 3,41%.

Tabel 2.13
Tabulasi dan Diagram Persentase Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Air Kota Ternate Berdasarkan Kecamatan

No.	KECAMATAN	KELAS KINERJA JASA LINGKUNGAN										TOTAL	
		Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi			
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1.	BATANG DUA	10,30	0,06	400,88	2,48	1.079,70	6,67	13,8389	0,09	1.384,36	8,56	2.889,09	17,85
2.	HIRI	0,00	0,00	418,15	2,58	159,21	0,98	1,4265	0,01	89,64	0,55	668,43	4,13
3.	MOTI	12,56	0,08	1.410,48	8,72	483,11	2,99	278,661	1,72	289,731	1,79	2.474,53	15,29
4.	PULAU TERNATE	3,13	0,02	616,95	3,81	412,74	2,55	34,5267	0,21	664,529	4,11	1.731,88	10,70
5.	TERNATE BARAT	11,45	0,07	1.948,78	12,04	551,48	3,41	274,067	1,69	596,267	3,68	3.382,05	20,90
6.	TERNATE SELATAN	44,51	0,28	1.303,62	8,06	170,57	1,05	-	0,00	530,443	3,28	2.049,14	12,66
7	TERNATE TENGAH	45,31	0,28	858,42	5,30	180,79	1,12	2,74786	0,02	318,531	1,97	1.405,79	8,69
8.	TERNATE UTARA	217,30	1,34	1.029,41	6,36	22,96	0,14	161,517	1,00	149,41	0,92	1.580,59	9,77
TOTAL		**344,56**	**2,13**	**7.986,69**	**49,36**	**3.060,56**	**18,91**	**766,78**	**4,74**	**4.022,91**	**24,86**	**16.181,51**	**100,00**



Sumber: Hasil Pengolahan, 2022



Gambar 2.9 Peta Jasa Lingkungan Pengatur Air

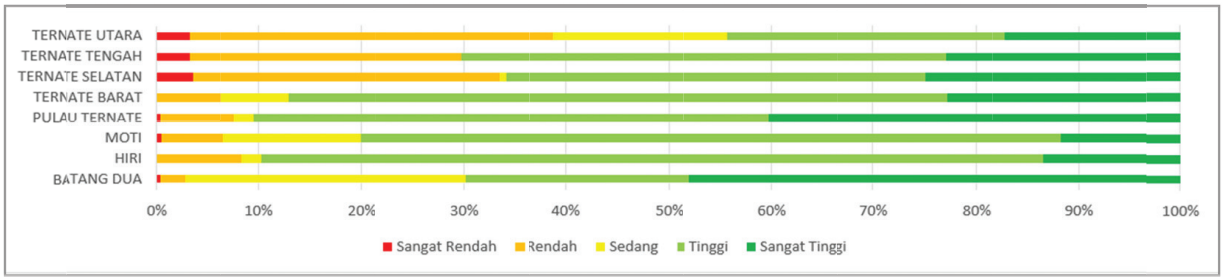
2) Jasa Lingkungan Pengatur Iklim

Secara alamiah ekosistem ini memiliki fungsi jasa pengaturan iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembapan dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbon dioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas. Secara umum layanan jasa lingkungan memberikan manfaat pengatur iklim di Kota Ternate berada di kategori kelas berpotensi tinggi (tinggi–sangat tinggi) dengan sebaran luas 75,07%, kelas berpotensi rendah (sangat rendah-rendah) seluas 14,60% dan kelas berpotensi sedang hanya seluas 10,33% dari total luas Kota Ternate.

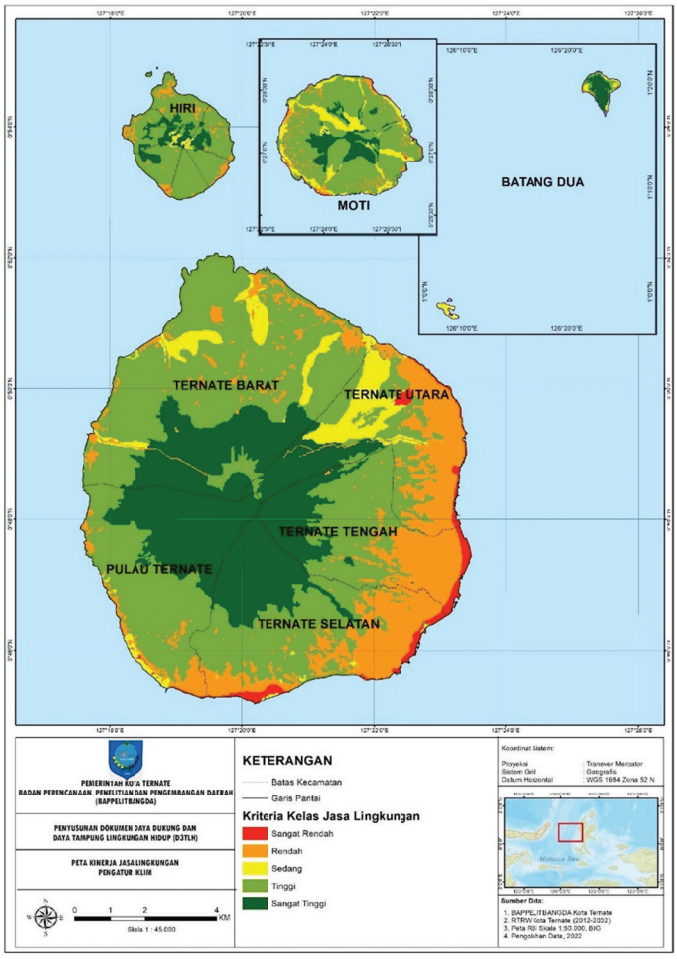
Berdasarkan tabel dan gambar berikut, dapat dilihat bahwa Kelas berpotensi tinggi (tinggi–sangat tinggi) dominan tersebar di Kecamatan Ternate Barat dengan wilayah paling luas sebesar 13,43% dan Kecamatan Batang Dua dengan luas sebesar 8,56%.

Tabel 2.14
Tabulasi dan Diagram Persentase Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Iklim Kota Ternate Berdasarkan Kecamatan

No.	KECAMATAN	KELAS KINERJA JASA LINGKUNGAN										TOTAL	
		Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi			
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1.	BATANG DUA	10,30	0,06	70,45	0,44	789,82	4,88	634,15	3,92	1.384,36	8,56	2.889,09	17,85
2.	HIRI	-	0,00	56,00	0,35	13,14	0,08	509,65	3,15	89,64	0,55	668,43	4,13
3.	MOTI	12,56	0,08	150,41	0,93	329,74	2,04	1.692,09	10,46	289,73	1,79	2.474,53	15,29
4.	PULAU TERNATE	5,72	0,04	127,43	0,79	32,75	0,20	868,65	5,37	697,34	4,31	1.731,88	10,70
5.	TERNATE BARAT	1,32	0,01	210,65	1,30	226,52	1,40	2.172,92	13,43	770,64	4,76	3.382,05	20,90
6.	TERNATE SELATAN	72,54	0,45	613,72	3,79	11,77	0,07	840,02	5,19	511,09	3,16	2.049,14	12,66
7	TERNATE TENGAH	45,39	0,28	372,64	2,30	0,23	0,00	666,26	4,12	321,28	1,99	1.405,79	8,69
8.	TERNATE UTARA	50,70	0,31	562,54	3,48	267,27	1,65	430,85	2,66	269,24	1,66	1.580,59	9,77
TOTAL		**198,54**	**1,23**	**2.163,83**	**13,37**	**1.671,24**	**10,33**	**7.814,57**	**48,29**	**4.333,32**	**26,78**	**16.181,51**	**100,00**



Sumber: Hasil Pengolahan, 2022



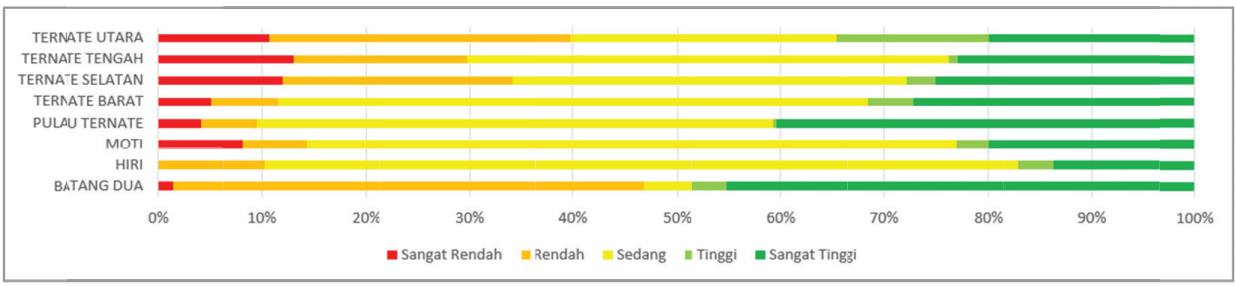
Gambar 2.10 Peta Jasa Lingkungan Pengatur Iklim

3) Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Perlindungan Bencana Banjir

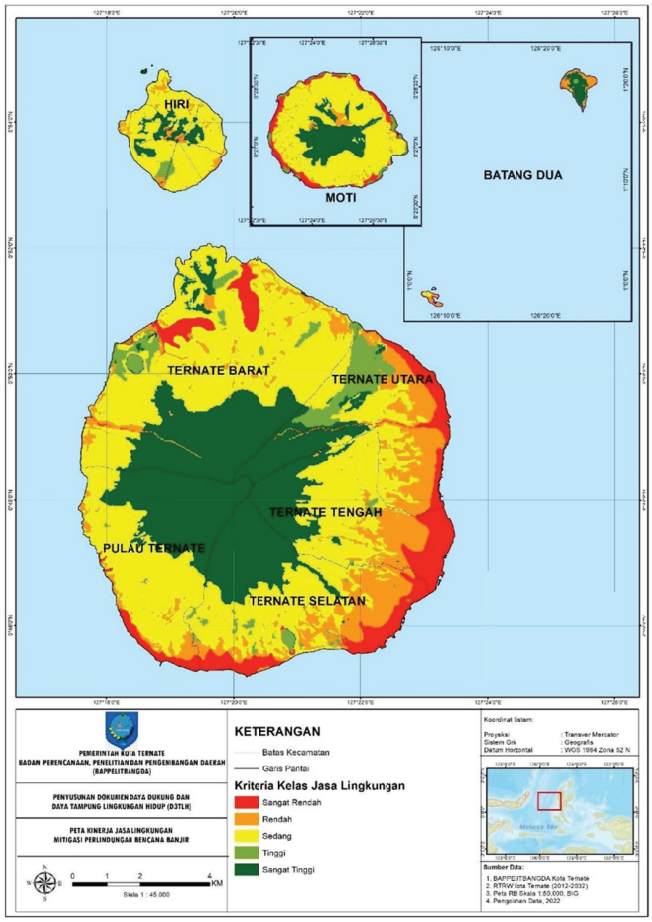
Kinerja jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana banjir adalah bahwa ekosistem di dalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya banjir. Secara umum layanan jasa lingkungan memberikan manfaat pengatur mitigasi bencana banjir di Kota Ternate berada di kategori kelas berpotensi sedang dengan sebaran luas 41,99%, kelas berpotensi tinggi (tinggi-sangat tinggi) seluas 32,78% dan kelas berpotensi rendah (sangat rendah-rendah) hanya seluas 25,23% dari total luas Kota Ternate. Kelas berpotensi sedang dominan tersebar Kec. Ternate Barat sebesar 11,90% dan Kec. Moti dengan luas sebesar 9,58%.

Tabel 2.15
Tabulasi dan Diagram Persentase Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Banjir Kota Ternate Berdasarkan Kecamatan

No.	KECAMATAN	KELAS KINERJA JASA LINGKUNGAN										TOTAL	
		Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi			
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1.	BATANG DUA	40,45	0,25	1.311,92	8,11	135,28	0,84	98,51	0,61	1.302,93	8,05	2.889,09	17,85
2.	HIRI	0,00	0,00	69,14	0,43	486,13	3,00	22,09	0,14	91,07	0,56	668,43	4,13
3.	MOTI	202,15	1,25	153,33	0,95	1.550,66	9,58	74,70	0,46	493,69	3,05	2.474,53	15,29
4.	PULAU TERNATE	71,20	0,44	94,69	0,59	862,19	5,33	4,83	0,03	698,97	4,32	1.731,88	10,70
5.	TERNATE BARAT	171,11	1,06	221,41	1,37	1.924,80	11,90	148,56	0,92	916,16	5,66	3.382,05	20,90
6.	TERNATE SELATAN	245,17	1,52	454,57	2,81	779,65	4,82	56,41	0,35	513,34	3,17	2.049,14	12,66
7	TERNATE TENGAH	183,06	1,13	235,19	1,45	653,16	4,04	13,10	0,08	312,28	1,99	1.405,79	8,69
8.	TERNATE UTARA	169,82	1,05	460,13	2,84	402,47	2,49	232,84	1,44	315,34	1,95	1.580,59	9,77
TOTAL		**1.082,97**	**6,69**	**3.000,38**	**18,54**	**6.794,35**	**41,99**	**651,03**	**4,02**	**4.652,78**	**28,75**	**16.181,51**	**100,00**



Sumber: Hasil Pengolahan, 2022



Gambar 2.11 Peta Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Banjir

4) Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Perlindungan Bencana Longsor

Ruang lingkup jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana longsor adalah bahwa ekosistem di dalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya tanah longsor. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari longsor atau pergerakan tanah. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan.

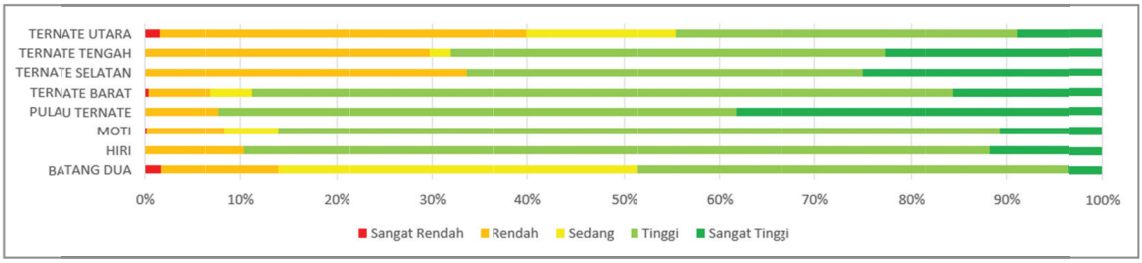
Adapun faktor yang membuat tanah longsor, di antaranya adalah tingginya intensitas hujan, kemiringan tanah yang tidak dibarengi penghijauan, terjadinya pelapukan dan erosi, dan pengembangan pemukiman dan tempat kegiatan yang tidak memperhatikan kestabilan tanah. Dari beberapa faktor tersebut, meski terjadi intensitas hujan yang cukup tinggi di wilayah Kota Ternate, namun kondisi alamiah lahan dalam mengatur pencegahan bencana tanah longsor secara alamiah mampu berfungsi dengan baik. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi vegetasi hutan dan tutupan hutan yang dominan di wilayah ini. Hutan yang berfungsi menyimpan air pada musim hujan mampu menahan laju erosi dan pelapukan tanah yang bisa mengakibatkan bencana tanah longsor.

Secara umum layanan jasa lingkungan memberikan manfaat pengatur mitigasi bencana tanah longsor di Kota Ternate berada di kategori kelas berpotensi tinggi (tinggi–sangat tinggi) dengan sebaran luas 72,65%, kelas berpotensi rendah (sangat rendah–rendah) seluas 17,20% dan kelas berpotensi sedang hanya seluas 10,16% dari total luas Kota Ternate.

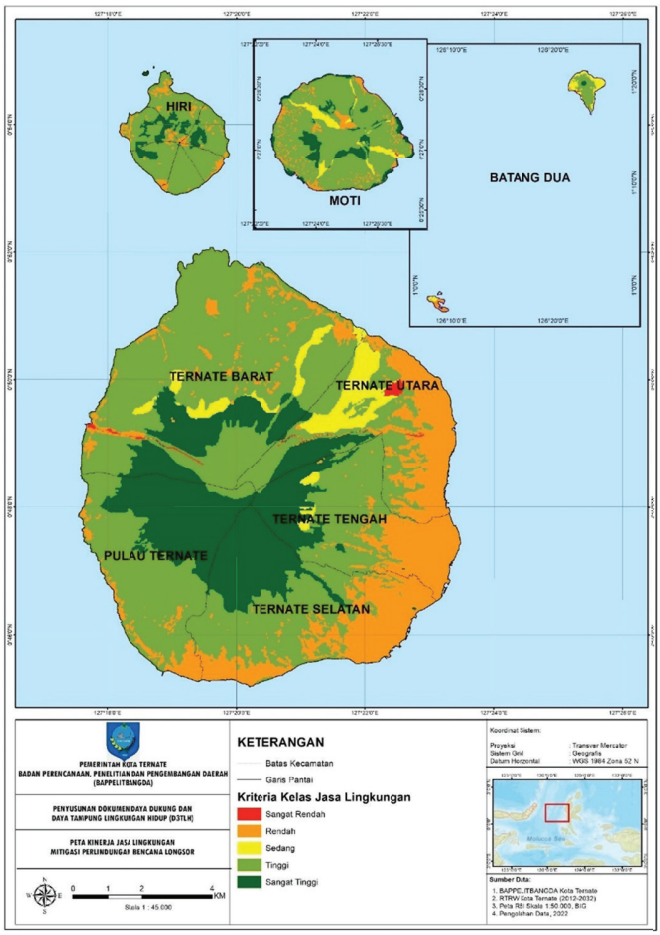
Berdasarkan hasil perhitungan jasa lingkungan pengatur iklim, sebaran wilayah fungsi ekosistem pengatur iklim di Kota Ternate disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.16
Tabulasi dan Diagram Persentase Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Longsor Kota Ternate Berdasarkan Kecamatan

No.	KECAMATAN	KELAS KINERJA JASA LINGKUNGAN										TOTAL	
		Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi			
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1.	BATANG DUA	48,44	0,30	354,99	2,19	1.082,85	6,69	1.298,86	8,03	103,93	0,64	2.889,09	17,85
2.	HIRI	0,00	0,00	69,14	0,43	0,00	0,00	512,09	3,22	78,20	0,48	668,43	4,13
3.	MOTI	3,33	0,02	204,73	1,27	137,24	0,85	1.864,06	11,52	265,17	1,64	2.474,53	15,29
4.	PULAU TERNATE	0,00	0,00	133,13	0,82	0,00	0,00	936,13	5,79	662,62	4,09	1.731,88	10,70
5.	TERNATE BARAT	12,09	0,07	219,73	1,36	146,42	0,90	2.480,71	15,33	523,09	3,23	3.382,05	20,90
6.	TERNATE SELATAN	0,00	0,00	687,91	4,25	0,00	0,00	849,41	5,25	511,81	3,16	2.049,14	12,66
7	TERNATE TENGAH	0,00	0,00	418,26	2,58	29,79	0,18	639,22	3,95	318,53	1,97	1.405,79	8,69
8.	TERNATE UTARA	24,84	0,15	606,89	3,75	246,43	1,52	562,00	3,47	140,43	0,87	1.580,59	9,77
TOTAL		**88,70**	**0,55**	**2.694,80**	**16,65**	**1.642,73**	**10,15**	**9.151,50**	**56,56**	**2.603,79**	**16,09**	**16.181,51**	**100,00**



Sumber: Hasil Pengolahan, 2022



Gambar 2.12 Peta Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Tanah Longsor

5) Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Perlindungan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Secara umum layanan jasa lingkungan memberikan manfaat pengatur mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Ternate berada di kategori kelas berpotensi sedang dengan sebaran luas 53,65%, kelas berpotensi tinggi (tinggi-sangat tinggi) seluas 31,74% dan kelas berpotensi rendah hanya seluas 14,61% dari total luas Kota Ternate.

Kelas berpotensi sedang dalam memberikan manfaat jasa pengatur mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Ternate sebesar 56,65% tersebar dominan di Kecamatan Ternate Barat dengan luas sebesar 13,12% dan Kecamatan Moti dengan luas 10,77%. Jenis bentang lahan yang dominan di kelas ini adalah Lereng Volkan Bawah dengan luas 29,70% dan jenis Lereng Volkan Tengah 9,97%.

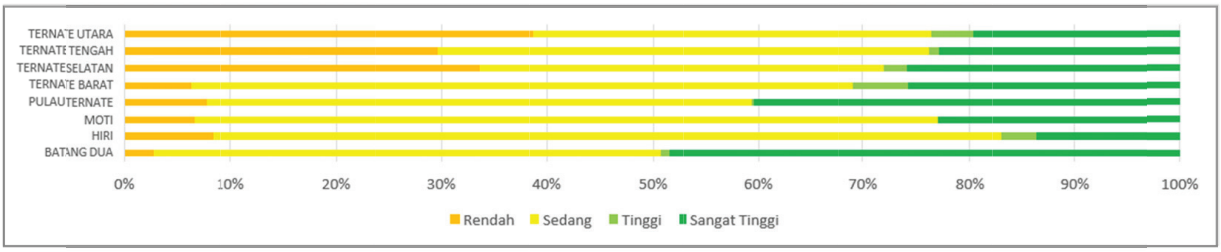
Untuk kelas berpotensi tinggi (tinggi–sangat tinggi) dalam memberikan manfaat jasa pengatur mitigasi bencana Kebakaran hutan dan lahan di Kota Ternate sebesar 31,74% tersebar dominan di Kecamatan Batang Dua dengan luas sebesar 8,64% dan Kecamatan Ternate Barat dengan luas 5,38%.

Untuk kelas berpotensi rendah dalam memberikan manfaat jasa pengatur mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Ternate sebesar 14,61% tersebar dominan di Kecamatan Ternate Selatan dengan luas sebesar 4,25% dan Kecamatan Ternate Utara dengan luas 3,79%.

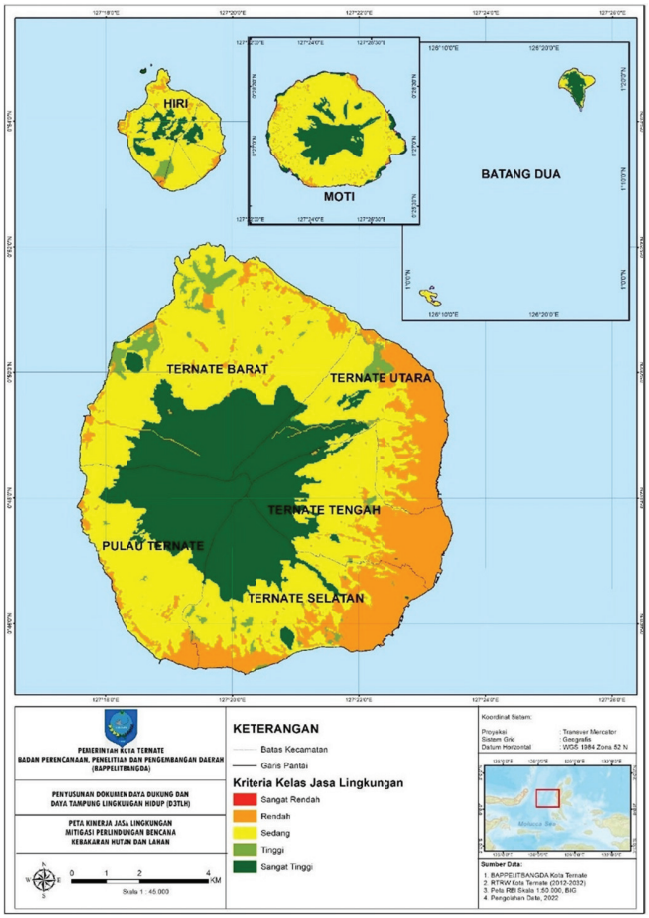
Berdasarkan hasil perhitungan jasa lingkungan pengatur iklim, sebaran wilayah fungsi ekosistem pengatur iklim di Kota Ternate disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.17
Tabulasi dan Diagram Persentase Distribusi Luas Kinerja Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Ternate Berdasarkan Kecamatan

No.	KECAMATAN	KELAS KINERJA JASA LINGKUNGAN										TOTAL	
		Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi			
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1.	BATANG DUA	0,00	0,00	80,76	0,50	1.384,85	8,56	25,28	0,16	1.398,20	8,64	2.889,09	17,85
2.	HIRI	0,00	0,00	56,00	0,35	499,27	3,09	22,09	0,14	91,07	0,56	668,43	4,13
3.	MOTI	0,00	0,00	162,97	1,01	1.743,17	10,77	1,24	0,01	567,15	3,50	2.474,53	15,29
4.	PULAU TERNATE	0,00	0,00	133,13	0,82	894,96	5,53	4,74	0,03	699,06	4,32	1.731,88	10,70
5.	TERNATE BARAT	0,00	0,00	211,66	1,31	2,123,75	13,12	176,30	1,09	870,33	5,38	3.382,05	20,90
6.	TERNATE SELATAN	0,00	0,00	687,91	4,25	786,70	4,86	44,08	0,27	530,44	3,28	2.049,14	12,66
7	TERNATE TENGAH	0,00	0,00	418,03	2,58	653,39	4,04	13,10	0,08	321,28	1,99	1.405,79	8,69
8.	TERNATE UTARA	0,00	0,00	613,24	3,79	595,23	3,68	61,20	0,38	310,93	1,92	1.580,59	9,77
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**2.363,71**	**14,61**	**8.681,31**	**53,65**	**348,04**	**2,15**	**4.788,46**	**29,59**	**16.181,51**	**100,00**



Sumber: Hasil Pengolahan, 2022



Gambar 2.13 Peta Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Perlindungan Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan

2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan merupakan tiga pilar penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memajukan perekonomian daerah. Dengan adanya ketersediaan energi yang stabil, air yang melimpah, dan pangan yang cukup, masyarakat dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan hidupnya.

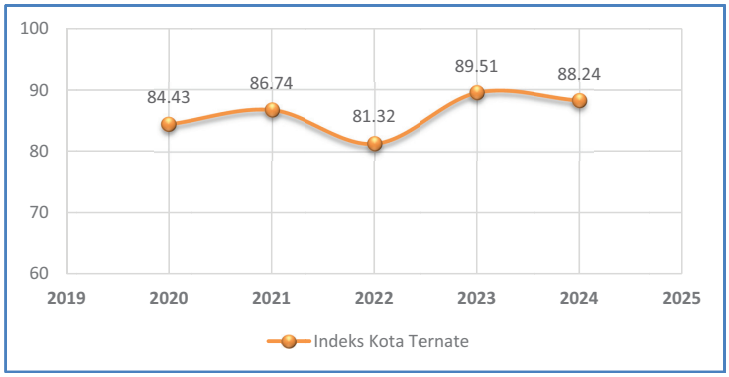
A. Indeks Ketahanan Pangan

Tersedianya informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik dapat mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi. Informasi ketahanan pangan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.

Informasi ini sangat penting untuk memberikan arah dan rekomendasi bagi para pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Ketahanan pangan bersifat multidimensi, sehingga penilaian terhadap situasi ketahanan pangan membutuhkan ukuran yang komprehensif dengan melibatkan serangkaian indikator. Indikator-indikator tersebut digabungkan untuk menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan, yang selanjutnya dijadikan sebagai Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

Badan Ketahanan Pangan menyusun IKP Nasional dengan unit analisis tingkat kabupaten/kota sebagai pemutakhiran IKP dan untuk melengkapi penyusunan IKP disusun juga unit analisis tingkat provinsi. IKP Nasional memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas daerah dan prioritas intervensi program. Secara khusus, penyusunan IKP Nasional dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi, serta memberikan gambaran peringkat (*ranking*) pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota dan provinsi lain. IKP yang disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan intervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasaran.

Grafik 2.4
Indeks Ketahanan Pangan Kota Ternate Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

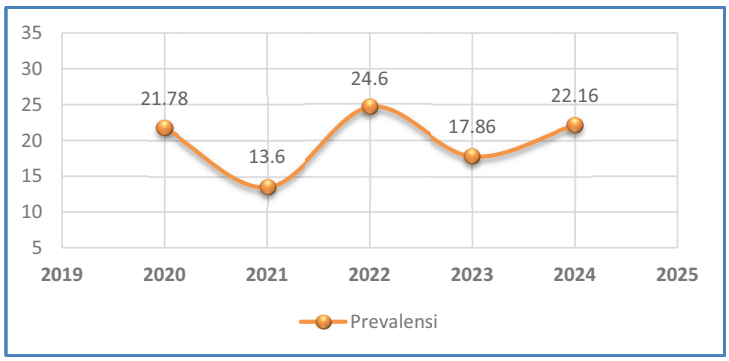
B. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Salah satu tujuan SDGs dalam hal hak atas pangan salah satunya adalah tujuan mengentaskan kelaparan, mencapai keamanan pangan, dan perbaikan gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan. Salah satu indikator digunakan untuk memonitor tren atau perubahan pola ketidakcukupan konsumsi energi dari makanan dalam suatu populasi secara berkala dari waktu ke waktu adalah PoU (*Prevalence of Undernourishment*).

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Angka PoU dihasilkan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) setiap tahun. Hasil SUSENAS 2020-2024 menunjukkan prevalensi ketidakcukupan pangan di Kota Ternate memiliki perkembangan fluktuatif dari 21,78 persen pada tahun 2020 menjadi 22,16 persen pada tahun 2024.

Artinya hingga tahun 2024, masih terdapat 22,16 persen penduduk yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif.

Grafik 2.5
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
Kota Ternate Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Pusat, 2025

C. Konsumsi Listrik per Kapita

Konsumsi listrik per kapita merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kemajuan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat suatu negara atau wilayah. Istilah ini merujuk pada jumlah rata-rata energi listrik yang dikonsumsi oleh setiap individu dalam satu tahun, biasanya diukur dalam satuan kilowatt-jam (kWh) per orang per tahun. Data konsumsi ini memberikan gambaran menyeluruh tentang sejauh mana infrastruktur energi telah menjangkau masyarakat, serta bagaimana listrik dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

Secara umum, semakin tinggi konsumsi listrik per kapita, semakin tinggi pula tingkat aktivitas ekonomi, pendidikan, teknologi, dan kesejahteraan masyarakat. Negara-negara maju cenderung memiliki konsumsi listrik per kapita yang tinggi karena penggunaan energi yang intensif dalam sektor industri, transportasi, perumahan, dan jasa. Sebaliknya, konsumsi listrik yang rendah dapat mencerminkan keterbatasan akses terhadap energi, rendahnya tingkat pendapatan, atau belum berkembangnya sektor ekonomi produktif. Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (*kilo Watt hours*) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung. Indikator konsumsi listrik per kapita ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan.

Tabel. 2.18
Konsumsi Listrik per Kapita Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Listrik per Kapita (kWh/Kapita)	993,61	1.049,54	1.260,93	1.074,24	1.131,86

Sumber: PLN Kota Ternate, 2025

Berdasarkan tabel di atas bahwa Konsumsi Listrik per kapita dari tahun 2020-2024 mengalami kenaikan, hal ini dipengaruhi oleh konsumsi listrik yang disalurkan oleh PLN kepada pelanggan juga mengalami kenaikan yang cukup besar.

D. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum dan Kapasitas Air Baku

Air adalah kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Ketersediaan dan akses terhadap air minum yang layak merupakan indikator penting dalam menentukan kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, air bukan hanya dilihat sebagai sumber daya alam, tetapi juga sebagai hak dasar setiap individu.

Akses rumah tangga terhadap air minum layak tidak hanya berkaitan dengan seberapa banyak air yang tersedia, tetapi juga seberapa mudah masyarakat mendapatkan air yang aman, bersih, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari konsumsi langsung hingga keperluan sanitasi. Data menunjukkan bahwa rumah tangga yang memiliki akses terbatas terhadap air minum layak lebih rentan terhadap penyakit, menurunnya produktivitas ekonomi, serta beban kerja tambahan, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang kerap menjadi penanggung beban pengambilan air.
Di sisi lain, kapasitas air baku, yakni potensi ketersediaan sumber air dari alam yang dapat diolah menjadi air minum, merupakan faktor fundamental yang menentukan seberapa luas dan seberapa andal layanan air dapat diberikan. Kapasitas ini sangat bergantung pada kondisi geografis, kualitas lingkungan, ketersediaan infrastruktur pengelolaan air, serta kebijakan tata kelola sumber daya air yang adaptif dan berkelanjutan.

Tantangan yang dihadapi saat ini tidak hanya terkait dengan jumlah air, tetapi juga dengan distribusi, kualitas, dan keberlanjutan pasokan air baku. Perubahan iklim, deforestasi, dan pertumbuhan populasi yang cepat semakin menekan ketersediaan air, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya alam atau rentan terhadap musim kemarau berkepanjangan. Oleh karena itu, untuk menjamin akses air minum yang adil dan merata, dibutuhkan sinergi antara peningkatan kapasitas air baku

dengan pengembangan sistem distribusi yang efisien, perlindungan terhadap daerah tangkapan air, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.

Kapasitas Air Baku (m^3/detik) adalah debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya. Untuk mendapatkan nilai Kapasitas Air Baku (m^3/detik), yaitu dengan menghitung total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) adalah Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (*on premises*); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.

Tabel. 2.19
Kapasitas Air Baku dan Akses Rumah Tangga Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kapasitas Air Baku (m^3/detik)	110,5	224,5	369,5	412,5	438
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	77	78,5	79,3	82	91,52

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate, 2024

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kapasitas air baku dari tahun 2020 yaitu sebesar 110,5 m^3/detik meningkat menjadi 438 m^3/detik pada tahun 2024, sehingga dapat dinyatakan bahwa Kapasitas Air Baku Kota Ternate mengalami peningkatan namun perlu diwaspadai adanya krisis ketersediaan air baku, yang dapat mengakibatkan suplai air baku menurun. Hal ini karena sumber air baku dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat, industri, atau sektor lainnya. Sedangkan untuk Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2020 sebesar 77% menjadi 91,52% pada tahun 2024, atau rata-rata peningkatan Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan dalam 5 tahun adalah sebesar 14,52%.

E. Ketersediaan Air Bersih

Air digunakan manusia untuk mencuci, mandi, dan minum. Air bersih sangat mempengaruhi kesehatan manusia, ketersediaan air bersih sangat penting diperhatikan baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Jika hanya mengandalkan air hujan saja tidak akan cukup memenuhi kebutuhan air manusia, oleh karena itu pengelolaan air yang baik dapat menjamin selalu tersedianya air bersih bagi masyarakat. Pemerintah Kota Ternate memiliki Perusahaan Daerah Air Minum untuk mengelola dan mendistribusikan air bersih ke masyarakat Kota Ternate.

Permasalahan Air besih di Kota Ternate salah satunya adalah air tanah yang dimanfaatkan oleh penyelenggara air minum sebagai air baku air minum, di mana saat ini terdapat beberapa sumur milik PDAM sudah mengalami intrusi air laut, sehingga mengganggu pelayanan air minum terutama dari aspek kuantitas dan kualitas air minum yang tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat, terutama masyarakat bagian utara Kota Ternate.

Tabel. 2.20
Produksi Air Bersih Perumda Ake Gaale Kota Ternate 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pelanggan	31.570	32.323	32.802	33.855	34.478
Produksi (m^3)	16.782.717	15.139.532	16.069.728	17.543.821	19.935.374
Terjual (m^3)	10.360.505	10.504.020	10.844.407	11.050.375	11.088.688
Nilai (Rp.)	56.017.220.350	56.600.801.650	59.421.685.150	62.860.719.500	73.694.412.950

Sumber: Kota Ternate Dalam Angka dan Perumda Ake Gaale, 2025

2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup yang berkualitas merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan lestari, masyarakat dapat meningkatkan kesehatannya, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan hidupnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan, serta meningkatkan upaya pelestarian lingkungan, sehingga dapat menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam fungsinya sebagai pendukung kebijakan, indeks kualitas lingkungan hidup dapat membantu dalam penentuan skala prioritas yang disesuaikan dengan derajat permasalahan lingkungan, sebagaimana diindikasikan oleh angka indeks kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sementara itu, IKLH dalam fungsinya sebagai bahasa komunikasi untuk publik dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat awam sehingga indeks dapat menjadi alat penggerak bagi keterlibatan publik. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ditetapkan secara nasional sebagai indikator untuk menilai ketercapaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup tingkat nasional. Demikian halnya dengan IKLH yang ditetapkan oleh provinsi dan kabupaten/kota juga menggambarkan kondisi pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Tabel. 2.21
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	n/a	73,61	75,28	74,44	71,34

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, 2025

Nilai IKLH Kota Ternate merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup kota yang merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh wilayah di Kota Ternate. Berdasarkan data pada tabel di atas, bahwa pada tahun 2019-2020 belum ada penilaian IKLH, sedangkan tahun 2021-2024 nilai IKLH Kota Ternate mengalami fluktuasi yang tidak signifikan, yang artinya bahwa pada nilai terendah pada tahun 2024 = **71,34** dan tertinggi pada tahun 2022 = **75,28**, secara keseluruhan masih berada pada *range* nilai (70 s/d 89 = Baik) dengan kategori **BAIK**, hal ini menunjukan bahwa kinerja Pemerintah Kota Ternate di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup cukup berhasil.

B. Pengelolaan Persampahan

Permasalahan utama pada bidang lingkungan hidup di Kota Ternate adalah terkait dengan Penanganan Sampah Perkotaan, terutama dalam hal pengumpulan sampah, pengangkutan sampah dan pemilahan sampah. Hal ini terjadi karena masih kurangnya sarana prasarana persampahan, seperti: armada angkut, trans depo dan TPS3R. Di sisi lain skema atau pola penanganan sampah saat ini masih dilakukan sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup, sehingga ke depannya perlu dilakukan perubahan atau inovasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah di Kota Ternate. Seiring jalannya pembangunan, dalam upaya memberikan kenyamanan dan lingkungan sehat bagi warga kota, Konsep *Green City* dapat menjadi solusi bagi pelaku pembangunan Kota Hijau (*green city*), suatu jargon yang sedang dicanangkan di seluruh dunia agar masing-masing kota memberi kontribusi terhadap penurunan emisi karbon untuk penurunan pemanasan global.

1. Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah

Pengelolaan sampah di Kota Ternate merupakan salah satu prioritas strategis dalam upaya menciptakan kota yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, urbanisasi, dan aktivitas ekonomi, volume timbulan sampah di Ternate terus mengalami peningkatan, sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih efektif dan efisien. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, pengelolaan persampahan saat ini didukung oleh berbagai sarana dan prasarana yang tersebar di beberapa kecamatan. Beberapa data penting yang menjadi dasar dalam pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:

a. Kapasitas Armada Eksisting

Jumlah dan kapasitas armada sampah yang sudah ada saat ini:

- Mobil *Dump Truck* = 14 unit (Kondisi baru 3 unit tahun 2024).
- Mobil *Arm Roll* = 6 unit (Kondisi baru 3 unit tahun 2024).
- Mobil *Pick Up* Bak Sampah = 8 unit (Kondisi baru 4 unit tahun 2024).
- Kendaraan Roda Tiga = 100 unit.

b. Frekuensi pengangkutan: frekuensi pengangkutan sampah yang dibutuhkan untuk menjaga kebersihan kota saat ini ritase angkutan perhari hanya 1 (satu) kali sesuai jalur pelayanan dan kebutuhan pendanaan yang tersedia dan teranggarkan (BBM dan Upah Operasional).

c. TPS3R dan Transdepo

Sarana TPS3R yang ada 3 unit, 1 unit di Kel. Kalumata, 1 unit di Kel. Tubo, 1 unit di Kel. Gamalama, sedangkan Transdepo terdapat 1 unit di Kel. Bastiong. Kondisi eksisting sarana TPS3R yang ada 3 unit dan operasionalnya belum maksimal yang diharapkan untuk mengurangi timbulan sampah yang ada di 3 Kelurahan yang TPS3R telah terbangun. Masyarakat belum bisa kontinu berperilaku 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan sampah di rumah tangga dan upaya membentuk budaya memilah sampah sejak dari sumbernya (secara masif dan atas kesadaran sendiri) masih cukup sulit untuk dilaksanakan, sehingga upaya pengurangan sampah belum berjalan maksimal.

d. Timbulan Sampah

Persentase Penanganan Sampah diperoleh dari formulasi : jumlah sampah yang tertangani dibagi dengan jumlah total sampah atau jumlah timbulan sampah. Asumsi timbulan sampah diperoleh dari jumlah penduduk (jiwa) dikalikan dengan koefisien timbulan sampah.

Asumsi timbulan sampah sesuai SNI Kota Sedang = 2,65 liter/jiwa/hari atau koefisien timbulan sampah 0,87 kg/orang/hari.

- Jumlah penduduk tahun 2024 = 210.836 jiwa

  = (237.624 x 2,65 x 1) = 558,71 M^3 per hari

- Timbulan sampah yang dapat diangkut ke TPA = 372,80 M^3 per hari

  = (372,70 M^3/ 558,71 M^3) X 100 = 67,00% Timbulan sampah yang tertangani setiap hari dan diangkut ke TPA Buku Deru-Deru Ternate.

e. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Takome

TPA Buku Deru-Deru terletak di Kelurahan Takome Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Letaknya berjarak ± 15 km dari pusat Kota Ternate dengan jarak dari jalan raya menuju TPA + 500 m dan jarak terdekat dari permukiman ± 1 km. TPA Buku Deru-Deru memiliki total luas 32 Ha, sedang beroperasi saat ini dan merupakan zona aktif adalah 3,44 Ha, 0,190 Ha digunakan sebagai sarana prasarana pendukung TPA dan bangunan komposting. Untuk lahan yang termasuk zona pasif dengan luas 1.165 Ha merupakan eks lahan penimbunan sampah *open dumping* dan 0,4 Ha sistem *controlled landfill.* Sedangkan sisa lahan ± 27.035 Ha merupakan zona penyangga yang ditumbuhi oleh berbagai jenis semak belukar dan tanaman tidak produktif.

Dari 5 (lima) poin di atas untuk mengatasi masalah ini, dilakukan peningkatan kapasitas sarana pengolahan persampahan, seperti penambahan pembangunan TPS3R, pengadaan armada pengangkut sampah yang baru, dan pembangunan fasilitas pengolahan sampah yang memadai. Selain itu, perlu juga dilakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah yang baik, sehingga dapat mengurangi timbulan sampah dari sumber sampahnya.

2. Rasio Kebutuhan Armada Pengolahan Sampah

Salah satu indikator penting dalam efektivitas pengelolaan persampahan di daerah perkotaan adalah rasio antara jumlah armada pengangkut sampah dengan jumlah penduduk. Di Kota Ternate, rasio ini menjadi sorotan karena langsung berdampak pada frekuensi pengangkutan, kualitas lingkungan, dan kepuasan masyarakat.

a. Kondisi Eksisting

Berdasarkan data terakhir, jumlah penduduk Kota Ternate tahun 2024 mencapai 210.836 jiwa yang tersebar di 8 kecamatan, dan untuk jumlah penduduk di Pulau Ternate yang tersebar di 5 kecamatan mencapai 200.652 jiwa. Sementara itu, jumlah armada pengangkut sampah yang tersedia sebanyak ± 14 unit *truck*.

Mengacu pada standar ideal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), perbandingan ideal adalah:

1 unit armada truk untuk setiap 7.000–10.000 penduduk.

Dengan penduduk di Pulau Ternate yang mencapai 200.652 jiwa, maka kebutuhan ideal armada adalah: 200.652 ÷ 7.000 ≈ 29-30 unit truk.

Artinya, jumlah armada truk pengangkut Kota Ternate saat ini hampir memenuhi rasio minimal, namun:

- Tidak semua armada beroperasi optimal setiap hari (ada yang rusak atau perawatan).
- Distribusi tidak merata di semua kecamatan.
- Tingkat pertumbuhan penduduk dan sampah belum diimbangi dengan penambahan armada secara berkala.

b. Tantangan Lapangan

Beberapa tantangan utama terkait rasio armada ini antara lain:

- Tingginya beban kerja per unit, menyebabkan armada cepat rusak atau memerlukan perawatan intensif.
- Distribusi armada yang tidak merata karena keterbatasan jumlah, sehingga beberapa wilayah harus menunggu giliran lebih lama untuk pengangkutan sampah.
- Volume timbulan sampah di pusat aktivitas ekonomi seperti pasar, pelabuhan, dan kawasan wisata sering melebihi kapasitas angkut harian.

c. Rencana dan Strategi Pemenuhan

Pemerintah Kota Ternate merancang beberapa strategi, antara lain:

- Penambahan unit armada baru, khususnya armada *compactor* yang mampu menampung lebih banyak volume sampah sekaligus memadatkannya.

- Rehabilitasi armada lama agar tetap layak pakai, disertai manajemen pemeliharaan yang lebih sistematis.
- Penyesuaian rute dan jadwal pengangkutan berbasis zonasi, dengan pendekatan data timbulan sampah dan kepadatan penduduk.
- Penguatan peran armada kecil (roda tiga) untuk daerah yang tidak bisa diakses truk besar, serta kolaborasi dengan pengangkut swadaya masyarakat di wilayah pinggiran.

Dengan rasio yang masih belum ideal antara jumlah armada pengangkut sampah dan populasi penduduk, Kota Ternate menghadapi tantangan nyata dalam menjaga kebersihan kota secara menyeluruh. Namun demikian, langkah-langkah perbaikan secara bertahap melalui penambahan unit, perbaikan armada, serta pengelolaan operasional yang lebih efisien menjadi kunci utama dalam memperbaiki layanan persampahan. Rasio ini bukan sekadar angka, tetapi cermin dari kapasitas layanan dasar yang menyentuh kehidupan sehari-hari warga kota. Oleh karena itu, perencanaan kebutuhan armada yang berbasis data dan realitas lapangan akan memperkuat arah pembangunan kota yang bersih dan layak huni.

3. Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Fasilitas pengolahan sampah terdiri dari: TPA, TPS3R, Komposting, Bank Sampah, Produk Kreatif dan fasilitas sumber energi berbasis sampah. Walaupun masih terdapat kekurangan, namun dengan fasilitas tersebut diharapkan mampu melakukan pengelolaan sampah dari sumber dengan metode pengelolaan secara ramah lingkungan. Berdasarkan data yang tersedia pengolahan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah di Kota Ternate antara lain: TPA, Komposting, TPS3R dan Bank Sampah.

Tabel 2.22
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	13,02	15,19	17,36	19,53	18,02

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, 2025

4. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Pengumpulan adalah aktivitas penanganan yang tidak hanya mengumpulkan sampah dari wadah individual atau dari wadah komunal (bersama) melainkan juga mengangkutnya ke tempat terminal tertentu, baik dengan pengangkutan langsung maupun tidak langsung. Proses pengumpulan sampah di Kota Ternate sebelumnya dilakukan dengan menggunakan mobil sampah (*dump truck*) langsung dari rumah, namun dalam 2 tahun terakhir melalui program penanganan sampah berbasis masyarakat pengumpulan sampah rumah tangga dilakukan menggunakan kendaraan roda tiga (motor sampah). Sehingga meningkatkan pelayanan sampah rumah tangga sampai pada jalan/gang yang tidak terjangkau oleh mobil sampah.

Tabel 2.23
Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	60,67	60,96	61,51	61,23	70,18

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, 2025

Berdasarkan data di atas dapat dilihat pengumpulan sampah mengalami peningkatan setiap tahunnya, di mana tahun 2024 terjadi kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 70,18%.

5. Neraca Sampah dan Peta Rute Pengangkutan Sampah

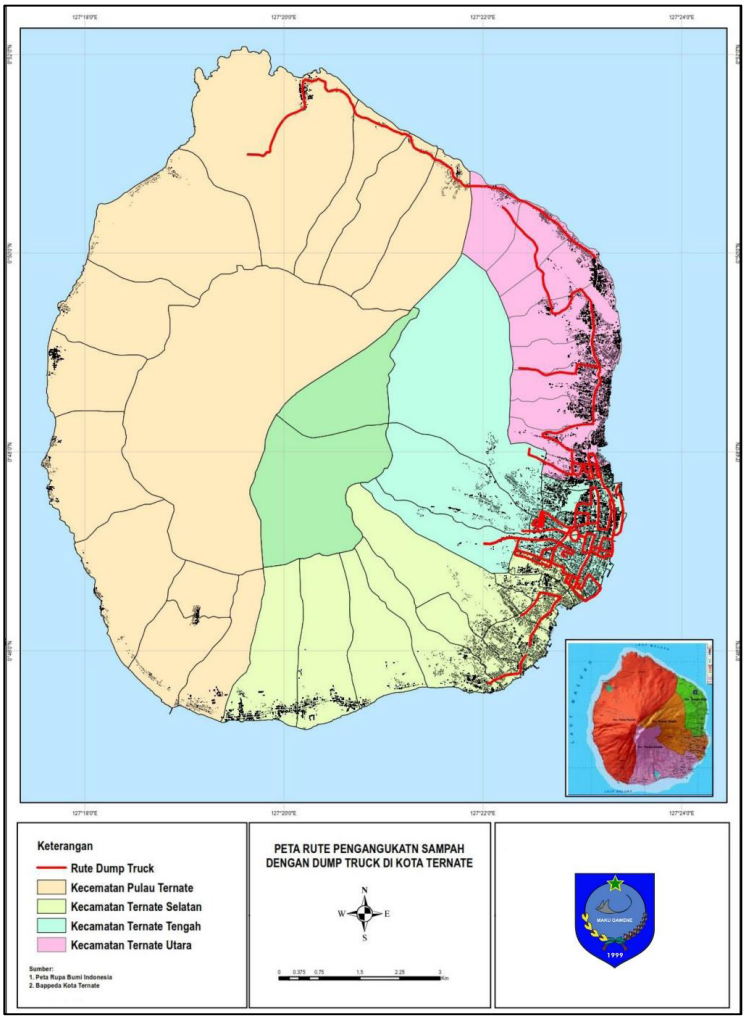
Neraca sampah merupakan gambaran kuantitatif mengenai timbulan, pengurangan, dan penanganan sampah di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Tujuan penyusunan neraca sampah adalah untuk mengetahui potensi sampah yang dihasilkan, sejauh mana pengelolaan dilakukan, serta sisa sampah yang harus ditangani lebih lanjut.

Tabel 2.24
Neraca Pengelolaan Sampah Kota Ternate Tahun 2024

No	Keterangan	Nilai (Ton/Tahun)
I	**JUMLAH TIMBULAN SAMPAH (Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)**	**44.855,58**
II	**JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH**	**4.881,91**
	Persentase Pengurangan Sampah	10,88
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	660,65
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	9,96
c	Jumlah Pendauran Ulang Sampah	4.211,30
III	**JUMLAH PENANGANAN SAMPAH**	**31.481,25**
	Persentase Penanganan Sampah	70,18
d	Pemilahan/Pengurangan	
e	Pengangkutan *)	0,00
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)	
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	
f	Pengolahan	456,25
	Jumlah sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak. kompos. daur ulang dan *upcycle*)	456,25
	Jumlah sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0,00
g	Pemrosesan akhir	31.025,00
	Jumlah sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	31.025,00
IV	**SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)**	**36.363,16**
	Persentase sampah terkelola	81,07
V	**SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I – IV)**	**8.492,42**
	Persentase sampah tidak terkelola	18,93

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, 2025

Peta rute pengangkutan sampah menggambarkan jalur operasional pengangkutan sampah dari sumber (TPS atau titik kumpul) menuju TPA. Rute ini dirancang untuk memastikan efisiensi waktu, bahan bakar, dan kapasitas armada, serta meminimalkan gangguan lalu lintas.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, 2025

Gambar 2.14 Peta Rute Pengangkutan Sampah Kota Ternate

6. Inovasi Penanggulangan dan Pengurangan Sampah

Pengelolaan sampah yang berkelanjutan tidak hanya mengandalkan teknologi dan kebijakan, tetapi membutuhkan perubahan perilaku masyarakat sebagai fondasi utama. Inovasi penanggulangan dan pengurangan sampah berbasis perilaku masyarakat bertujuan mengubah paradigma sampah dari masalah menjadi pemanfaatan sumber daya.

Melalui pendekatan partisipatif, edukatif, dan pemberdayaan komunitas, berbagai inovasi telah dikembangkan dan diterapkan, antara lain:

a. Budidaya Maggot (*Black Soldier Fly*) untuk Sampah Organik

   Masyarakat didorong memanfaatkan limbah organik rumah tangga sebagai pakan bagi larva lalat *Black Soldier Fly* (BSF) atau maggot. Selain mengurangi volume sampah organik secara signifikan, maggot juga menjadi sumber pakan ternak bernilai ekonomi tinggi. Inovasi ini memperkuat ekonomi sirkular berbasis rumah tangga dan kelompok tani/ternak.

b. Jaring Penyanggah Sampah di Aliran Kali Mati atau Barangka

   Untuk mencegah sampah masuk ke badan air, masyarakat bersama pemerintah memasang jaring penyanggah (*trash trap*) di titik-titik strategis seperti mulut saluran dan jembatan. Sampah yang terkumpul kemudian dipilah dan dikelola bersama oleh warga, menciptakan tanggung jawab kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan air.

c. Sampah Plastik Tertolak Diolah Menjadi *Paving Block* dan Batako

Plastik-plastik sulit daur ulang (seperti kresek dan kemasan multilapis) yang sebelumnya tidak memiliki nilai ekonomis diolah melalui proses pencacahan dan pemanasan untuk dijadikan *paving block* dan batako. Program ini dilakukan oleh kelompok masyarakat dan UMKM lingkungan, dengan hasil produk yang kokoh, ekonomis, dan bernilai jual.

d. Pengolahan Sampah Serabut Kelapa

Serabut kelapa yang kerap dianggap limbah kini diolah menjadi *cocopeat, cocomesh,* hingga media tanam organik. Inovasi ini mendorong pemanfaatan limbah pertanian dan perkebunan, khususnya di wilayah pesisir dan kepulauan, serta membuka peluang usaha baru berbasis rumah tangga.

e. Pemanfaatan Dahan dan Potongan Pohon Menjadi Briket Ramah Lingkungan

Sisa potongan pohon hasil pemangkasan yang sebelumnya dibuang kini dikeringkan, dicacah, dan dipres menjadi briket bahan bakar alternatif. Selain mengurangi pembakaran terbuka (*open burning*), inovasi ini juga menyediakan energi ramah lingkungan yang bisa digunakan untuk memasak di skala rumah tangga maupun UMKM kuliner.

Inovasi-inovasi ini menunjukkan bahwa penanggulangan sampah tidak harus rumit atau mahal, melainkan dimulai dari kesadaran, kemauan, dan kolaborasi masyarakat. Ketika masyarakat diposisikan sebagai aktor utama, pengelolaan sampah bukan hanya berhasil mengurangi beban lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan budaya baru yang berkelanjutan.

C. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak, yaitu jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%). Rumah tangga dinilai memiliki akses sanitasi layak atau akses sanitasi aman apabila memenuhi seluruh kriteria dari komponen di bawah ini:

Tabel. 2.25
Komponen Akses Sanitasi Layak

Komponen	Akses Layak	Akses Aman
Bangunan Atas	Kloset leher angsa	Kloset leher angsa
Bangunan Bawah	• Tanki Septik atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL); • Lubang tanah (khusus perdesaan)	Tanki Septik atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)
Pengguna	Digunakan oleh rumah tangga sensidi atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu	Satu rumah tangga
Frekuensi Penyedotan	(tidak dinilai)	Minimal sekali dalam jangka waktu 5 tahun terakhir

Tabel. 2.26
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Kota Ternate 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)	86,26	89,58	92,07	97,06	98,43

Sumber: Dinas PUPR Kota Ternate, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Kota Ternate dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 12,17%.

2.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memajukan perekonomian daerah. Dengan adanya kesiapsiagaan dan adaptasi yang efektif terhadap bencana dan perubahan iklim, masyarakat dapat mengurangi risiko dan dampak negatif, serta meningkatkan kemampuan untuk pulih dan bangkit setelah bencana. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan upaya peningkatan resiliensi masyarakat, meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim, serta meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan masyarakat yang tangguh dan berkelanjutan.

A. Indeks Risiko Bencana

Dalam melakukan kajian risiko bencana, pendekatan fungsi dari tiga parameter pembentuk risiko bencana, yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas terkait bencana. Beberapa prinsip dari proses pengkajian risiko bencana yang juga menjadi pertimbangan proses analisa adalah:

1. Menggunakan data dan segala bentuk rekaman kejadian yang ada, dengan mengutamakan data resmi dari lembaga yang berwenang;
2. Melakukan integrasi analisis probabilitas kejadian ancaman dari para ahli dengan kearifan lokal masyarakat;
3. Proses analisis yang dilakukan harus mampu menghitung potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar;
4. Hasil kajian risiko dapat diterjemahkan menjadi kebijakan umum untuk pengurangan risiko bencana.

Berdasarkan hasil kajian risiko bencana yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dirilis setiap tahun melalui Buku Resiko Bencana, untuk Kota Ternate Indeks Risiko Bencana tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.27
Indeks Risiko Bencana Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana Kota Ternate	104,49	101,89	103,22	100,90	91,97

Sumber: BPBD Kota Ternate, 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai Indeks Risiko Bencana Kota Ternate dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami penurunan, yang artinya tingkat risiko bencana Kota Ternate secara umum setiap tahun mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 103,22, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 91,97 yang merupakan nilai terendah sejak tahun 2020. Bahkan nilai tersebut lebih rendah dari Indeks Risiko Bencana Nasional tahun 2024 yaitu sebesar 115,89.

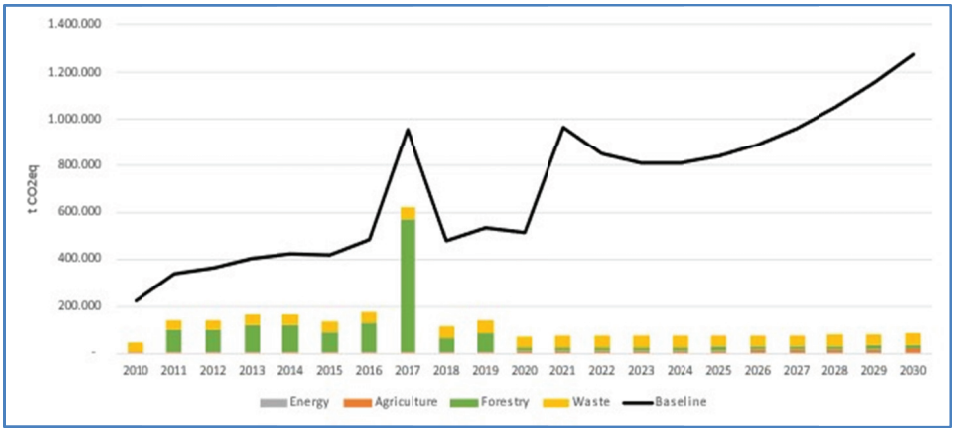
B. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana memberikan layanan asistensi teknis pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Tahapan penyusunan IKD dimulai dengan sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan *Focus Group Discussion*, untuk kemudian diverifikasi oleh BPBD Provinsi Maluku Utara dan dilanjutkan dengan verifikasi oleh BNPB. Diharapkan hasil yang didapatkan dari proses pengukuran tersebut berupa rekomendasi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga sebagai input pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota. Berdasarkan data dan informasi yang diketahui bahwa Kota Ternate belum melakukan asistensi teknis pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) oleh Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana maupun pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) secara mandiri.

C. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kota Ternate

Gas rumah kaca (GRK) merupakan gas di atmosfer yang berfungsi menyerap radiasi infra merah dan ikut menentukan suhu atmosfer. Adanya berbagai aktivitas manusia, khususnya sejak era pra-industri emisi gas rumah kaca ke atmosfer mengalami peningkatan yang sangat tinggi sehingga meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Target penurunan emisi di Kota Ternate didapatkan dari perhitungan *baseline* dikurangi skenario mitigasi. Perhitungan *baseline* merupakan proyeksi emisi yang dibuat tanpa memperhitungkan adanya intervensi kebijakan dan/atau teknologi mitigasi apapun. *Baseline* emisi GRK disusun dalam rangka melihat potensi reduksi masing-masing sektor penghasil emisi GRK. Sedangkan skenario mitigasi merupakan proyeksi emisi yang telah memperhitungkan opsi mitigasi yang telah disusun.

Grafik 2.6
***Baseline* dan Mitigasi GRK Kota Ternate Tahun 2010-2030**



Tabel 2.28
Penurunan Intensitas Emisi GRK Kota Ternate Tahun 2020-2030

Tahun	Total Emisi *Baseline* (ton Co_2eq)	Total Emisi Skenario Mitigasi (ton Co_2eq)	Target Penurunan Emisi (ton Co_2eq)	% Target Penurunan Emisi
2020	720.951	475.670	245.281	34%
2021	1.202.215	524.367	677.848	56,4%
2022	1.103.412	524.367	579.045	49,8%
2023	1.094.727	609.431	485.289	44,3%
2024	1.129.469	671.952	457.517	40,5%
2025	1.197.229	742.477	454.752	38%
2026	1.292.502	821.789	470.713	36,4%
2027	1.412.427	911.330	501.097	35,5%
2028	1.556.009	1.012.379	543.630	34,9%
2029	1.723.600	1.126.423	597.177	34,9%
2030	1.916.579	1.255.181	661.398	34,5%

Sumber: CRIC Kota Ternate, 2025

D. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam didefinisikan sebagai pelindungan kawasan dengan tujuan untuk melindungi manusia dan aktivitas kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Kriteria kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti, gempa bumi, tanah longsor, banjir, gunung berapi dan tsunami, angin puting beliung, kebakaran hutan, kekeringan dan lain-lain. Wilayah Kota Ternate merupakan salah satu daerah di Indonesia yang termasuk rawan bencana. Hal ini karena Kota Ternate berada pada interaksi 3 (tiga) lempeng besar dunia, yakni lempeng Eurasia, lempeng Hindia Australia dan lempeng Pasifik. Kota Ternate juga merupakan daerah yang

dilewati *Pacific Ring Of Fire* (rangkaian gunung berapi aktif dunia), Pulau Ternate secara langsung memiliki kerentanan terhadap bencana gunung berapi di mana Pulau Ternate terbentuk dari proses pembentukan Gunung Api Gamalama yang muncul dari dasar laut. Gunung Api Gamalama adalah salah satu gunung api sangat aktif di Indonesia, tercatat sudah sebanyak 70 kali letusan dimulai dari tahun 1538 - 2016. Jarak letusan satu dengan berikutnya bervariasi dari 1 tahun hingga 50 tahun tetapi umumnya kurang dari 10 tahun. Gunung Api Gamalama (1.715 mdpl) berbentuk gunung strato, tersusun oleh bahan vulkanik berupa lava, piroklastik dan lahar. Korban manusia tercatat pada letusan tahun 1673, 1775, 1838 dan 1871. Pada tahun 1775 sebanyak 141 jiwa hilang di kelurahan Takome, disebabkan oleh letusan freatik yang membentuk maar Tolire kecil.

Selain ancaman bencana banjir/banjir lahar dingin dari letusan gunung api, Kota Ternate juga memiliki ancaman bencana lain seperti: Gelombang pasang, angin puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi dan tsunami. Risiko bencana di Kota Ternate dipengaruhi oleh ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas adaptasi dalam menghadapi ancaman yang ada, curah hujan yang cukup tinggi dalam waktu yang pendek meningkatkan tingkat bahaya banjir akibat topografi wilayah, daya dukung lingkungan yang semakin menurun maupun kerentanan dan kapasitas warga dalam menghadapi ancaman bencana. Penurunan permukaan tanah yang diakibatkan oleh eksploitasi air yang berlebihan dan pembangunan infrastruktur semakin meningkatkan ancaman banjir dan meningkatkan kerentanan wilayah maupun komunitas Kota Ternate. Dampak perubahan iklim yang saat ini ada, secara signifikan mempengaruhi tingkat risiko bencana, karena selain mempengaruhi tingkat risiko bencana khususnya hidrometeorologis dan biologis, juga mempengaruhi kerentanan dan kapasitas yang ada. Kompleksnya bencana di Kota Ternate sebagai gerbang masuk di Maluku Utara maupun pusat pertumbuhan dan pembangunan, membutuhkan sebuah perencanaan yang sifatnya terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Ternate diharapkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam 5 (lima) tahun mendatang. Baik bagi Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat. Dimulai dari pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana serta alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

Untuk mengidentifikasi kawasan rawan bencana di Ternate, perlu dilakukan pengamatan terhadap kondisi geologi yang menunjukkan adanya daerah rawan terhadap bencana, agar dapat ditetapkan sebagai kawasan lindung untuk mencegah terjadinya kerugian yang besar akibat adanya bencana. Kawasan rawan bencana meliputi seluruh wilayah kecamatan dalam wilayah Kota Ternate, adapun jenis bencana yang terdapat di Kota Ternate, antara lain:

1. Kawasan rawan bencana gempa bumi terdapat di seluruh wilayah Kota Ternate yaitu Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Ternate Barat, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Hiri, Kecamatan Moti dan Kecamatan Batang Dua.
2. Kawasan rawan tanah longsor di Kota Ternate, terdapat pada hampir seluruh wilayah Kota Ternate, terutama pada kawasan dengan tingkat kemiringan lereng di atas 40% dengan kondisi vegetasi yang sedikit/gundul. Untuk kawasan dengan kemiringan lereng di bawah 40% pada umumya berada pada kawasan pertambangan bahan galian mineral non logam dan batuan (Galian-C), kawasan perumahan dan permukiman yang pengembangannya dilakukan dengan pemerataan lahan serta perumahan dan permukiman yang berada di bantaran sungai/kalimati/barangka yang pembangunannya tidak memperhatikan jarak sempadan. Sedangkan untuk kawasan pesisir pada umumnya berada pada wilayah pantai yang topografinya merupakan tebing.
3. Kawasan rawan banjir yang terdapat di Kota Ternate terdiri dari banjir genangan, banjir rob dan banjir bandang/kiriman. Untuk banjir genangan terjadi di beberapa kelurahan, antara lain: Kelurahan Mangga Dua, Kelurahan Mangga Dua Utara, Kelurahan Bastiong Talangame, Kelurahan Bastiong Karance, Kelurahan Gamalama, Kelurahan Jati, Kelurahan Santiong, Kelurahan Salero dan Kelurahan Akehuda. Untuk banjir rob terjadi di beberapa kelurahan yang berada di wilayah pesisir pantai. Sedangkan untuk banjir bandang terjadi akibat meluapnya air dari beberapa sungai/kalimati/barangka yang terdapat di Kota Ternate, antara lain: Kelurahan Tubo, Kelurahan Dufa-Dufa, Kelurahan Togafo, Kelurahan Loto, Kelurahan Marikurubu, Kelurahan Kampung Pisang, Kelurahan Takoma, Kelurahan Tanah Tinggi dan lain-lain.

4. Kawasan rawan bencana gunung berapi meliputi daerah rawan I, rawan II dan rawan III, yang meliputi:
    - Kawasan rawan bencana terhadap aliran masa, berupa lahar/banjir, kemungkinan perluasan awan panas serta aliran lava dan rawan bencana terhadap hujan abu, tanpa memperhatikan arah tiupan angin dan kemungkinan lontaran batu (pijar) dengan radius 4,5 Km. Kawasan rawan bencana gunung berapi kategori rawan I terdapat di Kelurahan Dufa-dufa, Tabam, Tubo, Kulaba, Bula, Tobololo, Takome, Loto, dan Kelurahan Togafo. Khusus untuk Kelurahan Kulaba, harus diwaspadai terhadap bahaya banjir pada musim penghujan. Di samping itu, pemukiman yang juga harus waspada terhadap kemungkinan perluasan lahar adalah Kelurahan Taduma, Dorpedu, Kastela dan Toboko dengan luas kurang lebih 1.028,29 Ha.
    - Kawasan rawan bencana gunung berapi kategori rawan III terdapat di sungai/barangka tepatnya di Kelurahan Sulamadaha hingga bagian timur laut yang berbatasan dengan Sungai Togorara. Alur sungai yang termasuk ke dalam kawasan ini adalah Sungai Togorara, Sungai Kulaba, Sungai Sosoma, Sungai Ruba, Sungai Kelawa, Sungai Tareba, Sungai Piatoe, Sungai Taduma dan Sungai Kastela. Pemukiman yang mungkin terancam terhadap bahaya lahar adalah Kelurahan Tubo, Tafure, Kulaba, Tobololo, Takome dan Kelurahan Loto, rawan bencana terhadap lontaran batu (pijar), hujan abu lebat adalah Kelurahan Foramadiahi, Marikurubu (Lingkungan Air Tege-Tege dan Lingkungan Tongole), Buku Bendera dan Kelurahan Moya dengan luas kurang lebih 1.525,18 Ha.
    - Kawasan rawan bencana gunung berapi kategori rawan III adalah kawasan yang letaknya terdekat dengan sumber bahaya dan sering terlanda awan panas, lontaran atau guguran batu (pijar) dan aliran lava. Berhubung sangat tinggi tingkat kewaspadaannya maka kawasan ini tidak diperkenankan untuk hunian tetap. Sebagian alur sungai utama yang termasuk ke dalam daerah ini dan merupakan sarana air untuk material letusan yang bersifat aliran adalah: Sungai Piatoe, Sungai Tareba dan Sungai Takome, Sungai Sososma, Sungai Ruba, Sungai Kulaba, serta Sungai Togorara.
    - Sedangkan untuk daerah sangat rawan terhadap material lontaran atau guguran batu (pijar), meliputi daerah puncak dengan radius 2,5 km dari pusat letusan (Kawah Gn. Arfat). Di dalam kawasan rawan bencana III ini tidak terdapat beberapa pemukiman penduduk.
5. Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami berpotensi terjadi di sepanjang tepian pantai Kota Ternate.
6. Kawasan rawan tsunami terdapat di Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Ternate Barat, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Pulau Hiri, Kecamatan Moti dan Kecamatan Batang Dua.
7. Kawasan rawan bencana angin puting beliung terdapat di seluruh wilayah Kota Ternate, terutama pada kawasan dengan lahan terbuka tanpa adanya vegetasi.
8. Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan dapat terjadi di seluruh kawasan hutan dan lahan pertanian/perkebunan di wilayah Kota Ternate. Bencana ini dapat terjadi karena perubahan iklim yang menyebabkan kemarau panjang yang disertai akibat dari ulah manusia yang melakukan pembukaan dan penguasaan lahan dengan cara pembakaran vegetasi dan semak belukar.
9. Kawasan rawan bencana kekeringan meliputi kawasan tandus yang merupakan kawasan dengan tingkat hujan yang rendah dan tidak memiliki sumber air.

Wilayah rawan bencana di Kota Ternate dalam perkembangannya harus memperhatikan perubahan iklim, data jurnal dan riset tentang bencana di Kota Ternate, sehingga perubahan wilayah titik kawasan rawan bencana, siklus kebencanaan dan potensi bencana lainnya dapat diantisipasi atau diminimalisir dampak risikonya melalui upaya-upaya adaptasi dan mitigasi kebencanaan.

2.1.7 Demografi

Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan,

kewarganegaraan, agama atau etnisitas tertentu. Dengan demikian data kependudukan adalah segala tampilan data penduduk dalam bentuk resmi maupun tidak resmi yang diterbitkan oleh badan-badan pencatatan kependudukan (pemerintah maupun non pemerintah), dalam berbagai bentuk baik angka, grafik, gambar dan lain lain. Secara khusus Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pertumbuhan penduduk Kota Ternate secara umum dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kebijakan pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta meningkatkan mobilitas penduduk. Upaya untuk menurunkan tingkat kelahiran, meliputi penundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, dan kampanye program KB. Sementara upaya menurunkan kematian dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

A. Jumlah dan Struktur Penduduk

Struktur penduduk adalah susunan jumlah penduduk berdasarkan kelompok data tertentu. Pada tahun 2020 telah dilaksanakan Sensus Penduduk, dengan tujuan untuk menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia menurut *de facto* dan *de jure*, serta menyediakan parameter demografi serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk.

Jumlah penduduk Kota Ternate hasil Sensus Penduduk tahun 2020 sebanyak 205.001 jiwa, dan berdasarkan proyeksi penduduk Kota Ternate untuk tahun 2021 sebanyak 205.870 jiwa dan 206.745 jiwa pada tahun 2022, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate jumlah penduduk untuk tahun 2023 sebesar 204.920 jiwa, dan untuk tahun 2024 sebesar 210.836 jiwa.

Tabel 2.29
Perkembangan Jumlah Penduduk, Distribusi Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kota Ternate Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Tahun Perkembangan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pulau Ternate	8.735	8.810	8.820	8.955	9.233
2	Moti	4.811	4.810	4.850	4.672	4.615
3	Batang Dua	2.791	2.800	2.820	2.726	2.711
4	Pulau Hiri	2.922	2.920	2.950	2.869	2.858
5	Ternate Selatan	74.329	74.810	74.945	72.193	75.105
6	Ternate Tengah	53.643	53.800	54.100	54.693	56.058
7	Ternate Utara	48.982	49.060	49.400	49.509	50.778
8	Ternate Barat	8.788	8.860	8.860	9.303	9.478
Jumlah		**205.001**	**205.870**	**206.745**	**204.920**	**210.836**

Sumber: Kota Ternate dalam Angka dan Dinas Dukcapil Kota Ternate, 2025

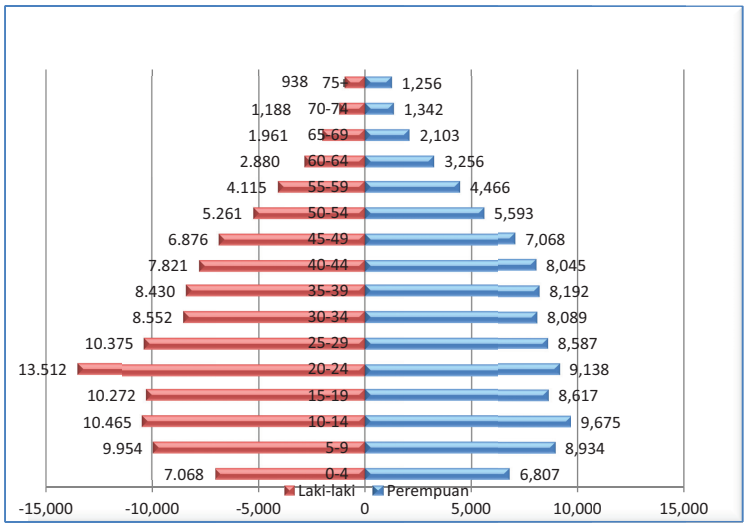
Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk Kota Ternate pada tahun 2024 telah terdistribusi pada 8 kecamatan, dengan tingkat persebaran yang tidak merata pada setiap kecamatan. Distribusi jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Ternate Selatan dengan jumlah penduduk sebesar 75.105 jiwa atau sekitar 35,62% dari jumlah penduduk Kota Ternate, sedangkan distribusi penduduk terkecil adalah Kecamatan Pulau Batang Dua dengan jumlah penduduk kurang lebih 2.711 jiwa atau sekitar 1,28% dan Kecamatan Pulau Hiri dengan jumlah penduduk sekitar 2.858 jiwa atau sekitar 1,35% dari jumlah penduduk Kota Ternate. Ditinjau dari angka kepadatan dan distribusi penduduk di Kota Ternate sangat dipengaruhi oleh jumlah pertumbuhan penduduk dan luas wilayah daerah tersebut. Angka kepadatan penduduk ini bermanfaat untuk mengetahui daya tampung dari suatu daerah dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakatnya serta untuk menentukan strategi pembangunan yang dapat dikembangkan di masa datang.

Tabel 2.30
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kota Ternate Tahun 2024

Kelompok Umur		Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	7.068	6.807	13.875
2	5-9	9.954	8.934	18.888
3	10-14	10.465	9.675	20.140
4	15-19	10.272	8.617	18.889
5	20-24	13.512	9.138	22.650
6	25-29	10.375	8.587	18.962
7	30-34	8.552	8.089	16.641
8	35-39	8.430	8.192	16.622
9	40-44	7.821	8.045	15.866
10	45-49	6.876	7.068	13.944
11	50-54	5.261	5.593	10.854
12	55-59	4.115	4.466	8.581
13	60-64	2.880	3.256	6.136
14	65-69	1.961	2.103	4.064
15	70-74	1.188	1.342	2.530
16	75+	938	1.256	2.194
Jumlah		**109.668**	**101.168**	**210.836**

Sumber: Kota Ternate dalam Angka dan Disdukcapil Kota Ternate, 2025

Grafik 2.7
Piramida Penduduk Kota Ternate Tahun 2024



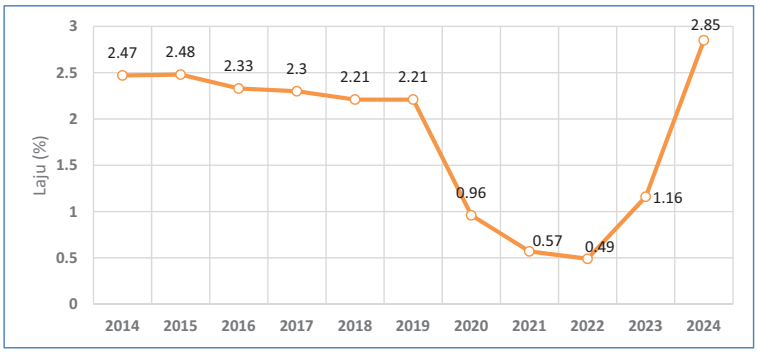
Sumber: Kota Ternate Dalam Angka dan Disdukcapil Kota Ternate, 2025

Secara garis besar, karakteristik penduduk di Kota Ternate dapat dilihat melalui piramida penduduk, yang menunjukkan komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin melalui dua diagram batang, pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya bisa menunjukkan jumlah penduduk perempuan dalam kelompok interval usia penduduk lima tahunan. Karakteristik penduduk ini menunjukkan ada laju pertumbuhan yang cukup cepat dengan populasi yang masih muda dan berkembang. Kelompok umur dengan populasi paling banyak adalah kelompok umur 20-24 tahun disusul dengan kelompok umur 10-14 tahun. Generasi usia produktif yang lahir pada tahun 2001-2005 (atau berumur 20-24 tahun) mendominasi karakteristik penduduk Kota Ternate.

B. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan dalam dokumen ini adalah metode geometrik. Berdasarkan data BPS Provinsi Maluku Utara, sejak tahun 2014 hingga 2022 laju pertumbuhan penduduk di Kota Ternate cenderung mengalami penurunan, dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2023 dan tahun 2024.

Grafik 2.8
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Ternate Tahun 2014-2024

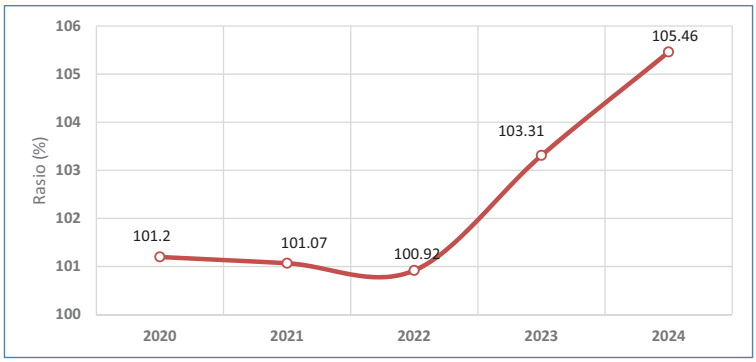


Sumber: BPS Maluku Utara, 2025

C. Rasio Penduduk

Sementara itu, jumlah rasio jenis kelamin penduduk Kota Ternate pada tahun 2024 adalah 105,46. Artinya, tiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 106 penduduk laki-laki, atau dengan kata lain jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin tertinggi berada pada kelompok umur 20-24 (120,22) dan 15-19 (113,38), sedangkan rasio jenis kelamin terendah berada pada kelompok umur di atas 75 tahun (74,85). Rincian data tentang rasio jenis kelamin penduduk Kota Ternate dari tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Grafik 2.9
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Ternate Tahun 2020-2024

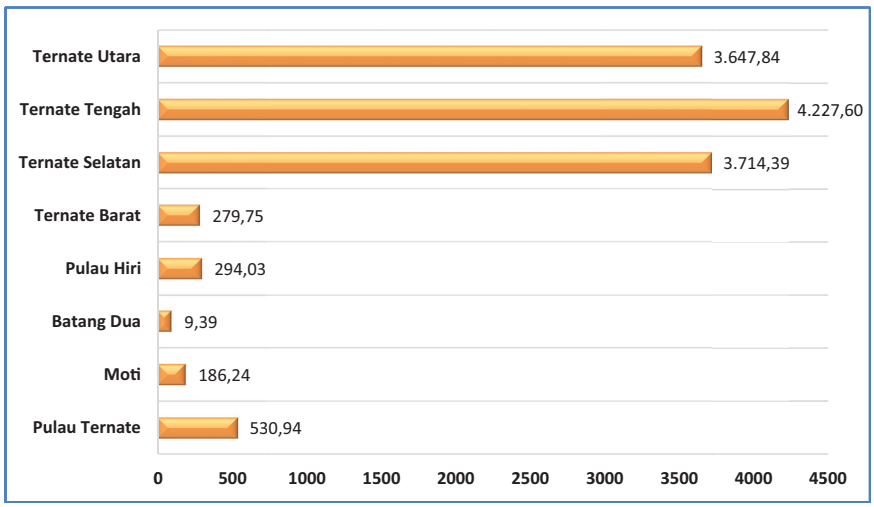


Sumber: BPS Maluku Utara dan Kota Ternate Dalam Angka, 2025

D. Distribusi / Pesebaran Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk masing-masing kecamatan tidak merata, akumulasi kepadatan penduduk Kota Ternate tahun 2024 mencapai 1.299,85 jiwa/Km^2. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kec. Ternate Tengah yaitu 4.227,60 jiwa/Km^2, kemudian disusul oleh Kec. Ternate Selatan dengan kepadatan 3.714,39 jiwa/Km^2 dan Kec. Ternate Utara dengan kepadatan 3.647,84 jiwa/Km^2. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kec. Batang Dua dengan kepadatan rata-rata 93,39 jiwa/Km^2. Secara kuantitas tingkat kepadatan penduduk tersebut dipengaruhi oleh perbandingan jumlah penduduk yang mendiami setiap kecamatan terhadap luasan wilayah kecamatan.

Grafik 2.10
Kepadatan Penduduk per Kecamatan Kota Ternate Tahun 2024 (Jiwa/Km^2)



Sumber: Kota Ternate Dalam Angka, 2025

E. Proyeksi dan Analisis Penduduk

Proses pembangunan yang berkelanjutan bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Penduduk adalah obyek dan subyek dari pembangunan, maka pembangunan harus berpusatkan pada penduduk (*people-centered development*), yaitu pembangunan yang berorientasi kepada potensi dan kebutuhan sosial, ekonomi, budaya dan ketenteraman lahir dan batin penduduk itu sendiri.

Jumlah penduduk merupakan data dan informasi yang utama dalam perencanaan pembangunan. Data jumlah penduduk dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja pembangunan dan acuan dalam pembangunan di masa yang akan datang. Data tersebut dapat memperkirakan kebutuhan fasilitas maupun sarana prasarana, serta dapat menjadi acuan dalam membuat strategi kebijakan di masa yang akan datang.

Berdasarkan dokumen proyeksi penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara, proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun proyeksi penduduk Indonesia setiap kali hasil Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) telah tersedia. BPS menyelenggarakan rangkaian Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang terbagi menjadi dua tahapan yaitu pendataan penduduk dengan menggunakan kuesioner sederhana (*short form*) pada tahun 2020, dan dilanjutkan dengan pendataan menggunakan kuesioner yang lebih rinci (*long form*) melalui kegiatan sensus sampel pada 2022, yang selanjutnya disebut *Long Form* Sensus Penduduk 2020 (LF SP2020). Informasi jumlah dan struktur umur penduduk hasil SP2020 serta parameter demografi hasil LF SP2020 digunakan untuk memutakhirkan proyeksi penduduk yang telah diterbitkan sebelumnya.

1. Proyeksi Jumlah Total Penduduk

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kota Ternate dapat diperkirakan bahwa pada akhir periode RPJMD (2030) jumlah penduduk Kota Ternate adalah sebesar 227.634 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 5,01% dari tahun 2025.

Tabel 2.31
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Ternate Tahun 2025-2030

Penduduk Tahun 2024 (Ribu Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Ribu Jiwa)					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
210,84	216,77	219,07	221,32	223,51	225,60	227,63

Sumber: BPS Kota Ternate, 2025 (Data diolah)

2. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kota Ternate berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki diperkirakan akan lebih besar dibanding jumlah penduduk perempuan dari tahun 2025-2030, dengan kondisi tren yang terus meningkat untuk jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk laki-laki di Kota Ternate pada akhir periode RPJMD (2030) diperkirakan sebesar 115,44 ribu jiwa dan penduduk perempuan sebesar 112,20 ribu jiwa.

Tabel 2.32
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Ternate Tahun 2025-2030

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2024 (Ribu Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Ribu Jiwa)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Laki-Laki	108,25	109,52	110,77	111,98	113,18	114,32	115,44
Perempuan	106,17	107,25	108,30	109,33	110,33	111,28	112,20
Rasio	101,96	102,12	102,28	102,42	102,58	102,73	102,89

Sumber: BPS Kota Ternate, 2025 (Data diolah)

3. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Proporsi penduduk usia 15-64 Kota Ternate diproyeksikan mengalami peningkatan 2025-2030, yakni dari 69,08% menjadi 69,68% di tahun 2030. Tren peningkatan terdapat pada penduduk usia 65-75+ dari 4,91% menjadi 6,61.%. Berdasarkan tabel, di sisi lain penduduk usia 0-14 mengalami penurunan dari 26,02% tahun 2025 menjadi 23,71% pada tahun 2030. Berikut adalah tabel proyeksi proporsi penduduk menurut kelompok umur.

Tabel 2.33
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Ternate Tahun 2025-2030

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2024 (Ribu Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Ribu Jiwa)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-14 Tahun	56,61	56,40	56,12	55,75	55,25	54,65	53,98
15-64 Tahun	147,88	149,75	151,54	153,34	155,12	156,91	158,61
> 65 Tahun	9,93	10,64	11,40	12,24	13,14	14,08	15,04
Angka Ketergantungan	44,99	44,77	44,56	44,34	44,09	43,80	43,51

Sumber: BPS Kota Ternate, 2025 (Data diolah)

4. Analisis Proyeksi Penduduk Kota Ternate

Pada tabel 2.31 terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk secara kontinu dari 2025-2030. Namun apabila dilihat lebih dalam tabel 2.32, peningkatan ini tidak terjadi merata pada setiap jenis kelamin. Terlihat bahwa terjadi peningkatan rasio jenis kelamin secara berturut-turut pada 2024 hingga 2030. Rasio jenis kelamin di atas 100 menunjukkan terjadinya jumlah laki-laki yang lebih dominan dari pada perempuan, bahkan diprediksi akan semakin dominan dari tahun ke tahun pada 2025-2030. Umumnya rasio jenis kelamin yang didominasi laki-laki dapat meningkatkan persaingan di pasar tenaga kerja yang ditandai oleh berlebihnya jumlah penduduk usia kerja pria, dan bisa berpotensi menurunnya upah pada sektor pekerjaan yang didominasi oleh laki-laki.

Sedangkan pada tabel 2.33 terlihat ada penurunan angka ketergantungan (*dependency ratio*) yang terus berkurang dari tahun ke tahun. Jika angka ini terus menurun, maka "beban" kelompok usia produktif untuk menanggung kelompok usia non produktif akan berkurang. Hal ini menandakan adanya indikasi positif pada pertumbuhan ekonomi. Momen berkurangnya *dependency ratio* ini merupakan ciri dari bonus demografi. Bonus demografi merupakan momen yang penting dan krusial. Hal yang perlu dipersiapkan adalah kesehatan dan pendidikan, guna meningkatkan produktivitas dari penduduk usia kerja ini. Selain itu, perlu disiapkan lapangan kerja yang memadai. Karena apabila momen ini tidak dimanfaatkan dengan baik, bonus demografi ini

bisa berbalik menjadi bencana demografi, di mana penduduk usia kerja yang membludak malah tidak terserap dengan baik oleh ketersediaan lapangan kerja yang ada, sehingga berpotensi meningkatkan angka pengangguran, tingginya kriminalitas, dan sebagainya.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya kesejahteraan ekonomi yang memadai, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan hidupnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan aspek kesejahteraan ekonomi dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Ternate pada tahun 2020-2024 memiliki kecenderungan fluktuatif, hal ini diakibatkan oleh dampak Covid-19 di tahun 2020. Pada tahun 2020, LPE Kota Ternate mengalami kontraksi sebesar -1,61%, pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 2,56%, kemudian di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 5,31%, di tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 5,00%, dan di tahun 2024 meningkat menjadi 8,83%.

Di tahun 2024, pertumbuhan ekonomi per sektor menunjukkan bahwa semua sektor memiliki pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2024, terdapat tujuh sektor mengalami pertumbuhan dengan angka di atas 5 persen, yaitu pada sektor: (a) Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar 6,82; (b) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,09%; (c) Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,48%; (d) Informasi dan Komunikasi sebesar 5,64%; (e) Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 15,57%; (f) Real Estate sebesar 6,82%; dan (g) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 14,82%.

Tabel 2.34
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Ternate Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,72	4,88	3,45	4,35	3,93
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,13	0,10	7,40	5,24	4,70
C	Industri Pengolahan	-7,56	-10,67	3,72	3,25	4,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,24	7,06	5,92	4,99	3,95
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,90	5,38	4,24	4,42	6,82
F	Konstruksi	1,48	1,82	3,64	2,35	-0,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-8,93	1,39	6,23	10,72	12,09
H	Transportasi dan Pergudangan	-20,75	0,01	16,40	6,81	7,48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-5,52	5,00	3,45	1,21	4,92
J	Informasi dan Komunikasi	9,97	8,29	6,85	1,36	5,64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,89	9,58	2,24	4,41	15,57
L	Real Estate	-5,01	2,35	1,38	6,43	6,82
M,N	Jasa Perusahaan	-3,66	9,31	5,01	1,01	4,58
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,53	1,40	0,31	1,32	14,82
P	Jasa Pendidikan	3,40	0,77	2,04	2,40	0,79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,59	3,84	0,76	3,95	0,03
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,02	2,51	4,33	2,02	3,79
Produk Domestik Regional Bruto		**- 1,61**	**2,56**	**5,31**	**5,00**	**8,83**

Sumber: Kota Ternate Dalam Angka, 2025
Catatan:
** Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara*

B. Struktur Ekonomi

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Ternate tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, yang terlihat dari peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Ternate selama lima tahun. Peranan terbesar pada struktur perekonomian tahun 2024 adalah pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yakni 25,89% dan sedikit meningkat dibandingkan tahun 2023 yakni 25,56%, kemudian diikuti lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 17,51% meningkat dibandingkan tahun 2023 yakni sebesar 16,70% dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,86%. Sementara peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0 – 8 persen. Struktur ekonomi ini adalah gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35
Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB ADHB Kota Ternate Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,11	4,28	4,27	4,43	4,28
B	Pertambangan dan Penggalian	0,08	0,07	0,08	0,07	0,07
C	Industri Pengolahan	2,70	2,33	2,30	2,31	2,21
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,15	0,15	0,14	0,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07
F	Konstruksi	7,22	7,48	7,46	7,16	6,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24,91	24,58	24,67	25,56	25,89
H	Transportasi dan Pergudangan	13,15	12,83	14,85	15,86	15,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,04	1,05	0,99	0,92	0,88
J	Informasi dan Komunikasi	8,23	8,56	8,32	7,97	7,84
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,35	8,10	8,12	7,79	8,16
L	*Real Estate*	0,23	0,22	0,21	0,20	0,21
M,N	Jasa Perusahaan	0,75	0,80	0,81	0,78	0,76
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	18,96	18,44	17,40	16,70	17,51
P	Jasa Pendidikan	5,30	5,25	4,88	4,79	4,62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,75	3,79	3,53	3,46	3,26
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,00	1,98	1,88	1,79	1,72
Produk Domestik Regional Bruto		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Kota Ternate Dalam Angka, 2025
Catatan:
** Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara*

C. Pertumbuhan PDRB

Indikator utama dalam mengukur pertumbuhan perekonomian suatu wilayah adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2024 PDRB Kota Ternate sudah menggunakan tahun dasar terbaru yaitu tahun 2010. Selain itu, PDRB sudah dirinci menjadi 17 sektor lapangan usaha yang pada perhitungan sebelumnya hanya berdasarkan 9 sektor lapangan usaha.

Nilai PDRB Ternate atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 15,2 triliun rupiah. Secara nominal PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,6 triliun rupiah dari tahun 2023. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Tabel 2.36
PDRB Kota Ternate Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	430,48	469,06	524,64	602,75	651,03
Pertambangan dan Penggalian	7,97	8,13	9,32	10,20	10,85
Industri Pengolahan	283,07	256,04	281,85	313,69	336,57
Pengadaan Listrik dan Gas	15,54	16,66	18,37	19,39	20,52
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,84	8,29	8,84	9,44	10,65
Konstruksi	757,13	821,10	916,03	974,02	993,38
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.610,54	2.696,02	3.028,41	3.476,93	3.937,88
Transportasi dan Pergudangan	1.378,13	1.407,64	1.823,06	2.157,13	2.412,03
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	108,64	114,84	121,86	125,80	134,48
Informasi dan Komunikasi	862,82	939,40	1.021,50	1.084,02	1.192,85
Jasa Keuangan dan Asuransi	770,64	888,90	996,77	1.059,56	1.240,72
Real Estate	23,59	24,23	25,30	27,84	31,21
Jasa Perusahaan	78,75	87,26	99,10	105,53	115,84
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.987,04	2.023,33	2.135,53	2.271,21	2.664,25
Jasa Pendidikan	555,52	576,23	599,52	651,54	702,91
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	393,13	415,71	433,50	471,2	496,25
Jasa Lainnya	209,37	217,33	231,20	242,87	261,10
TOTAL	**10.480,20**	**10.970,17**	**12.274,82**	**13.603,11**	**15.212,53**

Sumber: Kota Ternate Dalam Angka, 2025
*Catatan: * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara*

Berdasarkan harga konstan, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 8,11 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 8,83 triliun rupiah di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2023 Kota Ternate mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 8,83 persen. Pertumbuhan pada tahun 2024 sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2023.

Selama lima tahun terakhir struktur perekonomian Kota Ternate didominasi oleh lima kategori lapangan usaha, yaitu: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi; dan Jasa Keuangan dan Asuransi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Ternate.

Tabel 2.37
PDRB Kota Ternate Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	256,97	269,52	278,82	290,94	302,38
Pertambangan dan Penggalian	4,94	4,95	5,32	5,59	5,86
Industri Pengolahan	210,98	188,46	195,47	201,83	210,54
Pengadaan Listrik dan Gas	11,61	12,43	13,16	13,82	14,37
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,17	6,50	6,78	7,08	7,56
Konstruksi	515,04	524,43	543,50	556,27	553,03
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.760,41	1.784,91	1.896,03	2.099,36	2.353,13
Transportasi dan Pergudangan	887,80	887,92	1.033,57	1.103,93	1.186,55
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	77,50	81,38	84,19	85,20	89,39
Informasi dan Komunikasi	774,76	839,01	896,51	908,72	960,00
Jasa Keuangan dan Asuransi	513,97	563,22	575,83	601,21	694,83
Real Estate	16,69	17,08	17,32	18,43	19,69
Jasa Perusahaan	55,36	60,52	63,55	64,19	67,12
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.309,93	1.328,33	1.332,47	1.350,02	1.550,06
Jasa Pendidikan	336,26	338,85	345,75	354,07	356,85
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	265,24	275,43	277,51	288,49	288,58
Jasa Lainnya	154,50	158,37	165,23	168,57	174,96
TOTAL	**7.158,13**	**7.341,33**	**7.731,00**	**8.117,71**	**8.834,89**

Sumber: Kota Ternate Dalam Angka, 2025
*Catatan: * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara*

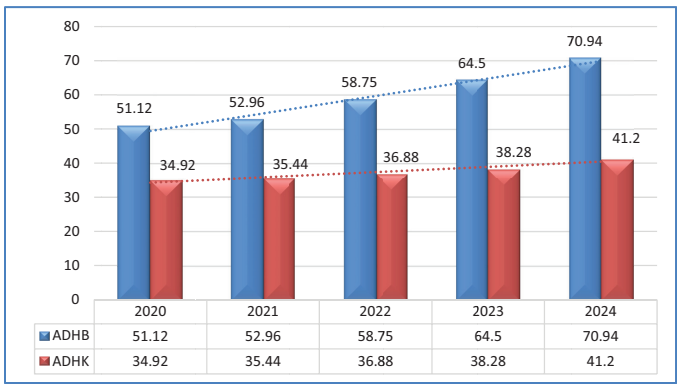
Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh kenaikan produksi barang dan jasa pada suatu wilayah tersebut pada tahun tertentu. Jika kenaikan produksi barang dan jasa pada tahun tertentu lebih tinggi dari tahun sebelumnya, maka dikatakan terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah digunakan data PDRB harga konstan, hal ini untuk menghindari terjadinya perubahan harga.

D. Nilai PDRB per Kapita

PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB merupakan suatu ukuran produktivitas yang mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Ternate pada tahun 2024 diperkirakan sebesar 70,94 juta rupiah atau meningkat dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 64,5 juta rupiah.

PDRB per kapita yang mengalami kenaikan dan pertumbuhan ekonomi yang terus berada pada posisi positif pada tahun 2024, secara langsung telah berdampak pada perbaikan kemampuan atau daya beli masyarakat, yang berpengaruh terhadap permintaan kebutuhan akan barang dan jasa. Pemenuhan yang tidak berimbang dengan permintaan sangat berdampak pada terjadinya inflasi di Kota Ternate.

Grafik 2.11
PDRB per Kapita Kota Ternate Tahun 2020– 2024 (Juta Rp)



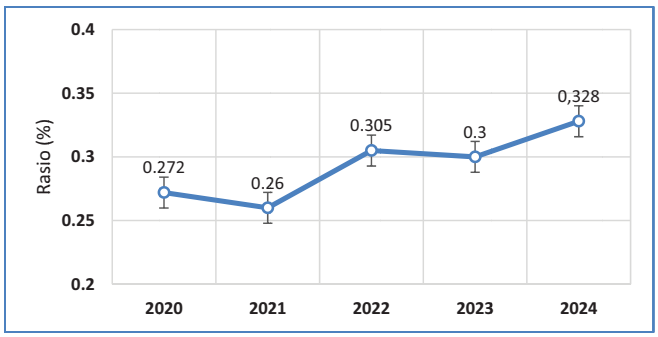
	2020	2021	2022	2023	2024
ADHB	51.12	52.96	58.75	64.5	70.94
ADHK	34.92	35.44	36.88	38.28	41.2

Sumber: Maluku Utara dalam Angka, 2025

E. Rasio Gini

Rasio Gini atau Koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Rasio gini pada tahun 2020-2024 Kota Ternate dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.12
Rasio Gini Kota Ternate Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Maluku Utara, 2025

F. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin (*head count index*) menurut konsep Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK), yang merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Rentang 2020-2024, tingkat kemiskinan Kota Ternate yang diukur berdasarkan persentase penduduk miskin mengalami fluktuatif di setiap tahunnya dan mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 3,14%. Menurut jumlah penduduk miskin di Kota Ternate mencapai 7,88 ribu jiwa penduduk di tahun 2024.

Tabel 2.38
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Kota Ternate Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Kemiskinan (%)	Indeks Kedalaman (P1)	Indeks Keparahan (P2)	Garis Kemiskinan (rupiah/ kapita/ bulan)
2020	8,18	3,46	0,38	0,10	595.553
2021	8,45	3,55	0,53	0,18	629.643
2022	7,54	3,11	0,41	0,10	661.459
2023	8,36	3,39	0,56	0,13	668.074
2024	7,88	3,14	0,78	0,25	701.354

Sumber: Kota Ternate dalam Angka, 2025

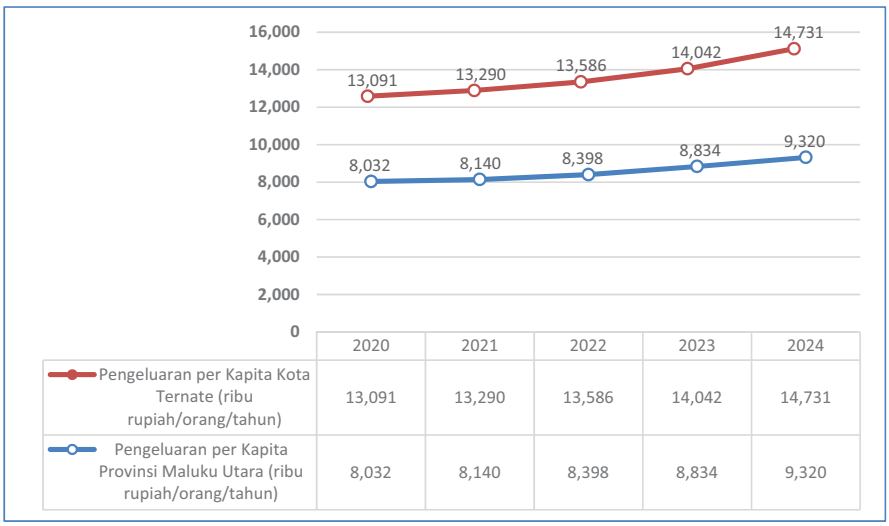
Tingkat kemiskinan Kota Ternate mengalami penurunan, namun pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan sebesar 0,78% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 0,56%, artinya masih ada perbedaan pengeluaran penduduk terhadap garis kemiskinan, terhadap Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada tahun 2024 berada pada angka 0,25% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 berada pada angka 0,13% artinya masih terdapat perbedaan pendapatan antar penduduk terhadap garis kemiskinan.

Maka strategi yang tepat tidak hanya sekadar menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga mengurangi *gap* (kesenjangan) pengeluaran dan pendapatan antar penduduk miskin, meliputi peningkatan pendapatan rumah tangga miskin melalui program padat karya produktif dan peningkatan keterampilan serta penguatan sektor usaha mikro; peningkatan daya beli dan akses kebutuhan dasar melalui subsidi tepat sasaran dan program ketahanan pangan keluarga serta akses pendidikan dan kesehatan yang terjangkau; pengurangan ketimpangan antar penduduk miskin melalui pendekatan pemberdayaan berbasis wilayah dan skema jaminan sosial adaptif; dan kolaborasi dan inovasi kebijakan melalui kemitraan pemerintah dan swasta.

G. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita menunjukan tingkat kesejahteraan penduduk Kota Ternate terus meningkat sepanjang 2020-2024. Pada tahun 2020 pengeluaran per kapita Kota Ternate sebesar Rp. 13.091.000, kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 13.290.000. Pada tahun 2022 sampai tahun 2024 terus mengalami peningkatan di mana pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 14.731.000.

Grafik 2.13
Perbandingan Pengeluaran per Kapita Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran per Kapita Kota Ternate (ribu rupiah/orang/tahun)	13,091	13,290	13,586	14,042	14,731
Pengeluaran per Kapita Provinsi Maluku Utara (ribu rupiah/orang/tahun)	8,032	8,140	8,398	8,834	9,320

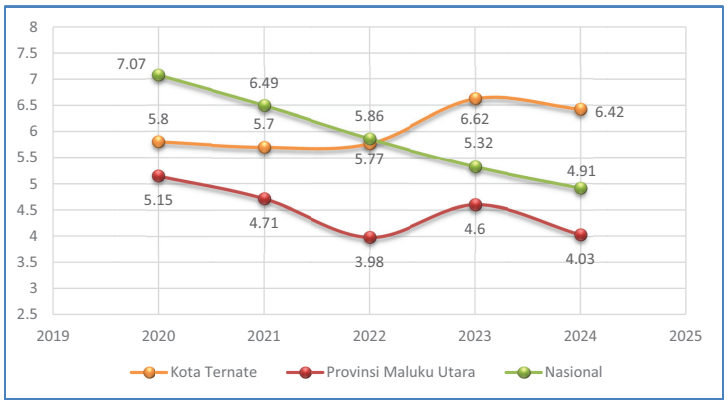
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2025

H. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Kemajuan perekonomian suatu daerah, ditandai pula dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja baru, karena salah satu indikator sosial untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam hal kesejahteraan penduduk adalah indikator ketenagakerjaan. Dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas tidak mampu menyerap pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Pengangguran merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan angka pengangguran, karena indikator tersebut merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja.

Di lain sisi Kota Ternate adalah sebuah kota terbuka yang menjadi pintu masuk para pencari kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan, untuk kemudian mendaftarkan diri untuk memperoleh kartu pencari kerja (AK.1) dan tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate, sehingga berkontribusi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Oleh karena itu optimalisasi informasi bursa lapangan kerja dan peningkatan kapasitas tenaga kerja berdasarkan kebutuhan lapangan kerja, dan diharapkan penyerapan tenaga kerja dapat tercapai dengan baik. Secara umum, dalam 5 (lima) tahun terakhir, capaian TPT Kota Ternate menunjukkan besaran yang fluktuatif di mana pada tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Ternate sebesar 6,42 lebih rendah dibandingkan TPT tahun 2023.

Grafik 2.14
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dan Indonesia Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara dan BPS Nasional, 2025 (diolah)

Kota Ternate sebagai bagian dari wilayah Provinsi Maluku Utara tidak terlepas dari adanya fenomena pembukaan lapangan pekerjaan skala besar pada sektor tambang yang berlokasi pada kabupaten lain di luar Ternate. Hal tersebut menjadi daya tarik oleh sebagian angkatan kerja yang sedang membutuhkan pekerjaan. Beralihnya sebagian angkatan kerja ke wilayah pertambangan tersebut berdampak terhadap penurunan jumlah pengangguran dan bahkan terhadap jumlah angkatan kerja secara lebih luas.

Tabel 2.39
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Status Pekerjaan Utama Jenis Kelamin di Kota Ternate, 2024

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Berusaha sendiri	16.299	10.711	27.010
Berusaha dibantu buruh tidak tetap / buruh tidak bayar	3.304	3.555	6.859
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	2.595	626	3.221
Buruh/Karyawan/Pegawai	31.467	19.157	50.624
Pekerja bebas	474	347	821
Pekerja keluarga/tak bayar	1.974	4.034	6.008
Jumlah	**56.113**	**38.430**	**94.543**

Sumber: Kota Ternate Dalam Angka, 2025

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menunjukan tren perkembangan di Kota Ternate, pada tahun 2020 berada pada angka 7,8% dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2024 sebesar 11%. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan jumlah penduduk pada usia 15 tahun ke atas di Kota Ternate yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi mengalami peningkatan, oleh karena itu semakin tinggi proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menunjukan bahwa kualitas sumber daya manusia di Kota Ternate cukup baik. Kondisi ini juga mempengaruhi peluang penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor tertentu berdasarkan kualifikasi pendidikan di Kota Ternate.

Tabel. 2.40
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	7,8	8,00	8,1	8,2	11

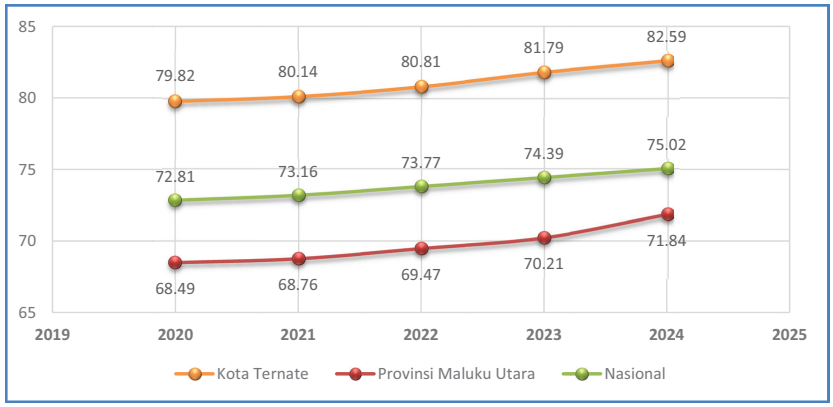
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate, 2025

I. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia, yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Perkembangan nilai IPM Kota Ternate setiap tahun, menunjukkan kemajuan pembangunan manusia Kota Ternate sangat signifikan. Berdasarkan konsep BPS, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan; kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 4 (empat) indikator, yakni angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan paritas daya beli.

IPM Kota Ternate tahun 2024 adalah sebesar 82,59 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2023 sebesar 81,79 atau naik sebesar 0,8 poin. Jika diamati, angka IPM Kota Ternate terus meningkat dari tahun 2020 sampai 2024. Tercatat IPM Kota Ternate tahun 2020 sebesar 79,82 dan terus meningkat hingga tahun 2024 angka IPM Kota Ternate menjadi 82,59. Dan dalam lingkup Provinsi Maluku Utara, IPM Kota Ternate masih menduduki posisi pertama selama 5 (lima) tahun terakhir dibandingkan IPM kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Bahkan IPM Kota Ternate lebih tinggi dibanding IPM Provinsi Maluku Utara. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penduduk Kota Ternate lebih maju di bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi dari kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku Utara.

Grafik 2.15
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ternate Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate dalam Angka, 2025

2.2.2 Kesehatan Untuk Semua

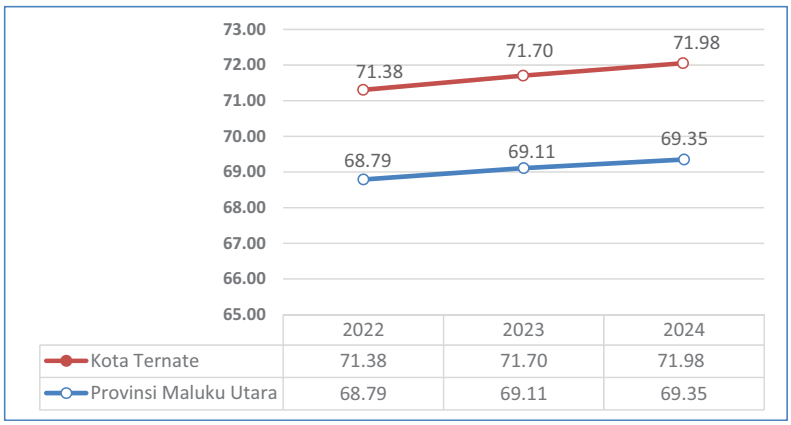
A. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam kurun waktu 2022-2024, Usia Harapan Hidup di Kota Ternate semakin meningkat dari 71,38 pada tahun 2020 menjadi 71,98 di tahun 2024, artinya secara rata-rata anak yang dilahirkan di Kota Ternate dapat bertahan hidup hingga mencapai usia 72 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat di Kota Ternate secara umum sudah semakin membaik.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi UHH dan bersifat kompleks yaitu aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek sosial dan aspek lingkungan. Faktor dominan yang mempengaruhi UHH adalah aspek kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diperhatikan serta menjadi investasi di masa yang akan datang. Dalam rangka mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, maka diperlukan berbagai upaya paradigma sehat melalui kegiatan promotif dan preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan termasuk pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan lintas sektor.

Perwujudan peningkatan UHH sangat dipengaruhi oleh faktor kesehatan ibu, bayi dan balita; perbaikan gizi; perubahan perilaku; pencegahan penyakit menular dan tidak menular; kesehatan lingkungan serta faktor pelayanan kesehatan dengan pendekatan *continuum of care* atau asuhan pelayanan kesehatan berkesinambungan yang komprehensif di sepanjang siklus kehidupan mulai dari sejak masa kehamilan, bayi, anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia (lansia) yang melibatkan peran keluarga, komunitas, fasilitas kesehatan primer (Puskesmas) dan fasilitas kesehatan rujukan (Rumah Sakit).

Grafik 2.16
Perbandingan Usia Harapan Hidup Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2022-2024



Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2025

B. Indeks Keluarga Sehat

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) adalah suatu pendekatan pelayanan kesehatan yang menggali faktor risiko terjadinya penyakit dalam suatu keluarga dan menilai status kesehatan keluarga, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Indeks Keluarga Sehat (IKS). Nilai IKS ini merupakan akumulasi dari nilai 12 indikator PIS PK dan dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yakni Keluarga Sehat bila nilai IKS > 0,8, Keluarga Pra Sehat bila nilai IKS 0,5 - 0,8 dan Keluarga Tidak Sehat bila nilai IKS < 0,5. Berikut ini adalah indikator PIS PK: Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB), Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif, Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, Penderita Tuberkulosis Paru mendapat pengobatan secara teratur, Penderita Hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak terlantarkan, Anggota keluarga tidak ada yang merokok, Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Keluarga mempunyai akses sarana air bersih, Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Berdasarkan data yang dianalisis pada tahun 2022 ada 8 (delapan) indikator yang capaiannya masih di bawah 80% atau 0,007, pada tahun 2023 dan 2024 ada 10 (sepuluh) indikator yang capaiannya di bawah 80%, terjadi penurunan capaian sehingga hasil IKS untuk Kota Ternate berada pada angka 0,005% di mana angka tersebut berdasarkan nilai IKS maka Kota Ternate termasuk dalam kategori Tidak Sehat. Oleh karena itu perlu didorong untuk mendukung capaian Indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS) tahun berikutnya sehingga Kota Ternate masuk kategori keluarga sehat.

Tabel 2.41
Indeks Keluarga Sehat Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Keluarga Sehat	n/a	0,06	0,007	0,005	0,005

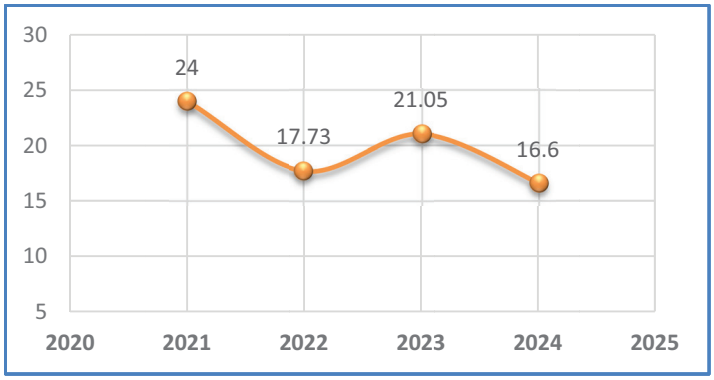
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ternate, 2025

C. Angka Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Penyebab utama terjadinya stunting adalah rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral serta buruknya keragaman pangan dan sumber protein.

Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) memberikan gambaran status gizi balita (stunting, *wasting, underweight, overweight*) dan determinannya meliputi indikator intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif menggunakan metode *two stage stratified sampling* secara potong lintang (*cross-sectional*). Untuk tahun 2019 dan 2020 Kota Ternate belum dijadikan lokus survei, sehingga pelaksanaan survei prevalensi stunting di Kota Ternate baru dimulai pada tahun 2021-2024. Untuk perkembangan hasil stunting Kota Ternate dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.17
Angka Stunting Kota Ternate Tahun 2021-2024



Sumber: Survei Status Gizi Indonesia, 2025

D. Bayi Baru Lahir Bergizi Buruk

Gizi buruk yang dialami oleh bayi baru lahir dapat menjadi suatu indikator kesejahteraan dan kualitas kesehatan jumlah bayi baru lahir gizi buruk di Kota Ternate 2024 sebesar 40 bayi. Jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan jumlah baik gizi buruk pada tahun 2023 yang sebesar 46 bayi.

Tabel 2.42
Jumlah Bayi Lahir dan Balita Gizi Buruk
di Kota Ternate Tahun 2020-2024

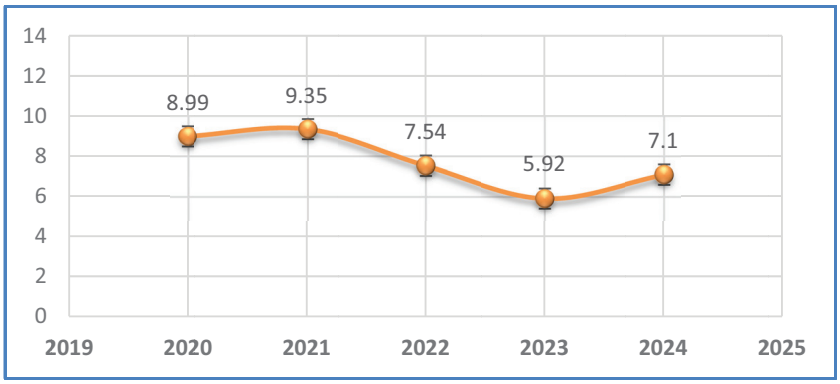
Tahun	Jumlah Bayi Bergizi Buruk	Jumlah Bayi Lahir
2020	74	4.559
2021	56	4.588
2022	34	4.442
2023	46	2.032
2024	40	3.712

Sumber: Kota Ternate dalam Angka, 2025

E. Angka Kesakitan

Angka Kesakitan (Morbiditas) merupakan angka yang menunjukan tingkat kesakitan akibat gangguan struktur maupun fungsi tubuh seseorang yang merupakan derajat sakit, cedera maupun gangguan pada populasi yang merupakan penyimpangan dari status sehat atau kesejahteraan suatu masyarakat. Angka Morbiditas merupakan indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat umum yang dilihat dari persentase penduduk dengan keluhan kesehatan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan.

Grafik 2.18
Angka Kesakitan Kota Ternate Tahun 2020-2024



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Ternate, 2025

Penyakit Tidak Menular (PTM) saat ini menjadi tantangan besar bagi pembangunan kesehatan di Kota Ternate. PTM umumnya berlangsung dalam jangka panjang, memerlukan biaya penanganan yang tinggi, serta berdampak signifikan terhadap kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Beberapa faktor risiko seperti pola hidup tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, konsumsi makanan tidak seimbang, serta paparan lingkungan turut berkontribusi terhadap meningkatnya kasus PTM. Berikut daftar penyakit tidak menular tahun 2024 per Puskesmas di Kota Ternate.

Tabel 2.43
Pola Penyakit Tidak Menular per Puskesmas Kota Ternate Tahun 2024

No	Puskesmas	Penyakit Tidak Menular		
		ISPA	Hipertensi	Diabetes Melitus
1	Kota Ternate	1.354	609	554
2	Kalumpang	1.128	424	330
3	Kalumata	2.247	1.552	175
4	Siko	3.025	186	148
5	Gambesi	1.200	370	103
6	Bahari Berkesan	1.003	113	137
7	Sulamadaha	1.258	404	166
8	Jambula	1.654	468	130
9	Moti	186	49	38
10	Mayau Batang Dua	359	351	53
11	Faudu Hiri	7.228	36	38

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ternate, 2025

Penyakit menular masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan kesehatan di Kota Ternate. Upaya pengendalian penyakit menular memerlukan perhatian serius dan penanganan terpadu, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap derajat kesehatan masyarakat, produktivitas kerja, dan kualitas hidup.

Tabel. 2.44
Penyakit Menular Kota Ternate Tahun 2020-2024

No	Penyakit Menular	Tahun					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk	77	73	102	80	136	
2	Angka Penemuan Kusta Baru per 100.000 Penduduk	42,8	44,4	39	68,3	45,7	
3	Jumlah Kasus Baru HIV	81	70	135	107	202	

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ternate, 2025

F. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga medis adalah profesional bidang kesehatan dengan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memiliki kewenangan melakukan tindakan kesehatan, sedangkan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan tinggi di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Ketersediaan dokter per satuan penduduk di Kota Ternate, dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat. Kurun waktu 2020-2024, dokter umum di Kota Ternate lebih besar dibandingkan dokter spesialis dan dokter gigi. Tenaga paramedis dibutuhkan masyarakat sebagai penunjang aktivitas pelayanan kesehatan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, tenaga paramedis yang terdiri dari perawat, bidan dan bidang kefarmasian dan gizi, kesehatan masyarakat dan lingkungan serta laboratorium. Keberadaan tenaga paramedis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat.

Tabel. 2.45
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Ternate Tahun 2024

Kecamatan	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi
Pulau Ternate	3	17	20	3	1
Moti	2	19	23	3	3
Pulau Batang Dua	3	12	20	2	4
Pulau Hiri	3	12	21	3	4
Ternate Barat	3	18	25	3	5
Ternate Selatan	7	27	46	12	17
Ternate Tengah	19	82	119	17	29
Ternate Utara	6	38	62	7	22
Jumlah	**46**	**225**	**336**	**50**	**85**

Sumber: Kota Ternate dalam Angka, 2025

G. Jaminan Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Dalam pembangunan kesehatan tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Salah satu upaya untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal adalah melalui pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat, jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Peningkatan ketersediaan akses pelayanan kesehatan, salah satunya adalah melalui pelayanan kesehatan gratis pada tingkat pertama atau Puskesmas, hal ini dilakukan untuk menjamin setiap warga Kota Ternate mendapat pelayanan masyarakat.

Grafik 2.19
Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan
Kota Ternate Tahun 2020-2024



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Ternate, 2025

H. Fasilitas Kesehatan

Penyediaan fasilitas kesehatan umum seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, termasuk tenaga kesehatan baik dari segi jumlah maupun kualitas serta pusat pelayanan lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Pemerintah Kota Ternate telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Ternate, di antaranya dengan membangun berbagai fasilitas kesehatan yang menyebar di setiap kecamatan.

Tabel. 2.46
Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Kota Ternate Tahun 2024

Kecamatan	Rumah Sakit	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu
Pulau Ternate	-	-	1	2
Moti	-	-	1	1
Pulau Batang Dua	-	-	1	2
Pulau Hiri	-	-	1	1
Ternate Barat	-	-	1	-
Ternate Selatan	1	5	2	3
Ternate Tengah	4	1	2	1
Ternate Utara	2	1	2	2
Jumlah	**7**	**7**	**11**	**12**

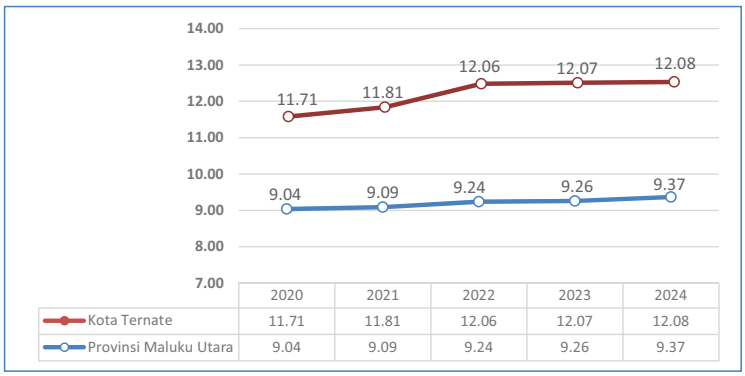
Sumber: Kota Ternate dalam Angka, 2025

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

A. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Ternate dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami peningkatan yang signifikan. Gambaran angka rata-rata lama sekolah di Kota Ternate pada tahun 2020 berada pada angka 11,71 tahun, pada tahun 2021 cenderung meningkat 11,81 tahun, kemudian pada tahun 2022 angka rata-rata lama sekolah sedikit mengalami peningkatan sebesar 12,06 tahun, di tahun 2023 sebesar 12,07 tahun dan tahun 2024 sedikit meningkat menjadi 12,08 tahun. Angka rata-rata lama sekolah tahun 2020-2024 menunjukan peningkatan dan mencapai target 12 tahun yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama dokumen ini. Angka rata-rata lama sekolah Kota Ternate masih lebih baik dibandingkan capaian kab/kota di Provinsi Maluku Utara.

Grafik 2.20
Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 (tahun)

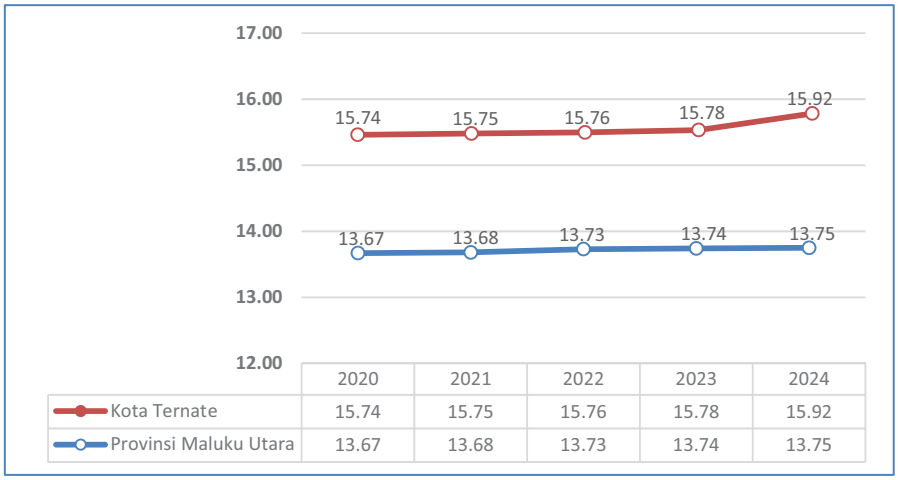


Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2025

B. Harapan Lama Sekolah

Salah satu variabel dari komponen IPM adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Ternate selama lima tahun terakhir berada di atas Provinsi Maluku Utara dan cenderung meningkat di tiap tahunnya. Pada tahun 2024 angka Harapan Lama Sekolah Kota Ternate sebesar 15,92 tahun, artinya bahwa penduduk Kota Ternate yang berumur 7 tahun ke atas diharapkan masih bersekolah selama minimal 15 tahun ke depan.

Grafik 2.21
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2025

C. Angka Putus Sekolah

Tingkat keberhasilan Program Wajib Belajar 12 tahun salah satunya dapat diukur melalui Angka Putus Sekolah. Angka putus sekolah menggambarkan murid yang tidak lagi melanjutkan sekolah karena alasan tertentu. Alasan paling menonjol murid tidak bisa melanjutkan sekolah biasanya adalah alasan ekonomi atau ketidakmampuan orang tua membiayai sekolah anaknya. Alasan yang lain adalah karena minat anak untuk bersekolah kurang karena faktor lingkungan sosial.

Tabel. 2.47
Angka Putus Sekolah Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Putus Sekolah SD/MI	0	0	0	0	0,25
Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0	0	0	0	0,33

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Ternate, 2025

D. Angka Literasi/Numerasi

Literasi dan Numerasi memiliki peran yang sama dalam mendukung capaian rapor pendidikan, literasi menggambarkan bagaimana kemampuan siswa dalam membaca, memahami tekstual dan kecakapan dan pemecahan masalah, sedangkan numerasi lebih kepada kemampuan menghitung dan memahami aljabar. Kemampuan literasi dan numerasi dapat dinilai melalui Asesmen Nasional Berbasis Komputer yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek.

Tabel 2.48
Angka Literasi/Numerasi Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Literasi	n/a	1,56	47,89	49,72	58,02
Angka Numerasi	n/a	1,45	34,17	39,67	53,99

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Ternate, 2025

Kota Ternate pada periode 2 (dua) tahun terakhir sedikit mengalami peningkatan yaitu untuk literasi tahun 2023 berada pada angka 49,72% sedangkan pada tahun 2024 mengalami kenaikan yaitu 58,02%, namun masih berada pada kategori belum tuntas karena di bawah 60%. Sedangkan untuk numerasi masih perlu ditingkatkan lagi kemampuan numerasinya karena berada pada 39,67% pada tahun 2023 dan tahun 2024 meningkat menjadi 53,99%, masih dibutuhkan kebijakan di bidang pendidikan terutama mendukung capaian rapor pendidikan.

E. Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, non formal, dan informal.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan: agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional dan seni. Berdasarkan data dan informasi angka PAUD sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.49
Angka Partisipasi Anak Usia Dini (PAUD) Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi PAUD	90	60	72	27,50	35,95

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Ternate, 2025

F. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah kegiatan perpustakaan yang berupa sensus atau pendataan untuk mengetahui tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangunan literasi masyarakat yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat dalam upaya membina dan membudayakan budaya membaca bagi masyarakat.

Tabel 2.50
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	n/a	n/a	72,97	68,51	72,16

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Ternate, 2025

Di Kota Ternate ada 7 (tujuh) Indikator untuk mengukur Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kota Ternate yaitu: Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi Perpustakaan, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat di Perpustakaan, Perpustakaan yang dibina sesuai SNP, Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan dan Anggota Perpustakaan, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Ternate pada tahun 2023 sebesar 68,51% sedangkan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 72,16%. Kondisi ini perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intens dengan berbagai pola agar mendorong kecenderungan masyarakat untuk gemar membaca dan menyediakan dan mengembangkan pojok-pojok literasi membaca bagi masyarakat pada tiap-tiap kelurahan.

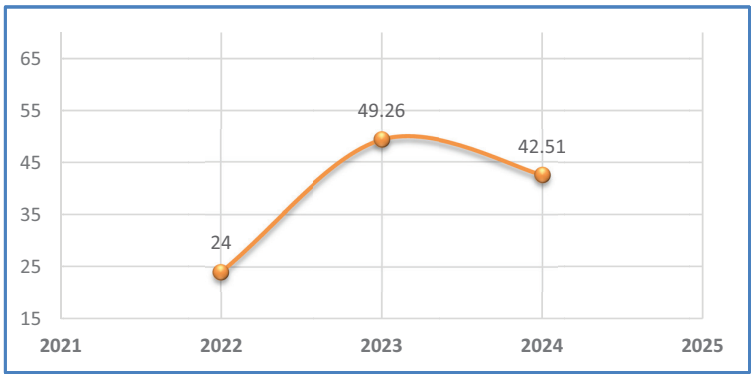
G. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Transformasi digital tidak hanya sekadar proses adopsi teknologi, tetapi juga mencakup perubahan yang lebih luas pada pola pikir, cara kerja, dan interaksi masyarakat. Transformasi digital telah menjadi kekuatan utama yang mendorong perubahan di berbagai aspek kehidupan, dari ekonomi, pendidikan, hingga layanan publik.

Transformasi digital berperan penting dalam mewujudkan negara yang berdaya saing global dengan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis teknologi. Dalam konteks ini, masyarakat digital menjadi aktor utama yang memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk menciptakan inovasi, meningkatkan produktivitas, dan memperluas akses ke peluang. Keberhasilan transformasi digital memerlukan pengukuran yang tepat untuk memahami kondisi masyarakat digital secara menyeluruh.

Indeks Masyarakat Digital Indonesia atau IMDI hadir sebagai instrumen strategis untuk memetakan tingkat adopsi teknologi, literasi digital, pemberdayaan ekonomi digital serta kesenjangan yang masih ada. Indeks ini tidak hanya menggambarkan pencapaian, tetapi juga memberikan arahan bagi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengidentifikasi tantangan serta peluang. IMDI merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Pengukuran IMDI telah dilaksanakan sejak tahun 2022, dan dilaksanakan setiap tahunnya.

Grafik 2.22
Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kota Ternate Tahun 2022-2024



Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, 2025

2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

A. Jaminan Ketenagakerjaan

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan fokus pada beberapa jaminan seperti Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemutusan Hubungan Kerja. Untuk Kota Ternate sejak tahun 2020 melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate melakukan validasi data Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada sektor formal dan informal serta masyarakat berada pada angka 25% dan kemudian meningkat pada tahun 2024 sebesar 95%. Kenaikan tersebut karena ada ketersediaan anggaran yang diperuntukan bagi para kelompok pekerja rentan di Kota Ternate, demikian halnya dengan beberapa sektor formal dan informal yang menyediakan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Tabel 2.51
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota (%)	25	60	70	90	95

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate, 2025

B. Penyandang Disabilitas Bekerja

Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas yang bekerja di sektor informal cukup rendah seperti pada tahun 2020 hanya berada pada angka 0,01%, dan pada tahun 2024 sedikit mengalami peningkatan pada angka 0,1% dari total jumlah disabilitas yang bekerja di sektor formal. Oleh karena itu peluang sebesar-besarnya perlu disediakan untuk kelompok rentan tersebut agar bisa terserap pada sektor formal.

Tabel. 2.52
Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	0,01	0,01	0,1	0,1	0,1

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate, 2025

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

A. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks kerukunan umat beragama (IKUB) adalah disandarkan pada tiga dimensi, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima dan menghargai perbedaan.

Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi hak dan kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Selanjutnya kerjasama, menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dinilai berdasarkan survey melalui kuisioner dan datanya dianalisis berdasarkan dimensi serta menghasilkan skoring antara 0 – 100. Untuk Kota Ternate IKUB-nya sudah cukup baik berada pada skoring tinggi atau 80% pada tahun 2024.

Tabel 2.53
Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Ternate Tahun 2020-2024

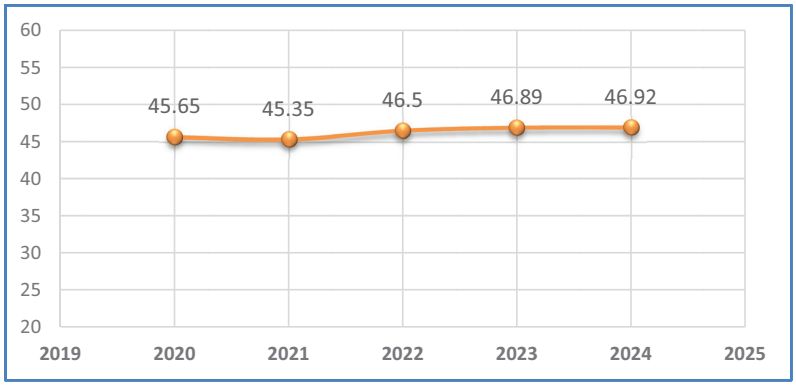
Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kerukunan Umat Beragama	67	70	73	75	75,03

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Ternate, 2025

B. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat dijadikan sebagai landasan rumusan kebijakan bidang kebudayaan serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam hal kebijakan dan kebutuhan data dalam mendukung analisis IPK di Kota Ternate. Instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. 7 (tujuh) dimensi tersebut diukur melalui 31 indikator. Di Kota Ternate ketersediaan data sektoral untuk menganalisis IPK masih terbatas sehingga tidak semua dianalisis terutama pada 31 indikator hanya 25 yang dianalisis dan hasilnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun walaupun dengan keterbatasan data sektoral tetapi bisa dianalisis. Kota Ternate pada tahun 2020 capaiannya pada posisi 45,65 masuk kategori sedang, untuk tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 46,92.

Grafik 2.23
Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Ternate Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Ternate, 2025

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku dan karya cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Pembangunan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru di era globalisasi. Pengaruh budaya global dapat disesuaikan dengan identitas nasional yang mengandung nilai-nilai luhur yang sesuai dengan falsafah Pancasila.

Budaya literasi adalah merupakan salah satu indikator untuk mengukur capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan. Budaya literasi memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian bangsa melalui nilai-nilai budaya yang ada sejak lama terbentuk. Hal ini dilakukan untuk menangkal berbagai dinamika perubahan dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi yang maju secara cepat mampu merubah pola pikir masyarakat ke arah apatis dan hedonisme yang bertentangan dengan karakter bangsa maupun *adat se atorang* yang dimiliki Kota Ternate.

Ada tiga hal penting pembudayaan literasi yang perlu dilakukan untuk membentuk karakter, inovasi dan kreatifitas dalam mencapai pembangunan manusia dan menjadikan budaya sebagai jati diri bangsa sebagai berikut:

1. Pembudayaan Literasi Masyarakat yang ditujukan untuk pengembangan kecakapan hidup dan pengetahuan antara lain: Pendidikan literasi untuk orang tua (dewasa); Penyusunan panduan literasi di perpustakaan; Penguatan kompetensi literasi pustakawan/literasi; Peningkatan layanan perpustakaan/TBM; Pengembangan Perpustakaan berbasis inklusi sosial; Peningkatan akses dan konten literasi masyarakat.
2. Pembudayaan Literasi Keluarga merupakan pondasi awal dalam membentuk karakter anak pada usia dini antara lain: Penyusunan panduan literasi di keluarga: *pseudo-reading*, membacakan buku, mendongeng; Pemberian paket buku untuk bayi; Penguatan kemampuan *pseudo reading* untuk bayi; Peningkatan kemampuan membaca buku dengan suara keras/nyaring (*reading aloud*); Peningkatan kemampuan mendongeng; dan Penyediaan konten literasi keluarga.
3. Pembudayaan Literasi Sekolah ditujukan untuk mendukung pembelajaran dengan mengembangkan pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis Peserta Didik antara lain: Penyusunan panduan literasi dalam pembelajaran; Penguatan kompetensi literasi guru; Peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran berbasis literasi; Peningkatan hasil asesmen literasi; Pengembangan Perpustakaan Sekolah; dan Peningkatan layanan Perpustakaan Sekolah.

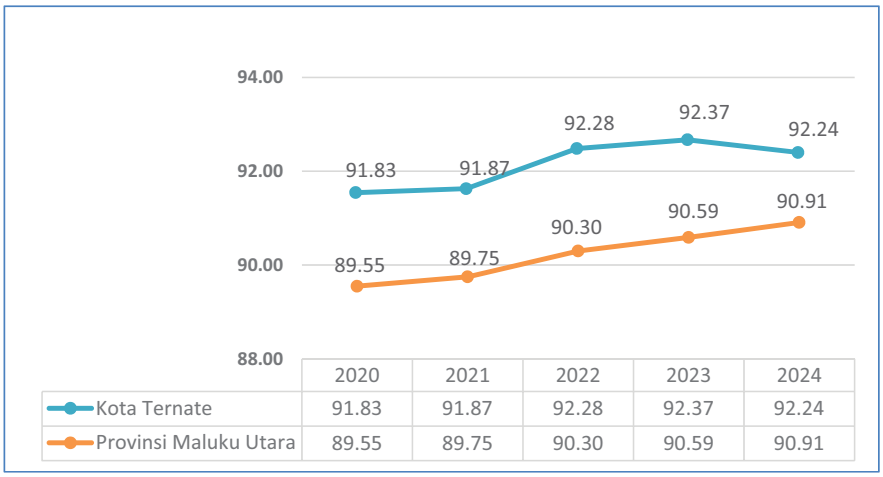
2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif merupakan 3 (tiga) aspek penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Karena dapat menjadi pondasi bagi pembangunan karakter dan kemampuan individu, untuk memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam masyarakat tanpa memandang latar belakang.

A. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG.

Grafik 2.24
Perbandingan IPG Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Ternate	91.83	91.87	92.28	92.37	92.24
Provinsi Maluku Utara	89.55	89.75	90.30	90.59	90.91

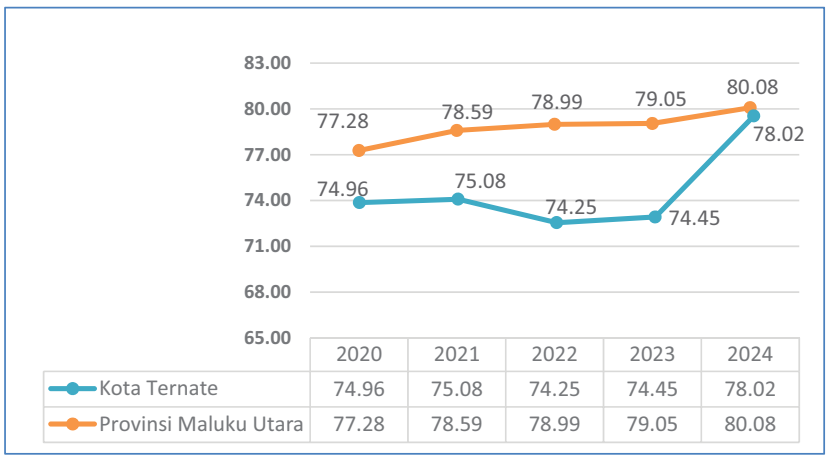
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025

Perkembangan IPG Kota Ternate tahun 2020-2024 masih berada di atas rata-rata Provinsi Maluku Utara. Pada tahun 2024, IPG Kota Ternate sebesar 92,24 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2023 sebesar 91,37. Namun hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia perempuan di Kota Ternate masih dalam kondisi baik khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan.

B. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 sampai dengan 2024, nilai IDG Kota Ternate berfluktuasi. Pada tahun 2020, nilai IDG Kota Ternate di angka 74,96. Pada tahun 2021 meningkat di angka 75,08, di tahun 2022 berada di angka 74,25, kemudian di tahun 2023 meningkat menjadi 74,45, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 78,02. Jika dibandingkan dengan Provinsi Maluku Utara sepanjang tahun 2020-2024 nilai IDG Kota Ternate masih di bawah rata-rata Provinsi Maluku Utara. Ini dapat terlihat pada grafik di bawah.

Grafik 2.25
Perbandingan IDG Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Ternate	74.96	75.08	74.25	74.45	78.02
Provinsi Maluku Utara	77.28	78.59	78.99	79.05	80.08

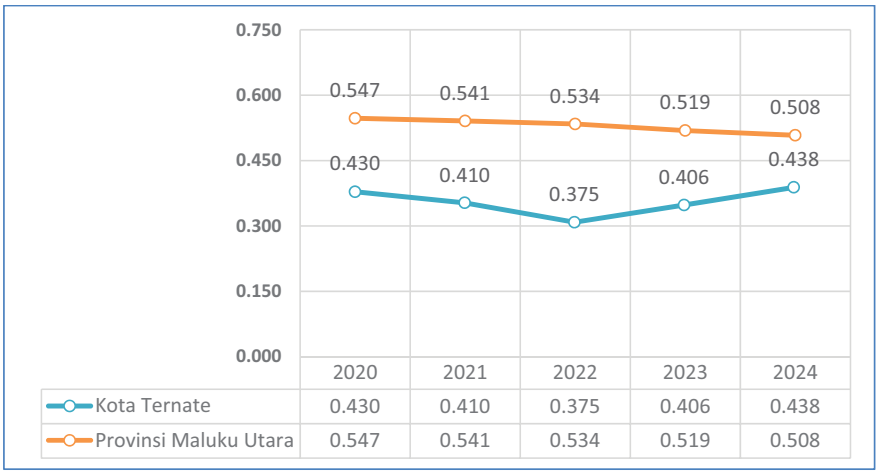
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025

C. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Ketimpangan gender Kota Ternate sejak tahun 2019 hingga 2023 cenderung fluktuatif dan sedikit meningkat di tahun 2023. Sejak tahun 2019, IKG Kota Ternate sebesar 0,475 poin, turun di tahun 2020 sebesar 0,430 kemudian menurun sampai di tahun 2022 sebesar 0,375. Hal ini mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin membaik.

Di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2023, ketimpangan gender paling rendah dicapai oleh Kota Ternate diikuti oleh Tidore Kepulauan, Halmahera Barat, Pulau Morotai, dan Halmahera Tengah. Sebanyak 5 (lima) kabupaten/kota mengalami penurunan ketimpangan gender. Ternate mengalami penurunan ketimpangan gender paling tinggi, terutama disebabkan oleh perbaikan indikator persentase perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas yang meningkat lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 7,60 persen poin berbanding 1,37 persen poin.

Grafik 2.26
Perbandingan IKG Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

D. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga adalah mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) diukur melalui pendataan keluarga (PK) yang dilakukan oleh BKKBN dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah yang memiliki Tupoksi Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kota dalam Provinsi Maluku Utara yang dilakukan sejak tahun 2020, maka hasilnya tergambar pada tabel di bawah. Pada tahun 2020 IPKK Kota Ternate 52,90% sedangkan pada tahun 2024 mengalami peningkatan 66,75% kondisi ini menunjukan bahwa IPKK Kota Ternate mengalami peningkatan yang cukup baik dibandingkan Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Maluku Utara.

Tabel 2.54
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	52,90	53,92	55,07	66,40	66,75

Sumber: Hasil PK 2024 oleh BKKBN Provinsi Maluku Utara, 2025

E. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup dan tumbuh berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, inti dari perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak yaitu hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang dan hak berpartisipasi. Di Kota Ternate setiap tahun mengikuti penilaian Kota Layak Anak dengan skoring mencapai 780 dan masuk kategori Nindiya, ini menunjukan bahwa upaya peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak terus dilakukan. Untuk Indeks Perlindungan Anak merujuk pada pemenuhan hak-hak dasar anak seperti hak kelangsungan hidup, hak perlindungan anak, hak tumbuh kembang dan hak berpartisipasi dan indeksnya mengalami peningkatan tiap tahunnya seperti tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.55
Indeks Perlindungan Anak Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Perlindungan Anak	n/a	71	89	92	86

Sumber: Data Hasil Analisis Penilaian per Klaster KLA Tahun 2024, 2025

F. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan instrumen penting yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan pemuda dalam berbagai dimensi kehidupan. Indeks ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai kondisi objektif pemuda pada suatu wilayah, tetapi juga menjadi acuan bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Sebagai generasi penerus bangsa, pemuda memegang peran strategis dalam pembangunan daerah maupun nasional. Oleh karena itu, peningkatan kualitas hidup pemuda menjadi kunci untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan berdaya saing.

Melalui pengukuran IPP, kita dapat menilai sejauh mana pemuda memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, partisipasi, serta peluang dan kesempatan yang mendukung kemandirian mereka. Data dan informasi yang dihasilkan dari IPP diharapkan mampu menjadi bahan refleksi sekaligus motivasi untuk terus memperbaiki kebijakan pembangunan kepemudaan, sehingga tercipta generasi muda yang sehat, cerdas, berdaya, serta siap menghadapi tantangan masa depan.

Data Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi, capaian, dan perkembangan pembangunan kepemudaan di suatu wilayah. Melalui data ini, dapat diketahui bagaimana pemuda memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, partisipasi, serta peluang yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup mereka.

Penyajian data IPP tidak hanya bertujuan sebagai informasi statistik, tetapi juga sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan program pembangunan kepemudaan. Dengan memahami tren, capaian, serta tantangan yang tergambar dalam data IPP, diharapkan semua pihak dapat mengambil langkah yang lebih tepat, terukur, dan berkelanjutan dalam mendukung peran pemuda sebagai motor penggerak pembangunan daerah maupun nasional. Indeks Pembangunan Pemuda hanya fokus pada kelompok umur 16 s/d 30 tahun. Berikut ini adalah capaian Indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP):

Tabel 2.56
Indeks Pembangunan Pemuda Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	56,21	56,18	57,15	58,30	59,17

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate, 2025

Indikator lainnya untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah, dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan aspek kesenian dan keolahragaan yang berkembang di masyarakat. Selama kurun waktu tahun 2020-2024, jumlah grup kesenian di Kota Ternate tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika masyarakat.

Jika dalam tahun 2020 grup kesenian masih berjumlah 4 (empat) grup, maka pada tahun 2024 telah bertambah menjadi 10 (sepuluh) grup kesenian. Demikian juga perkembangan museum, jika pada tahun 2020 masih terdapat 3 (tiga) museum, maka sampai dengan tahun 2024 telah menjadi 4 (empat) museum.

Tabel 2.57
Jumlah Grup Kesenian dan Museum Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Grup Kesenian	4	4	4	10	10
Jumlah Museum	3	3	3	4	4

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Ternate, 2025

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk mendorong terciptanya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, serta memiliki keterampilan yang tinggi untuk memenangkan kompetisi di era persaingan bebas sebagai dampak dari globalisasi yang sudah di depan mata, maka Pemerintah Kota Ternate telah menindaklanjuti seruan tersebut di antaranya dengan mendorong dan mengembangkan olahraga di kalangan masyarakat. Pertumbuhan sarana olahraga dalam 5 (lima) tahun terakhir di Kota Ternate, dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.58
Jumlah Klub Olahraga dan Gedung Olahraga Kota Ternate Tahun 2020 - 2024

Uraian	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Klub Olahraga	19	19	20	20	65
Jumlah Gedung Olahraga	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate, 2025

2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya guna menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menarik investasi dan talenta. Aspek daya saing tidak hanya bergantung pada keunggulan sumber daya alam, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, kebijakan pemerintah, inovasi, dan tata kelola yang baik. Dalam era globalisasi dan persaingan terbuka saat ini, setiap daerah dituntut untuk memperkuat daya saingnya agar mampu bertahan dan berkembang di tengah dinamika ekonomi nasional maupun internasional.

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dengan memiliki SDM yang berkualitas, inovatif, dan berdaya saing tinggi, suatu negara dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing global, dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

A. Profil Ketenagakerjaan

Sumber utama data ketenagakerjaan yang digunakan BPS adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Konsep usia kerja yang digunakan dalam Sakernas adalah usia 15 tahun ke atas. Usia

kerja ini dibagi ke dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang masuk kategori angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan yang masuk kategori bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang kegiatan sehari-harinya mengurus rumah tangga, sekolah dan kegiatan pribadi lainnya. Yang dimaksud bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara terus-menerus dalam seminggu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi).

Tabel berikut menunjukkan profil penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja menurut jenis kelamin di Kota Ternate tahun 2024, angkatan kerja didominasi oleh jenis kelamin laki-laki sebesar 60.190 jiwa, sedangkan bukan angkatan kerja didominasi oleh jenis kelamin perempuan sebesar 38.326 jiwa.

Tabel 2.59
Profil Penduduk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Kota Ternate Tahun 2024

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
A. Angkatan Kerja	**60.190**	**40.840**	**101.030**
1. Bekerja	56.113	38.430	94.543
2. Pengganguran Terbuka	4.077	2.410	6.487
B. Bukan Angkatan Kerja	**19.555**	**38.326**	**57.881**
1. Sekolah	6.950	9.535	16.485
2. Mengurus Rumah Tangga	3.532	25.298	28.830
3. Lainnya	9.073	3.493	12.566
Jumlah	**79.745**	**79.166**	**158.911**
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	**63,58**		
Tingkat Pengangguran (%)	**6,42**		

Sumber: Kota Ternate dalam Angka, 2025

B. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun.

Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Berdasarkan data penduduk menurut kelompok umur, dapat diketahui pada tahun 2024 bahwa rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Kota Ternate adalah 41,36 persen, yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 42 penduduk yang berusia tidak produktif. Jika dilihat dari trend rasio ketergantungan, rasio ketergantungan Kota Ternate mengalami penurunan rata-rata sebesar -1,12% selama tahun 2020 hingga tahun 2024, sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.60
Perkembangan Rasio Ketergantungan Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Usia 0 – 14 (jiwa)	56.974	56.070	55.951	52.907	52.903
Penduduk Usia 64 + (jiwa)	7.463	8.500	8.250	8.218	8.788
Penduduk Usia 15 – 64 (jiwa)	140.564	141.300	142.544	143.795	149.145
Rasio Ketergantungan (%)	**45,84**	**45,70**	**45,04**	**42,51**	**41,36**

Sumber: BPS Kota Ternate dan Disdukcapil Kota Ternate, 2025 (diolah)

C. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan di bidang pendidikan yang mempunyai kedudukan strategis, mengingat kualitas sumber daya manusia yang tercermin di dalamnya sangat menentukan tingkat produktivitas suatu bangsa. Indeks pendidikan diukur dari rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS), dari data berikut ada kecenderungan meningkat dari tahun 2020 sebesar 0,743% menjadi 0,784% pada tahun 2024.

Tabel 2.61
Indeks Pendidikan Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pendidikan	0,743	0,749	0,765	0,773	0,784

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Ternate, 2025

2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

A. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting yang menggambarkan kinerja ekonomi suatu wilayah. Salah satu komponen utama dalam PDRB adalah sektor Industri Pengolahan, yang mencakup seluruh aktivitas ekonomi yang mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi melalui proses mekanis, kimia, atau fisik.

Rasio PDRB Industri Pengolahan adalah perbandingan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDRB suatu daerah. Rasio ini menunjukkan seberapa besar peran sektor industri pengolahan dalam struktur perekonomian wilayah tersebut. Semakin besar rasio ini, semakin dominan peran industri pengolahan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan nilai tambah di wilayah tersebut. Secara umum, sektor industri pengolahan memiliki beberapa karakteristik utama:

1. Menciptakan Nilai Tambah: Dengan mengolah bahan baku menjadi produk bernilai lebih tinggi, sektor ini berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah.
2. Menyerap Tenaga Kerja: Industri pengolahan cenderung padat karya, sehingga mampu membuka banyak lapangan pekerjaan.
3. Mendorong Sektor Terkait: Industri pengolahan seringkali mendorong pertumbuhan sektor lain, seperti pertanian, perdagangan, dan jasa logistik.
4. Mempercepat Modernisasi Ekonomi: Dengan penggunaan teknologi dan inovasi, sektor ini mempercepat transformasi ekonomi dari berbasis primer (seperti pertanian) menuju ekonomi yang lebih maju.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, penting juga untuk memperhatikan bahwa pertumbuhan industri pengolahan harus sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan dan sosial, agar manfaat ekonominya tidak mengorbankan kualitas hidup masyarakat dan kelestarian alam. Perkembangan Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kota Ternate dari tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.62
Rasio PDRB Industri Pengolahan Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	2,70	2,33	2,30	2,31	2,21

Sumber: Kota Ternate Dalam Angka, 2025

B. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Sektor Akomodasi Makan dan Minum merupakan salah satu sektor penting dalam struktur ekonomi daerah, terutama di wilayah yang memiliki potensi pariwisata atau mobilitas penduduk yang tinggi. Sektor ini mencakup berbagai kegiatan usaha yang menyediakan jasa penginapan (akomodasi) serta usaha yang menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat (restoran, kafe, rumah makan, dan sejenisnya).

Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum adalah perbandingan antara nilai tambah bruto yang dihasilkan sektor ini terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Rasio ini menjadi ukuran seberapa besar kontribusi sektor akomodasi makan dan minum dalam keseluruhan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, penguatan sektor akomodasi makan dan minum juga perlu memperhatikan aspek higiene, keamanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan kualitas pelayanan, agar sektor ini tidak hanya tumbuh secara ekonomi tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga reputasi daerah. Perkembangan Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum di Kota Ternate dari tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.63
Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kota Ternate Tahun 2020-2024

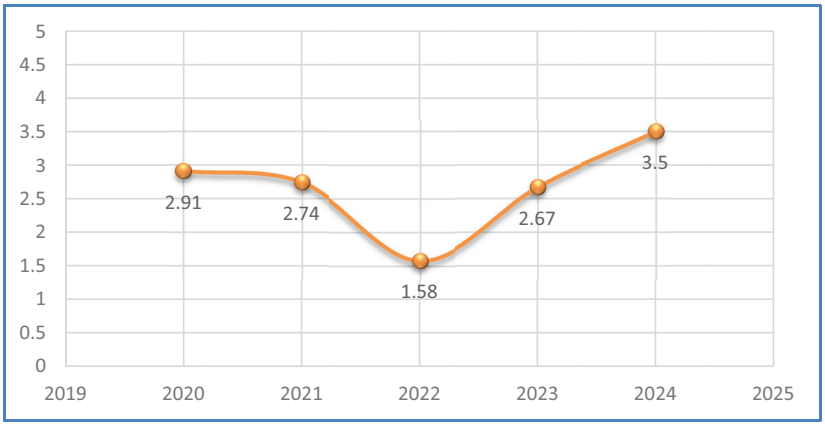
Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,04	1,05	0,99	0,92	0,88

Sumber: Kota Ternate Dalam Angka, 2025

C. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar.

Grafik 2.27 Rasio Kewirausahaan Kota Ternate Tahun 2020-2024



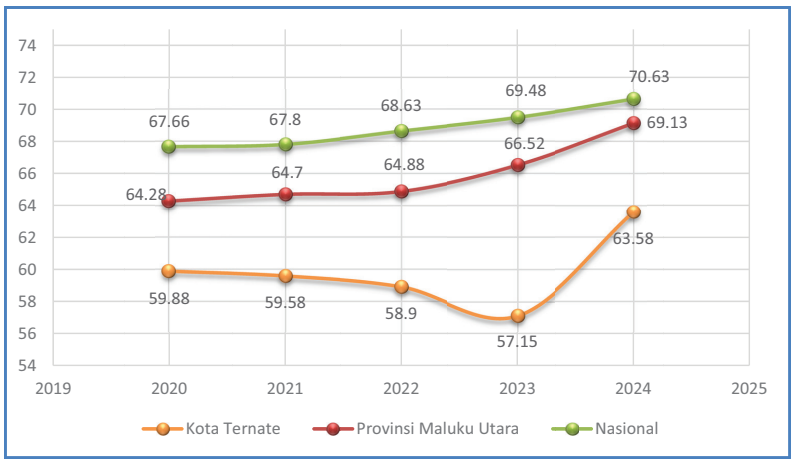
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate, 2025

Grafik kewirausahaan di atas menggambarkan atau menunjukan bahwa pada tahun 2020 kondisi kewirausahaan Kota Ternate pada saat terjadinya Covid-19 maka menunjukkan kewirausahaan pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis di angka 2,91% dan di tahun 2021 di angka 2,74% hingga mencapai level terendah di tahun 2022 yaitu angka mencapai 1,58%. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan stimulus untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat dan pemulihan ekonomi membuat indeks kewirausahaan, khususnya di Kota Ternate lebih optimis dengan prospek yang ada sehingga pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 3,5%.

D. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi indikasi besaran penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian wilayah.

Grafik 2.28
Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, dan Indonesia Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara dan BPS Nasional, 2025 (diolah)

E. Indeks Inovasi Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan pada era desentralisasi telah memberikan harapan besar terhadap upaya peningkatan kemandirian daerah yang berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Hal ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat mandiri dan mensejahterakan masyarakatnya, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, serta mampu melakukan percepatan dalam rangka mendorong peningkatan pelaksanaan di seluruh aspek, melalui kebijakan-kebijakan yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kearifan lokal di daerahnya masing-masing.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kementerian Dalam Negeri berupaya mendorong seluruh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melakukan Inovasi Daerah secara berkesinambungan dalam rangka memajukan daerah dan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya. Kegiatan ini diberi nama indeks inovasi daerah. Yang dimaksud indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk kebaharuan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Dari hasil indeks inovasi daerah, didapatkan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah. Pemeringkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintahan daerah. Kegiatan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif ini dimaksudkan agar dapat mendorong

kompetisi positif antar pemerintah Provinsi dan antar pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Kota Ternate pada tahun 2020, berdasarkan hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah memberikan penilaian sebagai Kota Kurang Inovatif yang berada di peringkat 56 dari 93 kota di Indonesia. Pada tahun 2021, skor Indeks Inovasi Daerah Kota Ternate berubah menjadi 48,36 berkategori Inovatif, di tahun 2022, skor Indeks Inovasi Daerah Kota Ternate tahun naik menjadi 54,96 berkategori Inovatif, dan menempati peringkat 34, tahun 2023 Indeks Inovasi Daerah berkategori Inovatif dengan nilai 43,60, dan pada tahun 2024 Indeks Inovasi Daerah Kota Ternate menjadi 53,58 berkategori Inovatif dengan menempati peringkat 54 dari 93 Kota di Indonesia. Penilaian ini memberi gambaran bahwa inovasi di Kota Ternate berkembang dengan baik.

Tabel 2.64
Indeks Inovasi Daerah Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Inovasi Daerah	398	48,36	54,96	43,60	53,58

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2025

F. Pengeluaran Rumah Tangga

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh kenaikan produksi barang dan jasa pada wilayah tersebut pada tahun tertentu. Jika kenaikan produksi barang dan jasa pada tahun tertentu lebih tinggi dari tahun sebelumnya maka dikatakan terjadi kenaikan pertumbuhan. Untuk menghindari pengaruh perubahan harga, maka pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan harga konstan. Dalam hal ini PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2001.

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran dihitung berdasarkan pengeluaran makanan dan non makanan. Kelompok makanan yang dihitung meliputi padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayur-sayuran, kacang kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, bahan minuman, bumbu-bumbuan, makanan dan minuman jadi, tembakau dan sirih serta konsumsi lainnya.

Pengeluaran dihitung berdasarkan pengeluaran makanan dan non makanan. Kelompok makanan yang dihitung meliputi padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, bahan minuman, bumbu-bumbuan, makanan dan minuman jadi, tembakau dan sirih serta konsumsi lainnya. Untuk lebih jelasnya rata-rata pengeluaran per kapita sebulan dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel 2.65
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (Rupiah)
Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Makanan	685.523	725.878	668.808	744.463	928.394
Bukan makanan	999.137	952.682	859.274	974.786	1.166.592
Total Pengeluaran	**1.684.600**	**1.678.560**	**1.528.082**	**1.719.250**	**2.094.986**

Sumber: Kota Ternate Dalam Angka, 2025

Jika diuraikan berdasarkan kelompok pengeluaran, persentase terbesar pada kelompok non makanan. Semakin besarnya proporsi konsumsi non makanan dibanding konsumsi makanan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Ternate meningkat.

G. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Terdapat empat jenis bank yang dimaksudkan dalam indikator ini, yaitu Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Pembangunan, dan Bank Pengkreditan Rakyat. Berikut ini jumlah bank yang beroperasi di Kota Ternate.

Tabel 2.66
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang Kota Ternate 2024

Uraian	Kantor Pusat	Kantor Cabang	Cabang Pembantu
Bank Pemerintah	-	4	3
Bank Pembangunan Daerah	-	1	-
Bank Swasta	-	11	2
Bank Perkreditan Rakyat	4	1	-
Jumlah	**4**	**17**	**5**

Sumber : Kota Ternate Dalam Angka, 2025

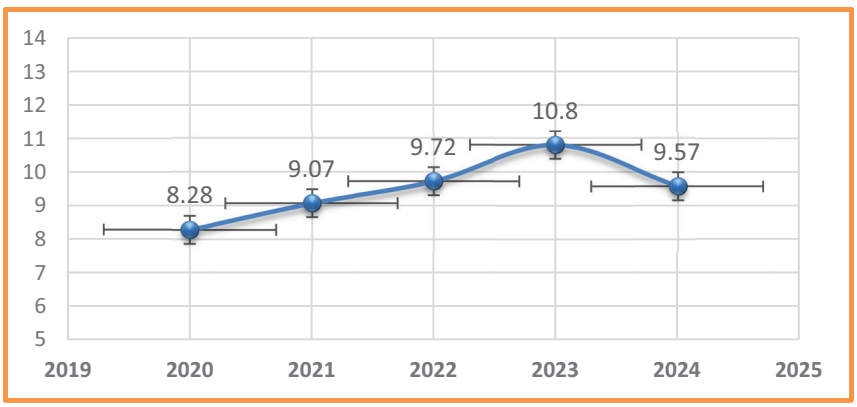
Jumlah bank yang beroperasi di suatu wilayah menunjukkan adanya pergerakkan ekonomi dan perputaran uang yang telah berjalan di wilayah tersebut, karena bank tidak hanya berperan sebagai lembaga penyimpanan tetapi juga menyalurkan bantuan modal terutama bagi pemilik usaha.

H. Rasio Kemandirian Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari tahapan perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan telah mengalami perkembangan yang sangat mendasar. Hal ini terkait dengan berbagai regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diubah dan dilengkapi dengan ketentuan baru yang diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

Keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dapat diukur melalui rasio kemandirian keuangan. Suatu daerah yang sudah mandiri dalam aspek keuangan diharapkan bisa melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan transfer dana dari pemerintah pusat. Perkembangan derajat otonomi fiskal Kota Ternate sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.29
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Ternate Tahun 2020-2024



Sumber: BP2RD dan Bappelitbangda Kota Ternate 2025 (diolah)

L. *City Branding* (Citra Kota)

City branding merupakan identitas dari kota yang berguna untuk memasarkan segala aktivitas dari kota tersebut terutama potensi wisata dan budayanya. Pengertian *City Branding* (Citra kota) adalah upaya strategi dari suatu kota untuk membuat *positioning* yang kuat di regional maupun global. Karena dengan adanya *City Branding* dapat membentuk identitas kota yang berguna untuk memasarkan segala aktivitas kegiatan, saran serta budaya yang ada di kota tersebut.

Membentuk Identitas Kota dengan *City Branding* bukannya hal yang mudah mengingat tantangan yang utama adalah berada di sekitar persoalan, bagaimana usaha untuk membentuk suatu perlindungan citra kota yang berkoherensi dalam ragam lintas area yang berbeda dari kegiatan dengan beragam target pengguna, namun di saat yang sama membentuk komunikasi citra kota yang sektor-spesifik. Dan itu adalah hal yang unik karena semua kota juga tidak dapat melakukan dengan cara yang sama untuk membentuk identitas kota.

Ternate, sebuah kota di Indonesia, dipandang sebagai tempat yang unik dalam berbagai aspek. Kota Ternate merupakan ibu kota salah satu kota di Provinsi Maluku Utara. Hal ini mengarah pada keunikan Kota Ternate sebagai kota pulau dan memiliki banyak potensi rempah-rempah. Pada saat yang sama, Kota Ternate telah mengalami kecepatan pembangunan dan kawasan perkotaan yang tinggi dengan tetap mempertahankan keindahan alam dan asimilasi bagi banyak etnis sejak era Kesultanan Ternate yang telah dikenal di seluruh dunia selama berabad-abad.

Pemerintah Kota Ternate telah menerima sertifikat Hak Kekayaan Intelektual *City Branding* **Ternate Kota Rempah** dengan nomor pendaftaran IDM000984109, pada tanggal 29 Agustus 2022. Hal ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Walikota Ternate Nomor 29 Tahun 2021 tentang *City Branding* Kota Ternate.



Gambar 2.15 Penyerahan Sertfikat HAKI *City Branding* Ternate Kota Rempah

City branding juga merupakan tugas dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan kota. Tanggung jawab keberhasilan *city branding* ada pada publik internal kota, termasuk pemerintah kota, swasta, pengusaha, kelompok kepentingan, dan masyarakat kota. Prioritas dalam *city branding* adalah memungkinkan potensi kota menjadi bernilai dan fungsional.

2.3.3 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Infrastruktur wilayah dalam berbagai periode pembangunan selalu menjadi salah satu isu sentral, keberadaannya sangat dekat dengan jumlah dan jenis pelayanan yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat untuk menunjang interaksi dan mobilitasnya. Tuntutan publik yang muncul dalam pembangunan infrastruktur di daerah ini adalah meningkatnya jumlah dan kualitas infrastruktur daerah. Adapun perspektif pemerintah daerah, cenderung menghendaki agar pembangunan infrastruktur daerah ini dapat mendukung meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK melalui percepatan

pembangunan infrastruktur strategis. Peningkatan daya saing melalui pembangunan infrastruktur Kota Ternate diharapkan sesuai dengan arahan yang tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate, sehingga fokus pengembangan wilayah kota mengedepankan aspek infrastruktur, keterhubungan, penataan ruang, teknologi, ekonomi dan sosial budaya sesuai tuntutan era globalisasi.

A. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna atas layanan infrastruktur yang tersedia. Indeks ini biasanya dihitung dengan mengukur tingkat ketidakpuasan atau kepuasan yang dirasakan oleh pengguna terhadap layanan yang tersedia. Pengguna disurvei untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan mereka dengan layanan infrastruktur yang tersedia. Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur secara berkala merupakan sarana evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menilai seberapa baik pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan. Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur juga memberikan informasi perspektif masyarakat secara objektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat.

Sektor infrastruktur yang akan dinilai meliputi:

1. Penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas;
2. Penyediaan transportasi (Darat dan ASDP, Laut, dan Udara);
3. Penyediaan infrastruktur air bersih;
4. Penyediaan infrastruktur irigasi (pertanian dan air baku);
5. Penyediaan infrastruktur perumahan.

Terdapat 6 (enam) unsur utama untuk mengukur Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI), yaitu:

1. Ketersediaan fisik (*availability*): bahwa dalam setiap aktivitas belanja yang diperuntukkan bagi kegiatan fisik tentunya akan menghasilkan *output* yang berupa barang secara fisik.
2. Kualitas fisik (*quality*): kualitas *output* yang dihasilkan. Bahwa aspek efektivitas akan lebih nyata apabila cakupannya lebih luas, yaitu tidak hanya keterpenuhan secara fisik tetapi juga didukung kualitas *output* yang baik dan optimal.
3. Kesesuaian (*appropriateness*): kesesuaian antara kebijakan yang ditetapkan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat.
4. Pemanfaatan (*utility*): tingkat pemanfaatan atas *output* yang telah dihasilkan.
5. Penyerapan tenaga kerja (*job creation*).
6. Kontribusi terhadap perekonomian. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan untuk menunjang berbagai kegiatan perekonomian sehingga perlu untuk menilai seberapa besar infrastruktur memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan perekonomian daerah.

Pengukuran di Kota Ternate belum pernah dilakukan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga pendidikan maupun institusi/lembaga lainnya, sehingga sampai saat ini belum ada skor/nilai IKLI di Kota Ternate.

B. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Rumah yang layak huni dan terjangkau dalam konteks pemukiman kumuh dalam kerangka kerja monitoring SDGs, menggunakan 5 (lima) kriteria yaitu (1) ketahanan bangunan; (2) kecukupan luas tempat tinggal; (3) akses air minum layak; (4) akses sanitasi layak; dan (5) keamanan bermukim. Adapun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Definisi dari masing-masing komponen hunian layak berdasarkan indikator nasional adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.67
Komponen Hunian Layak

No	Komponen	Kriteria
1	Ketahanan Bangunan	Bahan bangunan atap terluas adalah genteng, beton, Kayu/Sirap, dan Seng
		Bahan bangunan dinding terluas adalah tembok/GRC *Board*, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu/papan, dan batang kayu.
		Bahan bangunan lantai rumah terluas adalah marmer / granit, keramik, parket / vinil / karpet, ubin / tegel / teraso, kayu / papan, dan semen / bata merah
2	Kecukupan Luas Tempat Tinggal	Luas lantai per kapita ≥ 7,2 m^2
3	Akses terhadap Air Minum Layak	Mengikuti indikator dan metode perhitungan sasaran terkait akses air minum layak.
4	Akses terhadap Sanitasi Layak	Mengikuti indikator dan metode perhitungan sasaran terkait akses sanitasi layak.

Mempertimbangkan ketersediaan data yang ada, maka perhitungan Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau berdasarkan indikator nasional adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.68
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau (%)	62,14	63,85	65,42	68,17	69

Sumber: Dinas Perkim dan Pertanahan Kota Ternate, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan bahwa persentase rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan sebesar 11,04%.

C. Desa atau Kelurahan Mandiri

Desa/Kelurahan Mandiri adalah Desa/Kelurahan yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang baik dan berkompeten serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkualitas. Indikator Desa/Kelurahan yang mandiri tersebut bila disandingkan dengan Desa atau Kelurahan yang ada di Kota Ternate, belum bisa dinyatakan mandiri karena masih banyak kekurangan yang perlu dipenuhi dan diintervensi oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2020 Kelurahan Mandiri fokus pada kelurahan yang mengikuti Lomba Evaluasi Perkembangan Kelurahan dari aspek kewilayahan, pemberdayaan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pada tahun 2020 hanya 3 (tiga) Kelurahan yang dianggap Mandiri yaitu Kelurahan Ngade, Moya dan Sango, sedangkan pada tahun 2024 ada tambahan 1 (satu) Kelurahan yaitu Kelurahan Kalumpang sehingga angkanya bertambah menjadi 4 (empat) Kelurahan, diharapkan Jumlah Desa/Kelurahan Mandiri dapat bertambah di Kota Ternate.

Tabel 2.69
Jumlah Desa/Kelurahan Mandiri Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Desa/Kelurahan Mandiri	3	4	4	4	4

Sumber : Bagian Pemerintahan SETDA Kota Ternate, 2025

D. Perhubungan

Menurut Buku Informasi Statistik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang,

bus, truk dan sepeda motor. Panjang jalan yang diperhitungkan adalah jalan nasional (belum termasuk jalan tol), jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan kota. Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan. Jumlah panjang jalan seluruhnya akan dibagi dengan jumlah kendaraan yang ada untuk mencari seberapa besar rasionya. Dari perhitungan diketahui bagi setiap kendaraan di Kota Ternate tersedia sekitar 42 kilometer jalan.

Tabel 2.70
Jumlah Kendaraan Menurut Jenisnya di Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sedan, Jeep, Station Wagon	4.659	364	388	8.802	8.802
Bus, Micro Bus	7	4.548	9	16	16
Truck, Puck-Up	1.486	127	1.407	2.386	2.386
Kendaraan Khusus Alat Berat dan Besar	31	0	0	122	122
Sepeda Motor	33.433	34.639	35.083	123.914	123.914
Jumlah	**39.616**	**39.688**	**36.887**	**135.240**	**135.240**

Sumber: Kota Ternate Dalam Angka, 2025

Tabel 2.71
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Ternate Tahun 2024

Kota	Panjang Jalan (Km)	Jumlah Kendaraan Total	Rasio
Kota Ternate	319.789	135.240	1:42

Sumber: Kota Ternate Dalam Angka, 2025 (diolah)

E. Penataan Ruang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan:

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; serta
4. Mendayagunakan produk tata ruang sebagai alat penataan, penyusunan program pembangunan dan pengendalian secara optimal.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Ternate merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kota Ternate. Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Ternate berfungsi:

1. Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kota Ternate;
2. Sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kota Ternate;
3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kota Ternate; dan
4. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Ternate.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Ternate akan meliputi kebijakan dan strategi pengembangan wilayah, kebijakan dan strategi struktur ruang, kebijakan dan strategi pola ruang, kebijakan dan strategi peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan. Kebijakan penataan ruang Kota Ternate terdiri atas:

1. Memeratakan pusat-pusat pelayanan serta meningkatkan konektivitas infrastruktur dan infrastruktur dasar;

2. Mengoptimalkan alokasi pemanfaatan ruang yang mendorong pengembangan sektor ekonomi unggulan dan potensial perdagangan jasa, pariwisata, perkebunan, perikanan dan kelautan;
3. Mengoptimalkan alokasi pemanfaatan ruang untuk pemerataan fasilitas sosial, fasilitas umum, fasilitas hankam serta pelestarian cagar budaya;
4. Mengoptimalkan upaya preservasi kawasan lindung maupun berfungsi lindung untuk pelestarian *geodiversity*, sumber daya air, ketahanan pangan, dan mitigasi bencana.

Strategi penataan ruang wilayah Kota Ternate merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah Kota Ternate ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah Kota Ternate berfungsi:

1. Sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis Kota Ternate;
2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kota Ternate; dan
3. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Ternate.

Strategi penataan ruang wilayah Kota Ternate terdiri atas:

1. Strategi memeratakan pusat-pusat pelayanan serta meningkatkan konektivitas infrastruktur dan infrastruktur dasar, meliputi:
    a. Merevitalisasi pusat pelayanan kawasan eksisting, mengembangan sub pusat pelayanan baru di setiap pulau, serta mendekatkan pelayanan pusat-pusat lingkungan;
    b. Mengembangkan sistem transportasi berkelanjutan dan terintegrasi berbasis pengembangan angkutan umum;
    c. Meningkatkan konektivitas angkutan laut dan penyeberangan;
    d. Mengembangkan sistem *smart island* dengan peningkatan konektivitas telekomunikasi dan pelayanan publik berbasis digital;
    e. Meningkatkan elektrifikasi penduduk dengan listrik 24 jam 100% dengan bauran energi baru terbarukan hingga 85%.
2. Strategi mengoptimalkan alokasi pemanfaatan ruang yang mendorong pengembangan sektor ekonomi unggulan dan potensial perdagangan jasa, pariwisata, perkebunan, perikanan dan kelautan, meliputi:
    a. Melakukan revitalisasi dan penataan kawasan perdagangan jasa eksisting dengan konsep *superblock*;
    b. Mengembangkan kawasan pariwisata dengan penataan destinasi-destinasi pariwisata alam, *geodiversity*, dan sejarah beserta amenitas dan aksesibilitasnya sebagai perwujudan kota rempah dunia;
    c. Mengembangkan dan menata kawasan-kawasan sentra perikanan dan pengolahan perikanan;
    d. Mengembangkan sentra pengolahan perkebunan di pulau Moti, Mayau, dan Tifure.
3. Strategi mengoptimalkan alokasi pemanfaatan ruang untuk pemerataan fasilitas sosial, fasilitas umum, fasilitas hankam serta pelestarian cagar budaya, meliputi:
    a. Mengembangkan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk mendekatkan pelayanan publik terutama di Sub Pusat Pelayanan Pulau Hiri, Moti, Mayau, dan Tifure;
    b. Melestarikan serta meningkatkan nilai ruang dari cagar budaya sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya dengan penguatan tata kelola *cultural resources management*;
    c. Menata dan mengalokasikan kawasan pertanahan dan keamanan negara.
4. Strategi mengoptimalkan upaya preservasi kawasan lindung maupun berfungsi lindung untuk pelestarian *geodiversitas*, sumber daya air, ketahanan pangan, dan mitigasi bencana, meliputi:
    a. Menetapkan kawasan lindung sempadan pantai, sempadan sungai, serta rimba kota pada kawasan rawan bencana tinggi;
    b. Menetapkan jalur dan ruang evakuasi bencana serta infrastruktur sumber daya air untuk mitigasi bencana;
    c. Menetapkan kawasan lindung geologi untuk melindugi *geodiversitas* menuju *Global Geopark Island*;

d. Mengatur pemanfaatan pada kawasan resapan air serta keterlanjuran pada kawasan rawan bencana;
e. Menetapkan kawasan pertanian tanaman pangan sebagai LP2B untuk ketahanan pangan kawasan.

C. Komunikasi dan Informatika

Energi listrik sangat dibutuhkan bagi masyarakat modern sekarang ini. Seiring dengan kemajuan teknologi, permasalahan pada dunia listrik sering terjadi salah satunya pada kebutuhan energi listrik. Pertumbuhan suatu masyarakat modern, kebutuhan energi listrik pada umumnya akan meningkat sebanding dengan tingkat aktivitas ekonomi dan juga jumlah penduduk dalam wilayah tersebut. Peningkatan kebutuhan energi listrik di Kota Ternate tidak saja dipengaruhi oleh banyaknya penduduk, tetapi juga faktor aktivitas ekonomi masyarakat yang terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin tinggi aktivitas ekonomi maka akan semakin besar kebutuhan akan energi listriknya. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan jumlah pelanggan dan produksi listrik yang diusahakan oleh PT PLN (Persero) di Kota Ternate selama tahun 2020-2024.

Tabel 2.72
Jumlah Pelanggan dan Produksi Listrik yang Diusahakan oleh PT PLN (Persero) di Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pelanggan	57.344	60.515	63.343	66.341	69.802
Produksi Listrik (kWh)	203.690.270	216.069.519	260.691.365	220.133.680	256.323.185
Terjual (MWh)	186.922	197.450	181.860	220.133	234.829

Sumber: Kota Ternate Dalam Angka, 2025

Dalam hal pemanfaatan teknologi di Kota Ternate, penggunaan telepon seluler, nirkabel, komputer, dan akses internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Baik itu secara aspek dikaitkan dengan penggunaan untuk komunikasi, akses informasi, media sosial, hiburan dan pekerjaan dan produktivitas. Persentase penduduk yang menggunakan *handphone* atau telepon dan akses internet di Kota Ternate memiliki tren yang fluktuatif. Persentase pengguna sempat menurun pada tahun 2022 mencapai 89,82, kemudian meningkat di tahun 2023 dan kembali turun di tahun 2024 mencapai 90,30 persen.

Tabel 2.73
Persentase Penduduk dalam Penggunaan Teknologi Informasi Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer	89,02	91,36	89,82	91,67	90,30
Mengakses Internet	68,86	77,09	76,64	81,30	84,88

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Ternate, 2025

2.3.4 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro di tingkat daerah merupakan pilar penting bagi terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun kebijakan makro nasional memegang peran sentral, stabilitas di daerah turut menentukan kekuatan ekonomi secara keseluruhan. Faktor-faktor seperti inflasi daerah, kesempatan kerja, investasi lokal, dan daya beli masyarakat menjadi indikator kunci yang harus terus dijaga.

Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional, daerah dituntut untuk memiliki ketahanan ekonomi yang kuat, baik melalui pengelolaan fiskal yang sehat, penguatan sektor unggulan lokal, maupun penciptaan iklim usaha yang kondusif. Koordinasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sangat diperlukan agar potensi ekonomi daerah dapat dimaksimalkan, sekaligus memitigasi risiko yang dapat mengganggu kestabilan.

A. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah. Realisasi capaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini bahwa pada tahun 2021 capaian kinerja sebesar 4,29% mengalami peningkatan capaian tahun 2020 sebesar 3,64%, hal ini disebabkan karena adanya program pemulihan ekonomi pasca Covid-19, pada tahun 2022 pencapaian kinerja meningkat sebesar 4,87% dari tahun sebelumnya, begitu juga pada tahun 2023 meningkat sebesar 5,48% dan pada tahun 2024 pencapaian kinerja meningkat yaitu sebesar 5,04%.

Tabel 2.74
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Ternate 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	3,64	4,29	4,87	5,48	5,04

Sumber: BP2RD dan Bappelitbangda Kota Ternate 2025 (diolah)

B. Laju Inflasi

Secara teoritis, pengertian inflasi merujuk pada perubahan tingkat harga suatu barang dan jasa yang pada umumnya terjadi secara terus menerus. Inflasi di dunia ekonomi modern sangat memberatkan masyarakat. Hal ini dikarenakan inflasi dapat mengakibatkan lemahnya efisiensi dan produktivitas ekonomi investasi, kenaikan biaya modal, dan ketidakjelasan ongkos serta pendapatan di masa yang akan datang. Keberadaan permasalahan inflasi dan tidak stabilnya sektor riil dari waktu ke waktu senantiasa menjadi perhatian sebuah rezim pemerintahan yang berkuasa serta otoritas moneter. Lebih dari itu, ada kecenderungan inflasi dipandang sebagai permasalahan yang senantiasa akan terjadi. Hal ini tercermin dari kebijakan otoritas moneter dalam menjaga tingkat inflasi. Setiap tahunnya otoritas moneter senantiasa menargetkan bahwa tingkat inflasi harus diturunkan menjadi satu digit atau inflasi moderat.

Upaya stabilisasi harga saat ini memiliki tantangan yang cukup berat, tidak hanya pengendalian di sisi moneter namun diperlukan pula berbagai dukungan kebijakan di bidang fiskal. Secara umum, inflasi yang terjadi di Indonesia lebih disebabkan permasalahan struktural yang membutuhkan koordinasi kebijakan, misalnya rentannya produksi pangan terhadap kondisi cuaca, struktur pasar dan berbagai masalah lainnya. Khusus untuk wilayah Maluku Utara, permasalahan infrastruktur, saluran distribusi dan kondisi geografis yang sulit menjadi faktor dominan dalam pengendalian inflasi.

Terjadinya inflasi dapat mendistorsi harga-harga relatif, tingkat pajak, suku bunga riil, pendapatan masyarakat akan terganggu, mendorong investasi yang keliru, dan menurunkan moral. Maka dari itu, mengatasi inflasi merupakan sasaran utama kebijakan moneter. Pengaruh inflasi cukup besar pada kehidupan ekonomi, inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak mendapat perhatian para ekonom, pemerintah, maupun masyarakat umum. Berbagai teori, pendekatan dan kebijakan dikembangkan supaya inflasi dapat dikendalikan sesuai harapan.

Tingginya pendapatan per kapita masyarakat Ternate, terkadang juga menjadi masalah perekonomian di Kota Ternate, salah satunya adalah inflasi. Pendapatan masyarakat yang tinggi, secara langsung berdampak pada meningkatnya kemampuan masyarakat untuk konsumsi barang dan jasa. Terkadang, tingginya tingkat konsumsi masyarakat Kota Ternate tidak diimbangi dengan persediaan barang dan jasa yang dikonsumsi akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa tersebut. Kenaikan harga-harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat menyebabkan terjadinya inflasi.

Menurut konsep BPS, inflasi merupakan naiknya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila naiknya bersifat meluas atau berpengaruh terhadap kenaikan barang lainnya. Selain itu, kenaikan harga barang dan jasa juga dapat menyebabkan mata uang rupiah terdepresiasi (penurunan nilai riil mata uang). Dengan demikian, inflasi juga dapat diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Besarnya inflasi suatu daerah dapat digambarkan dengan perkembangan indeks harga implisit PDRB (perbandingan harga berlaku dengan harga konstan) setiap tahun dan Indeks Harga Konsumen.

Tabel 2.75
Indeks Harga Konsumen (IHK), Inflasi (*year on year*), andil Inflasi (*year on year*)
Kota Ternate Menurut Kelompok Pengeluaran, Desember 2024

Bulan		Kota Ternate		
		IHK Desember 2024	Inflasi *yoy* Desember 2024	Andil Inflasi *yoy* Desember 2024
	Umum	**108,22**	**1,66**	**1,66**
1	Makanan, Minuman, dan Tembakau	115,71	5,16	1,64
2	Pakaian dan Alas Kaki	106,01	-2,45	-0,12
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah tangga	103,41	0,75	0,15
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	103,93	-0,63	-0,03
5	Kesehatan	101,64	0,37	0,01
6	Transportasi	108,28	-4,30	-0,49
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,75	-0,26	-0,02
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	100,99	-0,49	-0,01
9	Pendidikan	104,93	1,82	0,05
10	Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran	107,10	4,49	0,38
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	107,96	1,38	0,10

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Kota Ternate, Januari 2025

Sepanjang tahun 2024, Kota Ternate mengalami inflasi sebesar 1,66 persen. Angka ini lebih rendah dari tahun 2023 yaitu sebesar 4,41 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,16%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar -2,45%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,75%; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar -0,63%; kelompok kesehatan sebesar 0,37%; kelompok transportasi sebesar -4,30%; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,26%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar -0,49%; kelompok pendidikan sebesar 1,82%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,49%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,38%.

Berdasarkan besarnya sumbangan/andil terhadap inflasi tahun 2024, sumbangan/andil tertinggi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yaitu sebesar 1,64 persen. Kemudian disusul kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,38 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,15 persen.

Tabel 2.76
Perkembangan Inflasi Kota Ternate Menurut Bulan (2012=100) Tahun 2020-2024

Bulan		2020	2021	2022	2023	2024
1	Januari	0,34	-0,51	-0,22	0,10	0,03
2	Februari	1,00	0,54	-1,11	1,85	-0,4
3	Maret	-0,48	0,08	0,34	-1,26	0,72
4	April	0,12	0,25	0,82	1,32	0,44
5	Mei	0,89	0,44	0,27	0,34	0,64
6	Juni	-0,34	-0,22	0,33	0,01	0,06
7	Juli	-0,95	0,55	1,82	0,30	-0,09
8	Agustus	0,33	-0,61	-0,24	0,26	-0,02
9	September	-0,74	-0,11	0,51	-0,42	0,67
10	Oktober	0,28	0,66	-0,49	0,43	-1,16
11	November	0,78	0,25	0,19	-0,20	0,49
12	Desember	0,70	1,03	1,14	1,64	0,3

Sumber: Kota Ternate Dalam Angka, 2025

C. Kerjasama Daerah

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab XVII tentang Kerja Sama Daerah pasal 363 ayat (1) menegaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Selanjutnya pasal 364 ayat (2) poin e kerjasama dimaksud adalah kerjasama antar Daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi.

Melalui pendekatan wilayah dimungkinkan untuk melihat dan memperhatikan berbagai potensi yang ada, kemudian dimanfaatkan untuk melakukan kerjasama antardaerah untuk bersinergi dan saling mendukung demi mendapatkan manfaat bersama. Dalam mewujudkan kerjasama antardaerah melalui pendekatan wilayah tersebut, masing-masing Kabupaten/Kota harus mampu melihat dan memanfaatkan potensi maupun fasilitas yang dimilikinya agar berdayaguna dengan memberikan kesempatan bagi daerah lain untuk memanfaatkannya. Pengamatan potensi daerah sendiri dan potensi daerah lain dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun langkah-langkah perencanaan pembangunan melalui pendekatan wilayah. Dalam melakukan kerjasama antar pemerintah daerah, akan terbuka kesempatan untuk mengatasi masalah-masalah bersama dengan melibatkan dua atau lebih pemerintah daerah.

Kota Ternate saat ini masih menjadi titik awal berkembangnya kehidupan di Maluku Utara. Akan tetapi bila dilihat dan ditinjau kembali, Kota Ternate pada dasarnya tidak dapat terus berdiri sendiri. Kondisi yang ada saat ini baik ditinjau dari aspek geografis dan sumber daya alam menunjukkan bahwa Kota Ternate pun memiliki keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itulah kerjasama antardaerah terdekat dirasa perlu dalam rangka mengatasi masalah-masalah bersama dengan melibatkan dua atau lebih pemerintah daerah. Dalam hal ini wilayah terdekat yaitu Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Barat.

Pada tanggal 15 Agustus 2016, bertempat di halaman kantor Walikota Ternate. Tiga kepala daerah berkumpul untuk menandatangani kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama tersebut menjadi awal dari terbentuknya kerjasama antar daerah yang disebut SEGITIGA EMAS (Halmahera Barat, Ternate, dan Tidore). Bentuk kerjasama adalah kesepakatan antar daerah tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah melalui keterpaduan sejumlah program dan kebijakan strategis sesuai kepentingan dan kebutuhan masing-masing daerah.

Kerja sama antar daerah ini dimaksudkan untuk menciptakan keterpaduan pembangunan dan konektivitas antar wilayah terdekat dan mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan sinergitas program strategis bersama di bidang pertanian dan kepariwisataan maupun bidang-bidang lain yang dianggap strategis sebagaimana tertuang dalam objek dan ruang lingkup kerja sama antar daerah dimaksud. Kerja sama antar daerah ini bertujuan mewujudkan konektivitas antar wilayah terdekat melalui keterpaduan program strategis antar daerah dan membentuk simpul-simpul pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan potensi dan karakteristik geografis yang diharapkan akan mengerucut menjadi poros utama Kawasan Segitiga Emas Ternate, Tidore, Jailolo (TTJ) sekaligus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Maluku Utara, juga menjadi bagian dari implementasi program prioritas nasional poros maritim dan tol laut. Kerjasama antardaerah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Bentuk kerjasama yang telah dan sedang dijajaki meliputi:

1. Penguatan ketahanan pangan dan pertanian antardaerah, dengan Ternate sebagai pusat distribusi dan kabupaten sekitar sebagai lumbung produksi.
2. Kolaborasi sektor pariwisata, melalui promosi destinasi wisata terpadu dan agenda kebudayaan bersama.
3. Pengelolaan bersama sumber daya kelautan dan perikanan, guna memastikan pemanfaatan berkelanjutan dan peningkatan nilai tambah hasil laut.
4. Peningkatan kapasitas SDM dan pertukaran informasi teknologi antardaerah, melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan program magang lintas daerah.

Melalui Expo Segitiga Emas yang dimulai dari tahun 2021, Pemerintah Kota Ternate berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dalam bidang kemandirian pangan, energi, dan ekonomi, hal ini merupakan langkah awal untuk memperluas kerja sama antar tiga daerah tersebut.

Pada Juni 2021, empat kepala daerah dari Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kabupaten Pulau Morotai mengadakan pertemuan di Halmahera Barat. Pertemuan ini membahas strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan mendorong kerja sama lintas daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ekspansi Kerja Sama Segitiga Emas dimulai sejak 2023, dengan memperluas kerjasama daerah dengan Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah. Kehadiran kedua wilayah ini dinilai strategis karena memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang besar, terutama dari sektor sumber daya alam. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi, meningkatkan ekonomi, dan mempercepat pembangunan di wilayah Maluku Utara.

D. Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Keduanya menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencerminkan kemandirian suatu daerah dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib dari warga negara atau badan usaha kepada pemerintah daerah yang bersifat tidak langsung, yang artinya tidak ada imbalan langsung yang diterima pembayar pajak.

Sementara itu, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak, retribusi memiliki hubungan timbal balik langsung antara pembayaran dan layanan yang diberikan.

Pajak dan retribusi daerah bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bentuk partisipasi nyata masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin sadar dan tertib masyarakat dalam memenuhi kewajiban ini, semakin besar pula peluang daerah untuk berkembang secara mandiri, adil, dan berkelanjutan. Tabel di bawah ini merupakan besaran realisasi retribusi daerah Kota Ternate selama tahun 2020-2024.

Tabel 2.77
Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Daerah	0	50.242,41	66.655,54	74.699,92	76.736,33
Retribusi Daerah	16.056,97	15.105,89	18.584,01	19.870,71	19.570,45

Sumber : BP2RD Kota Ternate, 2025

Berdasarkan tabel di atas bahwa dalam lima tahun terakhir, besaran pajak dan retribusi daerah Kota Ternate cenderung fluktuatif. Pada tahun 2024, realisasi pajak daerah mencapai 76.736,33 juta rupiah sedangkan realisasi retribusi daerah Kota Ternate mencapai 19.570,45 juta rupiah.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah di era digital, Pemerintah Kota Ternate dituntut untuk semakin inovatif dan adaptif dalam mengelola sumber-sumber pendapatan. Salah satu langkah strategis yang sangat relevan adalah digitalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Digitalisasi pengelolaan PAD bukan sekadar transformasi teknologi, tetapi juga perubahan sistemik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pemungutan, pencatatan, dan pelaporan pendapatan daerah.

Dengan memanfaatkan sistem digital dan integrasi dengan layanan perbankan dan aplikasi pembayaran digital, pemerintah daerah dapat:

- Mempermudah wajib pajak dan wajib retribusi dalam melakukan pembayaran secara cepat dan aman.
- Meminimalisir kebocoran penerimaan karena semua transaksi tercatat secara *real-time*.
- Meningkatkan akurasi data, sehingga perencanaan dan evaluasi kebijakan PAD bisa dilakukan secara lebih tepat.
- Membangun kepercayaan masyarakat melalui sistem yang transparan dan dapat dipantau bersama.

Lebih dari itu, digitalisasi juga membuka peluang untuk menyasar potensi pajak dan retribusi yang selama ini belum tergarap maksimal, misalnya dari sektor ekonomi digital, usaha mikro berbasis daring, atau aset digital lainnya.

Oleh karena itu, komitmen untuk mendorong digitalisasi pengelolaan PAD perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas SDM, pembenahan regulasi, serta kerja sama lintas sektor, termasuk dengan perbankan, penyedia layanan digital, dan lembaga pengawasan. Karena digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui pendekatan digital yang terencana dan berkelanjutan, Kota Ternate dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mempercepat pembangunan yang berbasis data, adil, dan berorientasi pelayanan.

E. Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan instrumen penting pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi lokal demi mendorong pertumbuhan, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Kota Ternate, kehadiran BUMD tidak hanya dipandang sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menghadirkan layanan publik yang lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan warga kota. Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Ternate merupakan salah satu strategi penting dalam mendorong kemandirian fiskal dan penguatan ekonomi lokal. Sebagai entitas usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, BUMD memainkan peran ganda: sebagai pelaku bisnis yang kompetitif dan sebagai penyedia layanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Dalam konteks Kota Ternate yang merupakan pusat perdagangan, jasa, dan pemerintahan di Provinsi Maluku Utara, pengelolaan BUMD diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan wilayah kepulauan yang kompleks. Tantangan tersebut antara lain mencakup keterbatasan akses logistik, ketergantungan pada pasokan luar daerah, serta tuntutan terhadap layanan publik yang semakin efisien dan responsif.

Hingga tahun 2024, Kota Ternate memiliki 2 (dua) BUMD aktif yang dikelola oleh pemerintah daerah, yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Ake Gaale, dengan fokus pada penyediaan air bersih untuk rumah tangga dan fasilitas umum dan Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Bahari Berkesan Kota Ternate, dengan fokus akses layanan perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, pelaku UMKM, dan kelompok masyarakat yang selama ini kurang terlayani oleh perbankan konvensional di Kota Ternate. Pengelolaan BUMD di Kota Ternate merupakan bagian integral dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dengan pembenahan tata kelola, peningkatan efisiensi, serta penguatan peran sosial-ekonomi, BUMD diharapkan mampu bertransformasi menjadi badan usaha yang mandiri, profesional, dan berkontribusi signifikan terhadap pelayanan publik dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ke depan, peran BUMD di Kota Ternate tidak hanya diukur dari sisi laba usaha, tetapi juga dari kemampuannya dalam menghadirkan solusi atas kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif. Dengan demikian, penguatan peran dan kapasitas BUMD bukan hanya bagian dari strategi ekonomi daerah, melainkan juga bagian dari komitmen untuk membangun kemandirian Kota Ternate secara berkelanjutan.

Tabel. 2.78
Kinerja Keuangan Perumda Ake Gaale Kota Ternate 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Total Aset (Rp.)	77.631.065.431	78.030.827.562	78.204.466.247	76.262.659.313	73.855.755.783
Kewajiban Jangka Pendek	3.769.365.715	4.087.789.710	7.470.179.556	8.202.393.359	5.342.917.745
Kewajiban Jangka Panjang	10.299.916.834	9.752.347.085	12.646.669.384	12.307.423.511	9.419.091.159
Ekuitas (Rp.)	67.331.148.597	68.278.480.477	65.557.796.862	63.955.235.802	64.436.664.624
Pendapatan (Rp.)	57.483.460.755	58.052.168.298	59.394.422.175	67.371.845.685	75.489.497.357
Laba/Rugi Setelah Pajak	(3.113.730.889)	947.331.880	(2.644.800.454)	(1.360.274.462)	(2.719.496.546)
Return on Asset	- 4,01%	1,21%	- 3,38%	- 1,78%	- 3,68%

Sumber: Perumda Ake Gaale, 2025

Tabel. 2.79
Kinerja Keuangan PT. BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Net Pendapatan dan (Beban) Non Operasional (Rp.)	7.465.777.591	8.118.826.100	7.548.236.939	6.749.362.909	7.788.219.484
Total Aset (Rp.)	89.807.467.686	109.827.792.072	143.292.801.973	119.381.008.943	106.577.386.786
Dividen (Rp.)	1.421.833.017	2.287.089.752	2.582.607.766	2.445.981.356	2.700.870.649
Return on Asset	2,92%	3,84%	4,09%	4,69%	5,69%
Predikat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat	Sangat Sehat

Sumber: PT. BPRS Bahari Berkesan Kota Ternate, 2025

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan umum merupakan salah satu tolok ukur utama keberhasilan pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar masyarakat. Aspek pelayanan umum mencakup berbagai sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, administrasi kependudukan, serta layanan sosial lainnya yang secara langsung menyentuh kehidupan sehari-hari.

Di era otonomi daerah, tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas, merata, dan akuntabel semakin besar. Tantangan yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan anggaran, kapasitas SDM, serta kebutuhan untuk terus berinovasi agar layanan publik mampu menjawab harapan masyarakat yang semakin tinggi.

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

A. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks SPBE adalah nilai hasil pelaksananaan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE (Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang hasilnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri PAN-RB. Untuk Kota Ternate berdasarkan tabel di atas bahwa indeks SPBE Kota Ternate pada tahun 2022 sebesar 1,06 poin (Permen PAN-RB No. 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023) dan indeks SPBE Kota Ternate Tahun 2023 sebesar 1,2 poin (Surat Keputusan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023). Jika dilihat dari hasil evaluasi tersebut maka terdapat kenaikan indeks dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 0,14 poin, namun walaupun demikian kenaikan tersebut tidaklah signifikan sehingga nilai indeks yang didapatkan oleh Pemerintah Kota Ternate masih berada pada Kategori= Kurang, oleh karena itu ke depannya diperlukan peningkatan infrastruktur serta pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada pengguna SPBE baik kepada sesama pemerintah, pemerintah daerah maupun kepada masyarakat/publik.

Di sisi lain terkait Indeks SPBE yaitu belum adanya regulasi atau Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari tahun 2019 s/d 2021, hingga pada tahun 2023 baru dikeluarkannya Perda Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Ternate. Oleh Karena itu menjadi salah satu kendala dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ternate sebagai OPD yang menangani penilaian indeks SPBE, kesulitan dalam memenuhi persyaratan untuk memberikan jawaban kuesioner melalui *website* resmi Kementerian PAN-RB. Sehingga dalam penilaian Indeks SPBE oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Ternate untuk Tahun 2019 s/d 2021 tidak ada penilaian.

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi, SPBE juga memiliki peran penting dalam peningkatan pelayanan publik yang efektif dan efisien, indeks SPBE pada tahun 2019 sampai dengan 2021 belum tersedia data Indeks SPBE. Kemudian dimulai pada tahun 2022 yang dinilai oleh Kementerian PAN RB untuk Kota Ternate berada pada angka 1,06%, atau masuk kategori masih kurang, sedangkan pada tahun 2023 sedikit mengalami peningkatan atau berada pada angka 1,20% masih kategori kurang. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan lagi terhadap implementasi SPBE di Kota Ternate melalui integrasi layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada Perangkat Daerah pelayanan publik.

Tabel 2.80
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (%)	n/a	n/a	1,06	1,20	1,89

Sumber : Diskomsandi Kota Ternate, 2025

B. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan indeks yang diperoleh melalui pemantauan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dengan unsur penilaian meliputi aspek layanan profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi, pengaduan, dan inovasi yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Data Ombudsman menyebutkan bahwa pada tahun 2024 Indeks Pelayanan Publik Kota Ternate berada pada angka 80,10% dan masuk kategori Zona Hijau (Tinggi), untuk itu optimalisasi pelayanan publik perlu dipertahankan dan ditingkatkan sehingga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi berkualitas.

Tabel 2.81
Indeks Pelayanan Publik Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pelayanan Publik (%)	Covid	72,86	59,55	92,53	80,10

Sumber : Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara, 2025

C. Indeks Survei Penilaian Integritas

Indeks Survei Penilaian Integritas adalah survei yang dilakukan terhadap institusi untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi serta upaya pencegahan korupsi. Melalui SPI, KPK akan mengidentifikasi kerawanan korupsi pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dan selanjutnya akan memberikan rekomendasi perbaikan. Survei SPI baru mulai dilaksanakan secara *online* pada tahun 2021 di Kota Ternate dalam bentuk penyampaian kuesioner. Tahun 2023 capaian ISPI di Kota Ternate berada pada angka 66,54% sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan 59,88%, artinya tingkat kooperatif perangkat daerah dalam memberikan informasi berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku dan jaminan transparansi masih perlu didorong lagi agar lebih optimal.

Tabel 2.82
Indeks Survei Penilaian Integritas Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Survei Penilaian Integritas (%)	n/a	64,12	65,74	66,54	59,88

Sumber : Inspektorat Kota Ternate, 2025

D. Proses Perizinan

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan terpadu adalah suatu pendekatan dalam mengelola proses pemberian izin dan layanan publik lainnya secara efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat serta pelaku usaha. Pendekatan ini bertujuan untuk mempermudah proses administratif, mengurangi birokrasi yang berlebihan, dan meningkatkan kepercayaan serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Dengan berpegang pada prinsip utama, yaitu terpadu, transparan, efisien, responsif, dan partisipatif.

Sistem perizinan dan non-perizinan di Kota Ternate diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, melalui DPMPTSP Kota Ternate. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu merupakan yang berproses dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dengan prinsip *one stop service*. Layanan perizinan dan layanan non perizinan, mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu yang berpedoman pada standar operasional prosedur layanan perizinan dan non perizinan. Pemerintah Kota Ternate menggunakan OSS-RBA atau *Online Single Submission - Risk Based Approach*, yang merupakan salah satu aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan terpadu di Indonesia. Aplikasi ini dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan bagi pelaku usaha. Dengan manfaat utama dari aplikasi OSS-RBA, meliputi Integrasi Pelayanan, Transparansi, Kemudahan Akses, *Monitoring* Proses, dan Dukungan Pengembangan Bisnis. Penerapan aplikasi OSS-RBA dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan terpadu telah memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha di Kota Ternate.

2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

A. Persentase Penegakan Perda

Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di Kota Ternate, keberadaan Perda mencerminkan dinamika kebutuhan masyarakat, arah pembangunan daerah, serta pelaksanaan otonomi yang efektif dan akuntabel. Seiring waktu, jumlah Perda yang ditetapkan mengalami perkembangan yang mencerminkan respon legislatif dan eksekutif daerah terhadap tantangan lokal, baik dalam bidang ketertiban umum, perlindungan lingkungan, pelayanan publik, hingga penguatan sektor ekonomi kerakyatan.

Penyusunan dan penetapan Perda Kota Ternate tidak hanya merupakan kewajiban konstitusional, tetapi juga wujud dari partisipasi masyarakat dalam mendorong regulasi yang aspiratif dan solutif. Oleh karena itu, pemetaan jumlah Perda yang telah ditetapkan menjadi penting, tidak hanya sebagai catatan administratif, tetapi juga sebagai dasar evaluasi untuk melihat sejauh mana regulasi daerah mampu menjawab kebutuhan nyata warga Ternate. Data berikut menyajikan jumlah Perda Kota Ternate yang telah dimiliki oleh Pemerintah Kota Ternate dari Tahun 2020-2024 secara terperinci berdasarkan tahun pembentukannya, sebagai bahan evaluasi sekaligus refleksi terhadap peran legislasi dalam mendukung visi pembangunan Kota Ternate yang Mandiri dan Berkeadilan.

Tabel 2.83
Jumlah Peraturan Daerah Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2000-2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Peraturan Daerah	336	342	345	360	365

Sumber: Bagian Hukum dan HAM SETDA Kota Ternate, 2025

Pemerintah Kota Ternate memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap Peraturan Daerah yang telah disahkan dapat ditegakkan secara konsisten dan adil. Perda merupakan fondasi hukum yang bertujuan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ketertiban umum, perlindungan lingkungan, hingga pengelolaan sektor ekonomi dan sosial.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Ternate menunjukkan komitmen yang makin kuat terhadap penegakan Perda. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah pelanggaran yang berhasil ditindaklanjuti. Persentase penegakan dihitung dari rasio antara jumlah pelanggaran yang tertangani secara tuntas dengan jumlah total pelanggaran yang dilaporkan atau ditemukan di lapangan.

Berdasarkan laporan tahunan Satpol PP Kota Ternate, capaian penegakan Perda dalam 5 (lima) tahun terakhir berada di 100%. Angka ini menandakan bahwa kasus pelanggaran dapat diselesaikan, baik melalui proses hukum, teguran tertulis, maupun tindakan administratif lainnya. Tren ini memperlihatkan adanya konsistensi dalam penegakan Perda di Kota Ternate.

Beberapa faktor yang berkontribusi pada penegakan Perda antara lain:

1. Penguatan Kapasitas Satpol PP: Pemerintah daerah secara rutin menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan personel, baik dalam aspek teknis maupun pendekatan humanis saat menegakkan hukum.
2. Pemanfaatan Teknologi: Sistem pelaporan dan pengawasan mulai memanfaatkan teknologi digital, seperti aplikasi aduan masyarakat, sehingga proses identifikasi pelanggaran menjadi lebih cepat dan transparan.
3. Sosialisasi Berkelanjutan: Kesadaran hukum masyarakat meningkat seiring dengan gencarnya sosialisasi Perda melalui berbagai media, baik daring maupun luring.
4. Kemitraan Strategis: Kolaborasi antara pemerintah daerah dengan tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan dunia pendidikan turut membantu memperkuat pengawasan di lingkungan masing-masing.

Tabel 2.84
Kinerja Penegakan Perda Kota Ternate Tahun 2020-2024

Jenis Perda	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pengaduan per Tahun					Total	Instansi	Cara Penyelesaian	Jumlah Tuntas	Belum Tuntas
		2020	2021	2022	2023	2024					
Ketertiban Umum	Kebisingan, Parkir Liar, PKL	1.811	987	680	148	550	4.176	Satpol-PP	Teguran dan Mediasi	4.176	0
Perda Bangunan	Bangunan Tanpa IMB/PBG	25	22	20	17	15	99	Dinas PUPR	Surat Peringatan, Penyegelan	99	0
Perda Lingkungan	Tata Ruang, Dokumen Lingkungan dan IPAL/TPS LB3	32	11	3	4	7	57	DLH	Verifikasi Lapangan, Berita Acara. Sanksi Administrasi	47	10
Perda Pajak Daerah	Penunggakan/ Reklame Ilegal	69	65	54	59	52	299	BP2RD	Mediasi, Surat Paksa	299	0

Sumber: Satpol PP, Dinas PUPR, DLH dan BP2RD Kota Ternate, 2025

Dari tabulasi di atas, dapat dilihat bahwa pengaduan tertinggi berasal dari pelanggaran Perda Ketertiban Umum, khususnya terkait kebisingan dan PKL di zona terlarang. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk peningkatan sosialisasi zona larangan serta penguatan patroli rutin oleh Satpol PP. Sebagian besar pengaduan datang dari masyarakat perkotaan yang terpapar langsung dampak pelanggaran, dan penanganan dominan dilakukan melalui pendekatan non-yustisial (teguran dan mediasi).

Meski demikian, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan jumlah personel dibandingkan luas wilayah yang harus diawasi, serta kompleksitas masalah sosial yang kerap kali menjadi hambatan dalam implementasi Perda. Selain itu, ada beberapa Perda yang perlu diperbarui agar sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Melihat perkembangan yang ada, Kota Ternate menunjukkan kemajuan yang cukup baik dalam hal penegakan Perda. Ke depan, diperlukan strategi yang lebih terpadu agar capaian ini terus meningkat. Harapan besar diletakkan pada penguatan partisipasi masyarakat sebagai mitra strategis dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan di kota ini.

B. Persentase Capaian Aksi HAM

Pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan dan menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia (P5HAM). Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah melindungi dan mengatur mengenai pemenuhan Hak Asasi Manusia. Untuk memenuhi penerapan P5HAM yang maksimal dan detail, pemerintah Indonesia mencanangkan RANHAM yang mengikat pemerintah pusat dan daerah dan diatur dalam Peraturan Presiden tentang RANHAM.

Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelaporan Aksi HAM Daerah dilaksanakan guna mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Merujuk pada Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2021 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM, tujuan penilaian KKP HAM adalah untuk:

1. Memotivasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan tanggung jawab melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;
2. Mengembangkan sinergitas organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal dan instansi terkait di daerah dalam rangka penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM; dan
3. Memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM 2021-2025, merupakan dasar hukum pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2021-2025. RANHAM dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM 2021-2025 ini, terdapat 4 (empat) kelompok sasaran Aksi HAM Daerah, yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat. Adapun tujuan pelaporan bagi daerah adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan HAM di daerah (khususnya 4 (empat) kelompok sasaran: hak anak, hak perempuan, hak penyandang disabilitas, dan hak masyarakat adat);
2. Untuk menjawab permasalahan dan tantangan terkait implementasi RANHAM di daerah;
3. Untuk menilai capaian dan dampak pelaksanaan aksi HAM di daerah (provinsi, dan kab/kota);
4. Sebagai bahan pelaporan capaian RANHAM kepada Presiden;
5. Sebagai bahan masukan bagi penyusunan pelaporan Indonesia pada Dewan HAM PBB, Badan Traktat PBB, dan forum HAM Internasional lainnya;
6. Sebagai bahan evaluasi penyusunan RANHAM dan penyempurnaan Aksi HAM pada periode berikutnya;
7. Sebagai bentuk perwujudan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di daerah.

Penilaian KKP HAM dan Pelaporan Aksi HAM Daerah dilakukan setiap tahunnya. KKP HAM dimulai dari proses penyampaian data penilaian dan data dukung hingga penetapan Kabupaten/Kota Peduli HAM yang mencapai prestasi Peduli HAM. Untuk Pelaporan Aksi HAM Daerah dibagi atas 3 (tiga) periode pelaporan, yaitu B04 pada bulan April, B08 pada bulan Agustus dan B12 pada bulan Desember.

Pemerintah Kota Ternate pada Tahun 2024 untuk pelaksanaan KKP HAM dan Pelaporan Aksi HAM Daerah berhasil memperoleh penghargaan Kota Peduli HAM, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MHA-01.HA.02.01.01 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Untuk nilai rata-rata capaian pelaksanaan Aksi HAM Daerah Kota Ternate dari tahun 2021-2024 dapat pada tabel berikut:

Tabel 2.85
Persentase Capaian Aksi HAM Kota Ternate Tahun 2021-2024

No	Tahun	Penghargaan Kab/Kota Peduli HAM	Rata-rata Nilai Capaian Aksi HAM Daerah (%)	Keterangan
1	2021	Cukup Peduli HAM	91,6	
2	2022	Cukup Peduli HAM	88,2	
3	2023	Cukup Peduli HAM	79,3	
4	2024	Peduli HAM	22,2	

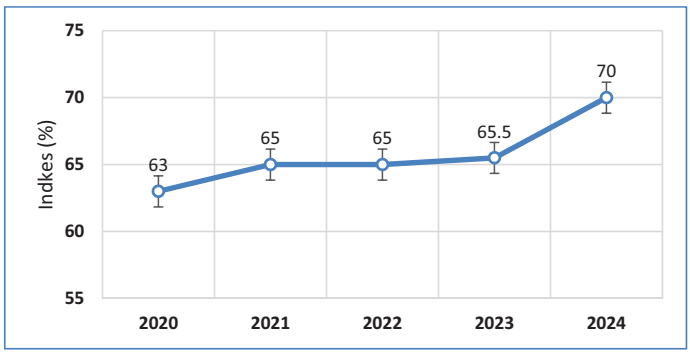
Sumber : Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Ternate, 2025

C. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia merupakan indeks komposit yang mengukur kualitas demokrasi di Indonesia, tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek dan 22 indikator. Metode penghitungan IDI menggunakan triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain. Pendekatan kuantitatif yaitu melalui penelusuran dan analisis isi surat kabar lokal dengan oplah terbesar di provinsi tersebut.

Pengumpulan berita juga dilakukan melalui proses *web scrapping* dari berbagai portal *online* dan reviu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi (SK Gubernur, Perda, SE, SK DPRD, data pemilih, data pelanggaran pemilu, dan lainnya). Data ini kemudian dilakukan koding. Pendekatan kualitatif yaitu ketika hasil data kuantitatif divalidasi melalui FGD yang melibatkan para ahli dan narasumber yang relevan. Tujuannya antara lain untuk menggali dan menjaring data kualitatif, mendapatkan informasi tambahan (verifikasi, konfirmasi, atau diskonfirmasi), serta melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi dengan indikator-indikator IDI. IDI dihitung secara tertimbang menggunakan skala 0-100.

Grafik 2.30
Indeks Demokrasi Kota Ternate Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Kesbangpol Kota Ternate, 2025

Untuk Kota Ternate IDI dihitung berdasarkan 3 aspek dan 11 indikator yaitu Kebebasan berkumpul dan berserikat, Kebebasan berpendapat, Kebebasan berkeyakinan, Kebebasan berdiksriminasi, Kebebasan memilih dan dipilih, Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, Pemilu yang bebas dan adil, Peran DPRD, Peran Partai Politik, Peran Birokrasi Pemerintah Daerah dan Peradilan yang independen. Dari hasil ini maka kondisi Indeks Demokrasi Indonesia 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan, pada tahun 2020 posisi IDI Kota Ternate berada pada skoring/bobot 63% sedangkan 2024 sebesar 70%, maka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun menunjukan tren kenaikan yang signifikan atau masuk kategori sedang.

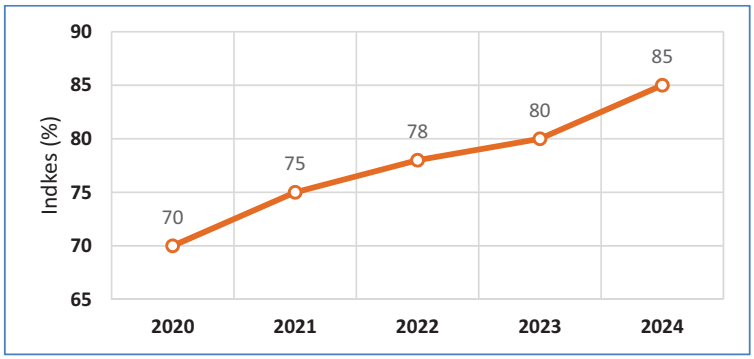
D. Indeks Rasa Aman

Rasa aman adalah rasa yang berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan. Konsep ini sering digunakan dalam psikologi untuk menggambarkan tingkat kepercayaan dan kenyamanan seseorang dalam situasi tertentu. Indeks rasa aman adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat rasa

aman yang dialami oleh orang-orang di sebuah wilayah atau komunitas. Indeks ini mengukur tingkat keamanan dan kenyamanan yang dirasakan orang-orang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Indeks rasa aman biasanya didasarkan pada kuesioner yang mensurvei penduduk tentang keamanan di sekitar mereka. Kuesioner tersebut mengukur berbagai aspek seperti keamanan lingkungan, keamanan pribadi, keamanan sosial, dan lainnya.

Hasil dari survei ini kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan skor rasa aman. Skor ini dapat digunakan untuk membantu pemerintah dan organisasi lokal mengidentifikasi masalah keamanan dan membuat tindakan untuk memperbaiki kondisi di sekitarnya. Indeks rasa aman merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas rasa aman dari gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Selain mengukur kepuasan masyarakat, juga akan diinventarisasi keinginan serta harapan dari masyarakat terhadap rasa aman bagi masyarakat di Kota Ternate.

Grafik 2.31
Indeks Rasa Aman Kota Ternate Tahun 2020-2024



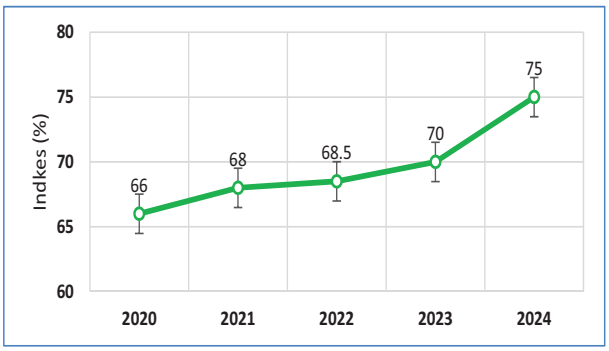
Sumber: Badan Kesbangpol Kota Ternate, 2025

Untuk IRA Kota Ternate dari tahun 2020 s/d 2024 menunjukan skoring yang baik dengan tren tahun 2020 berada pada skoring 70% meningkat menjadi 85% di tahun 2024, kondisi menunjukan rasa aman di Kota Ternate terjamin baik.

E. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Indeks ketenteraman dan ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tenteram, tertib dan teratur. Menjaga keamanan dan ketertiban bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga, dan memelihara ketertiban, ketenteraman, keteraturan dan kelestarian hidup. Ketenteraman dan Ketertiban merupakan bagian dari tugas Satuan Polisi Pamong Praja dengan melibatkan unsur-unsur terkait (TNI/POLRI) dalam rangka menegakan Peraturan Daerah, mengendalikan unjuk rasa dan menjaga rasa aman bagi masyarakat beserta lingkungannya.

Grafik 2.32
Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kota Ternate Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Kesbangpol Kota Ternate, 2025

Ketenteraman dan ketertiban Kota Ternate menunjukan tren positif di mana ada peningkatan skoring indeksnya yaitu pada tahun 2020 berada pada skoring 66% masuk kategori sedang, sedangkan pada tahun 2024 sudah hampir masuk kategori baik atau 75%. Oleh karena itu kebijakan selanjutnya bagaimana upaya mendorong capaian indeks KK ini masuk kategori sangat tinggi atau 100%.

F. Rasio Penduduk Terkena Tindak Kejahatan

Rasio Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (per 100.000 penduduk) adalah statistik penduduk terkena tindak kejahatan yang diperoleh berdasarkan laporan dari kepolisian, untuk Kota Ternate pada tahun 2020 Rasio Penduduk Terkena Tindak Kejahatan per 100.000 penduduk berada pada angka 2%, pada tahun 2024 tidak ada laporan tindak kejahatan yang menimbulkan korban jiwa di Kota Ternate. Menurunnya penduduk terkena tindak kejahatan menjadikan Kota Ternate sebagai Kota yang nyaman dihuni dengan tingkat kebahagiaan yang terjamin.

Tabel 2.86
Rasio Penduduk Terkena Tindak Kejahatan Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (%)	2	2	1	0	0

Sumber : Satpol PP Kota Ternate, 2025

G. Angka Kriminalitas

Untuk memberikan kenyamanan iklim berinvestasi dalam hal keamanan, Kota Ternate dilindungi oleh sarana keamanan berupa 1 kantor Polres, 5 kantor Polsek, 3 kantor Polisi Subsektor. Selain itu, di tahun 2023 Kepolisian Resort Ternate juga diperkuat dengan sejumlah personil polisi. Terdapat 494 orang polisi laki-laki, 30 orang polisi wanita, dan 4 orang perempuan PNS Polisi. Kriminalitas di Kota Ternate dari tahun 2020 sampai 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Sepanjang tahun 2024 terdapat 216 kasus tindak pidana yang terjadi di Kota Ternate. Jumlah ini sama dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.87
Angka Kriminalitas Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kriminalitas	206	134	191	216	216

Sumber : Kota Ternate Dalam Angka, 2025

2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

A. Indeks Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Dalam implementasinya, daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Aspek daya saing daerah dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim investasi, dan sumber daya manusia. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengeluarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2024 yang mencakup 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Perhitungan IDSD didasarkan pada 4 (empat) komponen, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi.

Tabel 2.88
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi Maluku Utara, dan Nasional Tahun 2024

KABUPATEN/KOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM			PASAR			EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	Pilar	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NASIONAL	**4,18**	**2,97**	**3,47**	**3,99**	**3,76**	**3,91**	**2,57**	**3,03**	**2,76**	**4,35**	**3,06**	**3,13**	**3,43**
PROV. MALUKU UTARA	**4,24**	**2,59**	**2,89**	**3,86**	**3,68**	**4,00**	**2,48**	**2,86**	**3,04**	**4,20**	**2,19**	**2,68**	**3,23**
RATA-RATA KAB/KOTA	**4,02**	**3,00**	**3,15**	**3,38**	**3,55**	**3,76**	**3,77**	**2,91**	**2,81**	**3,61**	**2,77**	**1,35**	**3,17**
HALMAHERA BARAT	4,19	3,02	3,18	2,92	3,50	3,75	5,00	2,60	2,98	3,30	1,87	1,07	3,11
HALMAHERA TENGAH	4,23	3,13	3,30	3,32	3,34	3,75	0,61	2,93	2,02	4,29	3,88	0,51	2,94
KEPULAUAN SULA	3,82	2,64	2,56	3,57	3,25	3,97	4,77	3,40	2,31	3,33	2,13	0,52	3,02
HALMAHERA SELATAN	4,27	2,99	2,71	3,10	3,46	3,77	1,95	1,88	3,47	4,11	2,52	0,92	2,93
HALMAHERA UTARA	4,31	3,00	3,42	3,74	3,76	3,44	4,31	3,00	3,42	3,70	2,68	2,13	3,41
HALMAHERA TIMUR	4,12	2,75	2,81	3,42	3,75	3,63	3,26	2,29	2,36	3,60	3,27	0,76	3,00
PULAU MOROTAI	3,86	2,88	2,84	3,81	3,60	3,49	4,73	2,70	2,09	3,13	2,55	1,60	3,11
PULAU TALIABU	3,27	2,53	2,71	2,53	3,15	3,72	3,01	3,49	2,49	3,16	2,53	0,93	2,79
TERNATE	3,90	3,58	4,46	3,76	3,90	3,95	5,00	3,83	4,41	4,01	3,43	2,99	3,93
TIDORE KEPULAUAN	4,23	3,48	3,51	3,62	3,76	4,15	5,00	3,02	3,42	3,42	2,85	2,11	3,48

Keterangan:
Pilar 1 : Institusi
Pilar 2 : Infrastruktur
Pilar 3 : Adopsi TIK
Pilar 4 : Stabilitas Ekonomi Makro
Pilar 5 : Kesehatan
Pilar 6 : Keterampilan
Pilar 7 : Pasar Produk
Pilar 8 : Pasar Tenaga Kerja
Pilar 9 : Sistem Keuangan
Pilar 10 : Ukuran Pasar
Pilar 11 : Dinamisme Bisnis
Pilar 12 : Kapabilitas Inovasi

Sumber: Dokumen Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2024, 2025

Berdasarkan Dokumen Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2024 (BRIN, 2025), komponen pilar yang unggul di Kota Ternate adalah Pilar 3 "Adopsi TIK", Pilar 7 "Pasar Produk" dan Pilar 9 "Sistem Keuangan". Sementara itu, komponen pilar yang terendah adalah Pilar 11 "Dinamika Bisnis" dan Pilar 12 "Kapasitas Inovasi".

Meningkatkan indeks daya saing bukanlah tugas yang ringan, karena memerlukan kolaborasi lintas sektor dan konsistensi kebijakan. Kota Ternate harus terus memperkuat program pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik yang transparan, serta menggandeng sektor swasta dan masyarakat dalam berbagai inisiatif pembangunan.

2.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Bidang Pendidikan

1. SPM Bidang Pendidikan

Standar pelayanan minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Jenis pelayanan bidang Pendidikan sesuai standar pelayanan minimal sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 untuk daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

a. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan PAUD;
b. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar;
c. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan.

Perkembangan capaian SPM bidang pendidikan di Kota Ternate tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.89
Capaian SPM Bidang Pendidikan Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Capaian (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan PAUD	56,89	57,24	54,54	63,96	41,23
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar	97,69	99,03	99,12	99,04	76,60
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan	86,12	86,25	86,49	86,73	79,78

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Ternate, 2025

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM). APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. APK Kota Ternate sepanjang 5 (lima) tahun terakhir mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami fluktuasi, baik di jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK.

Tabel 2.90
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Ternate dengan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Tahun	SD/MI/Sederajat (%)		SMP/MTS/Sederajat (%)		SMA/MA/SMK/Sederajat (%)
	Kota Ternate	Maluku Utara	Kota Ternate	Maluku Utara	Maluku Utara
2020	100,52	108,71	107,68	88,28	93,44
2021	99,26	108,07	91,56	87,99	95,04
2022	108,05	108,05	92,93	88,35	95,40
2023	84,01	107,81	98,16	88,71	95,64
2024	108,69	106,94	107,48	92,44	91,01

Sumber: BPS Kota Ternate, 2025

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Capaian APM Kota Ternate dari tahun 2020-2024 jenjang SD/MI berada di kisaran 75% sampai dengan 98%. Capaian APM pada jenjang SMP/MTs pada tahun 2024 meningkat jika dibandingkan tahun 2023. Demikian juga APM pada jenjang SMA/MA/SMK pada 2024 mengalami peningkatan. Secara rinci perkembangan APM di Kota Ternate dari tahun 2020-2024 baik SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.91
Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Ternate dengan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Tahun	SD/MI/Sederajat (%)		SMP/MTS/Sederajat (%)		SMA/MA/SMK/Sederajat)%)
	Kota Ternate	Maluku Utara	Kota Ternate	Maluku Utara	Maluku Utara
2020	89,56	97,21	75,82	76,90	64,25
2021	96,68	97,20	78,41	77,03	64,11
2022	97,40	97,27	78,53	77,41	65,35
2023	75,54	97,36	78,85	78,53	65,75
2024	98,01	96,41	81,08	79,34	68,02

Sumber: Kota Ternate Dalam Angka & Provinsi Maluku Utara Dalam Angka, 2025

4. Indikator Kinerja Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar. Dalam rangka menjamin kualitas dan pemerataan layanan pendidikan, pemerintah menetapkan Indikator Kinerja Urusan Pendidikan sebagai instrumen pengukuran capaian pembangunan di sektor ini, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Indikator kinerja ini berfungsi sebagai alat ukur yang objektif, terstandar, dan berbasis data untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi tanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan pendidikan. Dengan merujuk pada regulasi nasional, termasuk arahan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, indikator kinerja telah disusun agar selaras dengan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan pemerataan.

Indikator-indikator tersebut dikembangkan sejalan dengan pendekatan Rapor Pendidikan sebagai sistem evaluasi berbasis data nasional. Dalam Surat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1422/MDM.A/PR.07.05/2025 tanggal 24 Januari 2025, telah ditegaskan bahwa indikator kinerja ini menjadi dasar utama dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan pendidikan di daerah.

Tabel 2.92
Capaian Indikator Kinerja Bidang Pendidikan Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Capaian (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A.1 Skor Kemampuan Literasi (SD)	n/a	n/a	1,56	46,64	48,75
A.1 Skor Kemampuan Literasi (SMP)	n/a	n/a	1,63	61,08	65,38
A.2 Skor Kemampuan Numerasi (SD)	n/a	n/a	1,45	34,17	43,67
A.2 Skor Kemampuan Numerasi (SMP)	n/a	n/a	1,61	38,82	58,78
B.10 Angka Partisipasi Sekolah (5-6)(PAUD)	n/a	n/a	36,38	54,54	79,16
B.13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 (SD/SMP)	n/a	n/a	99,06	-	99,64
B.15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan	n/a	n/a	-	4,56	13,71
B.8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	n/a	n/a	71,76	-	77,03
C.1 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	n/a	n/a	58,03	62,01	62,69
D.10 Iklim Inklusivitas (SD)	n/a	n/a	1,94	53,17	53,52
D.10 Iklim Inklusivitas (SMP)	n/a	n/a	1,95	55,91	54,30
D.4 Iklim Keamanan (SD)	n/a	n/a	2,05	64,87	68,45
D.4 Iklim Keamanan (SMP)	n/a	n/a	2,17	66,38	67,53
D.8 Iklim Kebinekaan (SD)	n/a	n/a	2,18	65,8	68,08
D.8 Iklim Kebinekaan (SMP)	n/a	n/a	2,26	66,07	68,73

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Ternate, 2025

B. Bidang Kesehatan

Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu hal penting untuk ditingkatkan guna menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera. Untuk itulah peran serta pemerintah sangat diperlukan dalam hal peningkatan pelayanan kesehatan sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat semakin meningkat. Peran Pemerintah dalam pembangunan kesehatan menyangkut berbagai aspek seperti penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat baik menyangkut biaya maupun tempatnya. Selain itu, pemberdayaan kepada masyarakat untuk lebih memahami pola hidup sehat dan upaya menjaga kesehatan secara baik terus digalakkan oleh Pemerintah Daerah ini melalui Dinas Kesehatan.

1. SPM Bidang Kesehatan

Untuk menjamin kesinergian program pembangunan nasional dan daerah, di mana penyusunan RKPD berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemeritahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam rangka penerapan SPM Bidang Kesehatan diperlukan Standar Teknis SPM yang menjelaskan langkah operasional pencapaian SPM Bidang Kesehatan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagai acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah. Penerapan SPM bidang kesehatan tidak dapat terpisah dengan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena sifat saling melengkapi dan sinergisme. Jenis pelayanan bidang Kesehatan sesuai standar pelayanan minimal sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 untuk daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

a. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan;
b. Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan;
c. Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan;
d. Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan;
e. Persentase pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan;
f. Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan;
g. Persentase warga negara usia lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan;
h. Persentase warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan;
i. Persentase warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan;
j. Persentase warga negara gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan;
k. Persentase warga negara terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan;
l. Persentase warga negara orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Perkembangan capaian SPM bidang kesehatan di Kota Ternate tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.93
Capaian SPM Bidang Kesehatan Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Capaian (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	90	95,6	92	94	96
2. Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	94	99,1	94	99,5	100
3. Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan pelayanan	99	99,7	98	97	99
4. Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	86	86	83	76	84
5. Persentase pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	58,4	85	97,5	96
6. Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	91	95	89	87	77
7. Persentase warga negara usia lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan	94	76,28	87	94	92
8. Persentase warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	70	99	100	58
9. Persentase warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	57	77	78	100	100
10. Persentase warga negara gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	95	100	101	80	100
11. Persentase warga negara terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	74	49,3	98	90	75
12. Persentase warga negara orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	69	82	75	75	75

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ternate, 2025

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi merupakan kejadian kematian yang terjadi pada periode sejak bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Kematian bayi dipengaruhi oleh jumlah kematian neonatal, yang merupakan masalah yang kontribusinya sangat tinggi terhadap kematian bayi. Penyebab kematian neonatal antara lain adanya infeksi (*pneumonia*, tetanus, diare), prematur/BBLR, dan kelainan kongenital. Status kesehatan bayi tersebut sangat terkait dengan beberapa faktor ibu selama hamil dan ibu melahirkan, seperti rendahnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, rendahnya pemeriksaan selama masa kehamilan, dan juga status gizi ibu hamil yang masih rendah. Angka Kematian Bayi dihitung berdasarkan jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami fluktuasi. Angka Kematian Bayi tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 7,2 per 1.000 kelahiran hidup dan terendah pada tahun 2022 sebesar 4,26 per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi berbanding terbalik dengan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB). Jika tren Angka Kematian Bayi di suatu wilayah cenderung meningkat maka *trend* Angka Kelangsungan Hidup Bayi akan semakin menurun. Adapun penyebab Angka Kematian Bayi di Kota Ternate di antaranya disebabkan oleh kasus BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), asfiksia, kelainan kongenital, kelainan saluran pencernaan, *pneumonia*, diare dan adanya penyakit penyerta lainnya.

Grafik 2.33
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Ternate Tahun 2020-2024

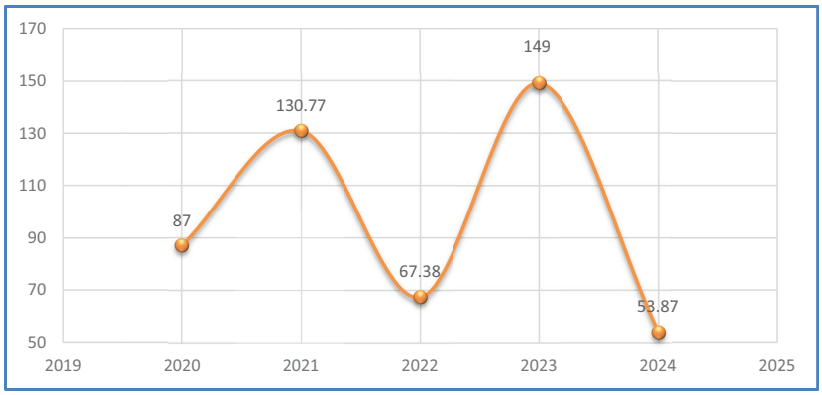


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ternate, 2025

3. Angka Kematian Ibu (AKI)

Kematian ibu maternal adalah kematian ibu karena kehamilan, melahirkan atau selama nifas. Angka Kematian Ibu merupakan salah satu indikator yang cukup penting untuk menggambarkan status kesehatan ibu baik dari asupan gizi, kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan dan kesadaran dalam melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin baik di saat kehamilan maupun masa nifas. Gambaran Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Ternate pada tahun 2020 berada pada angka 87 per 100.000 kelahiran, pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 149 per 100.000 kelahiran namun pada tahun 2024 mengalami penurunan kembali sebesar 53,87 per 100.000. Berikut adalah sajian data Jumlah Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran di Kota Ternate Tahun 2020–2024.

Grafik 2.34
Jumlah Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Kota Ternate Tahun 2020-2024

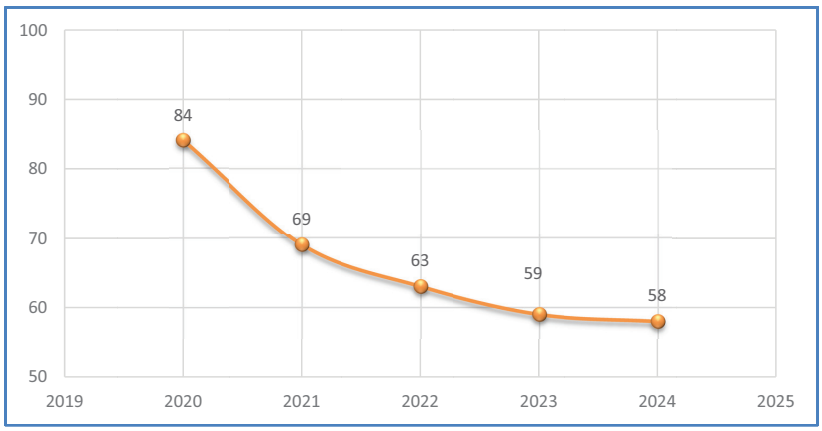


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ternate, 2025

4. *Universal Child Immunization* (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) merupakan suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (anak di bawah umur 1 tahun). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Selain itu, pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap pada setiap bayi dan anak. Perkembangan capaian kinerja UCI di Kota Ternate sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dapat dilihat sebagaimana data di bawah ini.

Grafik 2.35
Persentase *Universal Child Immunization* (UCI) Kota Ternate Tahun 2020-2024



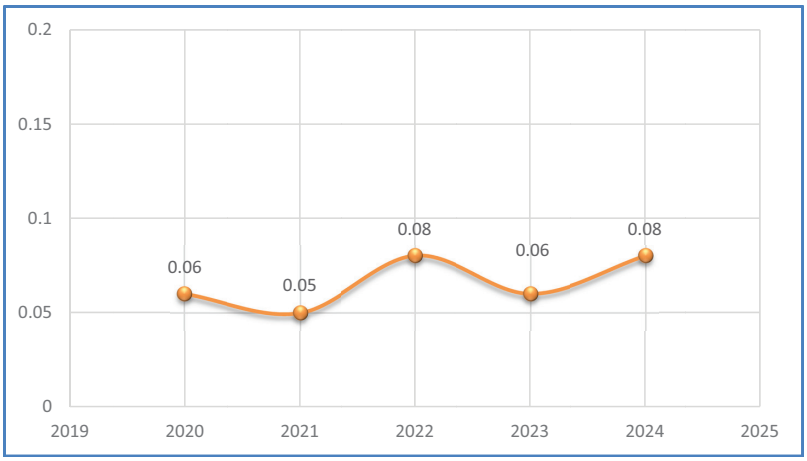
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ternate, 2025

5. *Annual Parasite Incidence* (API)

Annual Parasite Incidence merupakan jumlah penderita malaria dengan konfirmasi laboratorium positif terhadap populasi di wilayah dan waktu tertentu per 1.000 penduduk. Malaria merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang dapat menyebabkan kematian terutama pada kelompok risiko tinggi yaitu bayi, anak di bawah lima tahun (balita), ibu dan ibu hamil. Selain itu, malaria secara langsung juga dapat menyebabkan anemia dan menurunkan produktivitas kerja.

Penyakit malaria masih endemis di wilayah Maluku Utara khususnya di Kota Ternate. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menekan perkembangan penyakit malaria di Kota Ternate, antara lain: bekerja sama antara jajaran kesehatan dengan masyarakat dalam melaksanakan penyemprotan pada tempat-tempat perindukan nyamuk, pembubuhan larvasida pada air, serta pengeringan cekungan yang menampung air. Selain itu, memberikan bantuan kelambu berinsektisida kepada masyarakat untuk melindungi dari gigitan nyamuk malaria. Berdasarkan data dan informasi capaian indikator kinerja pelaksanaan API di Kota Ternate sejak tahun 2020- 2024, dapat dilihat sebagaimana grafik di bawah ini.

Grafik 2.36
Persentase *Annual Parasite Incidance* (API) Kota Ternate Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ternate, 2025

6. Tuberkulosis (TBC)

Penyakit Tuberkulosis (TBC) merupakan salah satu penyakit yang menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, sehingga dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Penanggulangan penyakit Tuberkulosis juga menjadi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Kota Ternate pada tahun 2020 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis sebesar 67% dan capaian pada tahun 2024 meningkat sebesar 99,5% cakupan pengobatan dari target yang telah ditetapkan. Kemudian angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis pada tahun 2020 sebanyak 80% sedangkan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 89%, sama halnya dengan Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) adalah merupakan gambaran dari 100.000 penduduk terdapat 189 orang penderita TBC pada tahun 2020, dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 462 orang penderita dari 100.000 penduduk. Kecenderungan kenaikan ini menunjukan bahwa penyakit Tuberkulosis di Kota Ternate perlu ditangani secara baik sehingga tidak ada peningkatan.

Tabel 2.94
Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatement coverage*) (%)	67	69	70	71	99,5
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment succes rate*) (%)	80	84	85	86	89
Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	189	219	322	344	462

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Ternate, 2025

C. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Standar Teknis Pelayanan Minimal, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.
b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

Perkembangan capaian SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kota Ternate tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.95
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate Tahun 2020-2024

Uraian	Capaian (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	86,75	86,88	87,01	91,37	91,52
Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengelolahan limbah domestik	0,17	0,17	0,28	0,59	1,01

Sumber: Dinas PUPR Kota Ternate, 2025

2. Drainase Perkotaan

Permasalahan drainase perkotaan, khususnya kota pantai seperti Kota Ternate, bukanlah hal yang sederhana sebab sangat dipengaruhi oleh kondisi air laut namun keuntungan yang dimiliki Kota Ternate karena kondisi topografi dengan tingkat kemiringan yang sangat baik, sehingga tidak perlu mempergunakan teknologi untuk mengeringkan drainase. Oleh karenanya pengaturan kembali sistem drainase sehingga dapat membentuk sebuah jaringan drainase mulai dari hulu hingga hilir berdasarkan kapasitas drainase sangat diperlukan. Penggunaan lahan yang tak terkontrol terutama pada kawasan-kawasan pegunungan serta daerah sekitar aliran sungai sehingga kawasan yang tadinya merupakan tangkapan hujan (daerah resapan air) atau kawasan yang berfungsi sebagai kawasan perlindungan bagi sungai, terus mengalami penyempitan akibat laju pertumbuhan kota, dengan demikian tentunya hujan tidak lagi dapat terserap ke dalam tanah atau sungai tidak mampu lagi berfungsi secara maksimal, sehingga air yang seharusnya mengalir mengikuti badan sungai meluap dan mengenangi daerah yang memiliki topografi yang rendah. Drainase yang mengalami penurunan kapasitas akibat pendangkalan dan penyempitan yang disebabkan oleh tingginya sedimentasi dan sampah. Selain itu, daya tampung drainase yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada akibat dari perencanaan drainase yang tidak mempertimbangkan pertumbuhan Kota.

Penyebab dari terjadi genangan di Kota Ternate diakibatkan oleh faktor:

a. Penyebab alam, seperti lokasi yang cekung dan terisolir tanpa adanya *outlet* untuk mengeringkan daerah tersebut.
b. Bentuk, ukuran penampang saluran drainase yang tidak terencana dengan baik.
c. Pemeliharaan yang tidak memadai sehingga sering terjadi penyumbatan pada mulut gorong-gorong atau sedimentasi yang berlebihan pada dasar saluran.
d. Pendangkalan drainase akibat kebiasaan masyarakat yang membuang sampah pada saluran drainase.
e. Berkurangnya daerah resapan air akibat pembangunan perumahan yang tidak terkendali.

Tabel. 2.96
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	71,61	72,87	74,37	75,14	87,11

Sumber: Dinas PUPR Kota Ternate, 2025

2. Jaringan Jalan dan Jembatan

Kondisi jaringan jalan dan jembatan di Kota Ternate kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.97
Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	81,24	83,79	85,25	89,97	96,46

Sumber: Dinas PUPR Kota Ternate, 2025

3. Air Limbah

Pertumbuhan penduduk Kota Ternate yang cukup tinggi akan berdampak terhadap peningkatan kebutuhan sarana prasarana dan utilitas. Salah satu aspek kebutuhan yang penting adalah aspek sanitisasi terutama yang terkait dengan air limbah, yang jika tidak ditangani dengan baik akan berdampak terhadap degradasi lingkungan dan menurunnya tingkat kesehatan masyarakat.

Banyak orang tidak menyadari besarnya pengaruh limbah rumah tangga terhadap kehidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Menyalurkan limbah rumah tangga ke alam bebas tanpa melalui proses pengolahan, akan membawa dampak buruk yang berkepanjangan bagi keberlangsungan hidup ekosistem.

Daerah perkotaan dengan jumlah penduduk yang padat, memiliki permasalahan pada pembuangan limbah rumah tangga. Permukiman padat di perkotaan banyak yang tidak dilengkapi dengan sumur resapan untuk mengolah kembali air ataupun mengendapkan limbah cair rumah tangga yang dihasilkan dari berbagai aktivitas, seperti: mandi, buang air kecil, buang air besar, cuci tangan, cuci alat masak dan alat makan, cuci pakaian, cuci kendaraan ataupun aktivitas lainnya.

Berbagai dampak yang dihasilkan dari proses pembuangan air limbah rumah tangga ke alam bebas, antara lain:

a. Dampak dari Aspek Kesehatan, air limbah yang berasal dari toilet mengandung bakteri *E. Coli* yang dapat menyebabkan penyakit perut seperti *typhus*, diare, kolera. Bila tidak diolah secara memadai, limbah toilet bisa merembes ke dalam sumur (apalagi bila jarak antara sumur dan *septic-tank* tidak sesuai baku mutu, seperti yang banyak ditemukan di permukiman padat). Bila air sumur yang sudah tercemar tersebut dimasak, bakteri akan mati, tetapi bakteri tetap dapat menyebar melalui proses lain, seperti; cuci piring, mandi, gosok gigi dan kegiatan penggunaan air sumur lainnya tanpa melalui proses memasak.

b. Dampak dari Aspek Lingkungan, jenis limbah tertentu, seperti limbah cuci mengandung bahan kimia deterjen yang dapat mempengaruhi tingkat keasaman/pH tanah. Limbah dengan kandungan bahan kimia yang dibuang dapat mematikan tumbuhan dan hewan tertentu. Keadaan ini dapat merusak ekologi lingkungan secara keseluruhan dalam waktu yang berkelanjutan.

c. Jika air tercemar limbah seperti sampah ataupun bahan kimia, hal ini akan mengganggu makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Tidak hanya hewan-hewan yang hidup di dalamnya, tumbuhan air pun akan terganggu produktivitasnya karena air berguna sebagai pembentuk protoplasma yang berperan dalam proses transpirasi dan fotosintesis.

d. Dampak dari Aspek Estetika, seperti halnya limbah padat, air limbah yang tidak diolah dapat menimbulkan masalah bau yang tidak sedap dan menghadirkan lingkungan yang tidak elok dipandang.

Tabel. 2.98
Persentase Penduduk Berakses Air Limbah Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penduduk Berakses Air Limbah	86,16	89,58	92,07	97,36	93,18

Sumber: Dinas PUPR Kota Ternate, 2025

4. Penataan Ruang

Berdasarkan isu lingkungan dalam beberapa dasawarsa belakangan ini mulai dikedepankan oleh Kota-kota besar di dunia. Hal ini dikarenakan semakin menurunnya daya dukung lingkungan terutama lingkungan perkotaan yang semakin terhimpit dengan peningkatan aktivitas warganya. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak diterbitkan diganti dengan Persetujuan Banguan Gedung (PBG) melalui aplikasi SIMBG dan dikelola Dinas PUPR. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan mengacu

pada jumlah bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dibandingkan dengan jumlah total bangunan dalam suatu area atau wilayah tertentu. Ini bisa menjadi indikator kepatuhan terhadap peraturan pembangunan setempat.

Tabel. 2.99
Rasio Bangunan Ber- IMB per Satuan Bangunan Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Bangunan Ber- IMB per Satuan Bangunan	53,45	54,39	54,99	87,20	81,12

Sumber: Dinas PUPR Kota Ternate, 2025

D. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah.

Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, meliputi:

- Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;
- Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kab/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni.

Tabel. 2.100
Capaian SPM Bidang PERKIM Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target dan Realisasi (Tahun)				
	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	0
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kab/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perkim dan Pertanahan Kota Ternate, 2025

Pemerintah Kota Ternate terus berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Keberhasilan capaian kinerja pengelolaan urusan perumahan dan kawasan permukiman dapat diukur dengan indikator Peningkatan Kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman Kumuh.

Tabel. 2.101
Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman Kumuh	3,1	3,2	3,5	5,0	7,38

Sumber: Dinas Perkim dan Pertanahan Kota Ternate, 2025

Backlog perumahan di Kota Ternate mencerminkan tantangan besar dalam penyediaan hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat. Sebagai kota kepulauan yang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa di Maluku Utara, Ternate mengalami pertumbuhan jumlah penduduk dan rumah tangga yang cukup pesat. Hal ini mendorong meningkatnya kebutuhan rumah, sementara ketersediaan lahan dan kemampuan masyarakat untuk membangun atau membeli rumah masih terbatas.

Dari sisi kuantitas, masih terdapat masyarakat yang belum memiliki rumah sendiri sehingga harus menumpang, menyewa, atau tinggal dalam kondisi hunian yang tidak memadai. Dari sisi kualitas, sebagian rumah masyarakat di wilayah pesisir maupun lereng gunung belum memenuhi standar kelayakan, seperti ketercukupan luas bangunan, akses air bersih, sanitasi, serta struktur bangunan yang aman dari bencana.

Kondisi geografis Ternate yang berupa pulau vulkanik dengan keterbatasan lahan datar juga menjadi faktor utama yang memperberat *backlog* perumahan. Harga tanah yang tinggi di kawasan perkotaan membuat rumah layak huni semakin sulit dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di sisi lain, keterbatasan akses pembiayaan perumahan dan tingginya biaya pembangunan menjadi hambatan tersendiri.

Percepatan penanganan *backlog* tetap membutuhkan kolaborasi dengan sektor swasta, perbankan, dan masyarakat sendiri agar dapat menghadirkan hunian yang layak dan terjangkau di tengah keterbatasan lahan perkotaan. Tujuannya adalah agar setiap keluarga di Ternate dapat menikmati hak atas hunian yang layak, aman, serta mendukung kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

Tabel. 2.102
***Backlog* Perumahan Kota Ternate Tahun 2017-2024**

No	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun	
		2017 - 2023	2024
1	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit)	4.278	2.039
2	Jumlah Penanganan (Unit)	2.239	31
3	Sisa Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit)	2.039	2.008

Sumber: Dinas Perkim dan Pertanahan Kota Ternate, 2025

E. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis di mana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kota Ternate mengupayakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya lainnya terkait pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi:

- Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Pelayanan informasi rawan bencana;
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Tabel. 2.103
Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Capaian (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda kab/kota	100	100	100	100	100
Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	91,89	94,47	83,80	89,30	89,45
Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	38,25	38,60	48,50	39,30	45,68
Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	97,29	98,57	100	93,30	99,63
Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	79,50	80	86	87,5	88,04

Sumber: Satpol PP Kota Ternate, BPBD Kota Ternate, dan Dinas Kebakaran Kota Ternate, 2025

Cakupan indikator keberhasilan pelaksanaan urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai tabel berikut:

Tabel. 2.104
Capaian Kinerja Satpol PP Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	n/a	100	100	100	95
Angka Kriminalitas yang Ditangani	n/a	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP Kota Ternate, 2025

F. Bidang Sosial

Jenis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial meliputi:

- Persentase warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
- Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
- Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
- Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti.
- Persentase warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota.

Tabel. 2.105
Capaian SPM Bidang Sosial Kota Ternate Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja	Target & Realisasi (%)				
	Target Permendagri No. 59/2021	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Persentase warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	82,2	83,19	100	100
Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	81,2	81,4	98,33	95
Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	83,7	83,7	87,69	100
Persentase warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	83,4	83,6	100	100
Persentase warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota	100	95,2	96,1	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kota Ternate, 2025

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa permasalahan-permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan. Berdasarkan data yang diperoleh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, penanganan bidang sosial khususnya terkait penurunan PMKS, tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.106
PMKS Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penurunan PMKS	10,26	55,14	23,93	22,64	32,65

Sumber: Dinas Sosial Kota Ternate, 2025

Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Bidang Tenaga Kerja

Kemajuan perekonomian suatu daerah, ditandai pula dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja baru, karena salah satu indikator sosial untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam hal kesejahteraan penduduk adalah indikator ketenagakerjaan. Permasalahan penting dalam bidang ketenagakerjaan selain keadaan tenaga kerja dan struktur ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran yang selama ini kita hadapi. Dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas tidak mampu menyerap pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Konsep usia kerja yang digunakan dalam SAKERNAS adalah usia 15 tahun ke atas. Usia kerja ini dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang masuk kategori angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan yang masuk kategori bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang kegiatan sehari-harinya mengurus rumah tangga, sekolah dan kegiatan pribadi lainnya.

Adapun rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kota Ternate mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Perkembangan rasio penduduk yang bekerja selama periode 2020-2024, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.107
Rasio Penduduk Bekerja Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Penduduk Bekerja	94,20	94,30	94,23	93,38	93,58

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate, 2025

B. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender dan Pemenuhan Hak Anak. Indikator capaian urusan pemberdayaan perempuan diukur berdasarkan (a) skoring Anugerah Parahita Ekapraya (APE) adalah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG), dan (b) Indeks Pemenuhan Hak Anak yang selanjutnya disingkat IPHA adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan Pemenuhan Hak Anak. Berikut tabel realisasi kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Ternate tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.108
Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan Anak Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Implementasi Pengarustamaan Gender (Anugerah Parahita Ekapraya)	650	650	731	780	831,44
Indeks Pemenuhan Hak Anak	n/a	67	67	59	379,85

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA Kota Ternate, 2025

C. Bidang Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan di suatu daerah mencakup empat komponen, yaitu: (1) kecukupan ketersediaan pangan; (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun; (3) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan; dan (4) kualitas/ keamanan pangan.

Oleh karena itu, ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus menjadi pilar utama hak asasi manusia, selain itu ketahanan pangan merupakan bagian sangat penting dari ketahanan nasional. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga mampu mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadi ketergantungan kepada pihak manapun.

Petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan, karena petani adalah produsen pangan sekaligus sebagai kelompok konsumen yang terbesar. Pertanian sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan, karena pangan merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar bagi setiap manusia. Setiap negara atau daerah selalu termotivasi untuk memiliki stok bahan pangan pokok dalam jumlah relatif aman untuk kebutuhan rakyatnya dalam jangka waktu tertentu. Cakupan indikator keberhasilan pelaksanaan urusan ketahanan pangan, di antaranya diukur melalui indikator pencapaian skor pola pangan harapan. Realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.109
Skor Pola Pangan Harapan Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Skor Pola Pangan Harapan	73,70	73,10	75,10	75,80	88,80

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Ternate, 2025

D. Bidang Pertanahan

Kinerja urusan pertanahan dapat dilihat dari cakupan bidang tanah bersertifikat milik pemerintah Kota Ternate. Capaian kinerja urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.110
Capaian Kinerja Bidang Pertanahan Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Bidang Tanah Bersertifikat Milik Pemerintah	48	15,2	12,14	21,35	24,05

Sumber: Dinas Perkim dan Pertanahan Kota Ternate, 2025

E. Bidang Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup yang lestari merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan di era otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Realisasi kinerja urusan lingkungan hidup tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.111
Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pengendalian kualitas lingkungan hidup	n/a	2,1	2,44	3,6	4,01
Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	12,6	12,5	12,53	12,53	12,53
Persentase jumlah sampah yang tertangani	n/a	60,96	60,51	61,23	70,18
Predikat Pengelolaan Lingkungan Hidup	n/a	Tidak Ada	75	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, 2025

Untuk memenuhi kebutuhan RTH sebesar 30% di Kota Ternate sulit untuk terealisasikan terlebih dari kondisi Ternate saat ini dengan luas lahan yang tidak terbangun hanya sedikit, dan cenderung telah terbangun dengan kegiatan perkantoran, dominasi perumahan yang sangat tinggi serta pertumbuhan penduduk yang sangat pesat.

F. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar. Capaian kinerja tahun 2020-2024, tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.112
Capaian Kinerja Dukcapil Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	94,02	109	96,15	92,46	103
Persentase Kepemilikan KK	100,7	100	100	100	100
Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran	88,97	94,41	95,20	96,87	108

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, 2025

G. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan jumlah penduduk perlu mendapat perhatian karena jumlah penduduk yang besar tanpa diimbangi dengan ketersediaan berbagai fasilitas penunjang kebutuhan mendasar dan juga kesempatan kerja akan menjadi permasalahan. Strategi yang dikembangkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yaitu dengan terus menggalakkan program Keluarga Berencana (KB), yang pada dasarnya bertujuan untuk menekan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk melalui upaya mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemakaian alat kontrasepsi KB.

Partisipasi masyarakat terhadap program KB di Kota Ternate dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkat hasilnya, karena di samping memberikan dampak positif dalam hal menekan angka kelahiran, program KB juga cukup mempunyai andil untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data realisasi laju pertumbuhan penduduk Kota Ternate, pada tahun 2020 adalah sebesar 0,96 persen, dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 1,16 persen. Berikut tabel realisasi indikator kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2020-2024.

Tabel 2.113
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Penduduk	-0,02	0,001	0,03	1,48	2,85

Sumber: Dinas Pengendalian Kependudukan dan KB Kota Ternate, 2025

H. Bidang Perhubungan

Kinerja urusan perhubungan tidak terlepas dari sektor transportasi. Transportasi berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Menjadi konsekuensi logis keberadaan transportasi harus mampu menghasilkan jasa layanan yang handal, dengan tetap mengikuti perkembangan baik internal maupun eksternal sistem yang harus disikapi secara komprehensif untuk memberikan solusi pelayanan transportasi yang terbaik.

Seiring dengan bertambahnya panjang jalan yang berkondisi baik dan semakin mudahnya fasilitas kepemilikan kendaraan bermotor, maka semakin banyak pula angkutan darat di Kota Ternate. Pada Tahun 2024 panjang jalan di Kota Ternate 319.789 km, jenis kendaraan terbanyak di Kota Ternate yaitu jenis sepeda motor sebanyak 123.914 unit dan sedan, *jeep, station wagon* sebanyak 8.802 unit (Sumber: Kota Ternate Dalam Angka, 2025). Sedangkan di tahun 2024 banyaknya penumpang yang bepergian melalui Pelabuhan Ahmad Yani sebanyak 392.902 orang, dan penumpang yang datang sebanyak 427.817 orang. Di sisi lain, arus bongkar muat barang melalui kargo barang angkutan dalam negeri yang terjadi di Pelabuhan Ahmad Yani pada tahun 2024 sebanyak 642.824 ton/m3 (bongkar) sedangkan barang yang dimuat sebanyak 93.077 ton/m^3 (Sumber: Kota Ternate Dalam Angka, 2025).

Untuk transportasi udara akan ditinjau dari perbandingan atau rasio antara penumpang dengan jumlah penerbangan. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah penumpang yang berangkat untuk penerbangan selama Tahun 2024 adalah sebanyak 389.236 orang, sedangkan penumpang yang datang sebanyak 392.901 orang (Sumber: Kota Ternate Dalam Angka, 2025).

Tabel 2.114
Capaian Kinerja Perhubungan Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	n/a	40	50	70	77
Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan	n/a	45	80	85	90
Persentase Penerimaan PAD dari Pengelolaan Perparkiran	n/a	50	15	29,68	47

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Ternate, Tahun 2025

Penguatan konektivitas wilayah merupakan salah satu strategi yang ditempuh dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Dalam mencapai keberhasilan pembangunan maka diperlukan tercapainya kondisi konektivitas yang ideal sehingga dapat mendukung perkembangan wilayah sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai.

Tabel 2.115
Indeks Konektivitas Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Konektivitas	48,28	48,28	48,28	48,28	50,10

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Ternate, Tahun 2025

I. Bidang Komunikasi dan Informatika

Pembangunan urusan informasi dan komunikasi ditandai melalui indikator pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi, serta kerjasama informasi dan media massa. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan komunikasi dan informatika, dapat diukur melalui indikator (i) Tingkat Pelayanan Masyarakat Melalui Media *On-Line*; (ii) Tingkat Ketersediaan *Data Base* informasi Daerah yang Akurat; (iii) Cakupan Wilayah yang Terakses Jaringan *Internet/Celluler*; serta (iv) Cakupan Wilayah Pelayanan Informasi dan Publikasi. Tabel berikut merupakan gambaran kinerja urusan komunikasi dan informatika Kota Ternate tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.116
Capaian Kinerja Kominfo Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Pelayanan Masyarakat Melalui Media *On-Line*	n/a	40	42	66	70
Tingkat Ketersediaan *Data Base* Informasi Daerah yang Akurat	n/a	34,4	12,3	35	24
Cakupan Wilayah yang Terakses Jaringan *Internet/Celluler*	n/a	44	85	90	93
Cakupan Wilayah Pelayanan Informasi dan Publikasi	n/a	25	38	60	75

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate, 2025

J. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Salah satu faktor yang memicu pertumbuhan perekonomian adalah meningkatnya peran serta masyarakat. Untuk mendongkrak peran masyarakat dimaksud salah satunya adalah dengan meningkatkan dan menguatkan lembaga perekonomian masyarakat melalui penguatan aspek permodalan koperasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Terkait dengan pembagian kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal penyelenggaraan UMKM, adalah sebagai berikut:

- Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Menegah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Kecil menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
- Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan urusan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara umum antara lain:

- Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam pembinaan koperasi dan UMKM.
- Pertumbuhan usaha dan industri kecil menengah yang melambat.
- Masih rendahnya kualitas sumber daya (jiwa wirausaha dan manajemen).
- Peran koperasi dan pengembangan UMKM yang belum optimal.
- Masih rendahnya daya saing usaha koperasi dibanding dengan pelaku ekonomi lainnya.

Data proporsi UMKM yang memperoleh penghargaan atau *award* dan persentase koperasi yang berkualitas di Kota Ternate tahun 2020-2024, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.117
Capaian Kinerja UMKM Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi UMKM yang memperoleh penghargaan/*Award*	0	0	0	0	0
Persentase koperasi yang berkualitas	7,32	7,18	7,13	6,0	30,98

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate, 2025

Untuk rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB Kota Ternate, dipahami bahwa semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut. Pertumbuhan usaha koperasi menunjukkan bahwa pada tahun 2020 angka usaha koperasi sebesar 1,32% jumlah usaha koperasi tersebut meningkat pada tahun 2021 sebesar 1,37% dengan pada tahun 2024 meningkat menjadi 30,98, hal ini disebabkan karena kondisi ini terjadi seiring dengan pembubaran koperasi yang tidak aktif yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), dalam rangka mengubah paradigma pemberdayaan koperasi dari kuantitas menjadi kualitas. Untuk itu pemerintah sebagai pembuat kebijakan sudah semestinya menciptakan kondisi yang kondusif bagi dunia usaha, baik berskala besar maupun kecil.

Tabel 2.118
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Kota Ternate 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,32	1,37	1,27	1,22	3,20

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate, 2025

K. Bidang Penanaman Modal

Berdasarkan kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten dan Kota, pemerintahan kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal. Kewenangan tersebut meliputi, antara lain:

- Memberikan izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
- Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
- Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota baik di dalam negeri maupun ke luar negeri; dan
- Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten/kota.

Penanaman modal merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Arus masuk investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, tidak hanya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas, tetapi juga memperkuat daya saing daerah serta memperluas basis penerimaan daerah. Oleh karena itu, capaian realisasi investasi menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dan iklim usaha.

Pemerintah Kota Ternate terus berupaya mendorong peningkatan investasi melalui perbaikan infrastruktur, penyederhanaan perizinan, serta penyediaan insentif dan kemudahan berusaha. Selain itu, penguatan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan transformasi digital dalam pelayanan publik telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan minat investor. Capaian realisasi investasi tidak hanya mencerminkan keberhasilan promosi dan fasilitasi investasi, tetapi juga menggambarkan efektivitas koordinasi antarinstansi serta peran aktif pelaku usaha lokal dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dalam konteks ini, pengukuran realisasi investasi dilaporkan secara berkala melalui sistem OSS-RBA dan menjadi bagian penting dalam penilaian kinerja pemerintah daerah oleh pemerintah pusat.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah, realisasi investasi diharapkan mampu mendukung sektor-sektor strategis. Selain meningkatkan PDRB, realisasi investasi juga diharapkan mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.119
Capaian Realisasi Investasi Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun (Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Investasi (Miliar)	167,96	285,43	446,81	384,29	282,47

Sumber: DPMPTSP Kota Ternate, 2025

Selain itu, cakupan kinerja urusan penanaman modal juga dapat diukur melalui realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), seperti tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.120
Capaian Kinerja PMDN Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi Investasi PMDN	n/a	70	57	256	112

Sumber: DPMPTSP Kota Ternate, 2025

L. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerja sama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kepemudaan dan olahraga dapat diukur melalui indikator jumlah organisasi pemuda, jumlah organisasi olahraga, jumlah kegiatan kepemudaan, jumlah kegiatan olahraga, jumlah gelanggang/balai remaja milik pemda dan jumlah lapangan olahraga.

Data tentang bidang urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Ternate tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.121
Capaian Kinerja Pemuda dan Indeks Olahraga Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemuda yang Mandiri	n/a	90	96	96,35	100
Indeks Pembangunan Keolahragaan	n/a	56	99	99	25

Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Ternate, 2025

M. Bidang Statistik

Pengukuran capaian indikator pelaksanaan urusan statistik, dapat juga diukur melalui indikator kinerja Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral, sebagaimana data yang tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.122
Capaian Kinerja Statistik Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	n/a	50	20,8	26	34,62

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate, 2025

Kota Ternate telah mempublikasikan dokumen statistik Kota Ternate dalam Angka Tahun 2025 pada 28 Februari 2025 lalu. Kota Ternate Dalam Angka merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Publikasi ini menyajikan data dari berbagai bidang yang bersumber dari sensus/survei BPS maupun data dari instansi lain, yang diharapkan dapat membantu dalam penyusunan rencana pembangunan di Kota Ternate. Apabila ditelusuri melalui laman badan pusat statistik, terdapat 20 dokumen Kota Ternate Dalam Angka yang sudah dipublikasikan, mulai dari tahun 2006 hingga tahun 2025.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Ternate, 2025

Gambar 2.16 Dokumen Kota Ternate Dalam Angka 2006 dan 2025

N. Bidang Persandian

Pengukuran capaian indikator pelaksanaan urusan persandian, dapat juga diukur melalui indikator kinerja Indeks Keamanan Informasi, sebagaimana data yang tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.123
Indeks Keamanan Informasi Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Keamanan Informasi	n/a	50	72,5	85,6	96,70

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ternate, 2025

O. Bidang Kebudayaan

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kebudayaan dapat diukur dengan indikator, melalui persentase sekolah dasar yang menerapkan pelajaran bahasa daerah dan jumlah *Event* Seni dan Budaya yang diselenggarakan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.124
Capaian Kinerja Seni dan Budaya Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah *Event* Seni dan Budaya yang diselenggarakan	n/a	2	2	4	6
Persentase SD yang menerapkan pelajaran Bahasa Daerah	94	77	87	88	88

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Ternate, 2025

P. Bidang Perpustakaan

Urusan perpustakaan, merupakan suatu wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Indikator keberhasilan pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, dapat diukur melalui indikator (i) persentase jumlah pengunjung perpustakaan; (ii) persentase jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah.

Tabel 2.125
Capaian Kinerja Perpustakaan Daerah Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan	100	100	100	102	119,14
Persentase Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	100	100	100	104,02	100

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Ternate, 2025

Q. Bidang Kearsipan

Kearsipan sangat memegang peranan penting terkait dengan kelancaran sistem organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sumber ingatan bagi organisasi. Dengan adanya sistem kearsipan yang tertata dengan baik, maka akan memudahkan pemimpin untuk menentukan kebijakan. Kearsipan itu sendiri dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui sistem sentralisasi di mana semua arsip yang ada dari berbagai bidang (unit) disimpan dan dikelola pada satu ruangan tersendiri dan melalui sistem desentralisasi di mana arsip-arsip dibagi menurut bidangnya (unitnya) untuk kemudian disimpan dan dikelola oleh masing-masing unit pada ruangan khusus di tiap unit.

Tabel 2.126
Capaian Kinerja Kearsipan Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Jumlah PD yang Tertib Arsip	100	100	100	100	150

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Ternate, 2025

Urusan Pemerintahan Pilihan

A. Bidang Kelautan dan Perikanan

Wilayah Kota Ternate yang terdiri dari pulau-pulau kecil memiliki luas lautan wilayah dan mengandung sumber-sumber pertumbuhan ekonomi seperti perikanan pantai, terumbu karang, hutan mangrove dan padang lamun. Produksi ikan hasil tangkapan di laut oleh nelayan di Kota Ternate dari tahun ke tahun cenderung meningkat, namun pengelolaan hasil produksi perikanan cenderung masih rendah. Untuk mendukung tercapainya kinerja pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dimaksud, maka Pemerintah Kota Ternate telah membangun dan mengembangkan 2 (dua) buah pelabuhan perikanan, yaitu pelabuhan perikanan Bastiong Ternate Selatan dan pelabuhan perikanan Dufa-Dufa Ternate Utara. Kedua pelabuhan ini memasok hampir sebagian besar kebutuhan ikan masyarakat Ternate. Data capaian kinerja sektor perikanan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.127
Capaian Kinerja Sektor Perikanan terhadap PDRB Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Sektor Perikanan terhadap PDRB Kota Ternate	9,37	7,97	6,30	7,02	3,93

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate, 2025

B. Bidang Pariwisata

Capaian kinerja pengelolaan sektor pariwisata Kota Ternate selama beberapa tahun terakhir mengalami kemajuan seiring dengan dibangunnya berbagai sarana dan prasarana pariwisata, objek-objek wisata alam dan objek-objek wisata lainnya yang lebih tematik sesuai dengan peruntukan masing-masing destinasi wisata. Berikut tersaji tabel realisasi Kinerja urusan Pariwisata.

Pada tabel capaian kinerja urusan pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu menjadi 187 kunjungan. Hal ini disebabkan terjadinya wabah Covid-19 yang melanda dunia. Namun untuk kunjungan wisatawan lokal, mulai dari kinerja awal tahun 2022, sudah menunjukan tren pertumbuhan kunjungan yang tetap stabil di mana pada tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 3.257.

Tabel 2.128
Capaian Kinerja Pariwisata Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	314	187	935	1.902	3.256
Jumlah Kunjungan Wisatawan Lokal	153.289	206.256	233.410	276.820	265.336
Jumlah Tempat Wisata yang dilestarikan dan dikembangkan	3	3	4	4	5
Rata-rata Lama Menginap Wisatawan	1,56	1,30	1,23	1,28	1,23

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Ternate dan Kota Ternate Dalam Angka, 2025

Begitu juga dengan strategi pengembangan daya tarik wisata di Kota Ternate. Ketersediaan aspek 3A dalam pengembangan destinasi wisata di Kota Ternate tidak hanya difokuskan pada potensi daya tarik wisata saja, namun juga harus memperhatikan aspek 3A (*Accessibility*, *Amenities* dan *Ancillary Service*). Hal ini karena aspek 3A tersebut yang menjadi pelengkap keberadaan daya tarik wisata.

C. Bidang Pertanian

Kinerja sektor pertanian dapat diukur melalui kontribusi sektor pertanian secara umum (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan). Berikut realisasi kinerja urusan pertanian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.129
Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Ternate	1,70	2,07	3.42	4,35	4,35

Sumber : Dinas Pertanian Kota Ternate, 2025

D. Bidang Perdagangan

Sektor perdagangan mempunyai peran yang sangat dominan dalam menggerakan roda perekonomian Kota Ternate selama beberapa tahun terakhir ini. Hal tersebut terlihat dalam struktur PDRB Kota Ternate di mana dari tahun ke tahun sektor ini memberikan kontribusi terbesar dibanding sektor kegiatan lainnya. realisasi kinerja urusan perdagangan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.130
Capaian Kinerja Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Ternate	-7,45	2,72	2,72	10,72	10,12
Persentase pasar rakyat dalam kondisi baik	n/a	86,7	88	88	84

Sumber: BPS Kota Ternate dan Dinas Perindag Kota Ternate, 2025

E. Bidang Perindustrian

Badan Pusat Statistik (BPS) menggolongkan perusahaan industri pengolahan di Indonesia ke dalam empat kategori : a) Industri kerajinan rumah tangga : industri yang mempunyai tenaga kerja 1-4 orang, b) Industri kecil: industri yang mempunyai tenaga kerja 5 – 19 orang, c) Industri sedang : industri yang mempunyai tenaga kerja 20 – 99 orang, dan d) Industri besar : industri yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih. Hal tersebut lebih didasarkan pada banyaknya tenaga kerja yang bekerja di perusahaan industri, tanpa memperhatikan penggunaan mesin produksi serta tidak memperhatikan model kapital yang digunakan.

Sektor industri di wilayah Kota Ternate didominasi oleh kelompok industri kecil dan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya modal dan teknologi yang digunakan. Walaupun masih berskala kecil namun karena jumlah dan ragam jenis usaha yang dilakukan cukup besar, maka sektor ini cukup berperan dalam pengembangan sektor ekonomi di Kota Ternate. Jenis usaha yang potensial tersebut berupa industri batik Tubo, industri kue atau oleh-oleh khas Ternate, ikan asap (cakalang fufu), industri kursi bambu Tongole serta berapa pelaku usaha industri kecil berskala rumah tangga atau *home industry*. Industri jenis usaha ini sangat sesuai untuk dikembangkan sebagai salah satu potensi yang dapat mendorong dan meningkatkan pendapatan para pelaku usaha industri.

Tabel 2.131
Pertumbuhan Sektor Industri terhadap PDRB Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Sektor Perindustrian terhadap PDRB Kota Ternate	-7,56	-10,67	-10,67	3,25	4,31

Sumber: BPS Kota Ternate dan Dinas Perindag Kota Ternate, 2025

Industri kecil dan menengah merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Realisasi capaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 sebesar 44,86% dan pada tahun 2021 meningkat sebesar 46,79% dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya di mana pada tahun 2024 meningkat menjadi 10,68%.

Tabel 2.132
Proporsi Jumlah Industri Kecil pada Level Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Jumlah Industri Kecil pada Level Kota (%)	44,86	46,79	48,65	56,11	10,68

Sumber: Dinas Perindag Kota Ternate, 2025

Unsur Pendukung

A. Sekretariat Daerah

Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah. Oleh karena itu, perumusan kegiatan antara lain:

- *Review* Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk pembentukan produk hukum daerah yang dapat memberi dampak dalam kemudahan investasi, proses birokrasi yang sederhana, serta pelayanan secara cepat, murah dan lebih baik.

- Evaluasi organisasi perangkat daerah yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang bertujuan untuk mengefektifkan penyelenggaraan urusan pemerintahan, penyusunan analisa jabatan/analisa beban kerja, penyusunan SOP ketatalaksanaan, sistem kerja, dan budaya kerja perangkat daerah, dan evaluasi jabatan perangkat daerah.
- Penyusunan dan evaluasi mandiri terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
- Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja daerah Kota Ternate.

Adapun kinerja urusan penyelenggaraan pemerintahan meliputi antara lain: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP), sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.133
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Peringkat Nasional LPPD	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah (2,51%)	Sedang
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Ternate, 2025

B. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah (PERDA), fungsi anggaran berkaitan dengan kewenangan anggaran daerah atau APBD, sedangkan fungsi pengawasan berkaitan dengan pengontrolan pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Tabel 2.134
Persentase Rekomendasi DPRD yang Ditindaklanjuti Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rekomendasi DPRD yang Ditindaklanjuti	50	75	80	100	77,06

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Ternate, 2025

Unsur Penunjang

A. Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah ditetapkan, bahwa Rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD. Tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah dimaksud harus saling terkait, selaras dan bersinergi. Oleh karena itu, dalam menyusun RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan dalam menyusun RKPD harus berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah, sedangkan RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan juga hasil kajian ataupun penelitian terkait perencanaan pembangunan sangatlah menunjang kinerja perencanaan. Secara umum, perbaikan kualitas perencanaan baik dokumen jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek merupakan unsur kunci dalam perencanaan terutama penetapan tujuan dan sasaran kinerja beserta indikator dan target kinerjanya. Adapun kinerja urusan perencanaan dapat diukur melalui indikator persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam perencanaan. Realisasi kinerja Urusan Perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.135
Persentase Terpenuhinya Kualitas dalam Perencanaan Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Terpenuhinya Kualitas dalam Perencanaan	17,73	17,73	19,50	19,50	18,1
Tersedianya Dokumen Perencanaan yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	3	3	3	3	3

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2025

Selain meningkatkan kualitas perencanaan, dalam rangka meningkatkan peran penelitian dan pengembangan guna mendukung kinerja pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, maka dalam perumusan kegiatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang menjadi urusan pemerintah daerah;
- Optimalisasi pemanfaatan dan publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- Penguatan dan pelaksanaan kebijakan inovasi daerah; dan
- Penyediaan dan peningkatan kemampuan/kompetensi SDM penelitian berbasis fungsional.

Indikator kinerja bidang penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.136
Capaian Kinerja Kelitbangan dalam Kebijakan Perencanaaan Pembangunan Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	95	80	72,88	87,76	95,35
Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	n/a	19,51	17,07	17,07	65,12

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2025

B. Bidang Keuangan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di bidang keuangan daerah, beberapa kebijakan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate meliputi: 1) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PPK BLUD; 2) Penerapan Sistem Aplikasi *e-budgeting*; 3) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah; 4) Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah. Indikator kinerja bidang Keuangan Daerah di Kota Ternate, adalah Opini BPK terhadap laporan keuangan. Realisasi kinerja Urusan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.137
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK terhadap laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKAD Kota Ternate, 2025

C. Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan aparatur yang maju dan mandiri. Pengembangan sumber daya aparatur Kota Ternate diarahkan pada peningkatan kualitas aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pemerintahan dan pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, beberapa kebijakan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate antara lain: 1) Persentase Penempatan Aparatur Berdasarkan Kompetensi; 2) Persentase Pejabat Struktural yang telah Mengikuti Diklatpim Sesuai Jenjang; dan 3) Persentase Angka Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara. Realisasi kinerja Urusan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.138
Realisasi Kinerja Kepegawaian Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penempatan Aparatur Berdasarkan Kompetensi	n/a	n/a	75,34	78,97	85,45
Persentase Pejabat Struktural yang telah Mengikuti Diklatpim Sesuai Jenjang	n/a	n/a	13,49	26,79	72,52
Persentase Angka Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara	n/a	n/a	0,57	3,00	0,28

Sumber: BKPSDM Kota Ternate, 2025

Unsur Pengawasan

Inspektorat

Adapun indikator kinerja bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, di Kota Ternate, antara lain: 1) Tingkat Maturitas SPIP; dan 2) Tingkat Kapabilitas APIP. Realisasi kinerja Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.139
Tingkat Maturitas SPIP dan Tingkat Kapabilitas APIP Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Maturitas SPIP (Level)	2	2	3	3	3
Tingkat Kapabilitas APIP (Level)	2	2	3	3	3

Sumber: Inspektorat Kota Ternate, 2025

Unsur Kewilayahan

Kecamatan

Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Kecamatan memiliki peran dalam pemerintahan berupa pemberdayaan kepada masyarakat, menjaga ketertiban dan ketenteraman umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan. Kota Ternate terbagi atas 8 (delapan) kecamatan yaitu Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Ternate Barat, Kecamatan Pulau Hiri, Kecamatan Moti dan Kecamatan Batang Dua.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, kecamatan dituntut untuk dapat melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan kepada masyarakat. Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, di mana ada asas-asas pelayanan publik yang harus dipenuhi antara lain: kepentingan umum, kepastian hukum, keseimbangan hak dan kewajiban, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, kemudahan dan keterjangkauan.

Indikator dalam mengukur tingkat kinerja pelayanan di kecamatan yakni dengan melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap sistem pelayanan kepada masyarakat. Realisasi kinerja Urusan Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.140
Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B	B	B

Sumber: Kecamatan di Kota Ternate, 2025

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik mematuhi standar pelayanan. Standar tersebut merupakan pedoman penyelenggaraan layanan dan menjadi tolok ukur penilaian kualitas pelayanan yang diberikan. Ombudsman RI melakukan kegiatan penilaian kepatuhan dimaksud. Pada level programatik, kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka upaya pencegahan maladministrasi pelayanan publik. Selama ini, objek penilaian dilakukan sebatas menguji pemenuhan standar pelayanan secara *tangible* (ketampakan fisik) pada unit penyelenggara layanan.

Sebagai bentuk inovasi pengawasan pelayanan publik, Ombudsman RI melakukan penyempurnaan lagi atas metode penilaian penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian dilakukan tidak hanya atas ketersediaan standar pelayanan dan penilaian persepsi maladministrasi saja, namun juga mengukur kompetensi penyelenggara layanan, ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana, serta pengawasan dan pengelolaan pengaduan. Semua penilaian tersebut, menjadi komponen dari Opini Pengawasan Ombudsman RI terhadap Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Perubahan ini diharapkan menjadi lebih komprehensif lagi dalam menakar mutu pelayanan publik: dimensi input dan proses (*service manufacturing*) hingga *output* dan dampak (*impactful publik service*).

Pada tahun 2024 ini kembali dilakukan penyempurnaan dan pengembangan variabel serta indikator penilaian yaitu: penilaian pada Kementerian dan Lembaga ditambahkan variabel Indeks Kepuasan Masyarakat sedangkan penilaian pada Pemerintah Daerah ditambahkan Standar Pelayanan Minimal. Di mana hasil penilaian juga disinergikan dengan pelaksanaan produk pengawasan Ombudsman yaitu Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara layanan sebagai upaya nyata perbaikan pelayanan publik.

Tabel 2.141
Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Tidak Ada	72,88	59,55	92,53	80,01

Sumber: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara, 2024

Unsur Pemerintahan Umum

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, maka perumusan kegiatan agar memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
- Peningkatan peran parpol dan ormas serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
- Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
- Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang kesatuan bangsa dan politik dapat diukur melalui indikator persentase penurunan konflik antar masyarakat, seperti tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.142
Persentase Penurunan Konflik Antar Masyarakat Kota Ternate Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penurunan Konflik Antar Masyarakat	2	2	1	0	0

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Ternate, Tahun 2025

2.5 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Gambaran keuangan daerah mencakup target, alokasi, dan realisasi anggaran yang menggambarkan pertumbuhan tahunan berdasarkan data tahun sebelumnya, sehingga menjadi dasar untuk perhitungan dan perencanaan anggaran lima tahun ke depan.

2.5.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah, di mana penerimaan meliputi pendapatan dan pembiayaan, serta pengeluaran mencakup belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah diukur berdasarkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan. Berbagai sumber penerimaan dianalisis untuk memahami karakteristik dan tren penerimaan tersebut.

Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi ke tahun-tahun mendatang, sebagai dasar penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dengan memahami kapasitas ini, dapat ditentukan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan Kota Ternate.

A. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan untuk memberikan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahun, yang meliputi kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Berikut ini adalah gambaran umum kinerja pelaksanaan APBD.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sumber Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, jumlah Pendapatan Daerah Kota Ternate memiliki besaran yang meningkat secara fluktuatif, hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,46 persen per tahun, atau dengan besaran Rp. 945.313.760.645,52,- di tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 1.077.484.500.211,46,- pada tahun 2024. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 memiliki besaran kecenderungan meningkat, atau jika ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhannya meningkat sebesar 7,96 persen per tahun, sedangkan pada Pendapatan Transfer juga terjadi peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,54 persen setiap tahunnya. Pendapatan daerah yang disajikan setiap tahunnya menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Ternate 2020–2024 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.143
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Ternate
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertum-buhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**PENDAPATAN**						
1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**						
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	49.802.378.454,00	59.028.041.466,18	66.655.543.333,50	74.699.927.100,00	76.558.328.336,00	11,50
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	16.077.017.079,00	18.044.142.365,50	18.684.010.470,00	19.870.715.616,00	20.024.315.575,00	5,73
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.310.008.542,79	2.487.275.591,85	2.877.193.432,16	3.747.741.808,05	3.359.625.392,24	31,36
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	11.085.377.101,76	7.455.712.875,93	6.313.840.706,18	5.236.423.214,46	6.212.039.533,22	- 11,62
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**78.274.781.787,55**	**87.015.172.298,96**	**94.530.587.941,84**	**103.554.807.738,51**	**106.154.308.836,46**	**7,96**
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**						
1.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**						
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	17.998.507.800,00	30.425.290.452,00	28.472.353.767,00	17.647.273.799,00	19.122.902.060,00	8,24
1.2.1.2	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	25.322.364.016,00	41.139.529.740,00	80.060.622.006,00	33.443.571.850,00	102.068.205.000,00	76,01
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	599.701.700.000,00	588.615.360.000,00	585.402.476.250,00	609.216.898.000,00	638.468.083.158,00	1,62
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	110.883.631.467,00	123.727.132.515,00	122.939.446.642,00	143.945.616.097,00	126.344.181.650,00	3,95
	Jumlah Pendapatan Tranfser Dana Perimbangan	**753.906.203.283,00**	**783.907.312.707,00**	**816.874.898.665,00**	**804.253.359.746,00**	**886.003.371.868,00**	**4,20**
1.2.2	**Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat – Lainnya**						
1.2.2.1	Dana Tambahan Penghasilan Guru	622.462.000,00	-	-	-	-	-
1.2.2.2	Dana Insentif Daerah	64.961.612.000,00	43.125.447.000,00	11.789.245.000,00	30.386.501.000,00	8.580.921.000,00	- 5,07
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	**65.584.074.000,00**	**43.125.447.000,00**	**11.789.245.000,00**	**30.386.501.000,00**	**8.580.921.000,00**	**- 5,23**
1.2.3	**Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi**						
1.2.3.1	Pajak Kendaraan Bermotor	6.003.010.871,00	2.756.759.812,00	1.255.556.879,00	1.259.277.437,00	11.243.915.747,00	171,16

Tabel 2.143
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Ternate
Tahun 2020-2024 (Lanjutan)

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertum-buhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.3.2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.243.927.517,00	2.539.144.402,00	1.422.732.319,00	1.608.082.519,00	10.875.767.020,00	123,45
1.2.3.3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.924.663.359,00	8.432.099.902,00	3.203.016.293,00	7.620.265.601,00	36.275.796.407,00	111,60
1.2.3.4	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	-	72.527.086,00	664.003.108,00	-	505.015.850,00	-
1.2.3.5	Bagi Hasil Provinsi (Pajak Rokok)	7.162.626.730,00	7.549.792.130,00	11.900.888.815,00	3.230.438.702,00	13.324.681.771,00	75,66
	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	**27.334.228.477,00**	**21.350.323.332,00**	**18.446.177.414,00**	**13.718.064.259,00**	**72.225.176.735,00**	**91,34**
	Total Pendapatan Transfer	**846.824.505.760,00**	**848.383.083.039,00**	**847.110.321.079,00**	**848.357.925.005,00**	**966.809.469.603,00**	**3,54**
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**						
1.3.1	Pendapatan Hibah	20.214.473.707,97	-	4.973.313.000,00	-	-	-
1.3.2	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	24.424.553.715,66	25.803.008.980,99	7.108.569.477,37	4.520.721.772,00	-
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	**20.214.473.707,97**	**24.424.553.715,66**	**30.776.321.980,99**	**7.108.569.477,37**	**4.520.721.772,00**	**- 16,62**
	JUMLAH PENDAPATAN	**945.313.760.645,52**	**959.822.809.053,62**	**972.417.231.001,83**	**959.021.302.220,88**	**1.077.484.500.211,46**	**3,46**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Ternate 2020-2024, 2025

2. Belanja Daerah

Analisis belanja daerah bertujuan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah efisien dalam mengelola anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu, dan memastikan pengeluaran tepat sasaran. Sub bab ini juga membahas tentang pertumbuhan belanja daerah, dengan menganalisis perkembangan komponen-komponen belanja dari tahun ke tahun.

Secara umum, selama periode 2020 hingga 2024, total belanja daerah Kota Ternate menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Selanjutnya, sama dengan komponen pada belanja operasi, komponen-komponen dalam belanja modal Kota Ternate juga menunjukkan besaran yang fluktuatif.

Tabel 2.144
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertum-buhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2	**BELANJA**						
2.1	**BELANJA OPERASI**						
2.1.1	Belanja Pegawai	399.268.221.088,00	444.380.940.746,00	447.014.483.809,89	451.162.028.029,87	502.804.085.264,13	6,07
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	260.888.108.201,26	295.682.161.956,70	289.109.992.093,23	384.990.027.073,19	381.398.398.035,90	10,84
2.1.3	Belanja Hibah	56.616.300.500,00	11.277.106.320,00	14.552.134.040,00	7.378.862.778,00	52.878.620.000,00	129,07
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	2.015.750.000,00	1.987.000.000,00	2.348.598.000,00	1.769.000.000,00	1.324.000.000,00	- 8,27
	Jumlah Belanja Operasi	**718.788.379.789,26**	**753.327.209.022,70**	**753.025.207.943,12**	**845.299.917.881,06**	**938.405.103.300,03**	**7,01**
2.2	**BELANJA MODAL**						
2.2.1	Belanja Modal Tanah	6.149.586.820,00	46.832.721.364,00	19.712.728.081,00	251.278.000,00	4.007.405.000,00	499,93
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.076.909.415,00	29.917.947.803,00	28.627.036.244,00	29.241.515.278,85	17.963.298.632,33	8,61
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.390.064.040,00	62.327.053.856,00	50.945.119.880,32	43.223.513.732,21	47.931.944.987,92	- 4,39
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	103.748.096.799,00	27.669.011.991,00	70.605.329.536,00	77.007.313.350,53	65.250.305.937,78	18,91
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.153.288.287,00	1.985.432.433,00	1.556.301.799,00	103.746.500,00	2.605.843.900,00	572,25
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	732.725.900,00	632.101.000,00	-
	Jumlah Belanja Modal	**188.517.945.361,00**	**168.732.167.447,00**	**171.446.515.540,32**	**150.560.092.761,59**	**138.390.899.458,03**	**- 7,29**
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**						
2.3.1	Belanja Tak Terduga	36.045.024.238,00	20.184.842.000,00	19.772.751.900,00	1.372.850.600,00	1.133.394.200,00	- 39,14
	Jumlah Belanja Tak Terduga	**36.045.024.238,00**	**20.184.842.000,00**	**19.772.751.900,00**	**1.372.850.600,00**	**1.133.394.200,00**	**- 39,14**
	JUMLAH BELANJA	**943.351.349.388,26**	**942.244.218.469,70**	**944.244.475.383,44**	**997.232.861.242,65**	**1.077.929.396.958,06**	**3,45**
2.4	**TRANSFER**						
2.4.1	**TRANSFER BANTUAN KEUANGAN**						
2.4.1	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	686.743.920,00	-	-	-	-	-
	Jumlah Transfer /Bagi Hasil ke Desa	**686.743.920,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	**944.038.093.308,26**	**942.244.218.469,70**	**944.244.475.383,44**	**997.232.861.242,65**	**1.077.929.396.958,06**	**3,45**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Ternate Tahun 2020-2024, 2025

Berdasarkan data dari tabel di atas, dapat ditentukan kelompok kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Kemampuan keuangan daerah diukur dari jumlah pendapatan umum daerah dibandingkan dengan belanja untuk pegawai aparatur sipil negara.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan terbagi menjadi dua bagian utama: penerimaan pembiayaan, yang mencakup semua dana yang masuk ke kas umum negara yang harus dikembalikan, dan pengeluaran pembiayaan, yang mencakup semua pengeluaran dari kas umum negara yang nantinya akan diterima kembali. Dalam kurun waktu tahun 2020, realisasi anggaran Pemerintah Kota Ternate menunjukkan realisasi anggaran defisit, sementara itu tahun 2021 sampai tahun 2024 menunjukkan realisasi anggaran surplus.

Tabel 2.145
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Ternate
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertum-buhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
3	**PEMBIAYAAN**						
3.1	**PENERIMAAN DAERAH**						
3.1.1	Penggunaan SiLPA	(4.806.514.549,84)	(3.530.847.212,58)	14.047.743.371,34	42.220.498.998,73	2.437.382.426,95	- 104,52
	Jumlah Penerimaan	**(4.806.514.549,84)**	**(3.530.847.212,58)**	**14.047.743.371,34**	**42.220.498.989,73**	**2.437.382.426,95**	**- 104,52**
3.2	**PENGELUARAN DAERAH**						
3.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	
	Jumlah Pengeluaran	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	PEMBIAYAAN NETTO	**(4.806.514.549,84)**	**(3.530.847.212,58)**	**14.047.743.371,34**	**42.220.498.989,73**	**2.437.382.426,95**	**- 104,52**
	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) Sebelum Koreksi	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	Koreksi SILPA	-	-	-	-	-	
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Sesudah Koreksi	**(3.530.847.212,58)**	**14.047.743.371,34**	**42.220.498.989,73**	**4.008.939.967,96**	**1.992.485.680,35**	**- 109,53**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Ternate Tahun 2020-2024, 2025

B. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah umumnya mencakup kebijakan mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD. Pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah secara efektif dan efisien. Analisis terkait kebijakan pengelolaan keuangan menjadi penting untuk memahami realisasi dari kebijakan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam periode tahun anggaran sebelumnya.

Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk mendapatkan gambaran dari realisasi kebijakan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah Kota Ternate pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan belanja dan pengeluaran pembiayaan di masa depan, dengan tujuan meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta menetapkan kebijakan belanja untuk masa mendatang.

1. **Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja**

   Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibandingkan dengan anggaran dari tahun 2020 hingga tahun 2024 memberikan informasi tentang tingkat realisasi belanja daerah Kota Ternate.

2. **Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama**

   Analisis realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat mencakup pengeluaran yang harus dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah. Belanja periodik prioritas utama mencakup pengeluaran yang harus dibayar secara berkala oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan keberlangsungan pelayanan dasar prioritas.

Tabel 2.146
Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kota Ternate
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020		(%)	2021		(%)	2022		(%)
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
2	**BELANJA**									
2.1	**Belanja Operasi**									
2.1.1	Belanja Pegawai	407.110.329.060,00	399.268.221.088,00	98,07	447.925.297.241,00	444.380.940.746,00	99,21	493.047.723.016,00	447.014.483.809,89	90,66
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	316.026.635.518,00	260.888.108.201,26	82,55	342.985.210.551,00	295.682.161.956,70	86,21	301.782.665.882,00	289.109.992.093,23	95,80
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-		-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-		-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	59.497.831.000,00	56.616.300.500,00	95,16	21.728.971.035,00	11.277.106.320,00	51,90	16.872.366.838,00	14.552.134.040,00	86,25
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.037.000.000,00	2.015.750.000,00	98,96	1.987.000.000,00	1.987.000.000,00	100,00	2.351.800.000,00	2.348.598.000,00	99,86
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-					-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	**784.671.795.578,00**	**718.788.379.789,26**	**91,60**	**814.626.478.827,00**	**753.327.209.022,70**	**92,48**	**814.054.555.736,00**	**753.025.207.943,12**	**92,50**
2.2	**Belanja Modal**									
2.2.1	Belanja Modal Tanah	6.652.962.340,00	6.149.586.820,00	92,43	46.900.346.855,00	46.832.721.364,00	99,86	19.713.247.581,00	19.712.728.081,00	100,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.654.934.174,00	17.076.909.415,00	66,56	30.689.027.181,00	29.917.947.803,00	97,49	28.469.843.518,00	28.627.036.244,00	100,55
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.978.256.611,00	59.390.064.040,00	87,37	65.118.400.079,00	62.327.053.856,00	95,71	58.443.744.186,00	50.945.119.880,32	87,17
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	115.823.505.111,00	103.748.096.799,00	89,57	31.462.378.511,00	27.669.011.991,00	87,94	82.864.210.018,00	70.605.329.536,00	85,21
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.947.452.000,00	2.153.288.287,00	54,55	2.137.481.465,00	1.985.432.433,00	92,89	-	1.556.301.799,00	-
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-					-	-	-
2.2.7	Belanja Modal Dana BOS	-	-					-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	**220.057.110.236,00**	**188.517.945.361,00**	**85,67**	**176.307.634.091,00**	**168.732.167.447,00**	**95,70**	**189.491.045.303,00**	**171.446.515.540,32**	**90,48**
2.3	**Belanja Tidak Terduga**									
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	40.000.000.000,00	36.045.024.238,00	90,11	25.000.000.000,00	20.184.842.000,00	80,74	21.000.000.000,00	19.772.751.900,00	94,16
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	**40.000.000.000,00**	**36.045.024.238,00**	**90,11**	**25.000.000.000,00**	**20.184.842.000,00**	**80,74**	**21.000.000.000,00**	**19.772.751.900,00**	**94,16**

Tabel 2.146
Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kota Ternate
Tahun 2020-2024 (Lanjutan)

No	Uraian	2020		(%)	2021		(%)	2022		(%)
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
	JUMLAH BELANJA	1.044.728.905.814,00	943.351.349.388,26	90,30	1.015.934.112,918,00	942.244.218.469,70	92,75	1.024.545.601.039,00	944.244.475.383,44	92,16
2.4	**Belanja Transfer**									
2.4.1	**Transfer Bagi Hasil Pendapatan Ke Kabupaten/Kota**									
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/ Kota	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2,4.2	**Transfer Bantuan Keuangan**									
	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	813.109.800,00	686.743.920,00	84,46	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	**813.109.800,00**	**686.743.920,00**	**84.46**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah Belanja Transfer							**-**	**-**	**-**
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	**1.045.542.015.614,00**	**944.038.093.308,26**	**90,29**	**1.015.934.112,918,00**	**942.244.218.469,70**	**92,75**	**1.024.545.601.039,00**	**944.244.475.383,44**	**92,16**

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan Kota Ternate 2020-2024, 2025

Tabel 2.146 (Lanjutan)
Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kota Ternate
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020		(%)	2021		(%)	2022		(%)
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
2	**BELANJA**									
2.1	**Belanja Operasi**									
2.1.1	Belanja Pegawai	503.505.508.562,00	451.162.028.029,65	89,60	527.207.122.610,89	502.804.085.264,13	95,37	6,07	94,58	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	427.587.680.448,00	384.990.027.073,19	90,04	427.093.097.974,71	381.398.398.035,90	89,30	10,84	88,78	
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.5	Belanja Hibah	8.630.000.000,00	7.378.862.778,00	85,50	53.506.992.500,00	52.878.620.000,00	98,83	129,07	83,53	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.769.000.000,00	1.769.000.000,00	100,00	1.324.000.000,00	1.324.000.000,00	100,00	- 8,27	99,76	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Belanja Operasi	**941.492.189.010,00**	**845.299.917.881,06**	**89,78**	**1.009.131.213.085,60**	**938.405.103.300,03**	**92,99**	**7,01**	**91,87**	
2.2	**Belanja Modal**									
2.2.1	Belanja Modal Tanah	805.678.000,00	251.278.000,00	31,19	4.007.405.000,00	4.007.405.000,00	100,00	499,93	84,70	
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.557.897.109,00	29.241.515.278,85	84,62	22.868.773.680,80	17.963.298.632,33	78,55	8,61	85,55	
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.567.300.135,00	43.223.513.732,21	64,93	67.748.173.575,56	47.931.944.987,92	70,75	- 4,39	81,19	
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	97.114.792.847,73	77.007.313.350,53	79,30	86.415.681.537,00	65.250.305.937,78	75,51	18,91	83,51	
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	103.758.600,00	103.746.500,00	99,99	3.493.444.644,00	3.237.944.900,00	92,69	724,57	68,02	
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	782.800.000,00	732.725.900,00	93,60	720.000.000,00	-	-	-	18,72	
2.2.7	Belanja Modal Dana BOS	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Belanja Modal	**199.932.226.691,73**	**150.560.092.761,59**	**75,31**	**185.253.478.437,36**	**138.390.899.458,03**	**74,70**	**- 7,29**	**84,37**	
2.3	**Belanja Tidak Terduga**									
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	1.372.850.600,00	91,52	3.420.147.300,00	1.133.394.200,00	33,14	- 39,14	77,93	
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	**1.500.000.000,00**	**1.372.850.600,00**	**91,52**	**3.420.147.300,00**	**1.133.394.200,00**	**33,14**	**- 39,14**	**77,93**	
	JUMLAH BELANJA	**1.142.924.415.701,73**	**997.232.861.242,65**	**87,25**	**1.197.804.838.822,96**	**1.077.929.396.958,06**	**89,99**	**3,45**	**90,49**	

Tabel 2.146 (Lanjutan)
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Ternate
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020		(%)	2021		(%)	2022		(%)
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
2.4	**Belanja Transfer**									
2.4.1	**Transfer Bagi Hasil Pendapatan Ke Kabupaten/Kota**									
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab/ Kota	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2,4.2	**Transfer Bantuan Keuangan**									
	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Jumlah Belanja Transfer	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	**1.142.924.415.701,73**	**997.232.861.242,65**	**87,25**	**1.197.804.838.822,96**	**1.077.929.396.958,06**	**89,99**	**3,45**	**90,49**	

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan - Laporan Keuangan Kota Ternate 2020-2024, 2025

Tabel 2.147
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Ternate
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi									
		2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
A	**Belanja Mengikat**	**399.268.221.088,00**	**98,07**	**444.380.940.746,00**	**99,21**	**447.014.483.809,89**	**90,66**	**451.162.028.029,87**	**89,60**	**502.804.085.264,13**	**95,37**
1	Belanja Pegawai	399.268.221.088,00	98,07	444.380.940.746,00	99,21	447.014.483.809,89	90,66	451.162.028.029,87	89,60	502.804.085.264,13	95,37
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	**Belanja Wajib**	**593.543.323.050,35**	**88,07**	**595.267.875.961,06**	**95,19**	**580.971.223.011,73**	**90,83**	**544.884.598.771,88**	**44,24**	**619.267.795.390,19**	**88,06**
1	Pendidikan	214.624.321.586,00	96,85	249.467.663.319,06	108,35	229.266.322.256,89	91,41	200.213.916.717,00	21,61	249.452.617.591,00	89,69
2	Kesehatan	128.935.470.160,35	77,46	155.027.575.889,00	84,91	153.131.391.576,52	90,69	175.489.616.291,83	19,57	170.613.557.586,56	96,37
3	Infrastruktur	250.983.531.304,00	87,46	190.772.636.753,00	89,78	198.573.509.178,32	90,28	169.181.065.763,05	2,28	199.201.620.212,63	80,30
C	**Pengeluaran Pembiayaan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	Pembayaran Cicilan Pokok Hutang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Penyertaan Modal Daerah										
3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Total Belanja Wajib Mengikat		**993.811.544.138,35**	**91,84**	**1.039.648.816.707,06**	**96,87**	**1.027.985.706.821,62**	**89,57**	**996.046.626.801,75**	**85,33**	**1.122.071.880.654,32**	**90,97**

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan Kota Ternate 2020-2024, 2025

2.5.2 Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Neraca daerah menyajikan gambaran tentang kondisi keuangan daerah, termasuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Neraca daerah dapat membantu Pemerintah Kota Ternate dalam membuat keputusan yang tepat dan efektif dalam mengalokasikan sumber daya daerah, hal ini karena neraca merupakan laporan keuangan yang menampilkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas (modal) Pemerintah Kota Ternate.

Informasi dari neraca daerah dapat digunakan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan kebijakan keuangan daerah memperhatikan prinsip-prinsip keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan. Dengan adanya neraca daerah ini, diharapkan Pemerintah Kota Ternate dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam mengalokasikan sumber daya daerah untuk mencapai tujuan pembangunan di Kota Ternate.

Tabel 2.148
Neraca Daerah Kota Ternate
Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	**ASET**					
	A. Aset Lancar	30.211.861.888,68	63.745.144.607,24	101.292.906.829,76	110.311.940.828,02	53.390.778.047,05
	B. Investasi Jangka Panjang	57.896.703.793,80	60.257.100.067,49	60.358.640.232,40	57.578.134.849,74	59.888.478.247,66
	C. Aset Tetap	2.449.905.961.395,74	2.491.995.062.137,43	2.528.583.907.980,29	2.562.169.819.952,59	2.442.869.946.302,73
	D. Aset Lainnya	64.403.640.619,96	64.775.154.217,92	72.357.688.547,92	133.258.538.807,42	67.679.261.007,92
	E. Properti Investasi	-	-	-	-	83.783.248.442,00
	JUMLAH ASET	**2.602.418.167.701,18**	**2.680.772.461.030,08**	**2.762.593.143.590,37**	**2.863.318.434.437,77**	**2.707.611.712.047,36**
2	**KEWAJIBAN**					
	A. Kewajiban Jangka Pendek	41.147.173.330,20	6.493.078.819,60	6.078.581.317,00	66.967.065.384,99	48.681.601.303,84
	B. Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	**41.147.173.330,20**	**6.493.078.819,60**	**6.078.581.317,00**	**66.967.065.384,99**	**48.681.601.303,84**
3	**EKUITAS**					
	Ekuitas	2.561.270.994.370,98	2.674.279.382.210,48	2.756.514.562.273,37	2.796.351.369.052,78	2.658.930.110.743,52
	JUMLAH EKUITAS	**2.561.270.994.370,98**	**2.674.279.382.210,48**	**2.756.514.562.273,37**	**2.796.351.369.052,78**	**2.658.930.110.743,52**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**2.602.418.167.701,18**	**2.680.772.461.030,08**	**2.762.593.143.590,37**	**2.863.318.434.437,77**	**2.707.611.712.047,36**

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan Kota Ternate 2020-2024, 2025

2.5.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk mengestimasi kapasitas keuangan total daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja periodik yang wajib dan mengikat, serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah dalam lima tahun ke depan. Analisis ini juga mencakup alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran lainnya. Kapasitas keuangan daerah merujuk pada total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangi kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan hingga akhir tahun, serta kegiatan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

A. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi pendapatan dan belanja adalah estimasi atau perkiraan tentang berapa banyak pendapatan yang akan diperoleh dan berapa banyak uang yang akan dikeluarkan selama periode tertentu.

1. Pendapatan Daerah

APBD tahun 2024 tersebut menjadi *baseline* dalam melakukan proyeksi pendapatan 2025-2030. Pendapatan Daerah Kota Ternate sampai dengan tahun 2030 ditargetkan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,55 persen, dengan rincian komponen pada Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 7,73 persen, Pendapatan Transfer meningkat sebesar 0,77 persen dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meningkat sebesar 10,53 persen.

Tabel 2.149
Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Ternate
Tahun 2026-2030

No	Uraian	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN						Rata-Rata Pertum-buhan (%)
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.077.484.500.211,46**	**1.104.982.939.130**	**1.118.526.305.699**	**1.125.255.933.159**	**1.137.551.610.414**	**1.172.499.134.399**	**1.181.134.760.237**	**1,55**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**106.154.308.836,46**	**141.318.000.000**	**148.551.180.000**	**150.539.481.800**	**153.754.287.018**	**157.234.678.354**	**161.004.628.150**	**7,73**
1.1.1	Pajak Daerah	76.558.328.336,00	86.650.000.000	91.839.180.000	92.381.221.800	94.218.080.418	96.102.279.058	98.035.405.992	4,29
1.1.2	Retribusi Daerah	20.024.315.575,00	37.718.000.000	39.305.000.000	40.367.520.000	41.174.870.400	41.998.367.808	42.838.335.164	16,88
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.359.625.392,24	3.500.000.000	3.570.000.000	3.677.000.000	3.824.184.000	4.015.393.200	4.256.316.792	4,03
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	6.212.039.533,22	13.450.000.000	13.837.000.000	14.113.740.000	14.537.152.200	15.118.638.288	15.874.570.202	22,23
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**966.809.469.603,00**	**957.595.878.000**	**962.975.125.699**	**967.466.451.359**	**976.297.323.396**	**1.007.514.456.045**	**1.012.130.132.087**	**0,77**
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	894.584.292.868,00	878.595.878.000	878.595.878.000	883.087.203.660	891.918.075.697	923.135.208.346	927.750.884.388	0,62
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.225.176.735,00	79.000.000.000	84.379.247.699	84.379.247.699	84.379.247.699	84.379.247.699	84.379.247.699	2,70
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**4.520.721.772,00**	**6.069.061.130**	**7.000.000.000**	**7.250.000.000**	**7.500.000.000**	**7.750.000.000**	**8.000.000.000**	**10,53**
1.3.1	Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	4.520.721.772,00	6.069.061.130	7.000.000.000	7.250.000.000	7.500.000.000	7.750.000.000	8.000.000.000	10,53

Sumber: Hasil Pengolahan BPKAD dan BP2RD Kota Ternate, 2025

2. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi nilai kekayaan bersih. Belanja ini digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah daerah. Ini mencakup berbagai kegiatan dan program yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Kota Ternate. Lebih lanjut, belanja pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,54 persen. Rata-rata pertumbuhan positif ditunjukkan oleh komponen Belanja Operasi sebesar 1,40 persen, tren positif ditunjukkan oleh komponen Belanja Modal sebesar 0,77 persen, dan Belanja Tidak Terduga pertumbuhan sebesar 294,10 persen. Adapun proyeksi Belanja Daerah pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2030, disajikan pada tabel 2.150 di bawah ini.

Tabel 2.150
Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kota Ternate
Tahun 2026-2030

No	Uraian	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN						Rata-Rata Pertumbuhan (%)
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	**BELANJA DAERAH**	**1.077.929.396.958,06**	**1.101.982.939.130**	**1.115.526.305.699**	**1.122.255.933.159**	**1.134.551.610.414**	**1.172.499.134.399**	**1.181.134.760.237**	**1,54**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**938.405.103.300,03**	**970.122.197.731**	**981.122.197.731**	**984.076.489.628**	**990.463.194.706**	**1.037.480.055.574**	**1.018.613.773.529**	**1,40**
2.1.1	Belanja Pegawai	502.804.085.264,13	569.065.923.338	569.065.923.338	566.937.385.805	566.013.902.926	567.214.733.391	575.238.373.228	2,38
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	381.398.398.035,90	400.017.074.393	402.017.074.393	407.042.287.823	414.165.527.860	416.236.355.499	432.885.809.719	2,15
2.1.3	Belanja Hibah	52.878.620.000,00	8.555.200.000	8.555.200.000	8.597.976.000	8.768.935.520	52.500.000.000	8.945.334.230	55,74
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.324.000.000,00	1.484.000.000	1.484.000.000	1.498.840.000	1.513.828.400	1.528.966.684	1.544.256.351	2,68
2.2	**BELANJA MODAL**	**138.390.899.458,03**	**102.860.741.399**	**114.404.107.968**	**118.179.443.531**	**124.088.415.707**	**125.019.078.825**	**137.520.986.708**	**0,77**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	4.007.405.000,00	5.916.042.500	5.916.042.500	6.111.271.903	6.416.835.498	6.464.961.764	7.111.457.940	11,11
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.963.298.632,33	17.062.352.033	20.062.352.033	20.724.409.650	21.760.630.133	21.923.834.859	24.116.218.344	5,27
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.931.944.987,92	27.212.805.180	32.212.805.180	33.275.827.751	34.939.619.138	35.201.666.282	38.721.832.910	-0,97
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	65.250.305.937,78	51.562.618.686	55.105.985.255	56.924.482.768	59.770.706.907	60.218.987.209	66.240.885.930	0,82
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.605.843.900,00	206.923.000	206.923.000	213.751.459	224.439.032	226.122.325	248.734.557	-12,17
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	632.101.000,00	900.000.000	900.000.000	929.700.000	976.185.000	983.506.388	1.081.857.026	10,24
2.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.133.394.200**	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**	**10.000.000.000**	**25.000.000.000**	**294,10**
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.133.394.200	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	10.000.000.000	25.000.000.000	294,10
SURPLUS/DEFISIT		**(444.896.746,60)**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**0**	**0**	**0**

Sumber: Hasil Pengolahan BPKAD dan BP2RD Kota Ternate, 2025

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan terbagi menjadi dua bagian utama: penerimaan pembiayaan, yang mencakup semua dana yang masuk ke kas umum negara yang harus dikembalikan, dan pengeluaran pembiayaan, yang mencakup semua pengeluaran dari kas umum negara yang nantinya akan diterima kembali. Dengan demikian, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan memiliki hubungan yang erat dalam siklus pembiayaan, di mana penerimaan pembiayaan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, dan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk mengembalikan dana yang diterima. Untuk pembiayaan daerah pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 diproyeksikan tidak mengalami pertumbuhan.

Tabel 2.151
Proyeksi Anggaran Pembiayaan Daerah Kota Ternate
Tahun 2026-2030

No	Uraian	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN						Rata-Rata Pertumbuhan (%)
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	**PEMBIAYAAN**	**0**	**(3.000.000.000)**	**(3.000.000.000)**	**(3.000.000.000)**	**(3.000.000.000)**	**0**	**0**	**0**
3.1	**PENERIMAAN DAERAH**	**2.437.382.426,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.1	Penggunaan SiLPA	2.437.382.426,95	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Penerimaan	**2.437.382.426,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.2	**PENGELUARAN DAERAH**	**0**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**0**	**0**	**0**
3.2.1	Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	0	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0	0
	Jumlah Pengeluaran	**0**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**0**	**0**	**0**
	PEMBIAYAAN NETTO	**2.437.382.426,95**	**(3.000.000.000)**	**(3.000.000.000)**	**(3.000.000.000)**	**(3.000.000.000)**	**0**	**0**	**0**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**1.992.485.680,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber: Hasil Pengolahan BPKAD dan BP2RD Kota Ternate, 2025

B. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, konsep kapasitas riil keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tidak lagi relevan karena perubahan dalam Belanja Daerah. Oleh karena itu, proyeksi belanja untuk tahun 2025 hingga 2030 disusun sesuai dengan konsep dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Ternate untuk tahun 2026-2030 disajikan pada tabel 2.152 di bawah ini.

Tabel 2.152
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Ternate
Tahun 2026-2030

No	Uraian	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN						Rata-Rata Pertum-buhan (%)
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.077.484.500.211,46**	**1.104.982.939.130**	**1.118.526.305.699**	**1.125.255.933.159**	**1.137.551.610.414**	**1.172.499.134.399**	**1.181.134.760.237**	**1,55**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**106.154.308.836,46**	**141.318.000.000**	**148.551.180.000**	**150.539.481.800**	**153.754.287.018**	**157.234.678.354**	**161.004.628.150**	**7,73**
1.1.1	Pajak Daerah	76.558.328.336,00	86.650.000.000	91.839.180.000	92.381.221.800	94.218.080.418	96.102.279.058	98.035.405.992	4,29
1.1.2	Retribusi Daerah	20.024.315.575,00	37.718.000.000	39.305.000.000	40.367.520.000	41.174.870.400	41.998.367.808	42.838.335.164	16,88
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.359.625.392,24	3.500.000.000	3.570.000.000	3.677.000.000	3.824.184.000	4.015.393.200	4.256.316.792	4,03
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	6.212.039.533,22	13.450.000.000	13.837.000.000	14.113.740.000	14.537.152.200	15.118.638.288	15.874.570.202	22,23
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**966.809.469.603,00**	**957.595.878.000**	**962.975.125.699**	**967.466.451.359**	**976.297.323.396**	**1.007.514.456.045**	**1.012.130.132.087**	**0,77**
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	894.584.292.868,00	878.595.878.000	878.595.878.000	883.087.203.660	891.918.075.697	923.135.208.346	927.750.884.388	0,62
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.225.176.735,00	79.000.000.000	84.379.247.699	84.379.247.699	84.379.247.699	84.379.247.699	84.379.247.699	2,70
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**4.520.721.772,00**	**6.069.061.130**	**7.000.000.000**	**7.250.000.000**	**7.500.000.000**	**7.750.000.000**	**8.000.000.000**	**10,53**
1.3.1	Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	4.520.721.772,00	6.069.061.130	7.000.000.000	7.250.000.000	7.500.000.000	7.750.000.000	8.000.000.000	10,53
1.4	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**2.437.382.426,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.437.382.426,95	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PENERIMAAN		**1.079.921.882.638,41**	**1.104.982.939.130**	**1.118.526.305.699**	**1.125.255.933.159**	**1.137.551.610.414**	**1.172.499.134.399**	**1.181.134.760.237**	**1,51**

Tabel 2.152
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Ternate
Tahun 2026-2030 (Lanjutan)

No	Uraian	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN						Rata-Rata Pertum-buhan (%)
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	**BELANJA DAERAH**	**1.077.929.396.958,06**	**1.101.982.939.130**	**1.115.526.305.699**	**1.122.255.933.159**	**1.134.551.610.414**	**1.172.499.134.399**	**1.181.134.760.237**	**1,54**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**938.405.103.300,03**	**970.122.197.731**	**981.122.197.731**	**984.076.489.628**	**990.463.194.706**	**1.037.480.055.574**	**1.018.613.773.529**	**1,40**
2.1.1	Belanja Pegawai	502.804.085.264,13	569.065.923.338	569.065.923.338	566.937.385.805	566.013.902.926	567.214.733.391	575.238.373.228	2,38
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	381.398.398.035,90	400.017.074.393	402.017.074.393	407.042.287.823	414.165.527.860	416.236.355.499	432.885.809.719	2,15
2.1.3	Belanja Hibah	52.878.620.000,00	8.555.200.000	8.555.200.000	8.597.976.000	8.768.935.520	52.500.000.000	8.945.334.230	55,74
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.324.000.000,00	1.484.000.000	1.484.000.000	1.498.840.000	1.513.828.400	1528.966.684	1.544.256.351	2,68
2.2	**BELANJA MODAL**	**138.390.899.458,03**	**102.860.741.399**	**114.404.107.968**	**118.179.443.531**	**124.088.415.707**	**125.019.078.825**	**137.520.986.708**	**0,77**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	4.007.405.000,00	5.916.042.500	5.916.042.500	6.111.271.903	6.416.835.498	6.464.961.764	7.111.457.940	11,11
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.963.298.632,33	17.062.352.033	20.062.352.033	20.724.409.650	21.760.630.133	21.923.834.859	24.116.218.344	5,27
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.931.944.987,92	27.212.805.180	32.212.805.180	33.275.827.751	34.939.619.138	35.201.666.282	38.721.832.910	-0,97
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	65.250.305.937,78	51.562.618.686	55.105.985.255	56.924.482.768	59.770.706.907	60.218.987.209	66.240.885.930	0,82
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.605.843.900,00	206.923.000	206.923.000	213.751.459	224.439.032	226.122.325	248.734.557	-12,17
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	632.101.000,00	900.000.000	900.000.000	929.700.000	976.185.000	983.506.388	1.081.857.026	10,24
2.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.133.394.200**	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**	**10.000.000.000**	**25.000.000.000**	**294,10**
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.133.394.200	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	10.000.000.000	25.000.000.000	294,10
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	**0**	**0**	**0**
2.5.1	Penyertaan Modal Daerah	0	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0	0
TOTAL PENGELUARAN		**1.077.929.396.958,06**	**1.104.982.939.130**	**1.118.526.305.699**	**1.125.255.933.159**	**1.137.551.610.414**	**1.172.499.134.399**	**1.181.134.760.237**	**1,54**

Sumber: Hasil Pengolahan BPKAD dan BP2RD Kota Ternate, 2025

2.6 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan dan isu strategis menjadi bagian terpenting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Analisis permasalahan yang dilakukan secara tepat akan meningkatkan upaya intervensi melalui kebijakan dalam mengatasi permasalahan. Demikian juga dengan pemilihan isu strategis yang sesuai dan relevan akan berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan pembangunan yang akan ditempuh oleh para pengambil kebijakan. Isu Strategis merupakan kondisi eksternal yang berpengaruh positif maupun negatif yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan dan sangat menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Permasalahan pembangunan yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, akan dibagi menjadi dua bagian yaitu permasalahan pembangunan lingkup makro yang terdiri dari masalah pokok, masalah dan akar masalah dan yang kedua adalah permasalahan berdasarkan urusan pemerintahan. Sedangkan isu strategis yang disusun dikelompokkan berdasarkan isu global, nasional, dan isu regional di Maluku Utara dan Kota Ternate. Identifikasi dan perumusan permasalahan dan isu strategis tersebut merupakan dasar dalam menetapkan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah, melalui tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan periodisasi Rencana Pembangunan Daerah tersebut.

2.6.1 Permasalahan

Kinerja pembangunan pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelumnya telah menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih terdapat kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan itu dibuat. Tantangan dan permasalahan pembangunan ke depan dari seluruh aspek akan semakin besar, sehingga kita perlu meningkatkan kinerja pembangunan dan memanfaatkan berbagai potensi dan peluang yang ada. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Kota Ternate akan menjadi fokus dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029 mendatang. Berikut ini berbagai permasalahan pembangunan di Kota Ternate yang terbagi atas 2 (dua) bagian, antara lain permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (level makro daerah) dan permasalahan pembangunan daerah pada level mikro sektoral atau penyelenggaraan urusan pemerintahan.

A. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Kota Ternate, melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan. Namun di sisi lain masih terdapat juga berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Berikut ini diuraikan berbagai permasalahan yang dihadapi Kota Ternate dalam melaksanakan urusan pemerintahan.

1. Kualitas SDM Belum Optimal

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator yang dapat menjadi ukuran pembangunan yang dapat memotret pembangunan dari sisi ekonomi, aspek sosial dan kesejahteraan manusia. IPM mencerminkan kondisi kualitas hidup manusia di suatu wilayah yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi (berdasarkan perhitungan IPM metode baru), yang terdiri atas (1) dimensi umur panjang dan hidup sehat, yang ditandai dengan indikator Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH); (2) dimensi standar hidup layak, yang ditandai dengan indikator Pengeluaran per Kapita per tahun yang disesuaikan (96 komoditas PPP); dan (3) dimensi pengetahuan, yang ditandai dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), terkait dimensi pengetahuan juga berhubungan dengan angka anak putus sekolah pada tingkatan SD

dan SMP. Angka Putus Sekolah (APS) juga menjadi permasalahan daerah yang harus menjadi perhatian terhadap urusan dibidang pendidikan.

Permasalahan lain yang sering timbul dalam pembangunan suatu wilayah adalah rendahnya daya saing tenaga kerja sehingga tidak bisa memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada. Rendahnya daya saing juga diiringi dengan belum optimalnya keterampilan sumber daya manusia, dalam menghadapi tantangan kerja ke depan. Rendahnya daya saing tenaga kerja inilah yang akan memberi dampak beruntun pada permasalahan pembangunan berikutnya seperti pendapatan rendah, kemiskinan, hingga pengangguran.

Pengangguran merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Pengangguran menjadi penting karena seringkali menjadi isu pengembangan wilayah dan menghambat pertumbuhan perekonomian. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan angka pengangguran, karena indikator tersebut merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT adalah persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja.

Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro terutama untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu wilayah. Kemiskinan yang sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan selalu menjadi fokus yang bisa diintervensi oleh pemerintah dan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang. Persentase penduduk miskin atau yang disebut juga dengan istilah tingkat kemiskinan merupakan besarnya persentase yang membandingkan antara jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan jumlah penduduk di suatu daerah.

2. Pertumbuhan Ekonomi Belum Maksimal dan Fluktuatif

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah, di mana besarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi ini dapat dianalisis berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan pada setiap tahunnya. Analisis pertumbuhan PDRB ADHK (riil) dapat menunjukkan kedudukan perekonomian wilayah beserta tingkat pertumbuhannya sehingga dapat diketahui perkiraan perkembangannya pada tahun-tahun mendatang.

3. Kualitas Infrastruktur Dasar Masih Belum Optimal

Hasil dari pembangunan daerah yang paling sering dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah pembangunan di bidang perekonomian, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memenuhi capaian target setiap bidang tersebut, perlu adanya penyempurnaan setiap fasilitas, sarana prasarana, dan infrastruktur yang terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk itu bukan hanya saja kuantitasnya tapi juga kualitas infrastruktur juga menjadi perhatian.

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan serta Ketahanan Bencana Masih Rendah

Penanganan pengelolaan kualitas lingkungan hidup masih belum optimal khususnya terkait kualitas air, kualitas udara dan besarnya tutupan hutan yang menjadi utama terhadap lingkungan hidup selain itu dalam upaya pengelolaan persampahan dan pengelolaan air limbah saat ini masih belum optimal masih terkendala sarana prasarana untuk mendukung pengurangan produksi sampah dan limbah domestik di Kota Ternate yang mana saat ini pengurangan sampah masih menggunakan metode pembakaran. Sarana yang dimaksudkan adalah sarana persampahan dan limbah domestik dari hulu ke hilir. Sarana persampahan berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Stasiun Pengangkutan Sampah (SPA), Tempat Pembuangan Sampah *Reduce, Recycle, Reuse* (TPS 3R), Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) serta mobil angkutan persampahan, sedangkan untuk limbah domestik berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), Instalasi Pengolahan Limbah Domestik Terpusat (IPAL-T), Instalasi Pengolahan Limbah Domestik Setempat (IPALD-S). Selain pengelolaan lingkungan hidup juga upaya terkait penanggulangan

bencana alam masih belum optimal apalagi Kota Ternate Selatan memilki potensi yang cukup besar terhadap bencana alam di antaranya adalah abrasi laut yang cukup tinggi di seluruh wilayah pesisir.

5. Masih Belum Optimalnya Transformasi Tata Kelola

Dalam perwujudan *good government* di setiap lingkungan pemerintahan. terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam realisasinya yakni *accountability, transparancy, predictability,* dan *participation.* Jika keseluruhan faktor tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan seksama maka sudah dapat dipastikan bahwa pemerintahan daerah akan berjalan pada koridor pencapaian pembangunan daerah sebagai pendukung peningkatan capaian kinerja pembangunan nasional. Kota Ternate dalam menjalankan roda pemerintahannya berusaha untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi setiap penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, terlihat peningkatan yang cukup signifikan dalam empat tahun terakhir terkait evaluasi terhadap pencapaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

B. Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan. Rumusan permasalahan diidentifikasi berdasarkan *gap* kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Uraian di bawah ini merupakan permasalahan pembangunan Kota Ternate berdasarkan Aspek/Fokus dan/atau Bidang Urusan Pemerintah Daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Bidang Pendidikan

- Tingkat partisipasi warga Negara pada usia 7-12, 13-15, dan usia 5-6 tahun pada jenjang pendidikan perlu ditingkatkan lagi karena belum mencapai target.
- Jumlah tenaga pengajar pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan PAUD belum semua memiliki Ijazah S1/IV sehingga mempengaruhi capaian target.
- Perizinan pendidikan setiap tahunnya belum maksimal karena sekolah tidak mengajukan izin untuk memperoleh NIS, sehingga sebagian masih bergabung pada sekolah lain untuk proses Asesmen Nasional.
- Belum tersedianya beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu pada jenjang pendidikan (SD/MI/SMP/MTs).
- Belum meratanya akses layanan pendidikan pada jenjang pendidikan (PAUD, SD/MI, SMP/MTs).
- Belum meratanya kompetensi guru mata pelajaran.
- Minimnya peningkatan kapasitas guru.
- Masih kurangnya minat siswa/siswi SMA/SMK/MA melanjutkan jenjang pendidikan tinggi.
- Masih terdapat anak putus sekolah (APS) pada tingkat pendidikan SD/SMP.

2. Bidang Kesehatan

- Angka kematian ibu cukup tinggi jauh dari target yang diharapkan, penyebabnya adalah ibu hamil kurang melakukan pemeriksaan risiko kehamilan pada fasilitas kesehatan.
- Angka kematian bayi cukup tinggi jauh dari target yang diharapkan, penyebabnya adalah ibu hamil kurang melakukan pemeriksaan risiko kehamilan pada fasilitas kesehatan.
- Data EPPGBM menunjukan tren fluktuatif pada capaian stunting artinya masih ada bayi-balita yang masuk kategori prevalensi stunting.
- Target akreditasi Puskesmas belum tercapai karena data dukung Puskesmas masih diperbaiki.
- Kurangnya tenaga dokter umum dan spesialis.
- Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai.
- Masih tingginya angka kematian ibu.
- Masih tingginya angka prevalensi stunting.
- Tingginya kasus TBC dan kurangnya konsistensi pengobatan pasien TBC.

- Masih banyak masyarakat yang belum mengakses layanan kesehatan pada pusat pelayanan kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit dan Klinik).
- Belum optimalnya pemenuhan anggaran Jaminan Kesehatan Nasional.

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Kurangnya sumber daya air.
- Minimnya perlindungan sumber air baku.
- Pembangunan pada *catchment* area.
- Intrusi air laut.
- Infrastruktur air minum belum memadai.
- Pelayanan jaringan air minum belum optimal.
- Masih terdapat kondisi jalan yang tidak baik.
- Masih terdapat rumah tangga belum berakses sanitasi.
- Pembangunan dan penggunaan lahan belum sepenuhnya mengacu pada dokumen tata ruang.

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Mahalnya biaya pembangunan rumah.
- Banyaknya permukiman pada wilayah pesisir pantai.
- Rendahnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman.
- Minimnya prasarana sarana dan utilitas perumahan permukiman.

5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Satuan Polisi Pamong Praja

- Kebutuhan akomodasi transportasi dalam pengamanan gangguan Trantibum kurang optimal.
- Belum optimalnya penegakan Perda.

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- Tingginya potensi risiko bencana.
- Kurangnya infrastruktur mitigasi bencana.
- Perubahan iklim dan variabilitas cuaca ekstrim.
- Kurangnya kesadaran dan edukasi kebencanaan.
- Belum optimalnya personil pendukung dan relawan tanggap bencana.
- Belum optimalnya penanggulangan bencana yang berorientasi pada mitigasi bencana.

c. Kebakaran

- Kapasitas dan performa aparat kebakaran dan non kebakaran atau petugas lapangan.
- Belum maksimalnya pelayanan kebakaran dan non kebakaran kepada masyarakat.
- Masih tingginya risiko kebakaran.

6. Bidang Sosial

- Masih fluktuatif penurunan angka kemiskinan.
- Masih kurangnya cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi kelompok rentan.
- Minimnya penyerapan tenaga kerja disabilitas pada sektor formal.
- Belum optimalnya program penanganan PMKS.
- Masih terdapat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum memperoleh Bantuan Sosial.
- Kurang optimalnya partisipasi PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
- Perlunya pemutakhiran data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara berkala.

Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Bidang Tenaga Kerja

- Masih tingginya pencari kerja yang belum ditempatkan.
- Ketidaksesuaian lapangan kerja dengan kemampuan tenaga kerja.

- Masih rendahnya kapasitas pekerja.
- Kurangnya kompetensi pencari kerja.
- Ketidakseimbangan antara pekerjaan dengan pertumbuhan tenaga kerja.
- Tingginya kualifikasi di sektor formal yang belum bisa diimbangi oleh keterampilan yang dimiliki oleh SDM.
- Perselisihan hak, kepentingan dan pemutusan hubungan kerja.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Belum optimalnya Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga.
- Masih tingginya Indeks Ketimpangan Gender.

3. Bidang Pangan

- Skor pola pangan harapan masih di bawah standar yang ditetapkan Nasional.
- Masih adanya masyarakat yang tidak memiliki akses yang stabil terhadap pangan yang cukup dan bergizi seimbang yang dapat menyebabkan stunting dan gizi buruk (terutama pada anak-anak).
- Pangan segar asal tumbuhan merupakan pangan yang berisiko tinggi terhadap cemaran kimia (residu pestisida, mikotoksin, logam berat) yang dapat mengganggu kesehatan manusia sehingga perlu dilakukan pengawasan keamanan pangan.

4. Bidang Pertanahan

- Belum optimalnya pengamanan dan sertifikasi aset pertanahan.
- Masih terdapat kasus sengketa tanah yang belum terselesaikan.

5. Bidang Lingkungan Hidup

- Berkurangnya kawasan hijau akibat pembangunan yang sporadis.
- Menurunnya kualitas sumber daya air.
- Meningkatnya pencemaran udara.
- Masih banyaknya Tanki Septik masyarakat yang belum sesuai dengan standar teknis.
- Terbatasnya sarana prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
- Minimnya sarana prasarana pengolahan sampah.
- Pengurangan sampah dari sumber belum optimal.
- Pengolahan sampah menjadi produk bernilai ekonomis belum menjadi tren.
- Minimnya teknologi pengolahan sampah.
- Volume sampah di TPA sangat tinggi.
- Minimnya sarana prasarana pengangkutan sampah.
- Banyaknya timbulan sampah.
- Degradasi lingkungan.
- Perubahan iklim.
- Perilaku konsumtif masyarakat.
- Tingginya emisi gas buang.
- Pengolahan sampah berbasis partisipatif belum optimal.
- Alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan terbangun.

6. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- Belum maksimalnya cakupan akta kematian.
- Belum maksimalnya cakupan akta perkawinan non muslim.
- Belum maksimalnya cakupan akta kelahiran.
- Masih terdapat penduduk usia dewasa yang belum memiliki KTP.
- Masih tingginya pasangan pernikahan yang tidak memiliki akta nikah.
- Masih terdapat penduduk yang tidak memiliki akta kelahiran.

7. Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

- Modern *Contraceptive Prevalence Rate* (MCPR) belum tercapai pelayanannya karena kesadaran masyarakat terhadap penggunaan kontrasepsi modern masih kurang.

- Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih jauh dari target karena harusnya peserta KB aktif perlu dipertahankan.

8. Bidang Perhubungan

- Terbatasnya sarana prasarana kepelabuhanan.
- Belum terintegrasi seluruh moda dan antar moda yang menghubungkan *hinterland* dengan pusat pertumbuhan.
- Terbatasnya ketersediaan sarana transportasi orang dan barang.
- Meningkatnya tingkat kemacetan.
- Penurunan kinerja lalu lintas, kualitas lingkungan, dan percepatan pembangunan yang berkelanjutan.
- Masih adanya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.
- Masih adanya sarana dan prasarana kepelabuhanan yang belum sesuai dengan standar.

9. Bidang Komunikasi dan Informatika

- Rendahnya integrasi sistem penghubung layanan pemerintah.
- Kurangnya infrastruktur teknologi.
- Kurangnya sosialisasi dan edukasi serta evaluasi mengenai aplikasi.
- Jaringan telekomunikasi dan informasi belum menjangkau seluruh wilayah.
- Kurangnya infrastruktur TIK.
- Belum terintegrasi seluruh sistem TIK.
- Minimnya SDM pengelola TIK.

10. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- Masih rendahnya pemahaman terhadap koperasi.
- Cenderung hanya pada satu jenis usaha koperasi.
- Masih terdapat koperasi yang tidak aktif.
- Masih terdapat usaha mikro yang tidak beroperasi.
- Belum optimalnya Pembinaan dan Pelatihan SDM UMKM.
- Minimnya akses permodalan bagi UMKM, belum adanya sentra UMKM.

11. Bidang Penanaman Modal

- Belum optimalnya pengendalian penanaman modal.
- Masih rendahnya investor baik PMDN maupun PMA.
- Sektor dan jenis sasaran investasi terbatas.
- Kurangnya Tingkat Kepatuhan PMA dan PMDN yang melaporan LKPM nya.

12. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- Sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki masih jauh dari ketentuan yang seharusnya.
- Pembinaan dan pembibitan atlet berprestasi masih belum bisa dilakukan secara maksimal.
- SDM dengan kompetensi dan pengalaman profesional bidang kepemudaan masih sangat terbatas.
- Masih banyak organisasi pemuda yang pasif.
- Masih sedikitnya wirausaha muda yang aktif.
- Belum optimalnya pembinaan olahraga.
- Masih rendahnya penyelenggaraan dan partisipasi kompetisi olahraga.

13. Bidang Statistik

- Minimnya ketersediaan data statistik sektoral dan satu data.

14. Bidang Persandian

- Ancaman siber yang semakin kompleks.
- Lemahnya standar keamanan perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi.
- Keterbatasan perangkat dan teknologi untuk mendukung operasi persandian.
- Kekurangan SDM atau tenaga ahli di bidang persandian dan keamanan informasi.

15. Bidang Kebudayaan

- Pelestarian dan pengembangan seni budaya belum optimal.
- Belum optimalnya upaya penguatan budaya lokal.
- Sarana dan prasarana seni budaya masih kurang.
- Belum optimalnya pengembangan cagar budaya.
- Belum optimalnya pengelolaan museum.

16. Bidang Perpustakaan

- Perpustakaan yang dibina sebagian tidak aktif akhirnya berpengaruh terhadap target.
- Perlunya optimalisasi pemanfaatan Perpustakaan dan Taman Baca Masyarakat untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

17. Bidang Kearsipan

- Pengelolaan kearsipan juga belum optimal karena ada sebagian OPD yang belum memahami pentingnya pengelolaan kearsipan.
- Pengelolaan arsip secara digital belum optimal.

Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Bidang Kelautan dan Perikanan

- Produksi perikanan budidaya masih minim.
- Ketersediaan lahan untuk pembudidaya perikanan masih sangat terbatas.
- Harga pakan dan bibit ikan yang masih tergolong mahal.
- Akses ketersediaan BBM bagi nelayan yang masih terbatas dan tidak merata.
- Penurunan populasi ikan akibat tekanan eksploitasi sumber daya laut.
- Praktik perikanan tidak ramah lingkungan.
- Keterbatasan modal dan sarana pendukung.
- Masih rendahnya Kapasitas SDM nelayan dan penyuluh perikanan.
- Pengelolaan pasca panen yang belum optimal.

2. Bidang Pariwisata

- Sarana dan prasarana di objek wisata belum memadai.
- Promosi pariwisata lokal maupun nasional masih minim.
- Jumlah destinasi wisata yang masih sedikit.
- Rendahnya minat berwisata masyarakat di sekitar kawasan wisata.
- Rendahnya pelaku usaha ekonomi kreatif.

3. Bidang Pertanian

- Belum optimalnya sistem pengelolaan usaha tani.
- Belum optimalnya penerapan teknologi budidaya dan penanganan pascapanen.
- Belum optimalnya hilirisasi produk hasil pertanian.
- Kurangnya jaringan irigasi dan sarana prasarana air.
- Belum optimalnya pemanfaatan lahan pertanian.
- Kurangnya kompetensi penyuluh pertanian.

4. Bidang Perdagangan

- Belum optimalnya pengelolaan pasar pemerintah.
- Belum optimalnya pelayanan ekspor daerah.
- Belum optimalnya promosi produk perdagangan.
- Belum adanya diversifikasi produk ekspor.

5. Bidang Perindustrian

- Belum adanya sentra-sentra Industri Kecil Menengah (IKM).
- Kurangnya modal IKM.
- Kurangnya inovasi dan kreasi produk IKM.
- Kurang optimalnya pembinaan IKM.
- Belum optimalnya legalitas produk IKM.

Unsur Pendukung Pemerintahan

1. **Sekretariat Daerah**

   - Belum optimalnya tata kelola birokrasi SETDA (Sekretariat Daerah).
   - Kuantitas dan kualitas SDM belum cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi lingkup SETDA.
   - Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi SETDA.
   - Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam menjawab permasalahan pembangunan daerah.
   - Belum optimalnya *monitoring* dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

2. **Sekretariat Dewan**

   - Belum optimalnya kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap pimpinan dan anggota DPRD.

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. **Bidang Perencanaan**

   - Belum sepenuhnya tersedia data capaian pada perangkat daerah.
   - Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan.
   - Kualitas dan kuantitas SDM belum optimal.
   - Konsistensi perencanaan dan penganggaran masih perlu ditingkatkan.

2. **Bidang Keuangan Daerah**

   - Masih adanya aset tanah yang belum besertifikat.
   - Pencatatan KIB OPD belum informatif.
   - Pengelolaan keuangan dan aset daerah belum maksimal.
   - Data potensi pendapatan belum valid.
   - Belum optimalnya tata kelola potensi pendapatan.
   - Sarana dan prasarana penunjang belum lengkap.
   - Capaian kinerja penerimaan pajak daerah secara total tercapai namun masih terdapat beberapa jenis pajak yang belum tercapai sesuai target.
   - Tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah.
   - Kepatuhan wajib pajak masih rendah.

3. **Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

   - Belum optimalnya pelaksanaan sistem Merit.
   - Kebutuhan ASN belum terpenuhi secara kuantitatif.
   - Belum optimalnya pengelolaan ASN.
   - Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan kepegawaian.

4. **Bidang Penelitian dan Pengembangan**

   - Belum semua hasil penelitian ditindaklanjuti dan menjadi dasar pengambilan kebijakan (*evidence based policy*).
   - Pengawalan inovasi belum berjalan optimal.

Unsur Pengawasan

1. **Inspektorat Daerah**

   - Terjadinya temuan-temuan yang sifatnya berulang dan rutinitas.
   - Belum optimalnya pengelolaan risiko di lingkup OPD.
   - Kurang optimalnya implementasi SAKIP di jajaran OPD.
   - Masih kurangnya kapasitas APIP.
   - Jumlah dan kualitas SDM auditor dan pengawas masih kurang.
   - Kurang efektifnya koordinasi antara APIP dan APH.
   - Risiko korupsi pada integritas pelaksanaan tugas sangat tinggi.
   - Risiko berupa pemberian gratifikasi masih tinggi.

- Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Belum optimalnya implementasi SPIP.

Unsur Kewilayahan

1. Kantor Kecamatan

- Terbatasnya anggaran dan sarana prasarana yang belum memadai.
- Masih belum maksimalnya pemakaian jumlah air, listrik, dan wifi di kantor camat dan kelurahan.
- Terbatasnya kompetensi dan keahlian sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan.
- Pelayanan publik yang diberikan belum mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat.
- Belum optimalnya pengelolaan Dana Kelurahan.
- Belum optimalnya kondisi dan penanganan keamanan, ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat yang kondusif.
- Belum maksimalnya tingkat pelayanan kebersihan di lingkungan.
- Belum optimalnya peran aktif perangkat kelurahan dan tingkat pemberdayaan masyarakat.
- Belum optimalnya penyelenggaraan urusan umum pemerintahan.
- Belum optimalnya pengawasan.

Unsur Pemerintahan Umum

1. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

- Masih rendahnya pemahaman ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
- Masih rendahnya pembinaan dan pengembangan ketahanan seni, budaya, agama dan ekonomi.
- Rendahnya partisipasi politik masyarakat.
- Masih kurangnya pemberdayaan dan pengawasan ormas.

2.6.2 Isu Strategis

Isu strategis dimaknai sebagai hal-hal yang bersifat penting, berdaya ungkit, memiliki pengaruh yang besar bagi pembangunan Kota Ternate. Kebijakan pembangunan jangka menengah yang dimuat dalam dokumen RPJMD ini sangat dipengaruhi oleh hasil rumusan isu-isu strategis daerah.

A. Isu Megatren dan Internasional

Tantangan global ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatren global. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Megatren global memiliki dua sisi, yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi di sisi lain juga memberikan disrupsi. Perubahan-perubahan tersebut meliputi (i) perkembangan demografi global, (ii) geopolitik dan geoekonomi, (iii) disrupsi teknologi, (iv) peningkatan urbanisasi dunia, (v) peningkatan peran perdagangan internasional, (vi) perubahan keuangan internasional, (vii) peningkatan penduduk kelas menengah (*middle class*), (viii) peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam, (ix) perubahan iklim, dan (x) pemanfaatan luar angkasa (*space economy*).

1. Perkembangan Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Menurut data *World Population Prospects* (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan (*life-span*) yang semakin panjang.

2. Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi Global

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional. Nilai *output* dunia negara berkembang semakin dominan. Pada tahun 2015, negara berkembang menyumbang 55 persen dari nilai *output* dunia, meningkat dari 34 persen pada tahun 1980. Pada tahun 2050, nilai *output* negara-negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71 persen dari total nilai *output* dunia dengan negara Asia sebagai pendorong utama—mencapai 54 persen dari total nilai *output* global. Peranan negara maju (G7) akan mengecil dengan kontribusi terhadap nilai *output* yang menurun dari 32 persen pada tahun 2015 menjadi 20 persen pada tahun 2050. Secara umum, pendapatan per kapita negara-negara maju tetap lebih tinggi dari negara berkembang. Meskipun demikian, 84 negara berkembang pada tahun 2050 diperkirakan akan memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi daripada negara-negara Eropa Selatan pada tahun 2015.

3. Perkembangan Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti *Internet of Things* (IoT), *blockchain, Hyper Connection, Artificial Intelligence* (AI), *Distributed Ledger Technology* (DLT), *Production Lifecycle Management, Robotic Process Automation* (RPA), *Edge Computing, Auto Robotic System*, 3D, dan *Future Technologies*. Disrupsi teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan berbagai bentuk disrupsi teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan secara optimal disrupsi teknologi yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi.

4. Peningkatan Urbanisasi Dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara *emerging economies*. Di Asia sendiri, dalam empat dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan ukuran kota. Berdasarkan data UN, pada tahun 2020 terdapat 23 *megacities*, yaitu kota dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa di dunia (di mana lebih separuhnya berada di negara *emerging economies*). Jumlah ini meningkat pesat sejak tahun 1970, di mana pada saat itu dunia hanya memiliki dua *megacities*.

5. Perubahan Konstelasi Global

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika. Perekonomian Negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di Kawasan Afrika, Nigeria dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi.

6. Pergeseran Tata Kelola Keuangan Global

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi

yang menuju *aging society* pada tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal.

7. Pertumbuhan Kelas Menengah

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia. Setiap tahunnya sekitar 140 juta orang masuk ke dalam status kelas menengah, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik.

8. Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

9. Perubahan iklim

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global - *The Triple Planetary Crisis*) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. *Triple planetary crisis* akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara *business-as-usual* (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkular.

10. Pemanfaatan Luar Angkasa

Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia (*common heritage of humankind*), yaitu suatu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Ketetapan bahwa antariksa tidak tunduk pada kepemilikan suatu negara tertentu, telah mendorong banyak negara mengembangkan industri antariksa. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di bumi. Proses menghubungkan bumi dengan luar angkasa kemudian memunculkan tiga isu utama, yaitu ekonomi antariksa (*space economy*), kelestarian antariksa (*space sustainability*), dan keamanan antariksa (*space security*).

Isu Strategis perubahan iklim meliputi:

1. Perubahan iklim yaitu kenaikan suhu global dikhawatirkan terus meningkat dan melampui 1,5 derajat celsius tahun 2100.
2. Daya tampung kualitas dan kapasitas air, udara, lahan dan laut menurun, daya dukung dan daya tampung wilayah berbeda beda.
3. Daya Dukung: daya dukung Lingkungan mengalami penurunan.

B. Isu Strategis Nasional

Isu dan tantangan pembangunan nasional ke depan meliputi:

1. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat.
2. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.
3. Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai.
4. Deindustrial dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah.
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata.
6. Potensi ekonomi laut belum dimanfaatkan secara optimal.
7. Kontribusi Koperasi dan UMKM masih rendah pada penciptaan nilai tambah ekonomi.
8. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih rendah.
9. Insfrastruktur dan literasi digital masih rendah.
10. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan.
11. Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan efisiensi penggunaan energi juga masih rendah.
12. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan ekonomi hijau.
13. Integrasi ekonomi domestik belum optimal, sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah masih terbatas.
14. Peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi masih rendah.
15. Kualitas pendidikan masih rendah.
16. Belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pemahaman pemanfaatan jaminan sosial juga masih rendah.
17. Kualitas regulasi yang rendah berdampak pada tumpang tindih dan disharmonisasi regulasi baik pusat maupun daerah.
18. Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terpragmentasi dan tidak efektif.
19. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terpragmentasi dan tidak adaptif.
20. Manajemen talenta belum diimplementasikan secara merata ke seluruh KL/D.
21. ASN rentan terhadap intervensi politik.
22. Kualitas pelayanan publik belum merata.
23. Transformasi digital masih menghadapi tantangan yang sangat mendasar, seperti disparitas infrastruktur telekomunikasi dan informasi antardaerah, terutama kesenjangan antarkota – desa yang cukup tinggi.
24. Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat.
25. Integritas pada partai politik masih menjadi permasalahan yang sangat mendasar.
26. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal.
27. Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan.
28. Demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis kepemiluan dan hubungan formal kelembagaan.
29. Keamanan nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta isu geopolitik kawasan terutama di perbatasan.
30. Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktek kehidupan, karakter, dan jati diri bangsa dalam menghadapi budaya global.
31. Ketahanan ekologi menghadapi tantangan berupa tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.
32. Ketimpangan antar jawa dan luar jawa masih tinggi.
33. Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah, namun masih jauh di bawah kebutuhannya.
34. Dalam konektivitas domestik dan global, tantangan utama yang dihadapi adalah konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal.
35. Belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, K/L dan daerah, serta konsistensi pencapaian jangka panjang.
36. Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah serta non publik masih terbatas.

C. Isu Strategis Provinsi Maluku Utara

Rincian dari masing-masing isu strategis pembangunan Provinsi Maluku Utara sebagaimana tersaji diuraikan sebagai berikut:

1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Meningkatnya jumlah penduduk dan bonus demografi yang sedang terjadi merupakan modal pembangunan yang penting. Situasi ini perlu disikapi dengan peningkatan produktivitas dan daya saing tinggi dari SDM yang ada. Ini dapat diraih melalui perluasan dan peningkatan kesehatan masyarakat, akses pendidikan menengah dan tinggi, serta perlindungan sosial yang adaptif dengan penciptaan kesempatan kerja layak dan inklusif. Kondisi ini tentunya akan membentuk komposisi penduduk yang mayoritas berpendidikan menengah dan tinggi yang dapat meningkatkan kualitas manusia dan pada akhirnya memacu produktivitas daerah.

Pembangunan dan pembentukan modal manusia juga harus menjamin bahwa sejak dalam kandungan, setiap anak, termasuk anak dalam kondisi khusus, dapat tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan didukung oleh lingkungan keluarga dan masyarakat yang kondusif. Selanjutnya, pendidikan berkualitas termasuk pendidikan vokasi, pendalaman keterampilan khusus, serta penguasaan IPTEK dan inovasi agar dapat merespons perkembangan dinamis dalam pembangunan daerah. Selain itu, perlindungan sosial yang adaptif perlu terus didorong untuk ditingkatkan dan harus mencakup seluruh penduduk tanpa terkecuali untuk memastikan kesetaraan dan menurunkan ketimpangan, mencakup bauran program jaminan sosial, layanan sosial, serta pemberdayaan secara komprehensif.

2. Ekonomi Bertumpu pada Sektor Primer dan Hilirisasi Industri

Provinsi Maluku Utara memiliki kelimpahan dan keragaman potensi SDA, dengan komoditas utamanya, seperti mineral tambang, perkebunan, perikanan, termasuk potensi pariwisata bahari dan hutan. Dalam beberapa tahun terakhir, industri pertambangan dan penggalian khususnya mineral nikel, serta industri pengolahannya, mengalami peningkatan yang sangat masif. Namun potensi mineral nikel tidak tersedia di seluruh wilayah Maluku Utara, sehingga mendorong ketimpangan ekonomi antardaerah yang semakin melebar. Di sisi lain, komoditas yang di masa lalu pernah menjadi unggulan seperti perkebunan (kelapa, pala dan cengkeh) semakin menurun produksinya. Sementara, pertanian dan pangan perlu didorong untuk memastikan kebutuhan pangan terpenuhi sekaligus menciptakan nilai tambah. Sektor kelautan dan perikanan perlu lebih dikembangkan dengan Ekonomi Biru (*Blue Economy*) harus menjadi tonggak pembangunan sektor maritim yang kompetitif.

Dalam konteks ini, transformasi ekonomi daerah ke depan perlu dipenuhi dengan semangat inovasi dan kolaborasi yang meningkat dan saling melengkapi di berbagai sektor-sektor ekonomi produktif. Melalui iptek, riset dan inovasi yang berkelanjutan, penciptaan inovasi menjadi lebih efektif yang kemudian dapat mendukung pengembangan bisnis dan menciptakan nilai tambah barang dan meningkatkan daya saing wilayah, terutama dalam menghadapi persaingan global. Ekosistem riset yang ideal dibangun oleh beberapa faktor yang saling berkaitan seperti kuantitas dan kualitas sumber daya riset, tata kelembagaan, skema pendanaan, akuntabilitas, dan kerangka regulasi. Namun Provinsi Maluku Utara saat ini menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam meningkatkan kualitas ekosistem riset pada setiap aspek-aspek tersebut sehingga investasi dan optimalisasi perlu dilakukan.

3. Tata Kelola Pemerintahan Adaptif dan Melayani

Selama dua dekade terakhir, upaya reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan dalam mendukung pembangunan dan daya saing daerah belum optimal, sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi. Ke depan, upaya transformasi sosial dan ekonomi daerah membutuhkan dukungan transformasi di sisi tata kelola guna menciptakan ekosistem yang kondusif. Penataan kelembagaan pemerintahan daerah merupakan salah satu prakondisi yang perlu dipersiapkan dalam transformasi digital.

Transformasi digital bukanlah sekadar mengubah proses eksisting yang berjalan manual menjadi berbasis teknologi (*digitialization*), melainkan melibatkan perubahan proses bisnis secara mendasar dengan pola pikir (*mindset*) digital (*digitalization*). Proses dalam pemerintahan daerah

perlu berjalan secara gesit (*agile*) di mana desain kelembagaan mungkin saja bersifat iteratif dan berorientasi pada *outcomes*, bukan semata-mata mandat. Dengan demikian, pada level institusional, perlu dilakukan rekayasa proses bisnis yang dimulai dengan penataan fungsi dan proses bisnis pemerintah daerah secara mendasar dalam suatu arsitektur kelembagaan pemerintah (*government enterprise architecture*) yang dapat memayungi seluruh fungsi dan proses yang berjalan di seluruh instansi pemerintah daerah. Transformasi digital organisasi pemerintah daerah memerlukan kompetensi atau keahlian baru supaya para ASN dapat mengimbangi perubahan yang terjadi di dalam organisasi (misal perubahan tugas/tanggung jawab).

4. Kondusivitas Daerah

Isu kondusivitas daerah di Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan stabilitas sosial, keamanan, dan hubungan antarkelompok masyarakat yang memengaruhi iklim pembangunan dan investasi. Secara umum, Maluku Utara tergolong relatif kondusif, namun masih terdapat potensi kerawanan terutama terkait konflik horizontal berbasis identitas lokal, etnis, dan agama, mengingat provinsi ini memiliki keberagaman sosial budaya yang tinggi. Beberapa wilayah juga pernah mengalami ketegangan akibat persaingan sumber daya alam, khususnya tambang dan lahan, yang bisa memicu gesekan antara masyarakat lokal, pemerintah, dan perusahaan. Selain itu, tantangan kondusivitas juga muncul dari keterbatasan infrastruktur keamanan, seperti keterjangkauan aparat di wilayah-wilayah kepulauan yang terpencil.

Kondusivitas yang mantap tentunya akan memberikan kepercayaan kepada investor. Secara umum, iklim investasi di Provinsi Maluku Utara saat ini sangat dinamis dan menjanjikan, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang mengejutkan, dominasi investasi di sektor pertambangan dan hilirisasi (khususnya nikel dan kobalt), serta dukungan kebijakan pemerintah daerah dan pusat yang pro-investor. Namun, tantangan tetap ada, seperti pembangunan infrastruktur (listrik, jalan, pelabuhan) yang belum merata, risiko deforestasi dan degradasi lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang tidak terkendali, serta kebutuhan peningkatan kapasitas SDM lokal agar manfaat investasi lebih inklusif.

5. Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup

Maluku Utara memiliki khasanah budaya yang sangat beragam, yang dapat berkontribusi dalam memperkaya khasanah kebudayaan nasional. Nilai-nilai agama, budaya, pendidikan karakter dan kewargaan, keluarga dan pengasuhan harus memungkinkan terbentuknya komunitas dan masyarakat dalam memperkuat kohesi, membangun solidaritas, dan meneguhkan komitmen untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Modal sosial budaya merupakan perangkat lunak yang dapat menjadi kekuatan penting dan berperan dalam menggerakkan aksi kolektif, serta mendorong proses transformasi masyarakat Maluku Utara dalam pembangunan di berbagai bidang dan sektor.

Salah satu kearifan lokal yang sudah mengakar di Provinsi Maluku Utara terkait dengan penjagaan lingkungan. Hal ini tercermin dari berbagai praktik tradisional masyarakat adat yang berakar kuat pada nilai-nilai pelestarian alam dan keharmonisan hidup dengan lingkungan. Namun demikian, tekanan pembangunan mengancam degradasi daya dukung sumber daya alam, yang merupakan kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya makin menguat. Ancaman tersebut di antaranya, daya dukung lahan hutan yang makin menurun, daya dukung lahan dan air dalam menopang kemandirian pangan semakin menurun, daya dukung KEHATI berpotensi menurun seiring dengan hilangnya habitat, peningkatan pencemaran, perubahan iklim, serta daya dukung ekosistem laut mengalami kerentanan. Kerusakan fisik ekosistem pesisir dan laut dapat diakibatkan pengelolaan yang tidak berkelanjutan antara lain pada aktivitas perikanan tangkap, pembangunan pesisir, transportasi dan pariwisata. Selain itu, ancaman kebencanaan akan semakin tinggi jika tidak diiringi dengan upaya peningkatan ketahanan daerah.

6. Konektivitas dan Infrastruktur Dasar

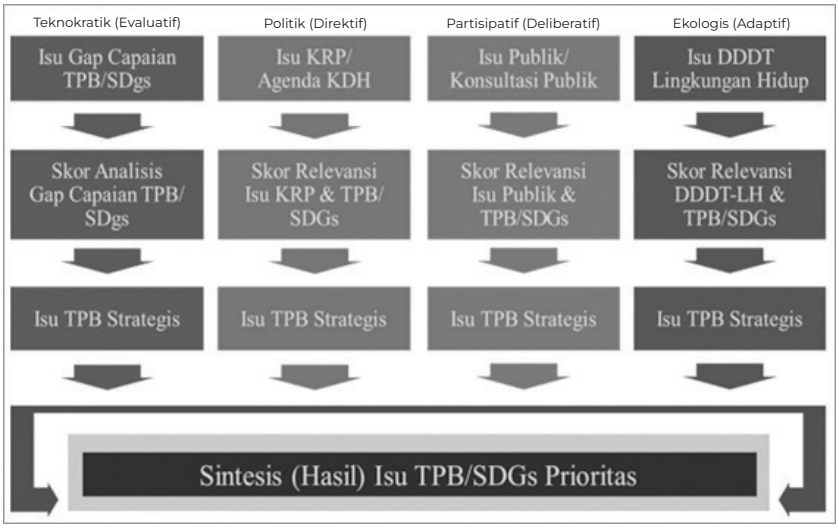
Ketimpangan antarwilayah di daerah kepulauan seperti di Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu isu strategis yang sangat mendesak untuk diatasi dalam 5 (lima) tahun ke depan. Tantangan geografis menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan ketimpangan antarwilayah di Provinsi Maluku Utara. Jarak antarpulau yang jauh, terpisah oleh laut, sulitnya akses transportasi,

dan keterbatasan sumber daya alam di beberapa wilayah menjadikan pembangunan di daerah yang satu berjalan lebih lambat dibandingkan dengan wilayah di daratan utama atau di pulau-pulau besar. Akses yang sulit ini menyebabkan biaya logistik menjadi sangat tinggi, yang pada akhirnya berdampak pada harga barang dan jasa yang lebih mahal serta minimnya ketertarikan investasi dari sektor swasta.

Keterbatasan infrastruktur konektivitas menjadi kendala serius dalam mempercepat pembangunan di Provinsi Maluku Utara, baik saat ini maupun dalam 5 (lima) tahun ke depan. Keterbatasan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan fasilitas umum lainnya mengakibatkan sulitnya mobilitas penduduk dan barang, serta membatasi akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur utilitas berbasis jaringan seperti air bersih dan energi terutama listrik. Selain itu, infrastruktur digital seperti jaringan internet yang belum merata juga memperburuk kesenjangan akses informasi dan teknologi, yang semakin memperlebar jurang ketimpangan antarwilayah.

D. Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Ternate

Isu strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi prioritas dalam kerangka pembangunan jangka menengah Kota Ternate 2025-2029, merupakan hasil akhir dari proses sintesis multidimensi yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berbasis bukti. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi daftar tujuan yang penting secara teoritis, melainkan juga untuk menyaring mana dari sekian banyak tujuan yang benar-benar menuntut perhatian segera berdasarkan kombinasi antara urgensi empiris, tekanan ekologis, relevansi kebijakan, dan legitimasi sosial. Dalam konteks inilah KLHS memainkan peran penting sebagai simpul integratif antara instrumen perencanaan pembangunan dan prinsip-prinsip keberlanjutan. Tahapan ini didahului oleh 4 (empat) analisis utama: (1) identifikasi *gap* capaian TPB berdasarkan jarak terhadap target nasional 2024 dan target global 2030, (2) analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, (3) analisis keterkaitan dengan kebijakan/rencana/program (KRP) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta (4) analisis aspirasi dan persepsi publik yang dirumuskan dalam bentuk isu-isu strategis aktual. Keempat dimensi tersebut kemudian disintesis untuk menghasilkan pemetaan TPB yang dianggap strategis secara substansial, operasional, dan kontekstual.



Sumber: Hasil Analisis, 2025

Gambar 2.17 Kerangka Metodologi Sintesis Multi Dimensi TPB Prioritas

Sebagaimana tergambar pada ilustrasi diagram metodologi, pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa perumusan TPB prioritas tidak dilakukan secara sektoral atau normatif semata, melainkan melalui pertimbangan menyeluruh yang melibatkan pendekatan teknokratik-evaluatif, ekologis-adaptif, politik-direktif, serta partisipatif-deliberatif.

1. Dimensi teknokratik-evaluatif digunakan untuk menilai capaian indikator TPB berdasarkan data yang tersedia dan jaraknya terhadap target yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, KLHS merujuk

pada RAN TPB 2020–2024 dan SDGs 2030 sebagai tolok ukur, sebagaimana dimandatkan Permendagri 7/2018 dan kerangka OECD SDG *Distance Framework*.

2. Dimensi ekologis-adaptif mengaitkan TPB dengan hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam hal ini, prinsip-prinsip keberlanjutan ekosistem menjadi fondasi dalam mempertimbangkan risiko lingkungan hidup jangka panjang, kapasitas regeneratif alam, dan potensi daya lenting wilayah.
3. Dimensi politik-direktif memastikan bahwa pemilihan TPB prioritas tidak lepas dari visi, misi, dan program prioritas kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih. Hal ini penting agar KLHS tidak berjalan sendiri, melainkan selaras dan mendukung dokumen RPJMD sebagai instrumen utama perencanaan strategis daerah.
4. Dimensi partisipatif-deliberatif dibangun melalui hasil forum konsultasi publik, penggalian persepsi masyarakat, serta analisis terhadap isu-isu yang berkembang di lapangan. Dengan ini, proses KLHS menjamin legitimasi publik terhadap isu yang dipilih.

Keempat dimensi ini kemudian dikonversi ke dalam skor keterkaitan yang merepresentasikan kekuatan tematik dan relevansi operasional dari setiap TPB terhadap masing-masing dimensi yang ditinjau. Dalam penerapannya, suatu Agenda TPB dikategorikan sebagai "strategis" apabila muncul secara signifikan dalam minimal satu dimensi dengan narasi yang kuat. Penetapan TPB strategis menurut dimensi ini telah dilakukan sebelumnya dengan proses terstruktur dan disajikan dalam sub bab terdahulu. Sedangkan suatu Agenda TPB dikategorikan sebagai "prioritas", apabila memiliki keterkaitan kuat dan konsisten dalam tiga atau lebih dari empat dimensi analisis.

Tabel berikut menunjukkan hasil akhir sintesis keempat dimensi, dengan skor yang mengindikasikan kekuatan posisi masing-masing TPB dalam kerangka pembangunan Kota Ternate 2025–2030. Dari hasil tersebut, 5 (lima) TPB ditetapkan sebagai TPB Prioritas, yaitu:

1. TPB 04 – Pendidikan Berkualitas
2. TPB 06 – Air Bersih dan Sanitasi Layak
3. TPB 11 – Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan
4. TPB 12 – Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
5. TPB 13 – Penanganan Perubahan Iklim

Kelima TPB tersebut muncul secara konsisten dalam lintas dimensi analisis, yang menjadikan posisinya menonjol dalam spektrum isu pembangunan berkelanjutan Kota Ternate.

Tabel 2.153
Matriks Hasil Sintesis TPB Prioritas Multi Dimensi

Agenda TPB	Dimensi Perumusan Isu TPB Strategis				Sintesis (Hasil)
	Gap Capaian TPB	DDDTLH	KRP Strategis	Isu Publik	
TPB 01 - Tanpa Kemiskinan	-	-	-	Strategis	-
TPB 02 - Tanpa Kelaparan	Strategis	-	-	Strategis	-
TPB 03 - Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Strategis	-	-	Strategis	-
TPB 04 - Pendidikan Berkualitas	Strategis	-	Strategis	Strategis	Prioritas
TPB 05 - Kesetaraan Gender	-	-	-	-	-
TPB 06 - Air Bersih dan Sanitasi Layak	Strategis	Strategis	-	Strategis	Prioritas
TPB 07 - Energi Bersih dan Terjangkau	Strategis	-	-	-	-
TPB 08 - Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	-	-	Strategis	Strategis	-
TPB 09 - Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Strategis	-	Strategis	-	-
TPB 10 - Berkurangnya Kesenjangan	-	-	Strategis	Strategis	-
TPB 11 - Kota dan Komunitas Berkelanjutan	Strategis	Strategis	Strategis	Strategis	Prioritas
TPB 12 - Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	Strategis	Strategis	-	Strategis	Prioritas
TPB 13 - Penanganan Perubahan Iklim	-	Strategis	Strategis	Strategis	Prioritas
TPB 14 - Ekosistem Laut	-	-	-	Strategis	-
TPB 15 - Ekosistem Daratan	-	Strategis	-	Strategis	-
TPB 16 - Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	-	-	Strategis	-	-
TPB 17 - Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Strategis	-	-	-	-

Sumber: Hasil Analisis, 2025

TPB 04 – Pendidikan Berkualitas, secara konsisten muncul sebagai agenda utama dalam hampir seluruh dimensi penilaian. Di satu sisi, capaian indikator TPB ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama pada kualitas dan inklusi pendidikan. Di sisi lain, TPB ini tercermin kuat dalam program-program prioritas kepala daerah terpilih yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM, dan penguatan karakter generasi muda. Aspirasi publik yang terekam melalui forum konsultasi juga menunjukkan bahwa pendidikan berkualitas merupakan kebutuhan mendesak, tidak hanya sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan sosial. Ketika dikaitkan dengan tekanan lingkungan hidup, TPB ini menampakkan keterkaitannya secara tidak langsung, misalnya dalam konteks literasi kebencanaan dan kapasitas adaptasi generasi muda terhadap perubahan iklim dan degradasi sumber daya alam.

TPB 06 – Air Bersih dan Sanitasi Layak, menduduki posisi strategis karena muncul sebagai simpul masalah dalam dimensi gap capaian, daya dukung lingkungan, serta artikulasi aspirasi masyarakat. Ketergantungan hampir mutlak Kota Ternate pada air tanah dalam, yang mencapai 99% dari total pasokan air bersih menjadi salah satu titik rawan keberlanjutan yang mengemuka. Selain distribusi yang belum merata, kualitas air di wilayah tertentu juga tidak layak konsumsi. Sementara itu, sistem pengelolaan sanitasi masih menghadapi tantangan struktural berupa *septic tank* non-kedap, minimnya cakupan layanan air limbah, dan belum optimalnya sistem resapan. Program prioritas kepala daerah pun memberikan ruang yang cukup besar untuk menjawab masalah ini, termasuk dalam hal perluasan akses infrastruktur dasar di wilayah kepulauan serta konservasi sumber daya air. Oleh karena itu, TPB 06 sebagai prioritas tidak dapat ditawar karena bersinggungan langsung dengan hak dasar, keberlanjutan ekosistem, dan stabilitas sosial.

TPB 11 – Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan menjadi titik pusat dari transformasi ruang dan keseimbangan pembangunan wilayah. Capaian indikator TPB ini di Kota Ternate menghadirkan tantangan besar, mulai dari pertumbuhan permukiman yang tidak terkendali, kerentanan terhadap bencana, hingga ketimpangan akses terhadap infrastruktur dasar. Data KLHS juga menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Ternate menghadapi tekanan tata ruang yang signifikan, termasuk degradasi kawasan resapan, pencemaran drainase, serta tekanan terhadap keanekaragaman hayati pesisir.

Agenda pembangunan yang diajukan kepala daerah terpilih menempatkan aspek ini sebagai salah satu pilar utama, melalui revitalisasi ruang kota, pengendalian risiko geologi, dan perbaikan tata kelola lingkungan permukiman. Aspirasi masyarakat juga menyoroti buruknya kondisi kawasan kumuh dan sanitasi yang berdampak langsung terhadap kesehatan lingkungan. Penetapan TPB 11 sebagai prioritas menunjukkan keberpihakan terhadap perbaikan kualitas hidup urban secara holistik, dari skala makro tata ruang hingga skala mikro pelayanan dasar.

TPB 12 – Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab muncul sebagai hasil dari kombinasi tekanan lingkungan hidup, kegagalan sistemik pengelolaan sampah, dan respon kebijakan yang masih parsial. Data menunjukkan bahwa peningkatan timbulan sampah tidak diimbangi dengan kapasitas pengelolaan yang memadai, sementara lahan TPA hanya tersedia sebesar 5 hektare dari kebutuhan ideal 30 hektare. Polusi mikroplastik, buruknya sistem pemilahan sampah, serta belum berkembangnya sistem daur ulang menjadi indikasi bahwa sistem konsumsi dan produksi Kota Ternate masih beroperasi dalam kerangka yang tidak berkelanjutan. Isu ini juga memperoleh tempat dalam program prioritas melalui inisiatif pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan diperkuat oleh aspirasi warga terkait pencemaran lingkungan dan banjir perkotaan. Penetapan TPB ini sebagai prioritas dimaksudkan untuk menggerakkan perubahan sistemik dalam gaya hidup, manajemen sumber daya, dan keberlanjutan ekosistem urban.

TPB 13 – Penanganan Perubahan Iklim merupakan bentuk tanggapan strategis terhadap tekanan perubahan iklim yang telah nyata dirasakan masyarakat Kota Ternate, terutama dalam bentuk banjir, abrasi, dan risiko longsor. Dalam KLHS ini, TPB ini dinilai berkelindan erat dengan ekosistem darat dan pesisir yang mengalami degradasi, serta kapasitas adaptasi yang tidak merata antarwilayah dan kelompok sosial. Analisis emisi GRK Kota Ternate juga menunjukkan bahwa sektor energi, khususnya pembangkit listrik dan transportasi darat, menjadi kontributor utama. Proyeksi *business-as-usual* menunjukkan lonjakan emisi yang signifikan pada tahun 2030 jika tidak diimbangi dengan strategi mitigasi yang terukur. TPB 13 pun memperoleh dukungan eksplisit dalam sejumlah program prioritas kepala daerah, khususnya yang berkaitan dengan transisi menuju material ramah lingkungan, literasi kebencanaan, dan konservasi wilayah pesisir. Aspirasi publik juga memperlihatkan kepedulian yang tinggi terhadap ancaman perubahan iklim, baik dalam konteks lingkungan maupun ekonomi.

Kelima TPB prioritas menggambarkan orientasi pembangunan yang tidak hanya responsif terhadap tantangan lokal, tetapi juga selaras dengan arah pembangunan global yang digariskan dalam Agenda 2030. Penetapan ini juga menegaskan bahwa keberlanjutan bukan hanya konsep normatif, melainkan peta jalan untuk memperbaiki arah pembangunan dalam kerangka tata kelola daerah. KLHS RPJMD, dalam konteks ini, tidak hanya menjadi dokumen formal pelengkap RPJMD, melainkan sebagai instrumen penyaring dan penyatu antara kondisi faktual dan arah kebijakan. Dengan sintesis lintas dimensi, penetapan TPB prioritas menjadi titik awal bagi perumusan isu strategis secara lebih konkret dan fokus.

Namun demikian, dalam proses penyusunan isu strategis untuk masing-masing TPB tersebut, penting ditegaskan bahwa kekuatan analisis tidak hanya terletak pada indikator yang memiliki data eksplisit, tetapi juga pada pembacaan terhadap indikator-indikator yang belum terukur secara sistemik di tingkat daerah. Dalam konteks ini, pendekatan kehati-hatian (*precautionary principle*) menjadi acuan metodologis yang digunakan secara sadar. Setiap indikator yang tidak memiliki data atau tidak tersedia secara resmi di tingkat daerah tidak dianggap netral, melainkan ditafsirkan sebagai indikasi lemahnya sistem pemantauan dan risiko ketercapaian yang belum terjamin.

Ketidakterukuran merupakan sinyal bahwa aspek tersebut masih menjadi titik lemah dalam tata kelola pembangunan, baik dari sisi substansi kebijakan, sistem pencatatan, maupun dukungan sumber daya. Oleh karena itu, indikator yang tidak memiliki data dianggap sebagai belum tercapai, kecuali tersedia bukti program, kebijakan, atau evaluasi kualitatif yang menunjukkan capaian aktual secara eksplisit. Pendekatan ini dipilih secara sadar untuk:

- Menjaga integritas proses analisis dengan memperlakukan semua TPB secara adil;
- Mendorong penguatan sistem data dan statistik pembangunan daerah;
- Mencegah terjadinya *blind spot* dalam perencanaan yang berakibat pada pengabaian isu-isu struktural yang sebenarnya mendesak.

Dengan kerangka pemikiran tersebut, maka penyusunan isu strategis pada masing-masing TPB prioritas tidak hanya diarahkan untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi, tetapi juga untuk menyoroti area-area kritis yang selama ini tersembunyi dalam kekosongan data.

Langkah ini sekaligus memperkuat peran KLHS sebagai instrumen reflektif, korektif, dan proaktif dalam membangun sistem perencanaan yang berbasis keberlanjutan dan bukti. Selanjutnya, pembahasan akan diarahkan secara lebih terfokus pada perumusan isu strategis untuk masing-masing dari 5 (lima) TPB prioritas. Setiap pembahasan akan mengacu langsung pada struktur indikator resmi SDGs, dengan memperhatikan data yang tersedia dan menyampaikan secara jernih konteks substantif dari setiap persoalan yang teridentifikasi.

1. Isu Strategis TPB 4 – Pendidikan Berkualitas

Pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan manusia dan sosial yang berkelanjutan. TPB 4 secara eksplisit mengamanatkan pentingnya menjamin pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas, serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua kelompok masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, komitmen terhadap TPB 4 tidak hanya diukur dari besarnya cakupan peserta didik dalam sistem pendidikan, tetapi juga dari mutu pembelajaran, kesiapan infrastruktur, serta keberpihakan terhadap kelompok rentan yang menghadapi hambatan struktural maupun kultural.

Secara umum, tantangan utama dalam pencapaian TPB 4 di Kota Ternate dapat dipetakan ke dalam dua ranah utama yang saling berkaitan: pertama, kesenjangan akses terhadap layanan pendidikan dasar dan menengah; dan kedua, kualitas pembelajaran dan keberlanjutan hasil belajar. Pemisahan ini selaras dengan kerangka kebijakan nasional yang membedakan antara pemerataan layanan dasar dan penguatan kualitas sumber daya pendidikan, meskipun pada praktiknya keduanya harus ditangani secara terpadu.

Pada aspek akses, data indikator 4.1.2.(a) menunjukkan bahwa masih terdapat anak-anak usia 7–15 tahun yang tidak mengenyam pendidikan formal. Walau proporsinya kecil, hal ini mencerminkan bahwa *universal access* belum sepenuhnya tercapai. Belum terpenuhinya indikator 4.2.1 dan 4.2.2, yang terkait dengan pendidikan anak usia dini dan partisipasi dalam layanan prasekolah, mengindikasikan lemahnya sistem pemantauan PAUD serta belum terintegrasinya intervensi terhadap kesiapan belajar anak sejak dini.

Ketimpangan juga terlihat dalam indikator 4.5.1 yang mencerminkan disparitas partisipasi pendidikan di tingkat pendidikan dasar berdasarkan jenis kelamin, disabilitas, dan status sosial ekonomi.

Capaian yang masih di bawah standar nasional ini menandakan bahwa upaya afirmatif terhadap kelompok marginal belum sepenuhnya efektif, baik dalam bentuk pendanaan yang responsif, penyediaan fasilitas inklusif, maupun mekanisme partisipatif berbasis komunitas. Kesenjangan ini semakin diperparah oleh ketiadaan data pada indikator 4.a.1 tentang keberadaan infrastruktur sekolah yang ramah anak, disabilitas, dan gender, yang merefleksikan lemahnya sistem informasi pendidikan berbasis inklusi. Konsekuensinya, kelompok rentan berisiko tidak terakomodasi dalam perencanaan pembangunan pendidikan secara memadai.

Sementara itu, pada aspek mutu pembelajaran, tantangan utama tercermin dalam capaian indikator 4.1.1 yang menunjukkan rendahnya proporsi siswa yang mencapai kompetensi minimum dalam literasi membaca. Hal ini menandakan keterbatasan efektivitas pengajaran, metode belajar, dan ketersediaan sarana pembelajaran yang mendukung. Dari sisi tenaga pendidik, indikator 4.c.1 mengungkap bahwa meskipun mayoritas guru telah memenuhi kualifikasi akademik, persentase guru bersertifikat masih belum memenuhi target nasional, yang menunjukkan adanya celah dalam penguatan kompetensi profesional, khususnya terkait penguasaan pendekatan pembelajaran abad ke-21.

Di luar itu, lemahnya tata kelola sekolah juga terlihat dari tidak tersedianya data yang memadai terkait akses terhadap listrik, internet, komputer, air bersih, fasilitas sanitasi, dan layanan WASH di sekolah. Ketidakhadiran data ini tidak hanya menjadi indikator lemahnya pelaporan, tetapi juga mencerminkan potensi belum terpenuhinya standar minimum infrastruktur pendidikan. Keterbatasan sarana belajar yang layak berdampak langsung pada rendahnya daya dukung terhadap proses dan hasil pembelajaran yang berkualitas. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada peserta didik aktif, tetapi juga tercermin dalam rendahnya kemampuan literasi dan numerasi penduduk dewasa. Indikator 4.6.1.(a) menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang belum mencapai tingkat melek aksara yang memadai. Kesenjangan ini membatasi kapasitas warga dalam mengakses informasi, mengambil keputusan ekonomi, dan berpartisipasi dalam pembangunan sosial secara bermakna.

Seluruh uraian di atas menegaskan bahwa tantangan pembangunan pendidikan di Kota Ternate tidak dapat direduksi sekadar pada kuantitas partisipasi, tetapi harus dibaca dalam satu kerangka sistemik yang mencakup keberpihakan terhadap kelompok rentan, kualitas proses pembelajaran, dan kesiapan infrastruktur sekolah.

Dengan demikian, rumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan yang diangkat dalam TPB 4 adalah:

Kesenjangan partisipasi pendidikan yang inklusif dan merata, mutu hasil pembelajaran, dan infrastruktur pendidikan yang memadai.

Isu ini merepresentasikan simpul dari masalah struktural yang harus ditangani secara lintas sektor melalui intervensi terpadu antara pendidikan, sosial, perencanaan wilayah, infrastruktur dasar, dan tata kelola kelembagaan. Sebagai landasan perumusan arah kebijakan dan skenario pembangunan, isu ini tidak hanya menyoroti permasalahan, tetapi juga menegaskan komitmen untuk membangun sistem pendidikan yang adil, tangguh, dan berkelanjutan.

2. Isu Strategis TPB 6 – Air Bersih dan Sanitasi Layak

TPB 6 mengamanatkan tersedianya akses universal terhadap air bersih dan sanitasi yang layak bagi semua, serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya air yang mendukung kualitas hidup dan ketahanan ekosistem. Dalam konteks Kota Ternate, hasil telaah menunjukkan tantangan yang kompleks dan berlapis, baik dari aspek layanan dasar maupun keberlanjutan daya dukung lingkungan. Ketersediaan data yang sangat terbatas pada sebagian besar indikator utama menjadi sinyal awal akan lemahnya sistem pemantauan, yang berdampak langsung pada ketidakmampuan pemerintah daerah dalam merumuskan strategi yang berbasis bukti dan mengukur capaian secara akuntabel.

Indikator 6.1.1 mengenai layanan air minum yang dikelola secara aman, serta serangkaian indikator sanitasi seperti 6.2.1 dan turunannya, seluruhnya tidak memiliki data yang tersedia di tingkat Kota Ternate. Ini menunjukkan bahwa sistem layanan air bersih dan sanitasi belum terdokumentasi secara sistematis dan tidak memiliki *baseline* yang jelas untuk pengambilan keputusan yang kredibel. Satu satunya indikator yang menunjukkan status "tercapai" adalah persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak (6.2.1(b)), namun status ini tidak disertai dengan informasi tentang distribusi geografis, keberpihakan terhadap kelompok rentan, maupun kelayakan infrastruktur sanitasi itu sendiri. Sementara itu, persoalan nyata di lapangan seperti praktik buang air besar sembarangan (BABS), pengelolaan lumpur tinja, dan rendahnya akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik belum tercermin dalam pelaporan resmi, meskipun banyak diangkat dalam notulensi publik dan dokumen perencanaan.

Dalam aspek kualitas lingkungan, indikator 6.3.2(a) yang mengukur kualitas air permukaan menunjukkan status "sedang" dan belum mencapai target nasional. Kualitas air tanah, meskipun menjadi sumber utama bagi 99% populasi Kota Ternate, tidak tercatat dalam sistem pemantauan, yang memperkuat kesimpulan bahwa aspek pengawasan kualitas air belum berjalan optimal. Ketidakterpenuhinya data indikator 6.3.1 dan 6.3.2(b) memperlemah kapasitas daerah dalam menilai risiko pencemaran dan menentukan prioritas mitigasi. Tanpa sistem informasi yang andal, risiko-risiko ini tidak hanya bersifat teknis tetapi juga struktural.

Krisis daya dukung sumber daya air semakin nyata dengan tidak tersedianya data pada indikator efisiensi penggunaan air (6.4.2), yang penting dalam menilai keseimbangan antara pemanfaatan dan ketersediaan. Indikator 6.6.1 tentang perubahan sumber daya air dan kualitas lahan menunjukkan skor yang rendah, menandakan bahwa degradasi kawasan resapan, defisit konservasi, dan absennya diversifikasi sumber air baku telah berdampak langsung terhadap keberlanjutan penyediaan air. Debit Danau Ngade sebagai salah satu sumber air permukaan aktif utama PDAM mengalami penurunan drastis dalam lima tahun terakhir, tanpa sistem cadangan atau pengelolaan limpasan air hujan yang terintegrasi. Kawasan tangkapan air mengalami degradasi, sementara konservasi berbasis ekosistem belum menjadi bagian dari tata kelola sumber daya air.

Permasalahan sanitasi turut memperburuk situasi pada kinerja TPB ini. Masih berlangsungnya praktik BABS di wilayah pesisir, rendahnya cakupan layanan pengelolaan lumpur tinja, serta ketiadaan sistem sanitasi terpusat menunjukkan bahwa standar minimum pelayanan belum terpenuhi. Lemahnya tata kelola sanitasi ini bukan hanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menimbulkan konsekuensi jangka panjang terhadap kesehatan lingkungan dan beban pelayanan kesehatan. Ketidakterpaduan antara kebijakan, data, dan infrastruktur menjadikan sistem sanitasi perkotaan rentan dan tidak tangguh terhadap tekanan populasi dan perubahan iklim.

Seluruh kondisi ini menggambarkan tantangan sistemik dalam menjamin layanan air bersih dan sanitasi yang aman di Kota Ternate. Ketidakterpenuhinya standar dasar layanan, ketiadaan sistem pemantauan yang andal, dan krisis keberlanjutan daya dukung sumber daya air menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak dapat diselesaikan secara sektoral semata.

Oleh karena itu, rumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan dalam TPB 6 difokuskan pada:

Kesenjangan akses dan mutu layanan air bersih dan sanitasi aman, kerentanan sumber daya air, serta lemahnya pengelolaan limbah cair.

Isu ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan transformasi tata kelola, penguatan sistem informasi, dan integrasi kebijakan lintas sektor, meliputi lingkungan hidup, pekerjaan umum, kesehatan, perencanaan wilayah, dan sosial, dalam satu kerangka pembangunan yang berbasis keberlanjutan dan ketangguhan jangka panjang.

3. Isu Strategis TPB 11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan

TPB 11 mengedepankan prinsip kota yang aman, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, sebuah orientasi pembangunan yang menyatukan dimensi spasial, sosial, ekologis, dan kelembagaan dalam satu kesatuan sistem. Di Kota Ternate, kompleksitas TPB 11 tidak hanya tercermin dalam

pengelolaan ruang fisik perkotaan, tetapi juga menyangkut kualitas hidup warganya, akses terhadap ruang dan layanan dasar, serta kemampuan adaptif kota dalam menghadapi tekanan lingkungan dan bencana. Oleh karena itu, pemetaan isu strategis TPB 11 dalam KLHS RPJMD 2025–2029, difokuskan dalam tiga klaster utama yang saling terkait namun memiliki karakter tantangan yang spesifik.

Klaster pertama berkaitan dengan akses terhadap hunian layak dan ruang kota yang mendukung kehidupan yang bermartabat. Berdasarkan indikator 11.1.1, proporsi rumah tangga dengan akses terhadap hunian yang memenuhi standar masih di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan ruang terbuka hijau dan ruang publik (indikator 11.7.1) yang belum mencapai ambang batas minimal untuk menciptakan lingkungan yang sehat, teduh, dan inklusif. Di sisi lain, layanan persampahan yang tercakup dalam indikator 11.6.1 dan 11.6.1(b) menunjukkan tingkat pelayanan dan pengelolaan sampah yang masih rendah, menandakan belum optimalnya pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap lingkungan perkotaan yang bersih dan layak huni. Ketimpangan ini terlihat paling nyata di kawasan padat penduduk, permukiman kumuh, dan wilayah kepulauan yang mengalami fragmentasi akses terhadap layanan dasar dan ruang hidup yang aman. Tanpa intervensi yang berpihak dan terintegrasi, ketimpangan ini berisiko memperbesar eksklusi spasial dan memperdalam kesenjangan antarwilayah.

Klaster kedua mencakup ketidakteraturan urbanisasi dan pemanfaatan ruang yang belum terkendali secara ekologis maupun administratif. Urbanisasi di Kota Ternate berlangsung dalam ruang geografis yang sempit dan penuh tekanan, namun pengendalian tata ruang belum menunjukkan efektivitas yang memadai. Tidak tersedianya data pada indikator 11.3.1 (rasio perluasan lahan terbangun terhadap pertumbuhan penduduk) membatasi kapasitas analitis dalam membaca dampak urbanisasi. Sementara itu, dinamika di lapangan memperlihatkan pertumbuhan permukiman yang menyebar tanpa arah spasial yang terkonsolidasi. Penyusunan RTRW belum selesai secara menyeluruh, dan sebagian besar wilayah belum tercakup dalam rencana yang telah dilengkapi dengan KLHS RTRW (indikator 11.a.1). Akibatnya, pemanfaatan ruang kerap berlangsung tanpa pertimbangan daya dukung ekologis maupun risiko kebencanaan, memicu degradasi lingkungan, ketidakpastian investasi, dan konflik pemanfaatan lahan.

Klaster ketiga menyangkut kerentanan sistem ketahanan kota terhadap bencana dan perubahan iklim. Meskipun indikator 11.5.1 menunjukkan capaian yang positif dalam menurunkan jumlah korban bencana dan indikator 11.c.1 menandai kemajuan dalam regulasi bangunan gedung berkelanjutan, indikator 11.b.2 mengungkap bahwa sebagian besar pemerintah daerah, termasuk Kota Ternate, belum sepenuhnya mengadopsi strategi penanggulangan bencana yang selaras dengan kerangka nasional. Ini menandakan bahwa kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor masih perlu diperkuat secara signifikan. Sebagai kota kepulauan vulkanik dengan garis pantai aktif dan topografi curam, Ternate sangat rentan terhadap gempa bumi, longsor, banjir, serta dampak iklim ekstrem. Lemahnya sistem drainase, minimnya ruang evakuasi, dan belum terintegrasinya mitigasi iklim dalam perencanaan pembangunan memperbesar risiko kerugian sistemik di masa depan. Dengan demikian, rumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan yang diangkat dalam TPB 11 adalah:

- **Ketimpangan akses terhadap hunian layak, ruang terbuka hijau, dan layanan dasar perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan.**
- **Ketidakteraturan urbanisasi dan pemanfaatan ruang yang tidak terkendali dan tidak adaptif terhadap daya dukung ekologis.**
- **Kerentanan sistem ketahanan kota terhadap risiko bencana dan tekanan perubahan iklim yang semakin kompleks dan sistemik.**

Ketiga klaster isu menandai kompleksitas struktural yang dihadapi Kota Ternate dalam mengelola dinamika urbanisasi, tekanan ekologis, dan tuntutan keberlanjutan sosial. Penanganannya memerlukan pendekatan lintas sektor yang terintegrasi, penguatan kelembagaan tata ruang, serta reformasi sistemik dalam perencanaan dan implementasi kebijakan kota. Tanpa transformasi pada tataran konsepsi, data, dan pelaksanaan, risiko terakumulasinya tekanan spasial dan ketidaksetaraan sosial akan semakin tinggi, mengancam keberlangsungan kualitas hidup dan daya tahan kota di masa mendatang.

4. Isu Strategis TPB 12 – Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

TPB 12 menggarisbawahi pentingnya transformasi sistem produksi dan konsumsi menuju arah yang lebih efisien, bertanggung jawab, dan ramah lingkungan. Dalam konteks Kota Ternate, pencapaian TPB ini menghadapi tantangan fundamental, terutama menyangkut belum terbentuknya sistem pendukung yang memungkinkan penerapan prinsip keberlanjutan secara menyeluruh di berbagai sektor. Hal ini bukan semata masalah capaian indikator, tetapi lebih pada absennya struktur kebijakan dan kelembagaan yang dapat mendorong ekonomi sirkular tumbuh secara sistemik di tingkat daerah.

Sejumlah indikator TPB 12 menunjukkan bahwa landasan teknis untuk mendukung perubahan pola konsumsi dan produksi masih sangat lemah. Indikator 12.5.1—tentang timbulan sampah yang didaur ulang, masih "belum tercapai", mencerminkan belum terbangunnya sistem pengelolaan limbah yang berbasis siklus tertutup, baik dari sisi infrastruktur maupun perubahan perilaku masyarakat. Sementara itu, sebagian besar indikator lainnya seperti 12.1.1, 12.3.1, 12.4.2, dan 12.6.1 belum memiliki data yang tersedia, mengindikasikan tidak hanya lemahnya sistem pelaporan dan pemantauan, tetapi juga ketiadaan agenda kebijakan yang secara eksplisit mengusung pendekatan konsumsi-produksi berkelanjutan.

KLHS ini melihat bahwa instrumen kebijakan daerah yang seharusnya menjadi pengungkit, seperti pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan (indikator 12.7.1), belum diimplementasikan secara signifikan. Padahal, belanja publik merupakan instrumen strategis untuk mengarahkan pasar ke praktik yang lebih hijau dan efisien. Selain itu, belum berkembangnya mekanisme insentif bagi pelaku usaha untuk menerapkan praktik keberlanjutan menunjukkan adanya kekosongan kebijakan ekonomi yang pro-lingkungan, terutama bagi UMKM lokal yang seharusnya menjadi pelopor penerapan ekonomi hijau.

Kelemahan juga terlihat dalam aspek pendidikan dan budaya konsumsi masyarakat. Rendahnya partisipasi publik dalam pemilahan sampah, penggunaan ulang barang, dan pengurangan konsumsi berlebih berkaitan erat dengan belum adanya sistem edukasi yang terstruktur. Ketiadaan data pada indikator 12.8.1 menunjukkan bahwa literasi konsumsi-produksi berkelanjutan belum menjadi bagian dari kurikulum pendidikan formal maupun gerakan sosial di tingkat komunitas. Selain itu, indikator 12.a.1 tentang kapasitas energi terbarukan menunjukkan belum adanya investasi berarti dalam teknologi hijau.

Sementara indikator 12.b.1, yang mengukur sistem keberlanjutan pariwisata, tidak memiliki data yang memadai, padahal Kota Ternate tengah mengembangkan sektor ini sebagai pilar ekonomi masa depan. Tanpa rambu keberlanjutan yang kuat, pariwisata berisiko menciptakan tekanan tambahan terhadap lingkungan dan sumber daya lokal, termasuk peningkatan volume limbah, degradasi kawasan pesisir, dan beban infrastruktur publik yang belum siap mendukung lonjakan aktivitas wisata secara berkelanjutan.

Seluruh kecenderungan di atas menunjukkan bahwa pendekatan konsumsi produksi berkelanjutan di Kota Ternate masih berada dalam fase normatif, belum teraktualisasi dalam sistem perencanaan dan kebijakan sektoral yang konkret. Ketidakhadiran data pada sebagian besar indikator bukan semata masalah teknis, melainkan refleksi dari belum adanya arsitektur tata kelola yang mendukung transisi keberlanjutan secara struktural. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, isu strategis yang dihadapi adalah:

Keterbatasan integrasi kebijakan dan kelembagaan dalam mendukung ekonomi sirkular dan konsumsi-produksi berkelanjutan.

Situasi ini menandakan perlunya reposisi pendekatan pembangunan daerah agar tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengarusutamakan keberlanjutan dalam seluruh lini kebijakan. Tanpa integrasi lintas sektor yang solid, tata kelola yang progresif, dan dukungan kelembagaan yang adaptif, prinsip konsumsi-produksi berkelanjutan akan tetap menjadi narasi simbolik yang tidak terwujud dalam praktik pembangunan. Perubahan mendasar dalam cara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat memandang dan mengelola sumber daya menjadi prasyarat untuk menciptakan sistem ekonomi lokal yang adil, efisien, dan tahan terhadap krisis jangka panjang.

5. Isu Strategis TPB 13 – Penanganan Perubahan Iklim

TPB 13 menyerukan aksi nyata dalam penanganan perubahan iklim melalui penguatan kapasitas adaptasi, pengurangan emisi, peningkatan literasi publik, dan pembentukan kebijakan yang mendukung ketangguhan wilayah terhadap risiko iklim. Di Kota Ternate, upaya menjawab agenda ini telah dimulai dengan beberapa inisiatif awal, seperti penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Namun, hasil evaluasi terhadap indikator-indikator TPB 13 menunjukkan bahwa tantangan utama justru terletak pada aspek kelembagaan dan kemampuan operasional daerah dalam mengonsolidasikan berbagai agenda iklim ke dalam sistem pembangunan secara utuh dan berkelanjutan.

Pada aspek adaptasi, capaian Kota Ternate terhadap indikator 13.1.1(a)—jumlah korban terdampak bencana hidrometeorologi—menunjukkan status "tercapai", namun indikator lainnya seperti 13.1.2 (kesesuaian PRB daerah dengan Kerangka Sendai) dan 13.1.3 (implementasi PRB daerah) masih berada pada status "Belum Berjalan". Hal ini mengindikasikan bahwa penguatan kapasitas adaptasi belum sepenuhnya diinternalisasi ke dalam dokumen perencanaan maupun mekanisme tanggap darurat di tingkat daerah.

Dari sisi mitigasi, meskipun dokumen RAD-GRK telah tersedia, indikator 13.2.2 dan sub-indikatornya mengungkap belum tersedianya sistem perhitungan emisi GRK tahunan maupun proyeksi penurunan intensitas emisi. Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem *monitoring*, pelaporan, dan verifikasi (MRV) belum dikembangkan secara fungsional. Akibatnya, kontribusi Kota Ternate dalam pengendalian emisi belum dapat dinilai secara kuantitatif, apalagi dibandingkan terhadap target nasional.

Di sisi lain, indikator 13.3.1 yang berfokus pada literasi dan pendidikan perubahan iklim belum memiliki data sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada pendekatan sistematik untuk meningkatkan kesadaran publik atau mengarusutamakan pendidikan iklim dalam kurikulum maupun kegiatan komunitas. Ketidakhadiran data ini memperlemah basis sosial untuk mendorong partisipasi publik dalam aksi iklim yang bersifat *bottom-up*. Permasalahan semakin kompleks dengan tidak tersedianya data pada indikator 13.a.1 mengenai mobilisasi dan pencatatan anggaran perubahan iklim. Ketiadaan sistem *budget tagging* untuk aksi adaptasi dan mitigasi menandakan bahwa penganggaran belum terstruktur untuk menjawab kebutuhan program iklim secara eksplisit.

Berdasarkan keseluruhan indikator dan kondisi aktual, permasalahan yang dihadapi bukan terletak pada absennya inisiatif, tetapi pada lemahnya sistem yang memungkinkan inisiatif tersebut tumbuh menjadi aksi nyata yang terukur. Dengan demikian, rumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan yang diangkat dalam TPB 13 adalah:

Keterbatasan kapasitas kelembagaan dan operasional daerah dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan.

Penanganan tantangan ini menuntut langkah struktural dan berkelanjutan dari pemerintah daerah. Dibutuhkan pembentukan sistem koordinasi antarsektor yang kuat, pengembangan kapasitas teknis aparatur, pembenahan regulasi pendukung, serta penguatan data dan mekanisme pelaporan yang dapat diandalkan. Dalam kerangka yang lebih luas, kemampuan untuk berkontribusi pada agenda iklim nasional maupun global tidak cukup bertumpu pada keberadaan dokumen, tetapi pada ketangguhan institusi dan kesanggupan untuk mengimplementasikan aksi secara konsisten dan terukur dalam jangka panjang.

E. Isu Strategis Kota Ternate

Berdasarkan hasil telaahan identifikasi terhadap permasalahan pembangunan daerah Kota Ternate sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penetapan isu-isu strategis Kota Ternate Tahun 2025-2029 dirumuskan dengan mengunakan kriteria-kriteria sebagai berikut: memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan; merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; memiliki daya ungkit yang siginifikan terhadap pembangunan daerah; dan kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal penting dalam meraih visi Indonesia Emas 2045. Pada tahun 2023 Kota Ternate memiliki kuantitas penduduk usia produktif yang mendominasi struktur penduduk Kota Ternate. Kuantitas penduduk usia produktif harus didukung juga dengan kualitas sumber daya manusia yang baik dan dimulai dari sedini mungkin. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia didukung oleh berbagai macam aspek yang saling berkaitan, yaitu kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat dan pendidikan. Saat ini sumber daya manusia masih menjadi isu yang perlu pengoptimalan dari banyak aspek pendukungnya. Kota Ternate masih menghadapi isu-isu kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh partisipasi dan fasilitas pendidikan yang belum merata, derajat kesehatan yang masih rendah, pembangunan dan pemberdayaan gender yang belum optimal, pemberdayaan sosial yang kurang, dan belum efektifnya pelestarian nilai budaya dan agama. Sehingga aspek sumber daya manusia tidak hanya dilihat dalam capaian kualitas dan kuantitas namun pemerataannya juga. Isu strategis tersebut dilandasi oleh akar masalah, meliputi:

a. Belum optimalnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah dan pendidikan nonformal.
b. Belum optimalnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan serta peningkatan gerakan hidup sehat, serta belum optimalnya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular serta penerapan *zero new stunting*.
c. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan ketahanan keluarga.
d. Masih tingginya angka kemiskinan dan belum optimalnya efektivitas pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
e. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai kebudayaan daerah dan keagamaan.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan dan pemerataan ekonomi menjadi aspek penting dalam kemajuan daerah. Kebijakan-kebijakan strategis pembangunan daerah bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan dengan konsistensi pertumbuhan ekonomi dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Dalam pencapaian tujuan besar tersebut berbagai tantangan pembangunan dihadapi oleh Kota Ternate yaitu pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan yang cenderung stagnan, kesenjangan pembangunan ekonomi, dan kompetensi angkatan kerja yang masih rendah. Isu strategis tersebut dilandasi oleh akar masalah, meliputi:

a. Masih rendahnya nilai tambah komoditas sektor pertanian, kelautan, dan perikanan.
b. Belum optimalnya *City Branding* Ternate Kota Rempah.
c. Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan potensi kepariwisataan.
d. Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan UMKM.
e. Masih rendahnya pengembangan dan pembangunan kawasan industri kecil dan menengah.
f. Belum optimalnya percepatan penggunaan teknologi informasi pada setiap sektor ekonomi.
g. Masih rendahnya kompetensi angkatan kerja yang memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja.
h. Masih rendahnya pengelolaan sektor keuangan dan nilai investasi daerah.

3. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan

Penyediaan infrastruktur wilayah menjadi salah satu isu strategis Kota Ternate. Koordinasi dan keterpaduan penyediaan infrastruktur untuk kebutuhan dasar dan transportasi untuk konektivitas wilayah perlu dicapai dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Isu penyediaan infrastruktur wilayah yang merata dan berkelanjutan di Kota Ternate ditunjukkan oleh belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar, belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana lingkungan perkotaan, dan belum optimalnya pemenuhan dan integrasi layanan transportasi. Isu strategis tersebut dilandasi oleh akar masalah, meliputi:

a. Belum optimalnya peningkatan pembangunan infrastruktur dan transportasi untuk aksesibilitas dan konektivitas wilayah.
b. Belum optimalnya peningkatan prasarana sarana dan utilitas infrastruktur dasar serta hunian layak huni.

4. Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana

Pengendalian lingkungan hidup merupakan hal mendasar dalam perwujudan pembangunan berkelanjutan. Target pembangunan berkelanjutan perlu diinternalisasikan dalam arahan pembangunan di tingkat regional. Penurunan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengendalian lingkungan hidup menjadi salah satu isu penting dalam perencanaan pembangunan Kota Ternate jangka panjang. Manajemen kebencanaan, pengelolaan sumber daya alam, serta kualitas dan daya dukung lingkungan hidup, pelayanan persampahan dan penataan ruang menjadi isu pembangunan Kota Ternate. Isu strategis tersebut dilandasi oleh akar masalah, meliputi:

a. Masih rendahnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.
b. Belum optimalnya peningkatan dan pemerataan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi layak).
c. Belum optimalnya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
d. Masih rendahnya ketahanan pangan daerah.
e. Masih rendahnya mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim.
f. Belum optimalnya penataan ruang yang mendukung pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan penanggulangan kawasan rawan bencana serta perubahan iklim.

5. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan merupakan aspek yang krusial dalam pembangunan daerah karena berkaitan dengan aspek kontrol dan pengawasan terhadap banyak bidang dalam mencapai tujuan pembangunan. Indeks Reformasi Birokrasi dapat memperlihatkan kinerja pemerintah dalam mengupayakan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi. Isu strategis tersebut dilandasi oleh akar masalah, meliputi:

a. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang berbasis digital.
b. Belum optimalnya peningkatan dan pemerataan kualitas pelayanan publik.
c. Belum optimalnya penegakan regulasi daerah.
d. Belum optimalnya penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
e. Masih rendahnya profesionalisme ASN.
f. Masih rendahnya efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur.
g. Masih tingginya angka kriminalitas daerah.
h. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peradaban nilai demokrasi.

2.6.3 Potensi Daerah

Kota Ternate, sebagai salah satu kota strategis di kawasan timur Indonesia, memiliki potensi daerah yang sangat beragam dan khas. Letaknya yang berada di jalur perdagangan Maluku Utara serta kekayaan sejarah dan alam yang luar biasa menjadikan Ternate memiliki posisi yang sangat penting dalam peta pembangunan regional maupun nasional.

Salah satu potensi terbesar Ternate terletak pada sektor pariwisata. Kota ini dikenal sebagai “Kota Rempah” yang sarat akan nilai sejarah, mulai dari benteng-benteng peninggalan Portugis dan Belanda, Keraton Kesultanan Ternate, hingga situs-situs budaya yang masih hidup hingga kini. Kawasan strategis seperti Benteng Oranje, kawasan pusat kota, hingga wilayah pesisir Sulamadaha menjadi titik tumpu pengembangan pariwisata. Dengan penataan kawasan yang terintegrasi dan promosi yang konsisten, kawasan ini dapat menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal melalui pariwisata budaya dan bahari.

Selain itu, Ternate memiliki potensi kelautan yang sangat besar. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, seperti Pulau Hiri dan Pulau Moti, menjadi kawasan strategis dalam mendukung pengembangan sektor perikanan tangkap dan budidaya. Kawasan ini, jika didukung dengan infrastruktur pelabuhan perikanan yang memadai serta pengolahan hasil laut berbasis industri rumah tangga, dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat pesisir.

Di sektor perdagangan dan jasa, Ternate berperan sebagai pusat distribusi barang dan jasa di wilayah Maluku Utara. Kawasan strategis di sekitar Pelabuhan Ahmad Yani dan Bandara Sultan Babullah memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai zona ekonomi terpadu. Dengan memanfaatkan posisi strategis ini, Ternate dapat memperkuat fungsinya sebagai *hub* logistik dan perdagangan yang melayani daerah-daerah *hinterland* seperti Tidore, Halmahera, dan wilayah kepulauan lainnya.

Kawasan Strategis Kota adalah bagian dari wilayah perkotaan yang memiliki peran penting dan berdampak signifikan terhadap kepentingan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan. Penetapan suatu kawasan sebagai kawasan strategis bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi dan potensi wilayah tersebut sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pembangunan kota secara menyeluruh.

Dengan demikian, potensi daerah Ternate yang begitu kaya harus dikelola melalui pendekatan kawasan strategis yang terencana, inklusif, dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, komunitas, dan dunia pendidikan menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap potensi dapat dioptimalkan.

A. Kawasan Strategis Pengembangan Kota

Berdasarkan Materi Teknis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032, bahwa Kawasan Strategis Kota (KSK) merupakan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kota di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.

Delineasi kawasan strategis kota berbentuk poligon dan bersifat indikatif. Selain itu, kawasan strategis kota juga akan berpengaruh terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat kawasan ini mempunyai pengaruh yang sangat penting maka diperlukan penetapan secara tegas dan rencana serta penanganan perkembangannya harus dilihat secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai sektor, sinergis dengan kawasan yang ada di sekitarnya, dan harmonis tetap mempertimbangkan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan.

Nilai strategis kawasan strategis kota dirumuskan berdasarkan kriteria:

1. Mendukung tujuan penataan ruang wilayah kota;
2. Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
3. Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
4. Kesepakatan masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang akan ditetapkan di wilayah kota;
5. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kota;
6. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kota yang memiliki kekhususan;
7. Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional yang ada di wilayah kota;
8. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, namun harus memiliki kepentingan/ kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, dan pemerintah kab/kota yang jelas;
9. Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah kota untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat;
10. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kota; dan
11. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Materi Teknis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032 penetapan kawasan strategis meliputi:

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang berada di wilayah kota, meliputi:

KSP yang berada di wilayah Kota Ternate terdiri dari KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa kawasan bersejarah peninggalan Kerajaan Ternate, dengan arah pengembangan sebagai berikut:

1. Mengamankan, melestarikan, mengembangkan dan memperluas kawasan yang memiliki potensi situs-situs nilai bersejarah;
2. Mengembangkan ekonomi lokal sebagai kegiatan pendukung pariwisata yang merupakan basis perekonomian di kawasan bersejarah;
3. Mengembangkan kelembagaan lokal yang melibatkan seluruh *stakeholder* secara adil dalam pengelolaan kawasan bersejarah; dan
4. Mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan kawasan bersejarah.

Kawasan Strategis Kota (KSK) yang berada di Kota Ternate meliputi:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria:
    a. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
    b. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kota;
    c. Memiliki potensi ekspor;
    d. Memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
    e. Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
    f. Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
    g. Ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
    h. Memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
    i. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
    j. Memiliki fungsi untuk mempertahankan pangan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
    k. Memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya dengan kriteria sebagai berikut:
    a. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan;
    b. Memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya;
    c. Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
    d. Merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
    e. Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;
    f. Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;
    g. Hasil karya cipta budaya masyarakat kota yang dapat menunjukkan jati diri maupun penanda (*focal point, landmark*) budaya kota;
    h. Tempat yang memiliki sejarah dan keterkaitan sosial budaya lokal kota; dan/atau
    i. Kriteria lainnya yang dikembangkan sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kota.
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan kriteria:
    a. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
    b. Merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
    c. Memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
    d. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
    e. Menuntut prioritas tinggi untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup;
    f. Memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau

g. Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Kawasan Strategis Kota (KSK) merupakan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kota di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Delineasi kawasan strategis kota berbentuk poligon dan bersifat indikatif.

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
   a. Bandara Sultan Babullah, dengan arah pengembangan sebagai berikut:
      - Pengembangan dan revitalisasi kawasan Bandara Sultan Babullah; dan
      - Pengendalian pemanfaatan ruang pada KKOP Bandara Sultan Babullah.
   b. Kawasan Strategis Kota Baru, dengan arah pengembangan sebagai berikut:
      - Pengembangan dan revitalisasi Kawasan Strategis Kota Baru;
      - Pengembangan pusat perbelanjaan dan niaga pelayanan kota atau beberapa kecamatan; pembangunan sarana pelayanan umum skala kota atau beberapa kecamatan untuk meningkatkan fungsi pelayanan Kawasan; dan
      - Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang.
   c. *Water Front City*, dengan arah pengembangan sebagai berikut:
      - Pengembangan dan revitalisasi kawasan *Water Front City*;
      - Penanganan dan penataan kawasan sempadan; dan
      - Penanganan dan penataan kawasan permukiman kumuh.
   d. Minapolitan, dengan arah pengembangan sebagai berikut:
      - Pengembangan dan revitalisasi kawasan Minapolitan;
      - Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang;
      - Penanganan dan penataan kawasan permukiman kumuh;
      - Pengembangan komoditas unggulan;
      - Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk unggulan.
   e. Pelabuhan Ahmad Yani, dengan arah pengembangan sebagai berikut:
      - pengembangan dan revitalisasi kawasan Pelabuhan Ahmad Yani;
      - pengendalian pemanfaatan ruang pada alur pelayaran Pelabuhan Ahmad Yani; dan
      - pengembangan infrastruktur pendukung kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang.
   f. Pelabuhan Bastiong, dengan arah pengembangan sebagai berikut:
      - Pengembangan dan revitalisasi kawasan Pelabuhan Bastiong;
      - Pengendalian pemanfaatan ruang pada alur pelayaran Pelabuhan Bastiong; dan
      - Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang.
   g. Wisata Sulamadaha, dengan arah pengembangan sebagai berikut:
      - Pengembangan dan revitalisasi kawasan Wisata Sulamadaha;
      - Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang; dan
      - Pengelolaan potensi pariwisata bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan kelestarian lingkungan.
   h. Wisata Batu Lobang Gurabala, dengan arah pengembangan sebagai berikut:
      - Pengembangan dan revitalisasi kawasan Wisata Batu Lobang Gurabala;
      - Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang; dan

- Pengelolaan potensi pariwisata bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan kelestarian lingkungan.

i. Sentra Pertanian dan Perikanan, dengan arah pengembangan sebagai berikut:

- Pengembangan dan revitalisasi Sentra Pertanian dan Perikanan; pengembangan infrastruktur pendukung kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang;
- Pengembangan komoditas unggulan pertanian dan perikanan; dan
- Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk olahan pertanian dan perikanan.

j. Pelabuhan Fery Bastiong, dengan arah pengembangan sebagai berikut:

- Pengembangan dan revitalisasi kawasan Pelabuhan Fery Bastiong;
- Pengendalian pemanfaatan ruang pada alur pelayaran Pelabuhan Fery Bastiong; dan
- Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang.

k. Wisata Pantai Mayau, dengan arah pengembangan sebagai berikut:

- Pengembangan dan revitalisasi kawasan Wisata Pantai Mayau;
- Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang; dan
- Pengelolaan potensi pariwisata bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan kelestarian lingkungan.

l. Ekowisata Taman *Love*, dengan arah pengembangan sebagai berikut:

- Pengembangan dan revitalisasi kawasan Ekowisata Taman Love;
- Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang; dan
- Pengelolaan potensi pariwisata bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan kelestarian lingkungan.

m. Ekowisata Tafraka, dengan arah pengembangan sebagai berikut:

- Pengembangan dan revitalisasi kawasan Ekowisata Tafraka;
- Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang; dan
- Pengelolaan potensi pariwisata bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan kelestarian lingkungan.

n. Ekowisata Dorari Isa, dengan arah pengembangan sebagai berikut:

- Pengembangan dan revitalisasi kawasan Ekowisata Dorari Isa;
- Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang; dan
- Pengelolaan potensi pariwisata bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan kelestarian lingkungan.

2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, terdiri atas:

a. Benteng Kota Janji (Santo Pedro), dengan arah pengembangan sebagai berikut:

- Pengembangan dan revitalisasi Benteng Kota Janji (Santo Pedro); dan
- Pengendalian pemanfaatan ruang pada Benteng Kota Janji (Santo Pedro) dan sekitarnya.

b. Benteng Orange, dengan arah pengembangan sebagai berikut:

- Pengembangan dan revitalisasi Benteng Orange; dan
- Pengendalian pemanfaatan ruang pada Benteng Orange dan sekitarnya.

c. Kawasan Strategis Pendidikan, dengan arah pengembangan sebagai berikut:

- Pengembangan dan revitalisasi Kawasan Strategis Pendidikan; dan
- Pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Strategis Pendidikan dan sekitarnya.

d. Benteng Kalamata, dengan arah pengembangan sebagai berikut:
   - Pengembangan dan revitalisasi Benteng Kalamata; dan
   - Pengendalian pemanfaatan ruang pada Benteng Kalamata dan sekitarnya.

e. Benteng Santo Paolo Kastela, dengan arah pengembangan sebagai berikut:
   - Pengembangan dan revitalisasi Benteng Santo Paolo Kastela; dan
   - Pengendalian pemanfaatan ruang pada Benteng Santo Paolo Kastela dan sekitarnya.

f. Benteng Tolukko, dengan arah pengembangan sebagai berikut:
   - Pengembangan dan revitalisasi Benteng Tolukko; dan
   - Pengendalian pemanfaatan ruang pada Benteng Tolukko dan sekitarnya.

g. Jembatan Residen, dengan arah pengembangan sebagai berikut:
   - Pengembangan dan revitalisasi Jembatan Residen; dan
   - Pengendalian pemanfaatan ruang pada Jembatan Residen dan sekitarnya.

h. Jembatan Dodoku Ali, dengan arah pengembangan sebagai berikut:
   - Pengembangan dan revitalisasi Jembatan Dodoku Ali; dan
   - Pengendalian pemanfaatan ruang pada Jembatan Dodoku Ali dan sekitarnya.

i. Kawasan Cengkeh Afo, dengan arah pengembangan sebagai berikut:
   - Pengembangan dan revitalisasi Kawasan Cengkeh Afo; dan
   - Pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Cengkeh Afo dan sekitarnya.

j. Kawasan Bersejarah Foramadiahi, dengan arah pengembangan sebagai berikut:
   - Pengembangan dan revitalisasi Kawasan Bersejarah Foramadiahi; dan
   - Pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Bersejarah Foramadiahi dan sekitarnya.

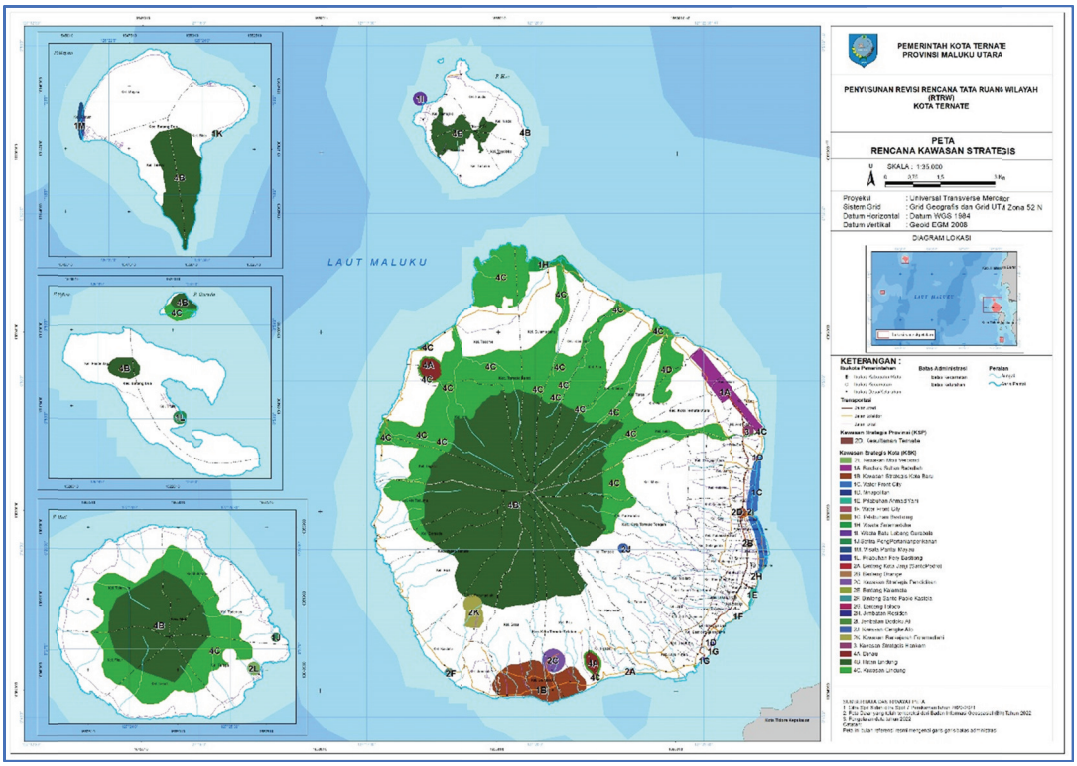
k. Kawasan Moti Verbond, dengan arah pengembangan sebagai berikut:
   - Pengembangan dan revitalisasi Kawasan Moti Verbond; dan
   - Pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Moti Verbond dan sekitarnya.

3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas:

   a. Danau Tolire di Kecamatan Ternate Barat dan Danau Ngade di Kecamatan Ternate Selatan dan, dengan arah pengembangan sebagai berikut:
      - Perwujudan kawasan lindung untuk mendukung fungsi konservasi danau;
      - Menerapkan kaidah konservasi lahan dan kegiatan budidaya ramah lingkungan, khususnya pada sempadan danau; dan
      - Pengendalian dan pembatasan pembangunan guna mempertahankan fungsi hidroorologis.

   b. Hutan Lindung di Kecamatan Batang Dua, Kecamatan Pulau Hiri, Kecamatan Moti, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Pulau Ternate, dan Kecamatan Ternate Barat, dengan arah pengembangan sebagai berikut:
      - Pemeliharaan hutan lindung guna menjaga keanekaragaman hayati serta mencegah dan/atau mengurangi resiko bencana; dan
      - Pengendalian pemanfaatan ruang sekitar hutan lindung.

   c. Kawasan Lindung Mangrove di Kecamatan Batang Dua, Kecamatan Moti, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Pulau Ternate, dan Kecamatan Ternate Barat, dengan arah pengembangan sebagai berikut:
      - Perwujudan kawasan lindung untuk mendukung fungsi konservasi air, tanah, keanekaragaman hayati serta mencegah dan/atau mengurangi risiko bencana;
      - Menerapkan kaidah konservasi lahan dan kegiatan budidaya ramah lingkungan, khususnya pada daerah budidaya pertanian, perkebunan dan kehutanan; dan
      - Pengendalian dan pembatasan pembangunan guna mempertahankan fungsi hidroorologis pada lahan dengan kondisi normal dan baik.



Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Ternate Tahun 2012-2032, 2024

Gambar 2.18 Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Ternate

B. Kawasan Strategis Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*)

Pulau Ternate merupakan bagian dari mandala vulkanik kuarter, terdiri dari pulau-pulau kecil sebelah barat Halmahera dan deretan vulkanik kuarter yang sebagiannya masih aktif. Halmahera bagian barat adalah bagian sabuk vulkanik muda yang disusun dari batuan gunung api dan batuan sedimen Tersier hingga Kuarter, yang merupakan perpanjangan dari Morotai melalui Halmahera Barat, Ternate, dan Tidore sampai menuju Bacan. Halmahera bagian timur merupakan perpanjangan ke arah timur melalui Pulau Gebe dan terhadap bagian utara kepala burung Papua. Bagian ini terdiri dari lengan Halmahera bagian timur laut dan tenggara yang merupakan busur luar yang tersusun dari batuan ultramafik, sedimen Tersier dan sedimen Kuarter di bagian pesisir (Appandi,1980). Ternate tersusun atas material vulkanik Gunung Gamalama berupa andesit, basalt, piroklastik serta endapan laharik, yang merupakan bagian dari mandala vulkanik kuarter terdiri dari pulau-pulau kecil sebelah barat Halmahera dan deretan vulkanik Kuarter yang sebagiannya masih aktif.

Vulkanisme di Ternate dimulai pada kuarter sebagai bagian dari *island arc* Halmahera, yang terbagi dalam 3 (tiga) fasies yaitu fasies Gamalama tua, fasies Gamalama dewasa, dan fasies Gamalama muda (Bronto,1982).

1. Gamalama Tua, pada bagian selatan dari bentang alam Gunung Gamalama atau tepat pada wilayah administrasi Kecamatan Ternate Pulau. Tersusun atas lava tua tak teruraikan, Ignimbrit, Endapan laharik, lava teraltrasi, endapan piroklastik, sumbat intrusi andesit.
2. Gamalama Dewasa, tersingkap di wilayah administrasi Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Selatan dan Kecamatan Ternate Barat. Tersusun atas lava aliran blok jenis andesit, lava tak teruraikan, endapan lahar, endapan jatuhan piroklastik, endapan letusan litoral, endapan aliran piroklastik.
3. Gamalama Muda, tersingkap di wilayah administrasi Kecamatan Ternate Tengah dan Kecamatan Ternate Selatan. Tersusun atas lava tak teruraikan, lava tak teruraikan, endapan blok andesit, lava andesit basalt, endapan lahar muda-bongkahan andesit, breksi percikan-letusan gunung api, endapan freatik tolire, endapan aliran piroklastik, endapan aliran piroklastik muda, endapan aliran piroklastik tua, lava 1-blok andesit, lava 4-blok andesit, lava 5-blok andesit, endapan freatik laguna, lava blok 1763.

4. Endapan Permukaan, tersusun atas alluvium dan piroklastik rombakan.
5. Endapan Sedimen Laut, berupa terumbu karang tersingkap di Pantai Tobololo–pantai Tabanga–Pantai Masirete, dengan pola kelurusan garis pantai.

Tektonik Halmahera juga ikut mempengaruhi aktivitas dan karakter Gunung Gamalama, yang berdampak pada tersingkapnya site-site potensial sebagai hasil produk Gamalama. Gunung api Gamalama menempati pulau seluas 40 km dengan jari-jari 5,8 km. Akibat erupsi puncak gunung terdiri dari beberapa kawah. Kawah lama Madiena yang memiliki ketinggian 1.669 m, kerucut Arafat dengan ketinggian 100 m yang merupakan pusat letusan sekarang (Neuman Van Padang, 1951).

Pulau Halmahera dan pulau-pulau kecil di sekitarnya merupakan daerah tektonik yang sangat kompleks. Interaksi ini melibatkan pertemuan Sub Lempeng Filipina di utara, Lempeng Pasifik di timur, Lempeng Eurasia di barat, dan Lempeng Indo-Australia di selatan. Batas selatan dari interaksi ini adalah Sesar Sorong dan batas utara merupakan sesar yang menerus ke Mindanao dan Filipina. Diperkirakan merupakan daerah *forearc* dari Busur Sangihe yang menutupi *Forearc* Busur Halmahera. Lempeng Laut Molucca seluruhnya tersubduksi (Hall, 1999).

Konsep pengembangan wilayah tidak bisa lepas dari penataan ruang/Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah disusun, terutama yang terkait dengan pola ruang. Rencana Pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Bentukan kawasan lindung merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan bentukan kawasan yang memiliki fungsi budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Metode-metode yang digunakan atau dikembangkan untuk maksud tersebut mengacu pada dua asas utama penataan ruang, yaitu: asas kesesuaian dan asas kelestarian lingkungan. Berdasarkan kedua asas tersebut, maka pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan tertentu seyogyanya dipertimbangkan dari sudut kesesuaiannya baik dari segi agro-ekologis (fisik), ekonomi, maupun sosial.

Pemanfaatan Ruang Kota Ternate berdasarkan fungsi utamanya secara makro terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penetapan kawasan lindung di Kota Ternate pada dasarnya dijadikan titik tolak di dalam pengembangan tata ruang wilayah yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam pengertian ini delineasi kawasan lindung diintegrasikan dengan tata ruang wilayah secara keseluruhan. Setelah kawasan lindung ditetapkan sebagai limitasi dan atau kendala di dalam pengembangan wilayah, barulah kemudian dapat direkomendasikan arahan kawasan budidaya untuk mengakomodasikan kebutuhan ruang baik bagi kegiatan budidaya pertanian maupun budidaya non pertanian.

Dalam upaya untuk mengembangkan pengelolaan dan pelestarian potensi warisan bumi dan pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Ternate Geopark, Pemerintah Kota Ternate telah menetapkan Badan Pengelola *Geopark* Ternate melalui Peraturan Walikota Ternate Nomor 18.A Tahun 2022 dan Surat Keputusan Walikota Nomor 159/VII.2/KT/2022.

Dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam SK Penetapan Badan Pengelola sebagai berikut:

1. Melakukan penataan dan pemeliharaan lingkungan *Geopark* sesuai sebaran situs geologi (*geosite*) dengan melibatkan para ahli, antara lain di bidang geologi, biologi, lingkungan hidup, sosial, budaya dan pariwisata;
2. Melakukan kegiatan pemanfaatan situs geologi (*geosite*), warisan geologi (*geoheritage*), keragaman geologi (*geodiversity*), keanekaragaman hayati (*biodiversity*) dan keragaman budaya (*cultural diversity*) secara berkelanjutan;
3. Melakukan pembangunan sistem pengawasan dan pengamanan situs geologi (*geosite*), warisan geologi (*geoheritage*), keragaman geologi (*geodiversity*), keanekaragaman hayati (*biodiversity*) dan keragaman budaya (*cultural diversity*);
4. Melaksanakan program konservasi warisan geologi (*geoheritage*), keragaman geologi (*geodiversity*), keanekaragaman hayati (*biodiversity*) dan keragaman budaya (*cultural diversity*);
5. Melakukan kegiatan pengembangan pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan;

6. Membangun perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kreatif;
7. Melakukan kegiatan pelestarian budaya;
8. Mengembangkan destinasi pariwisata;
9. Membangun kebutuhan amenitas dan infrastruktur pendukung pariwisata;
10. Menyediakan informasi keberadaan *geopark* (*visibility geopark*) seperti pusat informasi, sistem informasi terpadu dan museum *geopark*;
11. Mengembangkan kelembagaan *geopark* meliputi pengembangan sumber daya manusia, struktural pengelola dan manajemen pengelolaan;
12. Mempromosikan nilai ilmiah geopark untuk kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan;
13. Mengembangkan kerja sama dan peran aktif pengelola *geopark* dalam jaringan kemitraan *geopark* nasional, regional dan internasional; dan
14. Menyusun laporan secara berkala.

Penetapan Warisan Geologi atau *Geoheritage* merupakan langkah strategis pemerintah untuk melindungi dan memanfaatkan kekayaan geologi Indonesia secara berkelanjutan. *Geoheritage* diakui sebagai bagian penting dari identitas suatu daerah karena mencerminkan proses geologi yang khas, bernilai ilmiah tinggi, dan berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai objek edukasi, penelitian, hingga pariwisata berwawasan lingkungan.

Kota Ternate, yang dikenal sebagai salah satu kota kepulauan di Maluku Utara, memiliki karakter geologi yang sangat unik dan kaya. Hal ini ditandai dengan keberadaan gunung api aktif, formasi batuan vulkanik, serta bentang alam yang terbentuk dari aktivitas geologi selama ribuan tahun. Menyadari potensi tersebut, dan pada tanggal tanggal 19 Februari 2025 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 69.K/GL.01/MEM.G/2025 tentang Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*) Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, telah secara resmi menetapkan 19 site di Kota Ternate sebagai Warisan Geologi (*Geoheritage*).

Keputusan ini bukan hanya sekadar pengakuan formal, tetapi juga sebagai dasar hukum yang mengatur perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan *geoheritage* secara berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah agar situs-situs geologi yang memiliki nilai penting tersebut tetap lestari, tidak rusak oleh aktivitas manusia yang tidak terkontrol, dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta pengembangan pariwisata.

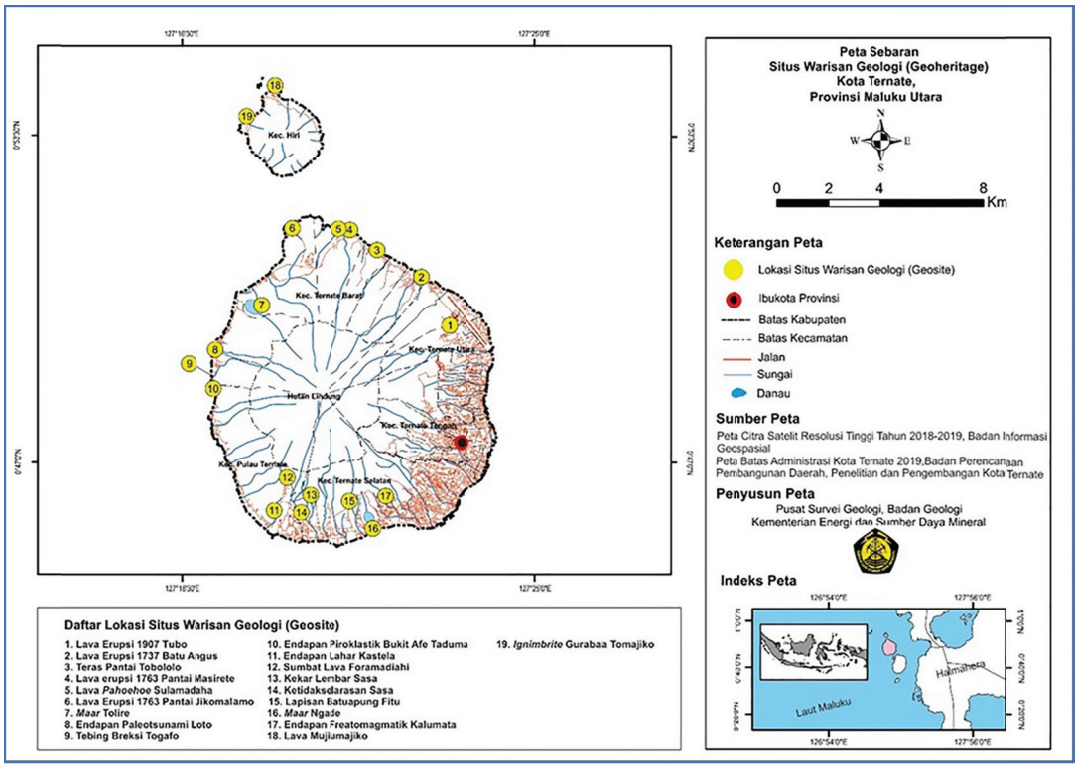
Beberapa situs yang telah ditetapkan sebagai *geoheritage* di Kota Ternate antara lain:

1. Lava Erupsi 1907 Tubo - Kelurahan Tubo, Kecamatan Ternate Utara;
2. Lava Erupsi 1737 Batu Angus - Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat;
3. Teras Pantai Tobololo - Kelurahan Tobololo, Kecamatan Ternate Barat;
4. Lava Erupsi 1763 Pantai Masirete - Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Ternate Barat;
5. Lava *Pahoehoe* Sulamadaha - Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Ternate Barat;
6. Lava Erupsi 1763 Pantai Jikomalamo - Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat;
7. *Maar* Tolire - Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat;
8. Endapan Paleotsunami Loto - Kelurahan Loto, Kecamatan Ternate Barat;
9. Tebing Breksi Togafo - Kelurahan Togafo, Kecamatan Ternate Barat;
10. Endapan Piroklastik Bukit Afe Taduma - Kelurahan Afe Taduma, Kecamatan Pulau Ternate;
11. Endapan Lahar Kastela - Kelurahan Kastela, Kecamatan Pulau Ternate;
12. Sumbat Lava Foramadiahi - Kelurahan Foramadiahi, Kecamatan Pulau Ternate;
13. Kekar Lembar Sasa - Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan;
14. Ketidakselarasan Sasa - Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan;
15. Lapisan Batuapung Fitu - Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan;
16. *Maar* Ngade – Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Selatan;
17. Endapan Freatomagatik Kalumata - Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan;
18. Lava Mujiumajiko - Kelurahan Faudu, Kecamatan Pulau Hiri;
19. Ignimbrite Gurabala Tomajiko – Kelurahan Tomajiko, Kecamatan Pulau Hiri.

Penetapan *geoheritage* ini membawa dampak positif bagi Kota Ternate. Di satu sisi, meningkatkan kesadaran masyarakat lokal akan pentingnya menjaga kelestarian alam; di sisi lain, membuka peluang ekonomi baru melalui pengembangan geowisata yang bertanggung jawab. Pemerintah daerah

bersama instansi terkait didorong untuk menyusun rencana pengelolaan yang terarah, termasuk penyediaan fasilitas pendukung, pembuatan jalur interpretasi geologi, serta pelatihan bagi pemandu wisata lokal.

Keputusan Menteri ini sekaligus menjadi bentuk komitmen nasional dalam mendukung *Global Geopark Network* yang diinisiasi UNESCO, di mana Indonesia secara aktif mempromosikan kawasan-kawasan geologi unggulan ke tingkat dunia. Dengan adanya payung hukum yang jelas melalui keputusan ini, diharapkan Kota Ternate mampu menjaga dan mengoptimalkan potensi *geoheritage*-nya, sehingga tidak hanya bermanfaat untuk generasi saat ini tetapi juga untuk masa depan.



Sumber: Kementerian Energi dan SDM Republik Indonesi, 2025

Gambar 2.19 Peta Sebaran Situs Warisan Geologi (*Geoheritage*) Kota Ternate

BAB 3
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 VISI DAN MISI

3.1.1 Visi

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2021-2024; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Walikota/Wakil Walikota Kota Ternate yang terpilih untuk masa bakti 2025-2030; berpedoman pada RPJPD Kota Ternate 2025-2045 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2024; memperhatikan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN; serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka Visi Pembangunan Kota Ternate Tahun 2025–2029 adalah:

"MEWUJUDKAN TERNATE YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN"
- TERNATE ANDALAN -

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan *stakeholder* yang ada di Kota Ternate. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Makna dari visi Pemerintah Kota Ternate dapat dijelaskan sebagai berikut:

MANDIRI, artinya:

Mandiri adalah sikap untuk tidak bergantung pada orang lain, memiliki sikap dan mental yang kuat dan memungkinkan untuk bertindak bebas, benar, dan bermanfaat, serta mampu mengatur diri sendiri sesuai hak dan kewajibannya. Orang yang mandiri identik dengan selalu berusaha, bekerja cerdas, dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Sikap mandiri tidak diperoleh secara instan tetapi melalui proses panjang yang dilatih sejak dini.

Masyarakat yang mandiri ialah warga yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada orang lain atau pihak lain, masyarakat yang mandiri juga bisa berperan aktif pada pembangunan serta kemajuan bangsa. Kemandirian masyarakat bisa dipandang dari taraf ketergantungan warga pada dunia luar. Warga yang mandiri adalah warga yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya menggunakan kemampuan mereka sendiri.

Mewujudkan masyarakat yang mandiri bukanlah hal yang singkat dan tentu saja tidak pula hal yang mudah. Terdapat banyak faktor yang dapat mengganggu tercapainya warga yang mandiri, antara lain (1) Kemiskinan. Masyarakat yang miskin akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagai akibatnya mereka akan sulit buat mandiri. (2) Kurang pendidikan serta keterampilan, adalah kapital dasar buat menjadi mandiri, masyarakat yang kurang pendidikan dan keterampilan akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan, (3) Kurang akses terhadap sumber daya, akses terhadap modal, dan teknologi.

Untuk mewujudkan masyarakat yang berdikari, dibutuhkan upaya-upaya yang terintegrasi dengan berbagai pihak. Pemerintah memiliki peran penting pada mewujudkan warga yang mandiri, antara lain

(1) Mempertinggi kualitas pendidikan dan pembinaan, (2) Meningkatkan akses terhadap sumber daya, (3) Membangun iklim usaha yang aman, dan (4) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Masyarakat.

BERKEADILAN, artinya:

Berkeadilan dimaknai sebagai suatu prinsip hidup yang menempatkan setiap individu, kelompok, dan golongan pada posisi yang layak sesuai dengan hak dan kewajibannya. Konsep ini tidak sekadar tentang memberikan hal yang sama kepada semua orang, melainkan memberikan apa yang menjadi hak seseorang secara proporsional berdasarkan kebutuhan, usaha, dan situasinya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berkeadilan berarti memastikan bahwa tidak ada pihak yang terpinggirkan atau tertindas karena latar belakang sosial, ekonomi, budaya, atau lainnya. Keadilan menuntut perlakuan yang adil dalam hukum, kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik, serta pembagian sumber daya yang merata agar kesejahteraan dapat dirasakan secara kolektif. Berkeadilan juga mengandung makna moral, kita diharapkan memiliki rasa empati, peduli terhadap yang lemah, dan berani membela mereka yang tidak mendapatkan haknya. Ini adalah fondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan beradab, di mana setiap orang merasa dihargai dan dilibatkan dalam pembangunan.

Masyarakat berkeadilan adalah tatanan sosial di mana setiap individu mendapatkan hak dan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi, serta diperlakukan secara adil sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, dan kontribusinya. Dalam masyarakat seperti ini, prinsip keadilan ditegakkan tidak hanya melalui hukum yang berlaku, tetapi juga melalui budaya, norma, dan praktik sehari-hari yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Masyarakat berkeadilan memberi ruang bagi semua orang untuk berkembang secara optimal. Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan hukum tersedia secara merata tanpa memandang status sosial, ekonomi, agama, atau suku. Tidak ada yang diistimewakan atau diabaikan, karena keberpihakan terhadap yang lemah menjadi bagian dari upaya menciptakan keseimbangan sosial.

Selain itu, masyarakat berkeadilan adalah masyarakat yang mendorong partisipasi aktif setiap warganya dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama. Transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi menjadi landasan agar hak-hak masyarakat tetap terjaga.

Dalam mencapai masyarakat berkeadilan, diperlukan komitmen yang kuat dari semua elemen, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat, untuk bersama-sama menciptakan sistem yang mendukung keadilan secara menyeluruh. Proses ini bukanlah hal yang instan, melainkan perjalanan panjang yang memerlukan konsistensi, ketegasan, dan kebijaksanaan dalam setiap langkah. Selain itu, membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya keadilan sosial adalah bagian dari upaya berkelanjutan. Pendidikan karakter dan kampanye nilai-nilai keadilan perlu ditanamkan sejak dini agar tercipta budaya yang menghargai hak dan kewajiban secara seimbang.

Dengan demikian, berkeadilan bukan hanya tentang aturan atau kebijakan yang tertulis, tetapi juga sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi kebenaran, menghormati hak-hak orang lain, dan menciptakan tatanan sosial yang seimbang.

3.1.2 Misi

Dalam rangka upaya menuju pencapaian Visi Pembangunan Daerah Kota Ternate tahun 2025-2029, ditetapkan Misi Pembangunan Daerah yaitu:

1. **Menumbuh-Kembangkan Kelembagaan Sosial dalam Bingkai 7 Nilai Dasar Kebudayaan Ternate (*Kie Se Gam Magogugu Matiti Tomdi*)**

   Kota Ternate sebagai kota yang heterogen, dari perbedaan agama, etnis dan budaya, akan melestarikan dan mempertahankan aset dan identitas kota, melalui menumbuh-kembangkan kelembagaan sosial dalam bingkai 7 Nilai Dasar Kebudayaan Ternate (*Kie se Gam Magogugu Matiti Tomdi*), yang terdiri

dari: 1) *Adat se Atorang*; 2) *Istiadat se Kabasarang*; 3) *Galib se Lakudi*; 4) *Cing se Cingare*; 5) *Bobaso se Rasai*; 6) *Ngale se Cara*; dan 7) *Sere se Duniru*.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan seni, dan pemajuan budaya melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan.

2. Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis

Membangun infrastruktur dalam menguatkan inter-konektivitas antar wilayah pertumbuhan ekonomi dan menjangkau lokasi pelosok dan terisolir. Kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan; peningkatan jangkauan listrik; pembangunan dan atau perbaikan jalan ke sentra-sentra produksi; dan peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih dan revitalisasi pasar.

3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing

Misi ini mengarah pada kualitas dan daya saing sumber daya manusia Ternate, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Ternate dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana ke depan modal sosial ini akan menempatkan Ternate sebagai salah satu daerah dengan sumber daya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Ternate yang semakin sejahtera.

Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Ternate yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Ternate tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Ternate, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Bersih, Transparan, dan Akuntabel yang Berorientasi pada Pelayanan Publik

Reformasi birokrasi yang diharapkan ke depan adalah pada 3 (tiga) dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun *open government* dan pemerintahan yang responsif. *Open government* dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon pemerintah dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan *responsive* diikat dalam satu *tagline* pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

5. Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat yang Tangguh dan Unggul Berbasis Kepulauan

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis kepulauan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan, Asri dan Lestari

Pemerintah Kota Ternate mendorong pembangunan yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang di dalamnya memuat harmonisasi antara aktivitas sosial, ekonomi dan budaya serta ekologi. Oleh karena itu misi ini akan mendorong pembangunan yang mampu menyelaraskan antara aspek perlindungan lingkungan hidup, dengan kepedulian terhadap ruang hidup, kearifan lokal dan identitas serta subyek budaya, sehingga proses pembangunan yang dilakukan dapat merekatkan kesatuan antar warga masyarakat dengan kesatuan ekologis yang menyatukan tidak saja warga Ternate

namun juga tanah, air, bumi serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan pusparagam kebudayaan yang menaungi kehidupan warga Ternate. Pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyerasikan aktivitas manusia dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai penopang, sehingga dapat terwujud keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan budaya dengan kondisi lingkungan hidup.

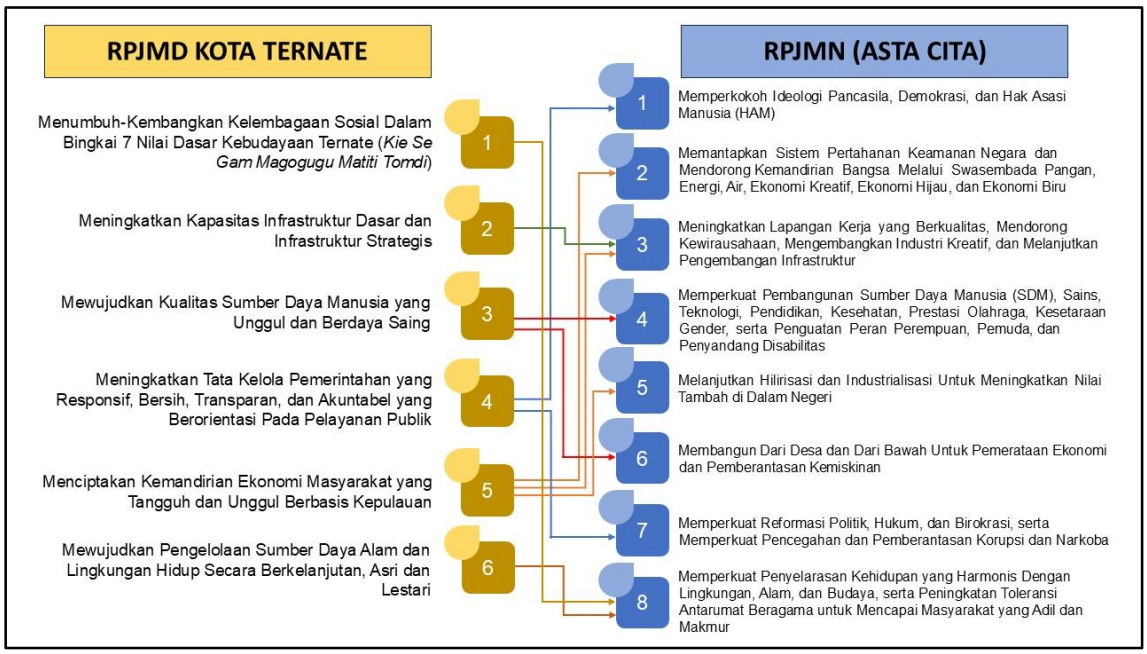
3.1.3 Keselarasan Misi RPJMN, Misi RPJMD Provinsi Maluku Utara dengan Misi RPJMD Kota Ternate 2025-2029

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate Tahun 2025–2029 merupakan bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, RPJMD Kota Ternate disusun dengan mengacu dan memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.

Keselarasan antara misi RPJMD Kota Ternate dengan misi RPJMN (Asta Cita) menjadi aspek krusial dalam menjamin keterpaduan arah pembangunan pusat dan daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan di Kota Ternate tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

RPJMN 2025–2029, sebagai turunan dari visi Indonesia Emas 2045, mengedepankan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan global. Dalam konteks lokal, misi pembangunan Kota Ternate 2025–2029 dirancang agar mampu menjawab tantangan dan potensi daerah, sembari berkontribusi langsung pada pencapaian agenda-agenda nasional.

Dengan demikian, keselarasan ini diwujudkan melalui penjabaran misi daerah yang memperhatikan aspek pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, penguatan daya saing ekonomi lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan keberlanjutan lingkungan, yang seluruhnya merupakan bagian dari prioritas nasional. Melalui harmonisasi antara arah pembangunan nasional dan daerah, diharapkan RPJMD Kota Ternate 2025–2029 tidak hanya mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Ternate, tetapi juga berkontribusi aktif dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.

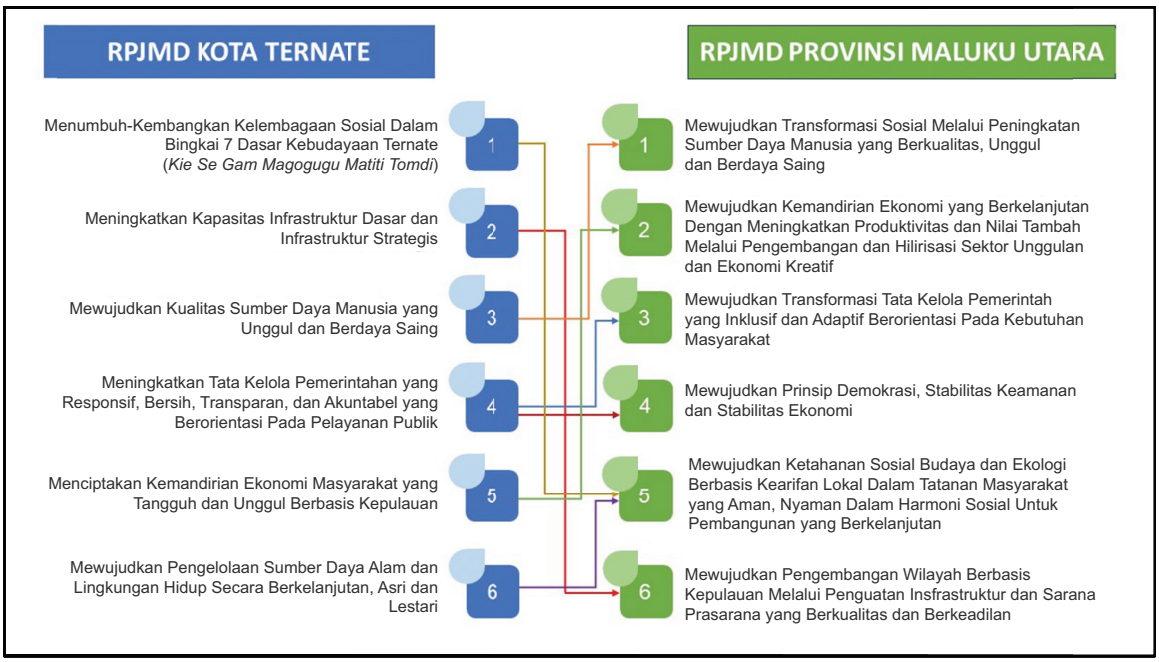


Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2025 (data diolah)

Gambar 3.1 Keselarasan Misi RPJMD dengan Misi RPJMN Tahun 2025-2029

Penyusunan Misi RPJMD Kota Ternate Tahun 2025-2029 dilakukan dengan memperhatikan arah pembangunan jangka menengah daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan di Kota Ternate memiliki keterpaduan, sinergi, serta kesinambungan dengan pembangunan Provinsi Maluku Utara.

Misi RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025–2029 secara umum menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan, tata kelola pemerintahan yang inklusif dan adaptif, ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan lokal serta pengembangan wilayah berbasis kepulauan melalui penguatan infrastruktur. Selaras dengan itu, Misi RPJMD Kota Ternate disusun dengan mempertajam aspek lokal, yaitu penguatan kemandirian ekonomi berbasis kepulauan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan kepulauan, serta penguatan budaya dan jati diri masyarakat Ternate. Misi RPJMD Kota Ternate tidak hanya merefleksikan kebutuhan dan potensi lokal, tetapi juga merupakan bagian integral dari pencapaian Misi RPJMD Provinsi Maluku Utara. Keselarasan ini diharapkan memperkuat posisi Kota Ternate sebagai pusat pertumbuhan perdagangan, dan kebudayaan di Maluku Utara.



Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2025 (data diolah)

Gambar 3.2 Keselarasan Misi RPJMD dengan Misi RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029

3.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Ternate yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kota Ternate Tahun 2025-2029.

1. **Menumbuh-Kembangkan Kelembagaan Sosial dalam Bingkai 7 Nilai Dasar Kebudayaan Ternate (*Kie Se Gam Magogugu Matiti Tomdi*)**

   Misi ini memiliki tujuan Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Berkebudayaan Maju dengan sasaran Terwujudnya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dengan indikator sasarannya Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).

2. **Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis**

   Misi ini memiliki tujuan Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Kewilayahan yang Terintegrasi, Strategis dan Memiliki Daya Ungkit Ekonomi dengan sasaran (1) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Publik dan (2) Meningkatnya Konektivitas Transportasi Publik. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Ketimpangan Infrastruktur dengan indikator sasarannya (1) Indeks Infrastruktur, dan (2) Indeks Konektivitas.

3. **Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing**

   Misi ini memiliki tujuan Mewujudkan Kualitas SDM, dengan sasaran (1) Meningkatnya Kualitas Pendidikan, (2) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, (3) Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, dan (4) Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Olah Raga. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia, dengan indikator sasarannya (1) Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 tahun (tahun), (2) Harapan Lama Sekolah, (3) Usia Harapan Hidup (UHH), (4) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita, (5) Indeks Ketimpangan Gender, (6) Kota Layak Anak, dan (7) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

4. **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Bersih, Transparan, dan Akuntabel yang Berorientasi pada Pelayanan Publik**

   Misi ini memiliki tujuan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Berbasis Digital, dengan sasaran (1) Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat dan (2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan indikator sasarannya (1) Indeks Pelayanan Publik, (2) Indeks Sistem Merit, (3) SAKIP, (4) SPBE, (5) Nilai MCP KPK, (6) Indeks Demokrasi Indonesia, (7) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah, (8) Indeks Reformasi Hukum, (9) Indeks Survey Penilaian Integritas, (10) Rasio PAD terhadap PDRB, dan (11) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. **Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat yang Tangguh dan Unggul Berbasis Kepulauan**

   Misi ini memiliki tujuan Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran (1) Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan, (2) Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata, (3) Meningkatnya Kualitas Tenaga yang Berkompetensi dan Berdaya Saing, (4) Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Usaha, (5) Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan, (6) Menurunnya Tingkat kemiskinan, dan (7) Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Pendapatan per Kapita, dan (3) Indeks Gini, dengan indikator sasarannya (1) Rasio PDRB Industri Pengolahan, (2) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Nilai Investasi, (5) Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB, (6) Tingkat Kemiskinan, dan (7) Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB.

6. **Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan, Asri dan Lestari**

   Misi ini memiliki tujuan Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Daerah, dengan sasaran (1) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan (2) Ketangguhan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator (1) Penurunan Intensitas Emisi GRK, dan (2) Indeks Kota Berkelanjutan, dengan indikator sasarannya (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan (2) Indeks Risiko Bencana (IRB).

Setiap misi kemudian dijabarkan ke dalam tujuan pembangunan, yang menggambarkan kondisi atau capaian spesifik yang ingin diraih selama periode RPJMD. Tujuan ini memberikan arah yang lebih fokus terhadap upaya pembangunan yang sesuai dengan permasalahan dan potensi yang ada di Kota Ternate. Selanjutnya, untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan, ditetapkan sasaran pembangunan yang lebih terukur dan realistis. Sasaran ini menyatakan hasil yang diharapkan dari berbagai program dan kegiatan pembangunan, serta menjadi tolok ukur kinerja pemerintah daerah dalam lima tahun mendatang.

Dengan demikian, pada tabel 3.1 digambarkan tentang keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD Kota Ternate 2025–2029 bersifat hierarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama, misi sebagai penjabaran strategis, tujuan sebagai target kondisi, dan sasaran sebagai indikator capaian. Sinergi dari keempat elemen ini menjamin bahwa pelaksanaan pembangunan daerah berjalan secara terstruktur, efisien, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dinamika pembangunan global, nasional, dan regional.

Sedangkan pada tabel 3.2 digambarkan tentang keselarasan Indikator Utama Pembangunan antara RPJMD Kota Ternate, RPJMD Provinsi Maluku Utara dan RPJMN. Penyelarasan ini menjadi bagian dari integrasi sistem perencanaan nasional dan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Karena keterkaitan dan keselarasan perencanaan ini juga menjadi dasar dalam penguatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Ternate dalam mewujudkan visi daerah secara nyata.

Tabel 3.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Ternate Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun					Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	VISI "MEWUJUDKAN TERNATE YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN"								
1	**Menumbuh-Kembangkan Kelembagaan Sosial dalam Bingkai 7 Nilai Dasar Kebudayaan Ternate (*Kie Se Gam Magogugu Matiti Tomdi*)**								
1.1	**Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Berkebudayaan Maju**	**Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)**	**75,03**	**75,85**	**76,87**	**76,93**	**76,97**	**77,00**	**77,12**
1.1.1	Terwujudnya Penguatan dan Pemajuan Kebudayan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	46,92	47,90	47,92	47,96	47,99	48,00	49,21
2	**Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis**								
2.1	**Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Kewilayahan yang Terintegrasi, Strategis dan Memiliki Daya Ungkit Ekonomi**	**Indeks Ketimpangan Infrastruktur**	**n/a**	**0,316**	**0,300**	**0,285**	**0,270**	**0,255**	**0,240**
2.1.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Publik	Indeks Infrastruktur	n/a	60	65	70	75	80	85
2.1.2	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Publik	Indeks Konektivitas	50,10	52,73	57,21	57,21	59,84	61,70	61,70
3	**Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing**								
3.1	**Mewujudkan Kualitas SDM**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**82,59**	**82,61**	**82,63**	**82,67**	**82,69**	**82,71**	**82,89**
3.1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	12	12,09	12,11	12,14	12,16	12,19	12,35
		Harapan Lama Sekolah	15,67	15,79	15,80	15,82	15,83	15,85	15,90
3.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	71,98	72,60	72,65	72,73	72.93	73,07	73,15
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	16,6	14,0	13,05	11,64	11,00	10,23	9,03
3.1.3	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Ketimpangan Gender	0,438	0,360	0,340	0,320	0,310	0,300	0,290
		Kota Layak Anak	860	865	869	873	878	880	891
3.1.4	Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	59,17	60,05	62,13	62,85	62,99	63,01	64,21
4	**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Bersih, Transparan, dan Akuntabel yang Berorientasi pada Pelayanan Publik**								
4.1	**Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Berbasis Digital**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**60,02**	**63**	**65**	**68**	**70**	**72**	**74**
4.1.1	Meningkatnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	80,04	92,63	93,67	93,69	93,74	94,07	95,03
		Indeks Sistem Merit	60,61	63,07	65,12	67,45	70,02	74,32	75,64

Tabel 3.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Ternate Tahun 2025-2029 (Lanjutan)

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun					Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	VISI "MEWUJUDKAN TERNATE YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN"								
4.1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	SAKIP	B	B	BB	BB	BB	BB	BB
		SPBE	1,89	1,96 – 2,10	2,24	2,38	2,52	2,66	2,80
		Nilai MCP KPK	80,05	80,20	80,51	80,63	80,73	80,85	81,05
		Indeks Demokrasi Indonesia	81	80	81	81,54	81,65	81,75	81,93
		Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	90	92	95	96	98	98	98
		Indeks Reformasi Hukum	100	100	100	100	100	100	100
		Indeks Survei Penilaian Integritas	59,88	66,58	67,00	67,08	67,11	67,43	67,65
		Rasio PAD terhadap PDRB	6,62	6,68	6,75	6,81	6,94	7,07	7,14
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B (70,28)	B (72,36)	B (75,03)	B (75,20)	B (75,57)	B (75,90)	B (76,05)
5	**Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat yang Tangguh dan Unggul Berbasis Kepulauan**								
5.1	**Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan**	**Pertumbuhan Ekonomi**	**8,83**	**8,57**	**8,76**	**8,87**	**8,89**	**9,03**	**9,06**
		Pendapatan Per Kapita	**70,949**	**74,496**	**78,221**	**82,132**	**86,239**	**90,551**	**90,721**
		Indeks Gini	**0,22**	**0,21**	**0,20**	**0,19**	**0,18**	**0,16**	**0,14**
5.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Rasio PDRB Industri Pengolahan	2,31	2,90-2,91	3,06	3,21	3,37	3,54	3,74
5.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	0,8	0,10	0,12	0,14	0,17	0,20	0,23
5.1.3	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja yang Berkompetensi dan Berdaya Saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,42	5,20	4,86	4,80	4,76	4,70	4,73
5.1.4	Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Usaha	Nilai Investasi	256 Miliar	273 Miliar	301 Miliar	324 Miliar	354 Miliar	371 Miliar	379 Miliar
5.1.5	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	13,26	14,03	14,28	14,60	14,81	15,00	15,03
5.1.6	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	3,14	3,00	2,98	2,97	2,85	2,82	2,74

Tabel 3.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Ternate Tahun 2025-2029 (Lanjutan)

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun					Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	VISI "MEWUJUDKAN TERNATE YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN"								
5.1.7	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB	8,01	10,93	11,01	12,90	13,01	14,89	14,91
6	**Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan, Asri dan Lestari**								
6.1	**Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Daerah**	**Penurunan Intensitas Emisi GRK**	**40,5**	**38**	**36,4**	**35,5**	**34,9**	**34,9**	**34,5**
		Indeks Kota Berkelanjutan	**n/a**	**2000-2500**	**2500-3000**	**3000-3500**	**3500-4000**	**4000-4500**	**4500-5000**
6.1.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,34	79,66	79,83	80	80,17	80,35	80,52
6.1.2	Ketangguhan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	91,97	100 – 99,11	98,21	97,31	96,41	95,52	94,62

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2025

Tabel 3.2
Keselarasan Indikator Utama Pembangunan RPJMD Kota Ternate,
RPJMD Provinsi Maluku Utara dan RPJMN Tahun 2025-2029

No	Indikator Utama Pembangunan	Kondisi Awal	Kota Ternate		Provinsi Maluku Utara		RPJMN	
		2024	2025	2029	2025	2029	2025	2029
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	75,03	75,85	77,00	81,00	83,00	76,77	78,25
2	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	46,92	47,90	48,00	57,03	59,21	58,39	60,70
3	Indeks Ketimpangan Infrastruktur	n/a	0,316	0,255				
4	Indeks Infrastruktur	n/a	60	80				
5	Indeks Konektivitas / Rasio Konektivitas	50,10	52,73	61,70	95,75	97,21		
6	Indeks Pembangunan Manusia / Indeks Modal Manusia	82,59	82,61	82,71	0,480	0,500	0,48	0,50
7	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	12	12,09	12,19	10,01	10,40	9,33	9,82
8	Harapan Lama Sekolah	15,67	15,79	15,85	14,01	14,32	13,32	13,58
9	Usia Harapan Hidup	71,98	72,60	71,40	71,40	73,80	74,43	75,40
10	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	16,60	14,00	10,23	17,50	11,50	18,8	14,2
11	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,438	0,360	0,300	0,497-0,493	0,447-0,472	0,430	0,394
12	Kota Layak Anak	860	865	880				
13	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	59,17	60,05	63,01			65,16	73,27
14	Indeks Reformasi Birokrasi	60,02	63	72	59,92	60,06	71,38	77,26
15	Indeks Pelayanan Publik	80,04	92,63	94,07	3,00	3,80	3,68	3,80
16	Indeks Sistem Merit	60,61	63,07	74,32				
17	SAKIP	B	B	BB	64,21	64,44		
18	SPBE	1,89	1,96 – 2,10	2,66	2,89	3,60	3,00	2,00
19	Nilai MCP KPK	80,05	80,20	80,85				
20	Indeks Demokrasi Indonesia	81	80	81,75	66,95	72,45	81,69-85,23	83,42-86,96
21	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	90	92	98	70,0	78,0		
22	Indeks Reformasi Hukum	100	100	100	59,92	60,06		
23	Indeks Survei Penilaian Integritas / Indeks Integritas Nasional (Poin)	59,88	66,58	67,43	60,93	61,09		
24	Rasio PAD Terhadap PDRB	6,62	6,68	7,07				

Tabel 3.2
Keselarasan Indikator Utama Pembangunan RPJMD Kota Ternate,
RPJMD Provinsi Maluku Utara dan RPJMN Tahun 2025-2029 (Lanjutan)

No	Indikator Utama Pembangunan	Kondisi Awal	Kota Ternate		Provinsi Maluku Utara		RPJMN	
		2024	2025	2029	2025	2029	2025	2029
25	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B (70,28)	B (72,36)	B (75,90)				
26	Pertumbuhan Ekonomi	8,83	8,57	9,03	11,4	12,7	5,30	8,00
27	Pendapatan Per Kapita / PDRB Per Kapita (Juta)	70,949	74,496	90,551	77,9	133,4	5.41	8
28	Indeks Gini / Rasio Gini	0,22	0,21	0,16	0,280-0,297	0,273-0,290	0,280-0,297	0,273-0,290
29	Rasio PDRB/PDB Industri Pengolahan	2,31	2,90-2,91	3,54	5,8	7,78	20,80	21,90
30	Rasio PDRB/PDB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	0,8	0,10	0,20	0,24	0,28	9,53	11,57
31	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,42	5,20	4,70	3,80-4,00	2,82-3,60	4,50-5,00	4,00-4,71
32	Nilai Investasi (Miliar)	256	273	371				
33	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	13,26	14,03	15,00	5,5-7,5	5,5-7,5		
34	Tingkat Kemiskinan	3,14	3,00	2,82	4,95-5,15	0,92-1,92	7,00-8,00	4,5-5,0
35	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB/PDB	8,01	10,93	14,89	12,1	10,8	2,20	3,46
36	Penurunan Intensitas Emisi GRK	40,5	38	34,9	86,35	94,12	86,35	94,12
37	Indeks Kota Berkelanjutan	n/a	2000-2500	4000-4500				
38	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,34	79,66	80,35	80,36	81,03	76,49	77,20
39	Indeks Risiko Bencana (IRB)	91,97	100 – 99,11	95,52	142,00	130,00		

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate dan RPJMD Provinsi Maluku Utara, 2025

3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KOTA TERNATE

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis, yang dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab II, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2025-2029, dapat dijabarkan sebagai berikut.

3.3.1 Arah Kebijakan RPJPD Tahap I (2025-2029):

Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka kerja yang digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan secara bertahap. Arah kebijakan juga memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok. Tahapan yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan pada tiap tahanan pembangunan berbeda, namun tetap memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu tahapan ke tahapan lainnya.

Pada 5 (lima) tahun pertama, arah kebijakan pembangunan Kota Ternate ditekankan pada penguatan pondasi transformasi. Pembangunan tahap pertama merupakan pondasi awal pembangunan dalam perubahan penyelenggaraan sistem kinerja pemerintah. Arah kebijakan ini diharapkan mampu membangun pondasi yang kuat dengan sistem pemerintahan yang profesional sehingga akan membantu proses pembangunan daerah. Arah kebijakan RPJPD Kota Ternate pada tahap ini:

Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Ternate yang Berdaya Saing, difokuskan pada (1) Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana serta akses pendidikan usia dini, dasar, menengah dan perguruan tinggi, (2) Peningkatan peran lintas sektor kesehatan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pemenuhan jaminan kesehatan nasional untuk masyarakat, (3) Penguatan kelembagaan keseteraan gender, (4) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor melalui peningkatan SDM dan optimalisasi sistem pendataan disabilitas, dan (5) Perlindungan tradisi adat budaya dan nilai-nilai keagamaan.

Mewujudkan Pembangunan Perekonomian Kota Ternate yang Tangguh dan Unggul Berbasis Kepulauan, difokuskan pada: (1) Penguatan komoditas, *City Branding* Ternate Kota Rempah dan Pusat pengembangan ekonomi atau kawasan strategis berbasis kepulauan serta peningkatan kemandirian ekonomi; peningkatan intensitas pelatihan tenaga kerja dan optimalisasi jaminan kesejahteraan tenaga kerja, (2) Memperkuat destinasi pariwisata berdasarkan prioritas secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk menarik minat wisatawan, dan (3) Optimalisasi pajak dan pengendalian inflasi serta pengelolaan sektor keuangan.

Meningkatkan dan Memantapkan Kapasitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis, Pada tahap ini difokuskan pada (1) Pengentasan kawasan rumah tidak layak huni melalui program rehabilitasi rumah dan subsidi perumahan dari pemerintah daerah dan peningkatan desa/kelurahan mandiri, dan (2) Peningkatan pembangunan kecamatan potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada.

Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari, difokuskan pada (1) Perbaikan dan peningkatan kondisi lingkungan dan permukiman serta pemenuhan layanan pengelolaan persampahan dari tingkat domestik hingga regional, (2) Perlindungan, pengembangan dan pengendalian kawasan produksi pangan dan peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang aman, dengan memastikan adanya penyebaran yang merata di seluruh wilayah (khususnya di pulau-pulau), dan (3) Peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana melalui mitigasi dan penanggulangan bencana serta pembangunan rendah karbon.

Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan, **dan Akuntabel Melalui Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik**, difokuskan pada (1) Pembagian tugas pokok dan fungsi pada instansi pemerintahan dan pengadopsian teknologi informasi yang terintegrasi dan berjangka panjang serta pemahaman konsep pelayanan publik, dan (2) Peningkatan kapasitas daerah dalam membangun lingkungan masyarakat yang kondusif dan demokratis.

3.3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Ternate Tahun 2025-2029

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kriteria suatu rumusan arah kebijakan, antara lain: memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu, membantu menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional; dan mengarahkan pemilih strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kota Ternate pada 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Ternate Tahun 2025-2029

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Menumbuh-Kembangkan Kelembagaan Sosial Dalam Bingkai 7 Nilai Dasar Kebudayaan Ternate (*Kie Se Gam Magogugu Matiti Tomdi*)	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Berkebudayaan Maju	Terwujudnya Penguatan dan Pemajuan Kebudayan	Rekonstruksi, Pengelolaan dan Penerapan Nilai-Nilai Budaya, Obyek Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Meningkatkan Ketahanan Budaya dan Kontribusi Budaya di Tengah Peradaban Dunia Melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan
2	Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Kewilayahan yang Terintegrasi, Strategis dan Memiliki Daya Ungkit Ekonomi	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Publik	Pemerataan dan Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Dasar	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan
					Pemenuhan Air Bersih untuk Rumah Tangga, Pertanian, dan Industri
					Pemerataan Akses Terhadap Layanan Listrik Menjangkau Seluruh Wilayah
					Peningkatan Layanan Infrastruktur Persampahan dan Air Limbah Domestik
				Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berkualitas dan Terjangkau	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan/atau Terdampak Bencana dan Program Pemerintah
			Meningkatnya Konektivitas Transportasi Publik	Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah Terutama untuk Mendukung Perekonomian dan Meminimalkan Kantong Kemiskinan	Pembangunan Sarana Prasarana Sistem Transportasi Darat dan Air
3	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Mewujudkan Kualitas SDM	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan	Pembangunan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan
					Meningkatkan Minat Baca
					Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Profesionalisme Tenaga Kesehatan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan	Pembangunan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
					Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Kesehatan
					Peningkatan Promosi dan Prevensi Kesehatan
				Peningkatan Pelayanan, Advokasi dan KIE Keluarga Berencana	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Advokasi dan KIE Keluarga Berencana
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkan Peran, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Lansia	Penguatan Kelembagaan dan Jejaring Perempuan, Anak dan Lansia

Tabel 3.3
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Ternate Tahun 2025-2029 (Lanjutan)

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga Melalui Peningkatan Kualitas Pembinaannya	Peningkatan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga, Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga
					Pengembangan Fasilitasi dan Pendampingan Usaha Pemuda
4	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Bersih, Transparan, dan Akuntabel yang Berorientasi pada Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Berbasis Digital	Meningkatnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat	Meningkatkan dan Memperluas Pelayanan Publik	Pemenuhan Air Bersih untuk Rumah Tangga, Pertanian, dan Industri
				Meningkatkan Kompetensi dan Kualifikasi Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan yang Profesional (Kompetensi Birokrasi)
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah	Memantapkan Sikronisasi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengendalian Pelakasanaan Rencana Pembangunan Daerah
				Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan Pengembangan Riset Berbasis Potensi	Pengembangan Tata Kelola Inovasi Pelayanan Publik dan Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Riset
				Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan Peran dan Kinerja Lembaga Pengelolaan Keuangan Daerah
					Diversifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah
				Meningkatkan Kinerja Pengawasan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
				Mengembangkan dan Memanfaatkan Sistem Informasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (*e-Government*)	Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
5	Tangguh dan Unggul Berbasis Kepulauan	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Peningkatan Daya Saing Produk Industri	Penerapan *Link and Match* Industri Kecil-Industri Besar, Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Industri serta Pengembangan Sentra Industri Terpadu
					Pengembangan IKM dan Industri Hijau
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Peningkatan Daya Saing Pariwisata	Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Produk Ekonomi Kreatif yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing
					Peningkatan dan Perluasan Promosi serta Pemasaran Pariwisata dan Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kemitraan Strategis
					Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif
					Pengembangan Budaya Lokal yang Mendukung Pengembangan Pariwisata

Tabel 3.3
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Ternate Tahun 2025-2029 (Lanjutan)

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatnya Kualitas Tenaga yang Berkompetensi dan Berdaya Saing	Pelayanan Bagi Pencari Kerja	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas serta Peningkatan Kesempatan Kerja
				Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Meningkatkan Kualitas Hubungan Tripartit dan Bipartit, Meningkatkan Kualitas Kapasitas Penerapan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja di Perusahaan
			Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Usaha	Peningkatan Inovasi dan Kualitas Penanaman Modal	Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi
					Promosi dan Peningkatan Layanan Investasi
					Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas
					Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Peningkatan Daya Saing Produk Perdagangan	Optimalisasi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri, serta Perdagangan Digital
					Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor dan Pasar Tujuan Ekspor
					Penguatan Jaringan Distribusi serta Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok
			Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Pengembangan Ketahanan Pangan Berkelanjutan	Perbaikan Tata Kelola Pangan dengan Memperhatikan Akses, Ketersediaan dan Pemanfaatan Pangan
					Integrasi Kultur (Budaya) dalam Peningkatan Daya Saing Pangan Lokal
				Penanggulangan Kemiskinan Secara Terpadu dan Tepat Sasaran	Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Mencegah Terjadinya Kemiskinan Baru
					Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan Memperkuat Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin serta Perlindungan dan Jaminan Sosial
					Penataan Kawasan Permukiman Kumuh
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan	Peningkatan Produksi dan Diferensiasi Produk di Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Pertanian serta Kelautan dan Perikanan
					Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku Industri Kelautan dan Perikanan, Peningkatan Kualitas Mutu Produk dan Nilai Tambah untuk Peningkatan Investasi dan Ekspor Hasil Kelautan dan Perikanan
					Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Penguatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Tabel 3.3
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Ternate Tahun 2025-2029 (Lanjutan)

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					Pengembangan Sentra Pertanian dan Perikanan yang Terpadu untuk Meningkatkan Produksi dan Produktivitas
					Penerapan Prinsip UMKM Hijau Terutama yang Mengembangkan Potensi Unggulan Daerah
6	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan, Asri dan Lestari	Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Daerah	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Menjaga Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Peningkatan Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Ketangguhan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Upaya Penanggulangan Bencana	Peningkatan Pelayanan Informasi, Kesiapsiagaan, Penyelamatan dan Evakuasi, serta Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
				Meningkatkan Penataan Ruang untuk Mewujudkan Tata Ruang Wilayah yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing	Peningkatan Kinerja Penataan Ruang

Sumber : Bappelitbangda Kota Ternate, 2025

3.3.3 Keselarasan Tujuan RPJMD dengan Prioritas Nasional dan Sasaran Utama RPJMN Tahun 2025-2029

Pembangunan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan di tingkat daerah, termasuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate, wajib disusun selaras dan searah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

RPJMN 2025–2029 telah menetapkan Prioritas Nasional dan Sasaran Utama Pembangunan Nasional, sebagai arah strategis pembangunan lima tahunan untuk mewujudkan fondasi yang kuat menuju Indonesia Emas 2045. Program-program prioritas tersebut mencakup transformasi sosial, ekonomi, kelembagaan, serta pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan kesejahteraan rakyat, tata kelola pemerintahan yang efisien, dan daya saing daerah.

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional, RPJMD Kota Ternate dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran nasional tersebut, melalui keselarasan yang nyata dalam tujuan pembangunan daerah.

Keselarasan tujuan RPJMD dengan prioritas nasional dan sasaran utama RPJMN Tahun 2025-2029 tercantum dalam tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Keselarasan Tujuan RPJMD dengan Prioritas Nasional dan Sasaran Utama
RPJMN Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama
1	Menumbuh-Kembangkan Kelembagaan Sosial dalam Bingkai 7 Nilai Dasar Kebudayaan Ternate (*Kie Se Gam Magogugu Matiti Tomdi*)	Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
2	Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan
			Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB
		Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)
			Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)
		Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan
3	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata
			Terwujudnya Kesehatan untuk Semua
			Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
			Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat
4	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Bersih, Transparan, dan Akuntabel yang Berorientasi pada Pelayanan Publik	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia
		Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan
		Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional
			Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani
			Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba

Tabel 3.4
Keselarasan Tujuan RPJMD dengan Prioritas Nasional dan Sasaran Utama
RPJMN Tahun 2025-2029 (Lanjutan)

No	Tujuan	Prioritas Nasional	Sasaran Utama
			Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan
			Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan
5	Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat yang Tangguh dan Unggul Berbasis Kepulauan	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan
		Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas
			Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata
			Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif
		Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan
			Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
		Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan
			Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
			Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
		Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
6	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan, Asri dan Lestari	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)
		Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Sumber : Bappelitbangda Kota Ternate, 2025

3.3.4 Arah Kebijakan dan Intervensi Pembangunan Berkelanjutan

Arah kebijakan dan intervensi strategis pembangunan berkelanjutan disusun berdasarkan 7 (tujuh) isu strategis yang telah ditetapkan, serta mempertimbangkan alternatif skenario pembangunan yang dipilih. Masing-masing isu dirumuskan secara tematik untuk menghasilkan sasaran antara, kerangka kebijakan yang responsif, serta arahan intervensi lintas sektor yang relevan dengan agenda TPB prioritas. Penjabaran dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antar isu, konsistensi dengan arah pembangunan nasional, serta kewenangan dan kapasitas pelaksanaan oleh perangkat daerah dalam konteks lima tahun perencanaan.

1. Isu Strategis 1

Kesenjangan partisipasi pendidikan yang inklusif dan merata, mutu hasil pembelajaran, dan infrastruktur pendidikan yang memadai.

Sasaran:
Meningkatnya partisipasi pendidikan yang inklusif dan merata, mutu hasil pembelajaran, serta pemenuhan infrastruktur pendidikan yang memadai.

Arah Kebijakan dan Intervensi Strategis:

1. Memperluas akses layanan pendidikan bagi kelompok usia strategis dan wilayah kepulauan.

   Intervensi diarahkan untuk memastikan setiap anak usia sekolah, terutama di wilayah rentan dan luar sistem formal, memiliki akses terhadap layanan PAUD, pendidikan dasar, dan kesetaraan.

   a. Mengidentifikasi dan memetakan anak tidak sekolah berbasis data spasial dan demografi.
   b. Memfasilitasi penyelenggaraan PAUD dan pendidikan kesetaraan berbasis komunitas di wilayah prioritas.
   c. Menyediakan insentif operasional minimum bagi lembaga nonformal dan PAUD swadaya.
   d. Meningkatkan koordinasi lintas OPD dan kelurahan dalam upaya penjangkauan kelompok sasaran.

2. Meningkatkan mutu kelembagaan pendidikan secara merata.

   Intervensi difokuskan pada pembinaan satuan pendidikan agar memenuhi standar layanan minimal dan memperoleh akreditasi secara bertahap.

   a. Mendampingi proses akreditasi satuan PAUD dan kesetaraan melalui mekanisme bertahap dan berbasis risiko.
   b. Membina manajemen kelembagaan pendidikan dasar dengan pendekatan supervisi progresif.
   c. Mengembangkan sistem evaluasi mutu internal sekolah berbasis refleksi dan partisipasi guru.
   d. Menyediakan modul pembinaan kelembagaan sederhana yang disesuaikan dengan kapasitas lokal.

3. Menguatkan profesionalisme pendidik secara sistemik.

   Intervensi diarahkan untuk menjawab tantangan kompetensi dan distribusi guru melalui skema pelatihan adaptif dan afirmasi sertifikasi.

   a. Menyelenggarakan pelatihan berjenjang untuk guru PAUD, SD, dan SMP berbasis kebutuhan satuan pendidikan.
   b. Memfasilitasi sertifikasi dan pelatihan lanjutan bagi guru non-PNS secara afirmatif.
   c. Mendorong pembentukan dan penguatan komunitas belajar guru di setiap kecamatan.
   d. Mengembangkan modul pelatihan tematik yang kontekstual terhadap kondisi kepulauan.

4. Meningkatkan capaian hasil belajar melalui pendekatan berbasis bukti. Intervensi difokuskan pada pembelajaran diferensial berbasis asesmen diagnostik, terutama di satuan pendidikan berkinerja rendah.

   a. Mengimplementasikan asesmen diagnostik awal dan tindak lanjut dalam pembelajaran numerasi dan literasi.

b. Mengintegrasikan hasil rapor pendidikan daerah ke dalam perencanaan dan supervisi sekolah.
c. Melibatkan komunitas belajar, orang tua, dan tokoh lokal dalam dukungan proses belajar anak.
d. Menyediakan sumber belajar yang relevan dan mudah diakses, termasuk bahan ajar kontekstual.

5. Mentransformasi iklim pendidikan menuju lingkungan belajar yang aman dan inklusif.

   Intervensi diarahkan pada perubahan nilai, relasi sosial, dan budaya sekolah agar kondusif bagi seluruh peserta didik.

   a. Membangun budaya sekolah ramah anak dan sistem pelaporan kasus perundungan yang responsif.
   b. Melatih guru dan kepala sekolah tentang kepemimpinan inklusif dan sensitivitas sosial.
   c. Mengembangkan kurikulum muatan lokal berbasis nilai kebhinekaan dan identitas budaya Ternate.
   d. Menyediakan ruang partisipatif siswa dalam tata kelola dan pengambilan keputusan sekolah.

6. Menjamin keberfungsian sarana-prasarana pendidikan yang layak dan sehat. Intervensi diarahkan pada pemenuhan fasilitas dasar yang mendukung pembelajaran, terutama sanitasi dan air bersih di satuan pendidikan PAUD dan SD.

   a. Menyediakan toilet layak dan fasilitas cuci tangan di seluruh satuan PAUD dan SD.
   b. Mengintegrasikan kebutuhan sanitasi sekolah dalam perencanaan lintas OPD (Disdik, PUPR, Dinkes).
   c. Mengembangkan sistem pemeliharaan sarana pendidikan berbasis peran komite sekolah dan masyarakat.
   d. Memonitor kualitas sarana sekolah secara berkala sebagai bagian dari supervisi layanan pendidikan.

2. Isu Strategis 2:

Kesenjangan akses dan mutu layanan air bersih dan sanitasi aman, kerentanan sumber daya air, serta lemahnya pengelolaan limbah cair.

Sasaran:
Tersedianya layanan air bersih dan sanitasi aman yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan, didukung oleh sistem kelembagaan, infrastruktur, dan tata kelola lingkungan yang adaptif terhadap risiko ekosistem.

Arah Kebijakan dan Intervensi Strategis:

1. Mendiversifikasi sumber air baku untuk mengurangi ketergantungan terhadap air tanah.

   Intervensi diarahkan pada penguatan ketahanan sumber daya air melalui pendekatan ekohidrologi dan pemanfaatan sumber alternatif.

   a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi sumber air alternatif, seperti air hujan dan air permukaan.
   b. Mengembangkan fasilitas pemanenan air hujan dan pembangunan embung skala kecil.
   c. Melindungi kawasan resapan dan sempadan melalui integrasi ke dalam tata ruang dan pengawasan pemanfaatan lahan.
   d. Memulihkan badan air alami (danau, mata air) melalui reboisasi mikro dan sistem filtrasi ekosistem.

2. Meningkatkan efisiensi sistem distribusi air bersih secara terukur. Intervensi difokuskan pada penguatan infrastruktur teknis dan digitalisasi manajemen distribusi.

   a. Melakukan audit jaringan distribusi untuk mengidentifikasi titik kebocoran dan inefisiensi.
   b. Mengganti dan merehabilitasi jaringan pipa tua secara bertahap berdasarkan tingkat kerusakan.
   c. Menerapkan sistem manajemen distribusi berbasis data dan sensor pemantauan tekanan air.
   d. Meningkatkan kapasitas teknis personel operator air dalam pemantauan dan tanggap darurat.

3. Meningkatkan cakupan sanitasi aman dan pengelolaan air limbah domestik. Intervensi bertujuan membangun sistem sanitasi rumah tangga dan lingkungan yang sesuai standar.

   a. Mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya tangki septik kedap dan aman.
   b. Memfasilitasi pembangunan tangki septik standar untuk rumah tangga miskin melalui program padat karya.

c. Memperluas cakupan layanan penyedotan lumpur tinja terjadwal berbasis kelurahan.
d. Mengembangkan SPALD-T dan SPALD-S di wilayah padat penduduk dan daerah pertumbuhan baru.

4. Meningkatkan kualitas air lingkungan secara progresif.

   Intervensi diarahkan pada pengawasan limbah dan pemantauan kualitas air berbasis spasial.

   a. Mengembangkan sistem pengawasan limbah domestik dan non-domestik melalui uji kualitas berkala.
   b. Memasang alat pantau kualitas air secara *real-time* di titik-titik strategis sungai dan perairan pesisir.
   c. Menindaklanjuti pelanggaran limbah cair dengan penguatan Perda dan peningkatan pengawasan.
   d. Melibatkan masyarakat dalam pemantauan kualitas air berbasis partisipatif dan pelaporan *online*.

5. Memulihkan kualitas lahan melalui konservasi dan perlindungan ruang ekologis.

   Intervensi ditujukan untuk memperkuat daya dukung lahan melalui konservasi, reforestasi, dan pengawasan ruang.

   a. Melakukan reboisasi kawasan lindung dan sempadan mata air secara kolaboratif.
   b. Memberikan insentif konservasi kepada masyarakat yang menjaga area tangkapan air dan lereng kritis.
   c. Menegakkan pemanfaatan ruang berbasis daya dukung ekologis melalui sistem pelaporan dan pengawasan.
   d. Mengkonsolidasikan kawasan rentan ke dalam kawasan lindung lokal melalui revisi tata ruang.

6. Memperkuat kelembagaan lintas sektor untuk air dan sanitasi.

   Intervensi difokuskan pada pengintegrasian perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam satu sistem koordinatif.

   a. Membentuk forum kelembagaan air dan sanitasi di tingkat kota dengan mandat pengambilan keputusan lintas sektor.
   b. Mengintegrasikan rencana kerja antar-OPD terkait dalam dokumen anggaran dan rencana tahunan.
   c. Mengembangkan sistem indikator kinerja layanan air dan sanitasi secara terpadu.
   d. Menyediakan *dashboard* pemantauan layanan dasar dengan *update* berkala untuk pengawasan publik.

7. Mengarusutamakan akses universal terhadap layanan dasar dalam kebijakan pembangunan.

   Intervensi ditujukan untuk menjamin keadilan spasial dan afirmasi kepada kelompok dan wilayah rentan.

   a. Menyusun peta kerentanan akses air dan sanitasi di wilayah kepulauan, padat, dan miskin kota.
   b. Mengalokasikan investasi dan dukungan teknis berbasis prinsip afirmasi dalam pengembangan infrastruktur dasar.
   c. Meningkatkan pelayanan pengaduan dan respon cepat keluhan masyarakat terhadap gangguan layanan.
   d. Melibatkan RT/RW dalam identifikasi dan pelaporan kesenjangan akses layanan.

8. Menjadikan integrasi air, sanitasi, dan lingkungan sebagai arsitektur utama pembangunan daerah.

   Intervensi diarahkan untuk memastikan bahwa perencanaan, anggaran, dan evaluasi daerah secara eksplisit mengacu pada sektor ini.

   a. Mengintegrasikan isu air dan sanitasi ke dalam RPJMD, Renstra OPD, dan dokumen penganggaran.
   b. Menghubungkan target TPB 6 dengan indikator kinerja utama daerah.
   c. Menyediakan analisis biaya-manfaat untuk setiap intervensi berbasis risiko lingkungan.
   d. Mengembangkan sistem *tagging* anggaran untuk pelacakan pembiayaan sektor secara transparan.

3. Isu Strategis 3

Ketimpangan akses terhadap hunian layak, ruang terbuka hijau, dan layanan dasar perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sasaran:
Tersedianya permukiman dan layanan dasar perkotaan yang layak, aman, dan berkelanjutan, serta terciptanya kualitas lingkungan kota yang inklusif dan mendukung keadilan spasial.

Arah Kebijakan dan Intervensi Strategis:

1. Meningkatkan akses terhadap hunian layak secara spasial dan sosial.

   Intervensi diarahkan untuk memastikan kelompok rentan memiliki akses terhadap tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan dan didukung oleh infrastruktur dasar.

   a. Memetakan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) secara spasial berbasis RT/RW.
   b. Memfasilitasi perbaikan RTLH melalui sinergi program DAK, APBD, dan swadaya masyarakat.
   c. Mendorong pelaksanaan SPM melalui penyediaan rumah layak huni
   d. Mengembangkan kolaborasi program perumahan/permukiman dengan sanitasi dan penyediaan air bersih.
   e. Meningkatkan kepastian tenurial dan legalitas lahan permukiman melalui penyuluhan dan kemudahan administrasi.
   f. Menyediakan dukungan teknis desain rumah tahan gempa dan ramah lingkungan bagi penerima bantuan.

2. Menambah dan mengoptimalkan ruang terbuka hijau kota secara adaptif.

   Intervensi bertujuan memulihkan tutupan hijau dan menyediakan ruang publik yang inklusif di tengah tekanan keterbatasan lahan.

   a. Mengidentifikasi dan mengamankan lahan potensial untuk RTH dalam revisi RTRW dan RDTR.
   b. Melaksanakan penghijauan kawasan sempadan sungai, pantai, dan sempadan jalan kota.
   c. Mengembangkan RTH vertikal, atap hijau, dan taman mikro di fasilitas publik.
   d. Menyediakan insentif zonasi dan kemudahan teknis bagi swasta yang menyediakan RTH publik.
   e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan taman lingkungan dan taman kota berbasis kelurahan.

3. Mentransformasi sistem pengelolaan sampah menuju sistem pengolahan berkelanjutan.

   Intervensi diarahkan pada pergeseran paradigma dari pengangkutan ke pengurangan dan daur ulang di sumber.

   a. Mengidentifikasi dan memperkuat kelembagaan TPS3R di kawasan padat dan pasar.
   b. Mengembangkan skema bank sampah digital dengan sistem insentif non-tunai.
   c. Mengedukasi pemilahan sampah rumah tangga berbasis komunitas dan sekolah.
   d. Menyederhanakan rantai logistik daur ulang dengan kemitraan pelaku usaha lokal.
   e. Meningkatkan integrasi pengelolaan sampah ke dalam sistem informasi pengelolaan lingkungan.
   f. Mengembangkan fasilitas pemrosesan akhir sampah yang adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial kepulauan, khususnya di Pulau Hiri, Moti, dan Batang Dua.

4. Mengembangkan sistem pemantauan kualitas udara yang terintegrasi dengan kebijakan publik.

   Intervensi bertujuan menghadirkan basis data kualitas udara yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan dan perlindungan kesehatan warga kota.

   a. Memasang sensor kualitas udara di titik-titik padat lalu lintas dan permukiman.
   b. Membangun *dashboard* publik yang menampilkan data kualitas udara secara *real-time*.
   c. Mengintegrasikan hasil pemantauan ke dalam kebijakan transportasi, tata ruang, dan kesehatan lingkungan.
   d. Melibatkan sekolah dan komunitas dalam pendidikan udara bersih dan kampanye publik.

5. Meningkatkan mutu dan kepercayaan terhadap transportasi umum perkotaan. Intervensi difokuskan pada perbaikan standar pelayanan dan keandalan sistem angkutan publik.

a. Melakukan standarisasi armada transportasi umum berbasis usia kendaraan dan kelayakan teknis.
b. Mengkaji dan menata ulang trayek dan waktu operasi agar responsif terhadap kebutuhan warga.
c. Membangun sistem informasi layanan transportasi berbasis aplikasi dan papan digital.
d. Meningkatkan pengawasan teknis kendaraan umum melalui revitalisasi alat uji KIR dan inspeksi berkala.
e. Mendorong kemitraan penyedia layanan transportasi dengan komunitas pengguna untuk evaluasi pelayanan.

4. Isu Strategis 4

Ketidakteraturan urbanisasi dan pemanfaatan ruang yang tidak terkendali dan tidak adaptif terhadap daya dukung ekologis.

Sasaran:
Pemanfaatan ruang kota yang terkendali, adaptif terhadap risiko bencana dan daya dukung lingkungan, serta mendukung tumbuhnya permukiman yang tertata, layak huni, dan berkeadilan.

Arah Kebijakan dan Intervensi Strategis:

1. Menurunkan tekanan pembangunan di zona rawan melalui penguatan pengendalian berbasis risiko.

   Intervensi diarahkan untuk menjadikan data spasial risiko sebagai instrumen utama dalam pengambilan keputusan perizinan dan pengawasan pembangunan.

   a. Mengintegrasikan peta risiko bencana dan kawasan lindung ke dalam basis data perizinan.
   b. Menyesuaikan ketentuan RTRW dan RDTR dengan indeks risiko bencana dan kapasitas daya dukung.
   c. Melatih aparat kelurahan dan kecamatan dalam identifikasi dini potensi pelanggaran tata ruang.
   b. Meningkatkan pengawasan perizinan bangunan di zona rawan melalui koordinasi antar-OPD dan penguatan regulasi teknis.

2. Mengarahkan pertumbuhan permukiman baru ke dalam koridor terencana dan terhubung infrastruktur dasar.

   Intervensi bertujuan untuk memandu ekspansi kawasan hunian ke wilayah yang telah memiliki kesiapan layanan dan sesuai perencanaan ruang.

   a. Mengidentifikasi dan menetapkan koridor pertumbuhan permukiman baru berbasis RDTR.
   b. Membangun kemitraan penyediaan lahan melalui pendekatan *land banking* dan insentif pemanfaatan.
   c. Memfasilitasi konektivitas jaringan jalan, air bersih, dan sanitasi ke kawasan prioritas.
   b. Mewajibkan pemenuhan prasarana dasar sebelum penerbitan izin pengembangan kawasan perumahan.

3. Mengintegrasikan perencanaan ruang darat dan laut dalam sistem tata ruang terpadu.

   Intervensi diarahkan untuk menyelaraskan rencana tata ruang darat dan laut secara fungsional dan kelembagaan.

   a. Mengharmonisasikan zonasi pesisir dengan kawasan lindung dan wilayah tangkapan air.
   b. Menegaskan pelarangan reklamasi di wilayah pesisir dan aktivitas tambang (khususnya Galian C) di wilayah atau kawasan penyangga ekosistem sesuai revisi RTRW, serta menjamin pemanfaatan ruang melalui reklamasi di kawasan-kawasan sesuai peruntukan dalam revisi RTRW.
   c. Mengembangkan sistem informasi ruang terintegrasi darat-laut berbasis webgis pemerintah kota.
   d. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang pesisir.

4. Menangani permukiman kumuh melalui pendekatan peningkatan kualitas kawasan berbasis komunitas.

   Intervensi difokuskan pada perbaikan lingkungan tanpa relokasi, dengan partisipasi masyarakat dan pemenuhan prasarana dasar.

a. Memetakan dan memverifikasi lokasi permukiman kumuh berbasis kelurahan dan indikator teknis.
b. Melaksanakan program peningkatan kualitas permukiman (*slum upgrading*) dengan metode padat karya.
c. Mengembangkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam peningkatan sanitasi, air bersih, dan drainase.
b. Mendorong adopsi desain rumah sehat dan adaptif oleh warga melalui dukungan teknis dan edukasi.

5. Memperkuat sistem pengawasan dan pelibatan publik dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

   Intervensi diarahkan untuk membangun pengawasan ruang digital yang partisipatif dan efektif.

   a. Mengembangkan sistem pemantauan pelanggaran tata ruang berbasis pelaporan digital (*geo-tagging*).
   b. Melibatkan tokoh masyarakat, RT/RW, dan ormas dalam pengawasan pembangunan skala lingkungan.
   c. Menetapkan indikator pengendalian ruang sebagai bagian dari evaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan.
   d. Menyediakan kanal pelaporan publik untuk pelanggaran pemanfaatan ruang dengan mekanisme umpan balik yang transparan.

5. Isu Strategis 5

Kerentanan sistem ketahanan kota terhadap risiko bencana dan tekanan perubahan iklim yang kompleks dan sistemik, serta belum terkelolanya warisan budaya dan geologi sebagai bagian dari sistem keberlanjutan kota.

Sasaran:
Terbangunnya sistem kota yang tangguh terhadap bencana, terintegrasi secara spasial dan kelembagaan, serta memuliakan warisan budaya dan geologi sebagai penguat identitas, pendidikan, dan keberlanjutan ekosistem kota.

Arah Kebijakan dan Intervensi Strategis:

1. Menurunkan risiko bencana melalui percepatan penguatan sistem pengelolaan risiko berbasis spasial.

   Intervensi diarahkan pada pembaruan pendekatan kebencanaan, dari logistik pasca bencana ke manajemen risiko secara proaktif dan terintegrasi.

   a. Memperbarui dokumen KRB dan memadukannya dengan dokumen RTRW dan RDTR.
   b. Mengintegrasikan indeks risiko bencana ke dalam sistem OSS (*Online Single Submission*) perizinan bangunan.
   c. Mengembangkan sistem evaluasi IRBI tahunan yang digunakan sebagai indikator kinerja daerah.
   d. Meningkatkan kapasitas teknis OPD dan kecamatan dalam penilaian risiko dan analisis spasial berbasis data.

2. Membangun sistem interoperabilitas spasial antar-OPD untuk mendukung pengambilan keputusan lintas sektor.

   Intervensi ditujukan untuk membentuk ekosistem data spasial bersama yang fungsional dan operasional.

   a. Membangun platform peta digital kota yang terintegrasi dengan data RDTR, risiko, perizinan, dan sosial-ekonomi.
   b. Menetapkan standar metadata dan format pertukaran data antar-OPD.
   c. Mengintegrasikan sistem pemantauan ruang ke dalam *dashboard* kebijakan Walikota.
   d. Menyediakan pelatihan lintas OPD untuk interoperabilitas sistem dan penggunaan informasi spasial terapan.

3. Mengembangkan kesiapsiagaan komunitas berbasis RT/RW dan integrasi sistem peringatan dini.

   Intervensi diarahkan pada penguatan jejaring sosial dan kesiapan warga sebagai garda pertama tanggap bencana.

a. Membentuk unit kesiapsiagaan RT/RW dan pelatihan simulasi evakuasi tahunan.
b. Menetapkan jalur evakuasi dan titik kumpul di setiap kelurahan berbasis partisipasi warga.
c. Mengintegrasikan sirine dan alat peringatan dini ke dalam infrastruktur lingkungan dan bangunan publik.
d. Melibatkan sekolah, masjid, dan komunitas lokal dalam skema edukasi kebencanaan terpadu.

4. Membangun kelembagaan pengelola *geopark* sebagai simpul konservasi, edukasi, dan ekonomi lokal.

   Intervensi bertujuan mengkapitalisasi warisan geologi sebagai basis pembelajaran dan penggerak ekonomi komunitas.

   a. Membentuk unit pengelola *geopark* lintas sektor dengan mandat konservasi dan pengembangan ekonomi lokal.
   b. Menyusun rencana pengelolaan dan promosi *geopark* berbasis zonasi dan potensi lokal.
   c. Mengembangkan destinasi edukatif berbasis batuan, lanskap, dan situs geologi penting.
   d. Melibatkan sekolah, komunitas, dan pelaku UMKM dalam program edukasi dan produk kreatif *geopark*.

5. Mengarusutamakan warisan budaya ke dalam ruang publik, kurikulum, dan ekonomi kreatif kota.

   Intervensi diarahkan agar nilai budaya tidak sekadar dilestarikan, tapi diaktivasi sebagai bagian hidup kota.

   a. Memasukkan konten sejarah dan budaya lokal ke dalam kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan menengah.
   b. Merevitalisasi ruang publik berbasis nilai sejarah, arsitektur tradisional, dan pola ruang lokal.
   c. Mendukung regenerasi pelaku budaya melalui program pelatihan dan inkubasi industri kreatif berbasis warisan.
   d. Mendokumentasikan dan mempublikasikan narasi budaya dan tradisi lokal dalam platform digital dan fisik.

6. Isu Strategis 6

Keterbatasan integrasi kebijakan dan kelembagaan dalam mendukung ekonomi sirkular dan konsumsi-produksi berkelanjutan.

Sasaran:
Terbangunnya sistem konsumsi dan produksi berkelanjutan yang bertumpu pada kebijakan lintas sektor, dukungan kelembagaan, dan partisipasi pelaku usaha dan komunitas dalam mendorong tanggung jawab lingkungan dan efisiensi sumber daya.

Arah Kebijakan dan Intervensi Strategis:

1. Membangun sistem klasifikasi aksi konsumsi-produksi berkelanjutan dalam perencanaan dan penganggaran daerah.

   Intervensi diarahkan untuk menjadikan aksi konsumsi-produksi sebagai komponen eksplisit dalam siklus dokumen perencanaan pembangunan daerah.

   a. Mengembangkan sistem klasifikasi dan labelisasi aksi konsumsi produksi pada dokumen Renstra dan RKPD.
   b. Menyusun indikator pelaksanaan TPB 12 yang terukur dan selaras dengan nomenklatur program daerah.
   c. Meningkatkan kapasitas Bappelitbangda dan OPD teknis dalam pengarusutamaan TPB 12 ke dalam perencanaan dan penganggaran.
   d. Menyediakan panduan teknis pelabelan aksi konsumsi-produksi untuk perangkat daerah.

2. Mengintegrasikan program 3R, bank sampah, dan ekonomi sirkular ke dalam sistem kinerja dan evaluasi daerah.

   Intervensi difokuskan untuk memperkuat posisi program berbasis pengurangan dan daur ulang dalam sistem manajemen kinerja pemerintah.

a. Merevisi indikator kinerja OPD terkait agar mencakup kontribusi terhadap pengurangan timbulan dan pemrosesan sampah.
b. Menguatkan kelembagaan bank sampah melalui dukungan kelembagaan di tingkat kelurahan.
c. Mendorong praktik ekonomi sirkular skala kecil dan komunitas melalui insentif kolaboratif.
b. Mengintegrasikan pelaporan kinerja 3R ke dalam *dashboard monitoring* RPJMD dan evaluasi TPB 12.

3. Meningkatkan akses pelaku usaha dan komunitas terhadap dukungan produksi berkelanjutan.

   Intervensi ditujukan untuk menjembatani pelaku UMKM dan komunitas dalam menerapkan prinsip tanggung jawab lingkungan.

   a. Menyediakan insentif fiskal non-tunai bagi pelaku usaha yang menerapkan prinsip efisiensi energi dan pengurangan limbah.
   b. Melatih komunitas dan pelaku UMKM dalam teknik produksi ramah lingkungan dan sertifikasi produk hijau.
   c. Mengembangkan katalog produk lokal ramah lingkungan dan mendorong adopsi pasar lokal.
   d. Mendorong kolaborasi antara komunitas produsen dan pengelola limbah dalam sistem ekonomi sirkular berbasis wilayah.

4. Menerapkan sistem pengadaan ramah lingkungan secara bertahap dalam barang dan jasa pemerintah.

   Intervensi difokuskan pada reformasi tata kelola pengadaan agar mempertimbangkan prinsip keberlanjutan dalam proses seleksi.

   a. Menyusun kriteria teknis pengadaan ramah lingkungan berdasarkan karakteristik barang/jasa strategis.
   b. Mendorong uji coba pengadaan hijau (*green procurement*) di unit kerja strategis (sekolah, puskesmas, kantor pelayanan).
   c. Melatih pejabat pengadaan dan perencana anggaran mengenai aspek lingkungan dalam proses pemilihan penyedia.
   d. Membangun sistem evaluasi pengadaan berbasis indikator keberlanjutan dan preferensi lokal.

5. Mengembangkan sistem pelaporan dan evaluasi konsumsi-produksi berkelanjutan berbasis TPB 12.

   Intervensi diarahkan untuk membangun kerangka akuntabilitas dan *monitoring* terhadap praktik konsumsi-produksi pada level kota.

   a. Membangun sistem pelaporan aksi TPB 12 yang terintegrasi dengan sistem *e-planning* dan *e-budgeting* daerah.
   b. Mengembangkan indikator kinerja lingkungan yang dikaitkan langsung dengan program dan kegiatan OPD.
   c. Mendorong publikasi rutin capaian dan praktik baik konsumsi-produksi melalui laporan pembangunan berkelanjutan.
   d. Menyediakan ruang partisipasi warga dalam pelaporan dan penilaian kinerja konsumsi-produksi (*public feedback loop*).

7. Isu Strategis 7

Keterbatasan kapasitas kelembagaan dan operasional daerah dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan.

Sasaran:
Terbangunnya sistem pengelolaan risiko iklim yang terstruktur, konsisten, dan kolaboratif, serta diperkuat oleh integrasi lintas sektor dan peningkatan legitimasi dalam sistem aksi iklim nasional dan global.

Arah Kebijakan dan Intervensi Strategis:

1. Membangun platform koordinatif lintas sektor untuk konsolidasi kebijakan dan aksi iklim.

   Intervensi diarahkan untuk menyatukan inisiatif mitigasi dan adaptasi yang selama ini tersebar ke dalam sistem kelembagaan yang terkoordinasi dan responsif.

a. Membentuk forum koordinasi perubahan iklim tingkat kota yang melibatkan OPD teknis, akademisi, dan masyarakat sipil.
b. Menetapkan unit pengampu kebijakan iklim di bawah Bappelitbangda atau Sekretariat Daerah sebagai koordinator.
c. Menyusun strategi integrasi aksi iklim ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra OPD).
d. Mengembangkan sistem kerja bersama berbasis peta aksi mitigasi adaptasi sektoral.

2. Mengidentifikasi dan melabeli program sektoral sebagai bagian dari aksi iklim yang sahih.

   Intervensi bertujuan memastikan kegiatan sektoral yang relevan dapat masuk ke dalam pelaporan TPB 13 dan mendukung pencapaian *Nationally Determined Contribution* (NDC) nasional.

   a. Melakukan audit program sektoral terkait potensi mitigasi dan adaptasi iklim.
   b. Melabeli kegiatan OPD yang memiliki kontribusi terhadap penurunan emisi atau penguatan adaptasi.
   c. Mengintegrasikan pelabelan tersebut ke dalam sistem *e-planning* dan *e-budgeting* daerah.
   d. Menyusun pedoman internal untuk klasifikasi aksi iklim berbasis dokumen nasional dan pedoman NDC.

3. Meningkatkan kapasitas pencatatan emisi berbasis intensitas secara konsisten dan akurat.

   Intervensi diarahkan untuk mengembangkan sistem MRV (*Measurement, Reporting, Verification*) lokal berbasis data spasial dan sektoral.

   a. Menyusun *baseline* emisi GRK per sektor prioritas menggunakan pendekatan intensitas (per kapita atau per unit PDRB).
   b. Membangun sistem pelaporan emisi terintegrasi dengan sistem informasi OPD teknis (energi, limbah, transportasi, dan lain-lain).
   c. Melatih OPD teknis dalam penghitungan emisi dan pencatatan aksi pengurangan berbasis metodologi resmi.
   d. Mengintegrasikan capaian penurunan intensitas emisi ke dalam sistem pemantauan pembangunan berkelanjutan kota.

4. Memperluas akses terhadap sumber pembiayaan dan dukungan teknis untuk aksi iklim daerah.

   Intervensi difokuskan pada peningkatan kapasitas fiskal dan teknis pemerintah kota untuk mendukung program iklim.

   a. Mengidentifikasi program dan kegiatan OPD yang memenuhi kriteria pembiayaan iklim nasional/internasional.
   b. Membangun proposal program hijau berbasis hasil dan risiko sebagai bagian dari pengajuan ke mitra pembangunan.
   c. Menjalin kemitraan strategis dengan lembaga donor, CSR sektor swasta, dan pemerintah pusat untuk mendukung program adaptasi-mitigasi.
   d. Menyediakan pelatihan teknis bagi OPD dalam menyusun proposal dan mengelola pendanaan berbasis hasil.

5. Menguatkan ekosistem adaptasi iklim masyarakat dan daya lenting sosial lingkungan secara terarah.

   Intervensi diarahkan pada penguatan kemampuan komunitas dalam menghadapi tekanan iklim secara mandiri dan berkelanjutan.

   a. Menyusun peta kerentanan iklim berbasis kelurahan untuk memandu program berbasis wilayah.
   b. Mengembangkan program ketahanan komunitas berbasis pangan, air, dan perlindungan sosial adaptif.
   c. Membangun jejaring edukasi iklim lokal melalui sekolah, pesantren, dan organisasi masyarakat.
   d. Mendorong desain ulang ruang terbuka publik yang adaptif terhadap panas ekstrem dan banjir.

Dengan tersusunnya arah kebijakan dan intervensi strategis berbasis isu TPB prioritas, KLHS RPJMD Kota Ternate 2025-2029 tidak hanya memberikan kerangka konseptual, tetapi juga instrumen operasional yang dapat langsung diturunkan ke dalam perencanaan dan penganggaran lima tahunan. Setiap intervensi strategis disusun untuk membentuk kesinambungan kerja yang logis, berjenjang, dan sesuai kewenangan pemerintah kota.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya akan sangat bergantung pada konsistensi pengambilan keputusan, keterpaduan lintas sektor, serta keterlibatan aktif para pemangku kepentingan, baik dari unsur masyarakat, dunia usaha, akademisi, maupun mitra pembangunan. Dalam semangat akuntabilitas publik, arah kebijakan ini diharapkan menjadi pengikat antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan di lapangan, serta menjadi landasan kuat bagi Kota Ternate dalam membangun sistem pembangunan yang inklusif, adaptif, dan bertanggung jawab di tengah dinamika sosial-ekologis kawasan kepulauan.

3.4 PROGRAM PEMBANGUNAN

Penjabaran lebih detail dari tujuan dan sasaran tertuang dalam arah kebijakan yang terimplementasi dalam program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Ternate bertujuan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun ke depan dalam RPJMD Kota Ternate Tahun 2025-2029.

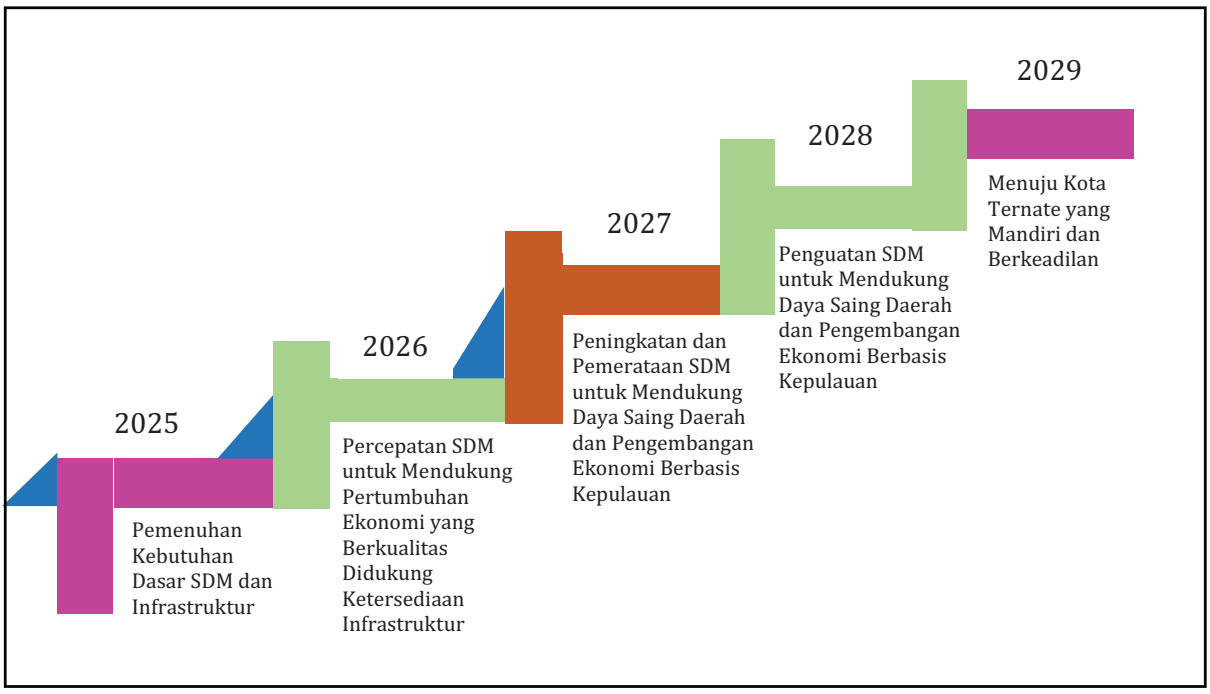
3.4.1 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Ternate Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD tahun 2025-2045, pada tahap atau periode pertama Penguatan Pondasi Transformasi. Kota Ternate diharapkan mencapai kemajuan dan kemandirian memasuki kehidupan masyarakat maju.

Adapun prioritas RPJMD untuk tahun 2025-2029, dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah:

1. Peningkatan Kelembagaan Sosial dalam Bingkai 7 Nilai Dasar Kebudayaan Ternate (*Kie Se Gam Magogugu Matiti Tomdi*).
2. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis.
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Bersih, Transparan, dan Akuntabel yang Berorientasi pada Pelayanan Publik.
5. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kepulauan.
6. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan di atas, maka dapat disimpulkan fokus pembangunan. Fokus pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kota Ternate dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahun. Penetapan fokus RPJMD Tahun 2025-2029 disajikan pada gambar berikut ini.



Sumber : Bappelitbangda Kota Ternate, 2025

Gambar 3.3 Fokus RPJMD Tahun 2025-2029

3.4.2 Program Prioritas Perangkat Daerah

Sejalan dengan pencapaian tujuan dan sasaran, program yang terdapat pada rencana strategis di masing-masing Perangkat Daerah (PD) diselaraskan dengan RPJMD Kota Ternate, yang juga mengacu pada program yang tertera pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam menjalankan rencana pembangunan diperlukan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan. Untuk memudahkan dalam koordinasi dan memandu arah pelaksanaan program dilakukan pembagian kelompok program yang membidik tujuan dan sasaran serta pencapaian target kinerja pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Ternate Tahun 2025-2029, maka disusun Program Prioritas sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
	Visi MEWUJUDKAN TERNATE YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN						
1	Menumbuh-Kembangkan Kelembagaan Sosial dalam Bingkai 7 Nilai Dasar Kebudayaan Ternate (*Kie Se Gam Magogugu Matiti Tomdi*)						
		Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Berkebudayaan Maju		Meningkatnya Kualitas Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		
			Terwujudnya Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan	Mewujudkan Kemajuan Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		
				Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	
				Meningkatnya Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
					Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan		
				Meningkatnya Tata Kelola Museum	Tingkat Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke Museum	Pengelolaan Permuseuman	
2	Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis						
		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur Kewilayahan yang Terintegrasi, Strategis dan Memiliki Daya Ungkit Ekonomi		Meratanya Infrastruktur yang Berkualitas di Seluruh Wilayah Kota Ternate	Indeks Ketimpangan		
			Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Publik	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Fasilitas dan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur		

Tabel 3.5
Program Prioritas Pembangunan Daerah (Lanjutan)

No	Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
	Visi **MEWUJUDKAN TERNATE YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN**						
				Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan	
					Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni		
				Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Program Kawasan Permukiman	
				Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
				Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
					Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob		
				Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Minum	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
				Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
				Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
			Meningkatnya Konektivitas Transportasi Publik	Peningkatan Akses Layanan Terhadap Transportasi Publik	Indeks Konektivitas		
				Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	

Tabel 3.5
Program Prioritas Pembangunan Daerah (Lanjutan)

No	Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
	Visi MEWUJUDKAN TERNATE YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN						
				Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Konektivitas Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
					Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal		
				Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Konektivitas Laut	Program Pengelolaan Pelayaran	
3	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing						
		Mewujudkan Kualitas SDM		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia		
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Tingkat Pendidikan yang Dicapai	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)		
					Harapan Lama Sekolah (tahun)		
				Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	
					Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama		
					Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD		
				Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Indeks Pemerataan Guru	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
					Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik		

Tabel 3.5
Program Prioritas Pembangunan Daerah (Lanjutan)

No	Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
	Visi **MEWUJUDKAN TERNATE YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN**						
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Tingkat Kualitas Hidup Masyarakat dan Menurunnya Tingkat Prevalensi Stunting	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)		
					Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita (%)		
				Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
					Prevalensi Stunting pada Balita		
				Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
				Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
				Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/ TFR)	Program Pengendalian Penduduk	
					Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19)		
				Meningkatkan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ *Modern Contraceptive* (mCPR)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
					Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)		
				Meningkatkan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Menwujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	

Tabel 3.5
Program Prioritas Pembangunan Daerah (Lanjutan)

No	Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
	Visi **MEWUJUDKAN TERNATE YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN**						
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Ketimpangan Gender		
					Kota Layak Anak		
				Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		
				Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Program Perlindungan Perempuan	
				Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
				Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
				Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Program Perlindungan Khusus Anak	
					Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)		
			Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Terwujudnya Tingkat Kemandirian Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		
				Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
				Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	

Tabel 3.5
Program Prioritas Pembangunan Daerah (Lanjutan)

No	Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
	Visi **MEWUJUDKAN TERNATE YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN**						
4	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Bersih, Transparan, dan Akuntabel yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik						
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Berbasis Digital		Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi		
			Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik		
					Indeks Sistem merit		
				Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Persentase Meningkatnya Kemampuan Penanganan dan Penyelamatan Terhadap Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
				Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Program Pendaftaran Penduduk	
					Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak		
				Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Program Pencatatan Sipil	
					Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
					Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
					Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
				Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	

Tabel 3.5
Program Prioritas Pembangunan Daerah (Lanjutan)

No	Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
	Visi **MEWUJUDKAN TERNATE YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN**						
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Tercapainya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	SAKIP		
					SPBE		
					Nilai MCP KPK		
					Indeks Demokrasi		
					Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah		
					Indeks Reformasi Hukum		
					Indeks Survey Penilaian Integritas		
					Rasio PAD Terhadap PDRB		
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		
				Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Informatika yang Dikembangkan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
				Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, baik yang Bersifat Anggaran ataupun Proses dan Kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
				Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
					Kapabilitas APIP Tindaklanjut Rekomendasi BPK T.A N-1		

Tabel 3.5
Program Prioritas Pembangunan Daerah (Lanjutan)

No	Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
	Visi **MEWUJUDKAN TERNATE YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN**						
				Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan Formasi	Program Kepegawaian Daerah	
				Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya		
				Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya		
				Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik		
				Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
					Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
					Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam		
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran antara Perencanaan Perangkat Daerah dengan RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah	

Tabel 3.5
Program Prioritas Pembangunan Daerah (Lanjutan)

No	Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
	Visi **MEWUJUDKAN TERNATE YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN**						
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran antara Perencanaan Perangkat Daerah dengan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran antara Perencanaan Perangkat Daerah dengan RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		
				Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
				Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
				Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan		
				Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital		

Tabel 3.5
Program Prioritas Pembangunan Daerah (Lanjutan)

No	Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
	Visi **MEWUJUDKAN TERNATE YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN**						
5	Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Yang Tangguh dan Unggul Berbasis Kepulauan						
		Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan		Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi		
					Pendapatan per Kapita		
					Indeks Gini		
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Pengolahan	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)		
				Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
				Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Usaha Pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)		
				Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
				Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	
				Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			Meningkatnya Kualitas Tenaga yang Berkompetensi dan Berdaya Saing	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		

Tabel 3.5
Program Prioritas Pembangunan Daerah (Lanjutan)

No	Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
	Visi **MEWUJUDKAN TERNATE YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN**						
				Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
				Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Program Penempatan Tenaga Kerja	
				Meningkatnya Pekerja Indonesia yang Terlindungi	Persentase Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Program Hubungan Industrial	
			Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Usaha	Tercapainya Target Nilai Investasi	Nilai Investasi		
				Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
				Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal	
				Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB		
				Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	
				Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata dan Terintegrasi	Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
				Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Nilai Barang Ekspor	Program Pengembangan Ekspor	

Tabel 3.5
Program Prioritas Pembangunan Daerah (Lanjutan)

No	Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
	Visi **MEWUJUDKAN TERNATE YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN**						
				Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
				Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
			Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan		
				Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di dalam Panti Rehabilitasi Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	
					Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di dalam Panti Rehabilitasi Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA		
					Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi/ Kab/ Kota pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar		
					Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial		
					Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial		

Tabel 3.5
Program Prioritas Pembangunan Daerah (Lanjutan)

No	Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
	Visi MEWUJUDKAN TERNATE YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN						
				Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Program Rehabilitasi Sosial	
					Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
					Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
					Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
					Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas		
					Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia		
					Indeks Peranan Sosial		
				Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
					Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi		
					Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin		
					Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar		
					Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi		
					Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan		

Tabel 3.5
Program Prioritas Pembangunan Daerah (Lanjutan)

No	Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
	Visi **MEWUJUDKAN TERNATE YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN**						
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Ketahanan Pangan	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB		
				Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
				Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
				Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	
				Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	
				Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Komoditas Peternakan dan Perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
				Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Persentase Unit Usaha Pangan asal Hewan yang Memiliki Sertifikasi Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)		
				Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluhan Pertanianyang Ditingkatkan Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Program Penyuluhan Pertanian	

Tabel 3.5
Program Prioritas Pembangunan Daerah (Lanjutan)

No	Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
	Visi MEWUJUDKAN TERNATE YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN						
				Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
				Meningkatnya Produksi Perikanan Pembudidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
				Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
6	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan, Asri dan Lestari						
		Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Daerah		Menurunnya Intensitas Emisi GRK dalam Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan	Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO_2)		
					Indeks Kota Berkelanjutan		
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Terintegrasinya Aspek Lingkungan dalam Program Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
				Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH Publik yang Dikelola Terhadap Luas RTH Publik	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	
				Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	
					Persentase Pengurangan Sampah		
					Persentase Penanganan Sampah		

Tabel 3.5
Program Prioritas Pembangunan Daerah (Lanjutan)

No	Misi	Tujuan	Sasaran	*Outcome*	Indikator	Program Prioritas	Ket
	Visi **MEWUJUDKAN TERNATE YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN**						
			Ketangguhan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Adaptasi dan Mitigasi Masyarakat dalam Menghadapi Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)		
				Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana dan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	
				Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat	Persentase Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat		
				Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana	Persentase Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana		

Sumber: Hasil Pengolahan, Bappelitbangda Kota Ternate, 2025

3.4.3 Pentahapan Agenda Prioritas Kota Ternate 2025-2029

Pentahapan agenda prioritas disusun untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan dilakukan secara sistematis, dengan mempertimbangkan urgensi isu strategis, permasalahan dan penekanan setiap tahunnya, namun tetap berkesinambungan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Pendekatan ini juga menjadi instrumen penting dalam menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sekaligus alat *monitoring* dan evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah dari tahun ke tahun.

Dengan demikian, agenda prioritas tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi wujud nyata dari semangat kolaboratif. Pentahapan Agenda Prioritas Kota Ternate tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Pentahapan Agenda Prioritas Tahun 2025**

   Tahun 2025 pada dasarnya merupakan kesinambungan dari pelaksanaan program-program sebelumnya dan mendorong capaian program yang belum tercapai. Agenda Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 ditujukan untuk "Pelestarian Cagar Budaya dan Entitas Keragaman Sosial Budaya Serta Mitigasi Kebencanaan untuk Pengembangan Ruang Kota Ternate yang Mandiri dan Berkeadilan".

2. **Pentahapan Agenda Prioritas Tahun 2026**

   Agenda Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 ditujukan untuk "Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Infrastruktur Dasar pada Wilayah BAHIM, Kemudahan dan Keadilan dalam Memperoleh Energi serta Optimalisasi Jaminan Perlindungan Pekerja Rentan".

3. **Pentahapan Agenda Prioritas Tahun 2027**

   Agenda Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 ditujukan untuk "Penguatan *City Branding* Ternate Kota Rempah dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Strategis Berbasis Kepulauan Melalui Peningkatan Daya Saing Industri Kreatif, UMKM dan IKM serta Kapasitas Penyandang Disabilitas".

4. **Pentahapan Agenda Prioritas Tahun 2028**

   Agenda Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2028 ditujukan untuk "Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat dan Konservasi Sumber Daya Air, untuk Kelestarian Lingkungan Hidup serta Penguatan Peran BUMD dan Optimalisasi Sumber Penerimaan Daerah".

5. **Pentahapan Agenda Prioritas Tahun 2029**

   Agenda Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2029 ditujukan untuk "Pengembangan Kawasan Strategis sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru, Didukung dengan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kepemudaan yang Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing".

AGENDA PRIORITAS	TAHUN				
	2025	2026	2027	2028	2029
1. Melindungi dan Melestrikan Cagar Budaya Sebagai Identitas Historis dan Jati Diri Kota Ternate 2. Menghidupkan Kembali Entitas Keragaman Sosial Budaya Sebagai Kekuatan Kohesi Sosial Masyarakat 3. Meningkatkan Literasi Kebencanaan dan Kapasitas Mitigasi Masyarakat Terhadap Risiko Bencana 4. Memperkuat Revitalisasi dan Penataan Pola Ruang Kota Berbasis Keberlanjutan dan Daya Dukung Lingkungan					
5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan ASN yang Profesional dan Akuntabel 6. Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Dasar di Wilayah Moti, Hiri, dan Batang Dua 7. Menghadirkan Kemudahan dan Keadilan Akses Energi Bagi Masyarakat Moti, Hiri, dan Batang Dua 8. Mengoptimalkan Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja dan Pekerja Rentan					
9. Memperkuat City Branding Ternate Sebagai Kota Rempah dan Mengembangkan Kawasan Ekonomi Strategis Berbasis Kepulauan Untuk Mendorong Kemandirian Ekonomi 10. Mengembangkan Iklim Usaha yang Kondusif dan Meningkatkan Daya Saing Industri Kreatif, UMKM dan IKM 11. Meningkatkan Kapabilitas Penyandang Disabilitas Melalui Pemberdayaan Ekonomi dan Kewirausahaan					
12. Meningkatkan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat dan Konservasi Sumber Daya Air 13. Menerapkan Penggunaan Material Alternatif Ramah Lingkungan Untuk Mendukung Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup 14. Merevitalisasi dan Memperkuat Peran BUMD Dalam Mendukung Pembangunan Daerah 15. Mengoptimalkan Berbagai Sumber Penerimaan Daerah Untuk Meningkatkan Kapasitas Fiskal Kota Ternate					
16. Mengembangkan Kawasan Strategis di Wilayah Utara dan Selatan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru 17. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manuasia yang Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing 18. Memperkuat Kapasitas Kepemudaan dan Kelembagaan yang Berkarakter, Berkualitas dan Berdaya Saing					

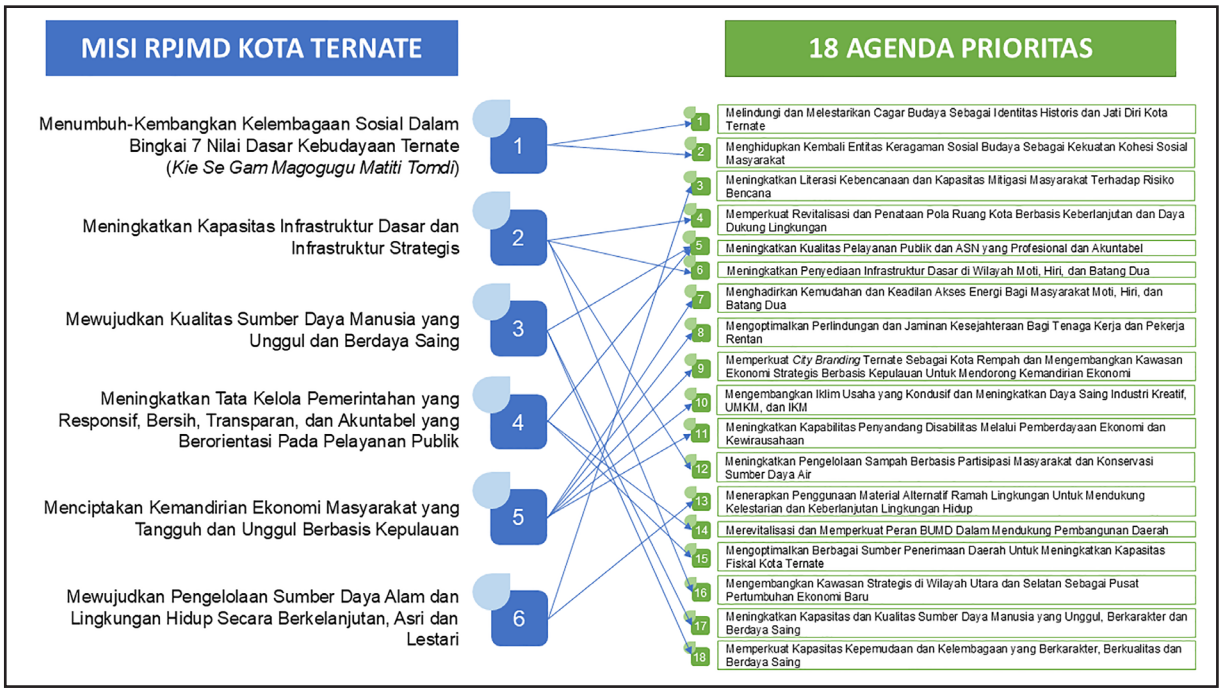
Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2025

Gambar 3.4 Pentahapan Agenda Prioritas RPJMD Kota Ternate Tahun 2025-2029

3.4.4 Implementasi Agenda Prioritas

Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat, implementasi kebijakan prioritas menjadi pijakan strategis yang harus dijalankan secara terencana, terukur, dan responsif terhadap dinamika lokal. Kebijakan prioritas bukan sekadar daftar program unggulan, melainkan representasi dari komitmen Pemerintah Kota Ternate dalam menjawab kebutuhan nyata masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta mengatasi isu-isu struktural yang menghambat percepatan pembangunan.

Dengan berfokus pada agenda prioritas, Pemerintah Kota Ternate berupaya untuk mampu mengonsolidasikan sumber daya, mempercepat capaian indikator kinerja utama, dan menciptakan perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Berikut rencana implementasi agenda prioritas.



Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2025 (data diolah)

Gambar 3.5 Keselarasan Misi RPJMD Kota Ternate dengan 18 Agenda Prioritas Kota Ternate Tahun 2025-2029

Tabel 3.6
Rencana Implementasi Agenda Prioritas Daerah Tahun 2025-2029

No	Agenda Prioritas	Deskripsi Implementasi	Program dan Kegiatan	Perangkat Daerah
1	Melindungi dan Melestarikan Cagar Budaya Sebagai Identitas Historis dan Jati Diri Kota Ternate	Perlindungan dan Pelestarian Cagar Budaya, Koordinator Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DINAS KEBUDAYAAN
			Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPELITBANGDA
			Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
2	Menghidupkan Kembali Entitas Keragaman Sosial Budaya Sebagai Kekuatan Kohesi Sosial Masyarakat	Pelestarian Budaya dan Penguatan Identitas Lokal, Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Integrasi Sosial serta Perlindungan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN
			Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	BADAN KESBANGPOL
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL
			Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/ Kota	
3	Meningkatkan Literasi Kebencanaan dan Kapasitas Mitigasi Masyarakat Terhadap Risiko Bencana	Pelayanan Kesehatan dan Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat, Penanggulangan Bencana dan Peningkatan Ketangguhan Daerah serta Penyediaan Satuan Pendidikan Aman Bencana	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
			Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	DINAS PENDIDIKAN
			Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD
			Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	

Tabel 3.6
Rencana Implementasi Agenda Prioritas Daerah Tahun 2025-2029 (Lanjutan)

No	Agenda Prioritas	Deskripsi Implementasi	Program dan Kegiatan	Perangkat Daerah
4	Memperkuat Revitalisasi dan Penataan Pola Ruang Kota Berbasis Keberlanjutan dan Daya Dukung Lingkungan	Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Fisik dan Tata Ruang, Pengelolaan Sampah dan Konservasi Lingkungan, Koordinator Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan serta Penertiban Permukiman Liar dan Pelanggaran Ruang Kota, serta Pengadaan Tanah Bagi Infrastruktur Perkotaan dan Fasilitas Layanan Dasar Sesuai Peruntukan Pemanfaatan Ruang	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPELITBANGDA
			Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
			Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	
			Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	

Tabel 3.6
Rencana Implementasi Agenda Prioritas Daerah Tahun 2025-2029 (Lanjutan)

No	Agenda Prioritas	Deskripsi Implementasi	Program dan Kegiatan	Perangkat Daerah
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DISPERKIMTAN
			Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
			Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			Kegiatan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
			Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	
			Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	
			Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
			Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH	
			Kegiatan Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah	
			PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	
			Kegiatan Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong	

Tabel 3.6
Rencana Implementasi Agenda Prioritas Daerah Tahun 2025-2029 (Lanjutan)

No	Agenda Prioritas	Deskripsi Implementasi	Program dan Kegiatan	Perangkat Daerah
5	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan ASN yang Profesional dan Akuntabel	Penyediaan Pelayanan Publik yang Memadai, Pembinaan ASN dan Pengembangan Kapasitas Aparatur, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kelembagaan, Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Pemerintahan, serta Penguatan Sistem Layanan Digital dan Integrasi Data	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DISDUKCAPIL
			Kegiatan Pelayanan pendaftaran penduduk	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Kegiatan Pelayanan Pencatatan sipil	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
			Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menengah	
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
			Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDMD
			Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
			Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	
			Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAGIAN ORGANISASI SETDA
			Kegiatan Penataan Organisasi	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DISKOMSANDI
			Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Pengelolaan *E-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

Tabel 3.6
Rencana Implementasi Agenda Prioritas Daerah Tahun 2025-2029 (Lanjutan)

No	Agenda Prioritas	Deskripsi Implementasi	Program dan Kegiatan	Perangkat Daerah
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
			Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
6	Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Dasar di Wilayah Moti, Hiri, dan Batang Dua	Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Fisik dan Tata Ruang; Pengelolaan Transportasi dan Konektivitas Wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN
			Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
			Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
			Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
			Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	

Tabel 3.6
Rencana Implementasi Agenda Prioritas Daerah Tahun 2025-2029 (Lanjutan)

No	Agenda Prioritas	Deskripsi Implementasi	Program dan Kegiatan	Perangkat Daerah
7	Menghadirkan Kemudahan dan Keadilan Akses Energi Bagi Masyarakat Moti, Hiri, dan Batang Dua	Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Akses Energi Daerah, serta Legalitas Perizinan dan Kerja Sama	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BAGIAN EKONOMI DAN SDA SETDA
			Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
			Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitasi/ Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BAGIAN KERJA SAMA SETDA
			Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN
			Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
8	Mengoptimalkan Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Bagi Tenaga Kerja dan Pekerja Rentan	Pelindung Kelompok Rentan dan Kesejahteraan Sosial, Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, Perlindungan Korban *Trafficking* dan Pekerja Rentan Berbasis Gender	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL
			Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/ Kota	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
			Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA
			Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
9	Memperkuat *City Branding* Ternate Sebagai Kota Rempah dan Mengembangkan Kawasan Ekonomi Strategis Berbasis Kepulauan Untuk Mendorong Kemandirian Ekonomi	Pengembangan Pariwisata Daerah dan Ekonomi Kreatif, Pengembangan UMKM, IKM, dan Sektor Perdagangan, Koordinator Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan; Promosi dan Pengelolaan *Geopark* Sebagai Destinasi Edukatif dan Konservatif	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINAS PARIWISATA
			Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
			Kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/ Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	

Tabel 3.6
Rencana Implementasi Agenda Prioritas Daerah Tahun 2025-2029 (Lanjutan)

No	Agenda Prioritas	Deskripsi Implementasi	Program dan Kegiatan	Perangkat Daerah
10	Mengembangkan Iklim Usaha yang Kondusif dan Meningkatkan Daya Saing Industri Kreatif, UMKM, dan IKM	Pengembangan UMKM, IKM, dan Sektor Perdagangan, Fasilitator Ekonomi Rakyat dan Kewirausahaan, Fasilitasi Legalitas Usaha dan Mendorong Industri Kreatif	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
			Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DINAS KOPERASI DAN UMKM
			Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINAS PARIWISATA
			Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
11	Meningkatkan Kapabilitas Penyandang Disabilitas Melalui Pemberdayaan Ekonomi dan Kewirausahaan	Fasilitator Ekonomi Rakyat dan Kewirausahaan, Penjamin Pengarusutamaan Gender, Fasilitator Inklusi Sosial Berbasis Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Difabel	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
			Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
			Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL
			Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DINAS KOPERASI DAN UMKM
			Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA
			Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	

Tabel 3.6
Rencana Implementasi Agenda Prioritas Daerah Tahun 2025-2029 (Lanjutan)

No	Agenda Prioritas	Deskripsi Implementasi	Program dan Kegiatan	Perangkat Daerah
12	Meningkatkan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat dan Konservasi Sumber Daya Air	Pengelolaan Sampah dan Konservasi Lingkungan; Konservasi Air Tanah dan Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik; Operasional Pengelolaan Persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
			Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3	
			Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Kegiatan Pengelolaan Sampah	
13	Menerapkan Penggunaan Material Alternatif Ramah Lingkungan untuk Mendukung Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup	Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Fisik dan Tata Ruang; Konservasi Lingkungan Hidup	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
			Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
14	Merevitalisasi dan Memperkuat Peran BUMD Dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Koordinator Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan; Layanan Publik dan Penggerak Ekonomi Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPELITBANGDA
			Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Kegiatan Pelayanan/Distribusi/Layanan Pengaduan	BUMD
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BAGIAN EKONOMI DAN SDA SETDA
			Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BAGIAN KERJA SAMA SETDA
			Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
15	Mengoptimalkan Berbagai Sumber Penerimaan Daerah Untuk Meningkatkan Kapasitas Fiskal Kota Ternate	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	PROGRAM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	BPKAD
			Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BP2RD
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

Tabel 3.6
Rencana Implementasi Agenda Prioritas Daerah Tahun 2025-2029 (Lanjutan)

No	Agenda Prioritas	Deskripsi Implementasi	Program dan Kegiatan	Perangkat Daerah
16	Mengembangkan Kawasan Strategis di Wilayah Utara dan Selatan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Fisik dan Tata Ruang; Pengembangan UMKM, IKM, dan Sektor Perdagangan; Koordinator Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
17	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing	Pengembangan Pendidikan Dasar dan Peningkatan Kualitas SDM serta Pendidikan Karakter, Pembinaan ASN dan Pengembangan Kapasitas Aparatur	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
			Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	DINAS KEBUDAYAAN
			Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM
			Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	
			Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
18	Memperkuat Kapasitas Kepemudaan dan Kelembagaan yang Berkarakter, Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Kapasitas Pemuda dan Kegiatan Olahraga, Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Kelembagaan Sosial	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
			Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
			Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	KESBANGPOL
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	

Sumber: Hasil Pengolahan, Bappelitbangda Kota Ternate, 2025

3.4.5 Dukungan Program RPJMD Kota Ternate terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

Pemerintah Kota Ternate terus berupaya menghadirkan tata kelola pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Untuk itu, dalam penyusunan dan pelaksanaan RPJMD, Pemerintah Kota Ternate memberikan dukungan penuh terhadap pendekatan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sebagai salah satu strategi untuk mempercepat capaian pembangunan daerah.

Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) merupakan pendekatan inovatif yang menekankan pentingnya hasil (*outcome*) yang nyata, terukur, dan dirasakan langsung oleh masyarakat dalam waktu yang lebih cepat. Pendekatan ini sejalan dengan semangat RPJMD Kota Ternate yang mengedepankan pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat, percepatan pelayanan dasar, serta penguatan peran aktif perangkat daerah dalam mengawal pencapaian target-target pembangunan.

Melalui dukungan terhadap pendekatan PHTC, Pemerintah Kota Ternate menegaskan komitmennya untuk mendorong transformasi cara kerja birokrasi menuju model pembangunan yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi hasil, maka disusun dukungan program RPJMD Kota Ternate terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7
Dukungan Program RPJMD Kota Ternate terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

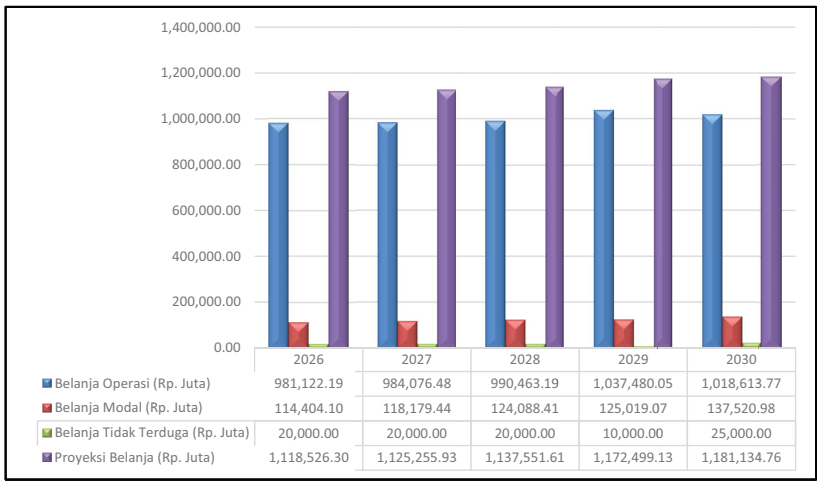
No	Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/ *Quick Wins* RPJMN	Program RPJMD
1	Memberi Makan Siang dan Susu Gratis di Sekolah dan Pesantren, serta Bantuan Gizi untuk Anak Balita dan Ibu Hamil	Program Penanganan Kerawanan Pangan
		Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2	Menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Menuntaskan Kasus TBC, dan Membangun Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
3	Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian, dengan Lumbung Pangan Desa, Daerah, dan Nasional	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4	Membangun Sekolah-Sekolah Unggul Terintegrasi di Setiap Kabupaten, serta Memperbaiki Sekolah-Sekolah yang Rusak	Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5	Menambah dan Memberikan Program Kartu-Kartu Kesejahteraan serta Memastikan Bantuan Sosial Tepat Sasaran	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Program Hubungan Industrial
6	Menaikkan Gaji ASN (TNI/Polri, Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh), serta Pensiunan dan Menghilangkan Kemiskinan Ekstrem	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
		Program Penanganan Kerawanan Pangan
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Program Pemberdayaan Sosial
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Pengembangan UMKM
7	Membangun dan Melanjutkan Infrastruktur Desa dan Kota, Termasuk Infrastruktur Transportasi, Teknologi, dan Perumahan Murah Bersubsidi Bagi Masyarakat Miskin, Generasi Muda, serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
8	Menambah Rasio Penerimaan Negara dan Meningkatkan Rasio Penerimaan Negara Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sumber: Hasil Pengolahan, Bappelitbangda Kota Ternate, 2025

BAB 4
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 KERANGKA PENDANAAN

Berdasarkan gambaran keuangan daerah yang dijelaskan dalam Bab II, proyeksi belanja tahun 2026-2030 ditunjukkan dalam Grafik 4.1 berikut.



	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Operasi (Rp. Juta)	981,122.19	984,076.48	990,463.19	1,037,480.05	1,018,613.77
Belanja Modal (Rp. Juta)	114,404.10	118,179.44	124,088.41	125,019.07	137,520.98
Belanja Tidak Terduga (Rp. Juta)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	25,000.00
Proyeksi Belanja (Rp. Juta)	1,118,526.30	1,125,255.93	1,137,551.61	1,172,499.13	1,181,134.76

Sumber: BPKAD dan BP2RD Kota Ternate, 2025

Grafik 4.1
Proyeksi Belanja Kota Ternate Tahun 2026-2030

4.2 AGENDA PRIORITAS

Agenda prioritas Walikota ditetapkan sesuai dengan janji Walikota dan Wakil Walikota selama kampanye pemilihan Kepala Daerah, merupakan kebijakan umum pembangunan daerah, yang bertujuan agar program-program pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih dapat diimplementasikan di lapangan. Oleh karena itu, agenda prioritas sejalan dan saling melengkapi dengan rumusan arah kebijakan sebagai penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan, agenda prioritas disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun rumusan kebijakan umum yang akan ditempuh untuk memenuhi janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2021-2026, dalam upaya mencapai Visi dan Misi serta untuk menjawab masalah daerah atau isu strategis Kota Ternate 5 (lima) tahun ke depan, dirumuskan 18 agenda prioritas, sebagai berikut:

1. Melindungi dan melestarikan cagar budaya sebagai identitas historis dan jati diri Kota Ternate.
2. Menghidupkan kembali entitas keragaman sosial budaya sebagai kekuatan kohesi sosial masyarakat.
3. Meningkatkan literasi kebencanaan dan kapasitas mitigasi masyarakat terhadap risiko bencana.
4. Memperkuat revitalisasi dan penataan pola ruang kota berbasis keberlanjutan dan daya dukung lingkungan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan ASN yang profesional dan akuntabel.
6. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar di wilayah Moti, Hiri, dan Batang Dua.
7. Menghadirkan kemudahan dan keadilan akses energi bagi masyarakat Moti, Hiri, dan Batang Dua.
8. Mengoptimalkan perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan pekerja rentan.
9. Memperkuat *city branding* Ternate sebagai kota rempah dan mengembangkan kawasan ekonomi strategis berbasis kepulauan untuk mendorong kemandirian ekonomi.
10. Mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan daya saing industri kreatif, UMKM, dan IKM.
11. Meningkatkan kapabilitas penyandang disabilitas melalui pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan.
12. Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat dan konservasi sumber daya air.
13. Menerapkan penggunaan material alternatif ramah lingkungan untuk mendukung kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.
14. Merevitalisasi dan memperkuat peran BUMD dalam mendukung pembangunan daerah.
15. Mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal Kota Ternate.
16. Mengembangkan kawasan strategis di wilayah utara dan selatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
17. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berkarakter dan berdaya saing.
18. Memperkuat kapasitas kepemudaan dan kelembagaan yang berkarakter, berkualitas dan berdaya saing.

4.3 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Indikasi rencana program dalam RPJMD Kota Ternate Tahun 2025-2029 merupakan rencana program pembangunan daerah yang menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah dan program perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis perangkat daerah. Secara keseluruhan, jumlah program yang akan dijalankan selama periode 5 (lima) tahun mendatang mencapai 175 program, yang terbagi ke dalam 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan 38 program, 17 (tujuh belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan 82 program, 5 (lima) urusan pilihan dengan 24 program, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan dengan 5 program, 4 (empat) unsur penunjang urusan pemerintahan dengan 11 program, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan dengan 3 program, 1 (satu) unsur kewilayahan dengan 6 program, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum dengan 6 program. Program-program tersebut dirancang tidak hanya untuk mencapai target pembangunan jangka menengah daerah, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pemerintah Kota Ternate memberikan dukungan penuh terhadap hasil identifikasi 83 kegiatan prioritas dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang akan dilaksanakan di Kota Ternate. Dukungan ini merupakan wujud nyata komitmen daerah dalam menyelaraskan arah kebijakan dan program pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah. Seluruh kegiatan prioritas tersebut menjadi pedoman penting bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana program dan kegiatan, sehingga setiap langkah pembangunan di Kota Ternate dapat berjalan seiring dengan target pembangunan nasional.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Pemerintah Kota Ternate memastikan bahwa hasil identifikasi kegiatan prioritas tersebut akan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik pada RPJMD maupun RKPD tahunan. Penyelarasan ini tidak hanya menjamin konsistensi arah kebijakan, tetapi juga memperkuat efektivitas pelaksanaan program di lapangan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan dukungan terhadap 83 Kegiatan Prioritas RPJMN tersebut, Kota Ternate bertekad untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional sekaligus mewujudkan visi pembangunan daerah yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan masyarakat.

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Urusan Pendidikan memiliki tujuan meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah, dengan indikator (1) Skor Literasi/Numerasi; (2) Harapan Lama Sekolah; dan (3) Rata-Rata Lama Sekolah. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah indikator yang akan dicapai yaitu (1) Nilai SAKIP; dan (2) Indeks Kepuasan Masyarakat.

2) Program Pengelolaan Pendidikan

Outcome: Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah. Indikator yang akan dicapai yaitu: (1) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun berpartisipasi dalam pendidikan dasar; (2) Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama; (3) Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun berpartisipasi dalam pendidikan PAUD; (4) Pemerataan distribusi guru sesuai kebutuhan sekolah; (5) Angka partisipasi kasar SD; (6) Angka partisipasi kasar SMP; (7) Angka partisipasi murni SD; (8) Angka partisipasi murni SMP; (9) A.1 Skor kemampuan literasi (SD); (10) A.1 Skor kemampuan literasi (SMP); (11) A.2 Skor kemampuan numerasi (SD); (12) A.2 Skor kemampuan numerasi (SMP); (13) B.10 Angka Partisipasi Sekolah(APS) 5-6 (PAUD); (14) B.13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 15 (SD/SMP); (15) B.15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan; (16) B.8 Proporsi jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B; (17) C.1 Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4; (18) D.10 Iklim inklusivitas (SD); (19) D.10 Iklim inklusivitas (SMP); (20) D.4 Iklim keamanan (SD); (21) D.4 Iklim Keamanan (SMP); (22) D.8 Iklim Kebhinekaan (SD); dan (23) D.8 Iklim Kebhinekaan (SMP).

3) Program Pengembangan Kurikulum

Outcome: Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal.

4) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Outcome: Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan. indikator yang akan dicapai yaitu: (1) Persentase pendidik pada jenjang pendidikan anak usia dini yang memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau S1 atau memiliki sertifikat; (2) Persentase pendidik pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar yang memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau S1 atau memiliki sertifikat; dan (3) Persentase pendidik pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau S1 atau memiliki sertifikat.

5) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Outcome: Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbarui.

6) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Outcome: Terlestarinya bahasa dan sastra daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pengembangan bahasa dan sastra.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Urusan Kesehatan memiliki tujuan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator (1) Umur harapan hidup; dan (2) Indeks Keluarga Sehat (IKS). Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu (1) Nilai SAKIP; (2) Indeks kepuasan masyarakat.

2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Outcome: Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu: (1) Angka kematian ibu (Per 100.000 kelahiran hidup); dan (2) Prevalensi stunting pada balita.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Outcome: Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan.

4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Outcome: Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.

5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Outcome: Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. indikator yang akan dicapai yaitu persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan.

6) Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan
Outcome: Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tujuan meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas, dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI). Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu nilai SAKIP.

2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Outcome: Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir. Indikator yang akan dicapai yaitu: (1) Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir; dan (2) Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob.

3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Outcome: Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penduduk berakses air minum.

4) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Outcome: Meningkatnya layanan persampahan regional. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST regional.

5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Outcome: Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman).

6) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Outcome: Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase cakupan drainase dalam kondisi baik.

7) Program Penataan Bangunan Gedung

Outcome: Meningkatnya kualitas bangunan gedung. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase bangunan gedung dalam kondisi baik.

8) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Outcome: Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata. Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah capaian program penataan bangunan dan lingkungan.

9) Program Penyelenggaraan Jalan

Outcome: Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman. Indikator yang akan dicapai yaitu tingkat kemantapan jalan.

10) Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Outcome: Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli.

11) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki tujuan terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, dengan indikator persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu nilai SAKIP.

2) Program Pengembangan Perumahan

Outcome: Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.

3) Program Kawasan Permukiman

Outcome: Meningkatnya kualitas kawasan permukiman. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase luas kawasan kumuh 10-15 ha yang ditangani.

4) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Outcome: Meningkatnya perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani.

5) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Outcome: Meningkatnya penyediaan PSU permukiman. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum).

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat memiliki tujuan meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat, dengan indikator indeks penyelenggaraan trantibumlinmas. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu nilai SAKIP.

2) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Outcome: (1) Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada; (2) Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; (3) Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat; dan (4) Meningkatnya kapasitas SDM PPNS. Indikator

yang akan dicapai yaitu: (1) Persentase perda dan perkada yang ditegakkan; (2) Persentase penyelenggaraan tibumtranmas; (3) Persentase cakupan perlindungan masyarakat; dan (4) Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya.

3) Program Penanggulangan Bencana

Outcome: (1) Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; (2) Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat; dan (3) Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana. Indikator yang akan dicapai yaitu: (1) Persentase layanan informasi rawan bencana dan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana; (2) Persentase penanganan bencana pada saat tanggap darurat; dan (3) Persentase penanganan pada saat pasca bencana.

4) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Outcome: (1) Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran. Indikator yang akan dicapai yaitu: (1) Persentase meningkatnya kemampuan penanganan dan penyelamatan terhadap bencana kebakaran dan non kebakaran; (2) Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran; (3) Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran; dan (4) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kebakaran dalam kondisi baik.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan Sosial memiliki tujuan meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusif, dengan indikator indeks kesejahteraan sosial. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu (1) Nilai SAKIP; dan (2) Indeks kepuasan masyarakat.

2) Program Pemberdayaan Sosial

Outcome: Meningkatnya pemberdayaan sosial. Indikator yang akan dicapai yaitu: (1) Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial; (2) Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA; (3) Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar; dan (4) Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial.

3) Program Rehabilitasi Sosial

Outcome: Meningkatnya rehabilitasi sosial. Indikator yang akan dicapai yaitu: (1) Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya; (2) Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya; (3) Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya; dan (4) Persentase gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Outcome: Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial. Indikator yang akan dicapai yaitu: (1) Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya; (2) Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin; dan (3) Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan.

5) Program Penanganan Bencana

Outcome: Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana. Indikator yang akan dicapai yaitu: (1) Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana; (2) Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya; dan (3) Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial.

6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Outcome: Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja memiliki tujuan meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja, dengan indikator tingkat produktivitas tenaga kerja. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu nilai SAKIP.

2) Program Perencanaan Tenaga Kerja

Outcome: Terkelolanya informasi tenaga kerja. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penyusunan rencana tenaga kerja.

3) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Outcome: Meningkatnya produktivitas tenaga kerja. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya.

4) Program Penempatan Tenaga Kerja

Outcome: Meningkatnya penempatan tenaga kerja. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri.

5) Program Hubungan Industrial

Outcome: Meningkatnya pekerja indonesia yang terlindungi. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tujuan meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, dengan indikator (1) Indeks Pembangunan Gender (IPG); (2) Indeks Ketimpangan Gender; dan (3) Indeks Perlindungan Anak (IPA). Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu nilai SAKIP.

2) Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Outcome: Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan. Indikator yang akan dicapai yaitu: (1) Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG); dan (2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan.

3) Program Perlindungan Perempuan

Outcome: Menurunnya kekerasan terhadap perempuan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif.

4) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Outcome: Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak. Indikator yang akan dicapai yaitu pembelajaran keluarga (PUSPAGA) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar.

5) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Outcome: Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak. Indikator yang akan dicapai yaitu tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan.

6) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Outcome: Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif. Indikator yang akan dicapai yaitu Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA).

7) Program Perlindungan Khusus Anak

Outcome: Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak. Indikator yang akan dicapai yaitu: (1) Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif; dan (2) Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA).

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Urusan Pangan memiliki tujuan meningkatnya ketersediaan dan cadangan yang berkualitas dan terjangkau, dengan indikator indeks ketahanan pangan. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu nilai SAKIP.

2) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Outcome: Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase jumlah cadangan pangan.

3) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Outcome: Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. indikator yang akan dicapai yaitu (1) Skor pola pangan harapan konsumsi; (2) Skor pola pangan harapan ketersediaan; dan (3) Persentase Koefisien variasi (Cv) pangan strategis (beras).

4) Program Penanganan Kerawanan Pangan

Outcome: Meningkatnya penanganan kerawanan pangan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase daerah rentan rawan pangan.

5) Program Pengawasan Keamanan Pangan

Outcome: Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan Pertanahan memiliki tujuan terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dengan indikator indeks tertib administrasi pertanahan. program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Outcome: Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselesaikan tepat waktu.

2) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Outcome: Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.

3) Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Outcome: Meningkatnya persentase penerima tanah (subjek) dan bidang tanah yang akan didistribusikan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase tanah yang siap didistribusikan.

4) Program Pengelolaan Tanah Kosong

Outcome: Meningkatnya pengelolaan tanah kosong. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase tanah kosong yang dikelola.

5) Program Penatagunaan Tanah

Outcome: Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase luas lokasi konsolidasi tanah.

6) Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah

Outcome: Meningkatnya kejelasan hak tanah bagi pemerintah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kejelasan hak milik atas tanah.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup memiliki tujuan terwujudnya kualitas lingkungan hidup, dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu nilai SAKIP.

2) Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Outcome: Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

3) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Outcome: Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

4) Program Pengelola Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Outcome: Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase RTH publik.

5) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Outcome: Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3). Indikator yang akan dicapai yaitu persentase limbah B3 yang terkelola.

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Outcome: Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan. Indikator yang akan dicapai yaitu tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH.

7) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

Outcome: Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya.

8) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Outcome: Meningkatnya kapasitas masyarakat di bidang lingkungan hidup. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya.

9) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Outcome: Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

10) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Outcome: Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup.

11) Program Pengelolaan Persampahan

Outcome: Meningkatnya tata kelola persampahan. Indikator yang akan dicapai yaitu: (1) Indeks kinerja pengelolaan sampah; (2) Persentase pengurangan sampah; dan (3) Persentase penanganan sampah.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tujuan terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu nilai SAKIP.

2) Program Pendaftaran Penduduk

Outcome: Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk. Indikator yang akan dicapai yaitu: (1) Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital; dan (2) Persentase kepemilikan kartu identitas anak.

3) Program Pencatatan Sipil

Outcome: Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil. indikator yang akan dicapai yaitu: (1) Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan; (2) Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan; (3) Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan; dan (4) Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan.

4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Outcome: Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan.

5) Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Outcome: Meningkatnya kualitas profil kependudukan. Indikator yang akan dicapai yaitu cakupan pengelolaan profil kependudukan.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki tujuan terwujudnya keluarga yang berkualitas, dengan indikator indeks pembangunan keluarga (ibangga). Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu nilai SAKIP.

2) Program Pengendalian Penduduk

Outcome: Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk. Indikator yang akan dicapai yaitu: (1) Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/TFR); dan (2) Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19).

3) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Outcome: Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB). Indikator yang akan dicapai yaitu: (1) Angka prevalensi konstrasepsi Modern/*Modern Contraceptive* (mCPR); dan (2) Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*).

4) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Outcome: Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS). Indikator yang akan dicapai yaitu persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan Perhubungan memiliki tujuan terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau, dengan indikator rasio konektivitas. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu nilai SAKIP.

2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Outcome: Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat. Indikator yang akan dicapai yaitu: (1). Persentase konektivitas darat; (2) Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal; dan (3) Tingkat LOS (*Level of Service*).

3) Program Pengelolaan Pelayaran

Outcome: Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase konektivitas laut.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika memiliki tujuan terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital, dengan indikator nilai indeks transformasi digital pilar pemerintah. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu nilai SAKIP.

2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Outcome: Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (Survei).

3) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Outcome: Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase aplikasi informatika yang dikembangkan.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki tujuan meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian, dengan indikator kontribusi UMKM terhadap PDRB. program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu nilai SAKIP.

2) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Outcome: Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam. Indikator yang akan dicapai yaitu pertumbuhan volume usaha koperasi.

3) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Outcome: Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi.

4) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Outcome: Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase koperasi aktif.

5) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Outcome: Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan.

6) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Outcome: Meningkatnya produktivitas koperasi. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas.

7) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Outcome: Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri. Indikator yang akan dicapai yaitu pertumbuhan wirausaha.

8) Program Pengembangan UMKM

Outcome: Meningkatnya daya saing UMKM. Indikator yang akan dicapai yaitu proporsi UMKM menjalin kemitraan dan ekspor.

9) Program Penguatan Badan Hukum Koperasi

Outcome: Meningkatnya legalitas koperasi. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal memiliki tujuan terwujudnya iklim investasi yang kompetitif, dengan indikator persentase peningkatan investasi. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu nilai SAKIP.

2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Outcome: Meningkatnya kemudahan berinvestasi. Indikator yang akan dicapai yaitu realisasi total terhadap target investasi.

3) Program Promosi Penanaman Modal

Outcome: Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase peningkatan investor yang berinvestasi.

4) Program Pelayanan Penanaman Modal

Outcome: Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan.

5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Outcome: Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha.

6) Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Outcome: Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal.

7) Program Kerja Sama Penanaman Modal

Outcome: Meningkatnya efektivitas kerja sama penanaman modal. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kerja sama penanaman modal yang ditindaklanjuti.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga memiliki tujuan meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga, dengan indikator (1) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP); dan (2) Indeks partisipasi olahraga. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu nilai SAKIP.

2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Outcome: Meningkatnya daya saing kepemudaan. Indikator yang akan dicapai yaitu rasio wirausaha pemuda.

3) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Outcome: Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase atlet yang masuk pelatnas.

4) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Outcome: Meningkatnya kualitas kepramukaan. Indikator yang akan dicapai yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan Statistik memiliki tujuan terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan, dengan tujuan Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Outcome: Tercapainya kolaborasi integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN). Indikator yang akan dicapai yaitu Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

14. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan Persandian memiliki tujuan meningkatnya keamanan informasi dengan indikator indeks SPBE (terkait keamanan). Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Outcome: Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Urusan Kebudayaan memiliki tujuan terwujudnya berkebudayaan maju, dengan indikator indeks pembangunan kebudayaan. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu nilai SAKIP.

2) Program Pengembangan Kebudayaan

Outcome: Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan. Indikator yang akan dicapai yaitu tingkat Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan.

3) Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Outcome: Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan.

4) Program Pembinaan Sejarah

Outcome: Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah. Indikator yang akan dicapai yaitu tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal.

5) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Outcome: Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan. Indikator yang akan dicapai yaitu: (1) Persentase warisan budaya yang dilestarikan; dan (2) Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan.

6) Program Pengelolaan Permuseuman

Outcome: Meningkatnya tata kelola museum. Indikator yang akan dicapai yaitu tingkat pertumbuhan kunjungan wisatawan ke museum.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan Perpustakaan memiliki tujuan meningkatnya literasi masyarakat, dengan indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu: (1) Nilai SAKIP; dan (2) Indeks kepuasan masyarakat.

2) Program Pembinaan Perpustakaan

Outcome: Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan. Indikator yang akan dicapai yaitu nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat.

3) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Outcome: Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Urusan Kearsipan memiliki tujuan meningkatnya tata kelola arsip, dengan indikator indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkup pemerintah daerah. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Arsip

Outcome: Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis. Indikator yang akan dicapai yaitu tingkat ketersediaan arsip.

2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Outcome: Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan ARSIP.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan memiliki tujuan meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan, dengan indikator (1) Nilai tukar nelayan; dan (2) Nilai tukar pembudidaya perikanan (NTPI). Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu nilai SAKIP.

2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Outcome: Meningkatnya produksi perikanan tangkap. Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah produksi perikanan tangkap.

3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Outcome: Meningkatnya produksi perikanan pembudidaya. Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah produksi perikanan budaya.

4) Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Outcome: Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah konsumsi ikan oleh masyarakat.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Urusan Pariwisata memiliki tujuan meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan indikator rasio PDRB penyediaan akomodasi, makan, minum. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu nilai SAKIP.

2) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Outcome: Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata. Indikator yang akan dicapai yaitu: (1) Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan; dan (2) Jumlah tempat wisata yang dikembangkan dan dilestarikan.

3) Program Pemasaran Pariwisata

Outcome: Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase peningkatan media pemasaran pariwisata.

4) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Outcome: Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual.

5) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Outcome: Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Urusan Pertanian memiliki tujuan meningkatnya kesejahteraan petani, dengan indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu nilai SAKIP.

2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Outcome: Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, komoditas peternakan dan perkebunan.

3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Outcome: Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B.

4) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Outcome: Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Indikator yang akan dicapai yaitu: (1) Tingkat pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS); dan (2) Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikasi pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner).

5) Program Penyuluhan Pertanian

Outcome: Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluhan pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu: (1) Persentase SDM penyuluhan pertanian yang ditingkatkan; dan (2) Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Urusan Perdagangan memiliki tujuan meningkatnya nilai tambah perdagangan, dengan indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu nilai SAKIP.

2) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Outcome: Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi.

3) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Outcome: Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya.

4) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Outcome: Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

5) Program Pengembangan Ekspor

Outcome: Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang.

6) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Outcome: Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penanganan pengaduan konsumen.

7) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri

Outcome: Meningkatnya Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Urusan Perindustrian memiliki tujuan meningkatnya daya saing industri, dengan indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Outcome: Meningkatnya realisasi pembangunan industri. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri.

2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Outcome: Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase izin usaha industri yang diterbitkan.

3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Outcome: Meningkatnya pemanfaatan informasi industri. Indikator yang akan dicapai yaitu tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Urusan Sekretariat Daerah memiliki tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, dengan indikator indeks reformasi birokrasi. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu nilai SAKIP.

2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Outcome: Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat. Indikator yang akan dicapai yaitu: (1) Dokumen LPPD; (2) Jumlah fasilitasi bantuan sosial dan keagamaan; dan (3) Jumlah perkada yang diterbitkan.

3) Program Perekonomian dan Pembangunan

Outcome: Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomi dan pembangunan. Indikator yang akan dicapai yaitu: (1) Dokumen TPID; (2) Dokumen *monitoring* dan pengendalian; dan (3) Indeks tata kelola pengadaan.

2. Sekretariat DPRD

Urusan Sekretariat DPRD memiliki tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dengan indikator tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu nilai SAKIP.

2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Outcome: (1) Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan; dan (2) Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan. Indikator yang akan dicapai yaitu: (1) Ketepatan penetapan perda APBD tahun N; dan (2) Persentase penetapan RANPERDA tahun N; serta (3) Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Urusan Perencanaan memiliki tujuan meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator indeks perencanaan pembangunan daerah. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu nilai SAKIP.

2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Outcome: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu: (1) Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; (2) Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam; dan (3) Persentase capaian kinerja program pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan.

3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Outcome: (1) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; (2) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan (3) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA. indikator yang akan dicapai yaitu: (1) Persentase keselarasan target kinerja dan anggaran antara perencanaan perangkat daerah dengan RPJMD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; (2) Persentase keselarasan target kinerja dan anggaran antara perencanaan perangkat daerah dengan RPJMD bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam); dan (3) persentase keselarasan target kinerja dan anggaran antara perencanaan perangkat daerah dengan RPJMD bidang infrastruktur dan kewilayahan.

2. Keuangan

Urusan Keuangan memiliki tujuan terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel, dengan indikator opini BPK atas laporan keuangan. program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu nilai SAKIP.

2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Outcome: (1) Meningkatnya tata kelola anggaran; (2) Meningkatnya tata kelola perbendaharaan; dan (3) Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan. Indikator yang akan dicapai yaitu: (1) Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik; (2) Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar; dan (3) Persentase laporan keuangan tepat waktu.

3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Outcome: Meningkatnya tata kelola aset daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penambahan nilai aset tetap.

4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Outcome: (1) Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan; dan (2) Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan. Indikator yang akan dicapai yaitu: (1) Realisasi penerimaan pajak daerah; (2) Realisasi penerimaan retribusi daerah; dan (3) Menurunnya piutang pajak daerah; serta (4) Nilai survei kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan pajak daerah (IKM).

3. Kepegawaian

Urusan Kepegawaian memiliki tujuan terwujudnya profesionalisme ASN, dengan indikator indeks profesionalitas ASN. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu nilai SAKIP.

2) Program Kepegawaian Daerah

Outcome: (1) Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian; (2) Meningkatnya pengembangan kompetensi asn; (3) Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN; dan (4) Meningkatnya kualitas penilaian kinerja asn. Indikator yang akan dicapai yaitu: (1) Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi; (2) Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya; (3) Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya; dan (4) Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik.

4. Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penelitian dan Pengembangan memiliki tujuan meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah, dengan indikator persentase kebijakan berbasis bukti. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Outcome: Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.

2) Program Riset dan Inovasi Daerah

Outcome: Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah.

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

Urusan Inspektorat Daerah memiliki tujuan meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan indikator maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu nilai SAKIP.

2) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Outcome: Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran atapun proses dan kewenangan. Indikator yang akan dicapai yaitu: (1) Tindaklanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1; dan (2) Tindaklanjut rekomendasi inspektorat.

3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Outcome: Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi. Indikator yang akan dicapai yaitu kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) tindaklanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1.

G. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu nilai SAKIP.

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Outcome: Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase masyarakat yang dilayani.

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Outcome: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kelurahan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase usulan masyarakat yang disetujui.

4) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Outcome: Meningkatnya harmonisasi hubungan antar masyarakat dan terpeliharanya situasi kondusif dalam wilayah kecamatan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase konflik yang diselesaikan.

5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Outcome: Meningkatnya capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam forum-forum pemerintahan.

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Outcome: Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan. Indikator yang akan dicapai yaitu tingkat keaktifan perangkat kelurahan.

H. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tujuan terwujudnya kehidupan masyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan HAM, dengan indikator (1) Indeks demokrasi Indonesia; dan (2) Indeks harmoni indonesia. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu nilai SAKIP.

2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Outcome: Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Indikator yang akan dicapai yaitu cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.

3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Outcome: Meningkatnya etika dan budaya politik. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pendidikan politik pada kader partai politik.

4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Outcome: Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif.

5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Outcome: Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan.

6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Outcome: Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase konflik sosial yang diselesaikan.

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
01	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**554.128.410.689**		**575.018.100.000**		**574.736.144.469**		**577.566.144.469**		**580.291.144.469**		**588.321.144.469**	
01.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**270.266.763.320**		**276.000.000.000**		**276.100.000.000**		**276.200.000.000**		**276.300.000.000**		**277.800.000.000**	**Dinas Pendidikan**
01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	B	203.588.527.469	B	215.960.148.800	BB	203.321.119.899	BB	206.960.567.945	BB	214.162.795.710	BB	214.998.030.613	Dinas Pendidikan
		Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B		B		BB		BB		BB		BB		
01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN															
Outcome	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 tahun berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	108,69 %	108,72 %	65.928.235.851	108,75 %	59.539.851.200	108,78 %	71.135.437.527	108,81 %	67.495.211.859	108,84 %	60.391.445.231	108,88 %	61.006.031.868	Dinas Pendidikan
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 tahun berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	107,48 %	107,52 %		107,55 %		107,58 %		107,62 %		107,65 %		107,68 %		
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 tahun berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	79,16 %	82,20 %		85,17 %		88,14 %		91,11 %		93,65 %		96,20 %		
		Pemerataan Distribusi Guru sesuai Kebutuhan Sekolah	20	20		30		40		60		80		100		
		Angka Partisipasi Kasar SD	108,69	108,72		108,75		108,78		108,81		108,84		108,88		
		Angka Partisipasi Kasar SMP	107,48	107,52		107,55		107,58		107,62		107,65		107,68		
		Angka Partisipasi Murni SD	98,01	100		100		100		100		100		100		
		Angka Partisipasi Murni SMP	81,08	100		100		100		100		100		100		
		A.1 Skor Kemampuan Literasi (SD)	48,75	51,25		53,75		56,25		58,75		61,25		63,75		
		A.1 Skor Kemampuan Literasi (SMP)	65,38	66,48		67,58		68,68		69,78		70,88		71,98		
		A.2 Skor Kemampuan Numerasi (SD)	43,67	46,57		49,47		52,37		55,27		58,17		61,07		
		A.2 Skor Kemampuan Numerasi (SMP)	58,78	60,28		61,78		63,28		64,78		66,28		67,78		

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
		B.10 Angka Partisipasi Sekolah (5-6) (PAUD)	79,16	82,20		85,17		88,14		91,11		93,65		96,20		
		B.13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 15 (SD/SMP)	99,64	99,83		100		100		100		100		100		
		B.15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	13,71	17,81		21,91		26,01		30,11		34,21		38,31		
		B.8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	77,03	100		100		100		100		100		100		
		C.1 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	62,69	69,05		69,8		70,55		71,30		72,05		72,8		
		D.10 Iklim Inklusivitas (SD)	53,52	56,02		58,52		61,02		63,52		66,02		68,52		
		D.10 Iklim Inklusivitas (SMP)	54,30	56,70		59,10		61,50		63,90		66,30		68,70		
		D.4 Iklim Keamanan (SD)	68,45	69,35		70,25		71,15		72,05		72,95		73,85		
		D.4 Iklim Keamanan (SMP)	67,53	69,03		70,53		72,03		73,53		75,03		76,53		
		D.8 Iklim Kebhinekaan (SD)	68,08	69,08		70,08		71,08		72,08		73,08		74,08		
		D.8 Iklim Kebhinekaan (SMP)	68,73	69,73		70,73		71,73		72,73		73,73		74,73		
01.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM															
Outcome	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	n/a	n/a	0	n/a	0	35,00 %	600.000.000	40,00 %	700.000.000	45,00 %	700.000.000	50,00 %	750.000.000	Dinas Pendidikan
01.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN															
Outcome	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Persentase Pendidik pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) atau S1 atau Memiliki Sertifikat	82,20 %	86,00 %	750.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	1.000.000.000	100 %	1.000.000.000	Dinas Pendidikan
		Persentase Pendidik pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) atau S1 atau Memiliki Sertifikat	92,35 %	95,25 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
		Persentase Pendidik pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) atau S1 atau Memiliki Sertifikat	94,55 %	96,65 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
01.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN															
Outcome	Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	n/a	n/a	0	n/a	0	20,00 %	43.442.574	23,00 %	44.220.196	25,00 %	45.759.059	30,00 %	45.937.519	Dinas Pendidikan
01.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**196.385.120**		**260.000.000**		**286.144.469**		**386.144.469**		**381.144.469**		**381.144.469**	**Dinas Kebudayaan**
01.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA															
Outcome	Terlestarinya Bahasa dan Sastra Daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	95,65 %	97,00 %	196.385.120	98,75 %	260.000.000	99,86 %	286.144.469	100 %	386.144.469	100 %	381.144.469	100 %	381.144.469	Dinas Kebudayaan
01.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**136.558.404.250**		**137.700.000.000**		**137.800.000.000**		**137.900.000.000**		**138.000.000.000**		**139.500.000.000**	**Dinas Kesehatan**
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	B	93.877.301.183	B	91.970.979.164	BB	93.970.631.237	BB	93.520.423.513	BB	92.511.026.109	BB	92.566.577.282	Dinas Kesehatan
		Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B		B		BB		BB		BB		BB		
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
Outcome	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	63,16 % Per 100.000 KH	63,16% Per 100.000 KH	40.282.353.647	65,73% Per 100.000 KH	42.280.201.006	67,82% Per 100.000 KH	40.400.148.932	69,02% Per 100.000 KH	41.935.813.322	69,92% Per 100.000 KH	42.000.775.037	72,52% Per 100.000 KH	43.429.796.295	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Stunting pada Balita	16,6%	14,00 %		13,05 %		11,64 %		11,00 %		10,23 %		9,03 %		
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN															
Outcome	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan.	91,00 %	90,00 %	2.310.830.300	91,00 %	2.350.830.300	93,00 %	2.331.230.300	96,00 %	2.331.638.300	99,00 %	2.347.237.906	100 %	2.347.670.712	Dinas Kesehatan
01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN															
Outcome	Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	87,00 %	89,00 %	832.775.480	91,00 %	842.802.389	93,00 %	842.802.389	94,00 %	852.633.981	95,00 %	872.690.428	97,00 %	883.119.781	Dinas Kesehatan

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN															
Outcome	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	87,00 %	88,00 %	255.143.640	89,00 %	215.187.141	91,00 %	215.187.142	93,00 %	219.490.884	94,00 %	228.270.520	96,00 %	232.835.930	Dinas Kesehatan
01.02.07	PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN															
Outcome	Meningkatnya Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	n/a	n/a	0	68,00 %	40.000.000	70,00 %	40.000.000	71,00 %	40.000.000	73,00 %	40.000.000	74,00 %	40.000.000	Dinas Kesehatan
01.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**96.059.769.488**		**106.000.000.000**		**106.800.000.000**		**108.300.000.000**		**109.800.000.000**		**111.800.000.000**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	B	31.542.472.564	BB	31.042.587.543	BB	25.752.727.270	BB	25.889.090.910	BB	26.025.454.550	BB	26.207.272.730	Dinas PUPR
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)															
Outcome	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat terhadap Banjir	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	50,07 %	54,21 %	6.600.000.000	57,65 %	12.300.000.000	61,41 %	10.072.727.273	65,25 %	10.209.090.909	69,23 %	10.345.454.545	73,33 %	10.527.272.727	Dinas PUPR
		Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	23,34 %	23,61 %		24,29 %		25,03 %		25,79 %		26,57 %		27,38 %		

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
01.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM															
Outcome	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	79,84 %	81,43 %	3.340.000.000	86,06 %	5.350.000.000	89,38 %	6.712.727.273	91,25 %	6.849.090.909	92,91 %	6.985.454.545	94,92 %	7.167.272.727	Dinas PUPR
01.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL															
Outcome	Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang dikelola di TPA/TPST Regional	n/a	20,00 %	525.000.000	35,00 %	250.000.000	50,00 %	1.322.727.273	75,00 %	1.459.090.909	85,00 %	1.595.454.545	100 %	1.777.272.727	Dinas PUPR
01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH															
Outcome	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	74,52 %	76,44 %	3.726.968.690	77,81 %	2.383.084.900	81,00 %	2.822.727.273	83,71 %	2.959.090.909	86,04 %	3.095.454.545	88,89 %	3.277.272.727	Dinas PUPR
01.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE															
Outcome	Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik.	59,83 %	64,45 %	9.260.000.000	69,18 %	15.141.361.100	73,94 %	16.827.727.273	78,81 %	16.964.090.909	83,71 %	17.100.454.545	88,89 %	17.282.272.727	Dinas PUPR
01.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG															
Outcome	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	54,03 %	58,06 %	10.934.973.032	60,48 %	10.059.976.000	62,90 %	12.822.727.273	65,32 %	12.959.090.909	67,74 %	13.095.454.545	70,16 %	13.277.272.727	Dinas PUPR
01.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA															
Outcome	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Jumlah Capaian Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	2 Kawasan	1 Kawasan	761.355.201	4 Kawasan	5.130.000.000	1 Kawasan	3.672.727.273	1 Kawasan	3.809.090.909	1 Kawasan	3.945.454.545	1 Kawasan	4.127.272.727	Dinas PUPR

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN															
Outcome	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan	83,44 %	83,65 %	28.133.000.000	87,51 %	23.217.990.457	89,69 %	25.622.727.273	91,85 %	25.759.090.909	93,88 %	25.895.454.545	95,76 %	26.077.272.727	Dinas PUPR
01.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI															
Outcome	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	n/a	15,00 %	150.000.000	30,00 %	150.000.000	30,00 %	322.727.273	30,00 %	459.090.909	45,00 %	595.454.545	60,00 %	777.272.727	Dinas PUPR
01.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG															
Outcome	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	85,00 %	80,00 %	1.086.000.000	62,00 %	975.000.000	45,00 %	847.727.273	30,00 %	984.090.909	16,00 %	1.120.454.545	6,00 %	1.302.272.727	Dinas PUPR
01.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**10.918.447.591**		**12.558.100.000**		**10.850.000.000**		**11.130.000.000**		**11.410.000.000**		**11.690.000.000**	**Disperkim**
01.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	B	8.774.142.871	BB	9.346.300.000	BB	9.107.000.000	BB	9.177.000.000	BB	9.247.000.000	BB	9.317.000.000	Disperkim
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN															
Outcome	Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	0 %	100 %	281.400.000	100 %	273.400.000	100 %	150.000.000	100 %	220.000.000	100 %	290.000.000	100 %	360.000.000	Disperkim

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN															
Outcome	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	18,00 %	26,00 %	380.904.720	34,00 %	1.560.800.000	41,00 %	1.000.000.000	48,00 %	1.070.000.000	53,00 %	1.140.000.000	58,00 %	1.210.000.000	Disperkim
01.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH															
Outcome	Meningkatnya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Persentase Jumlah Rumah tidak Layak Huni yang Ditangani	50,00 %	16,00 %	240.000.000	21,00 %	312.000.000	1,63 %	72.000.000	1,63 %	72.000.000	3,22 %	142.000.000	6,45 %	212.000.000	Disperkim
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)															
Outcome	Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	15,00 %	15,00 %	1.242.000.000	10,00 %	1.065.600.000	17,00 %	521.000.000	25,00 %	591.000.000	33,00 %	591.000.000	15,00 %	591.000.000	Disperkim
01.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**12.621.089.860**		**12.500.000.000**		**12.600.000.000**		**12.800.000.000**		**13.000.000.000**		**13.700.000.000**	**Satpol PP**
01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	B	11.217.846.200	BB	11.903.407.223	BB	11.989.407.223	BB	12.006.907.223	A	12.117.500.000	A	12.338.000.000	Satpol PP

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
Outcome	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	50,00 %	50,00 %	1.403.243.660	60,00 %	596.592.777	70,00 %	610.592.777	75,00 %	793.092.777	80,00 %	882.500.000	90,00 %	1.362.000.000	Satpol PP
Outcome	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	100 %	98,00 %		96,00 %		92,00 %		93,00 %		92,00 %		92,00 %		
Outcome	Meningkatnya Perlindungan terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	45,00 %	45,00 %		45,00 %		51,00 %		51,00 %		58,00 %		59,00 %		
Outcome	Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	2,004 %	26,00 %		26,00 %		51,00 %		51,00 %		77,00 %		77,00 %		
01.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**7.089.263.845**		**7.500.000.000**		**7.600.000.000**		**7.775.000.000**		**7.950.000.000**		**8.625.000.000**	**BPBD**
01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	B	5.772.395.645	BB	6.001.454.650	BB	6.031.018.000	BB	6.056.018.000	BB	6.081.018.000	BB	6.281.018.000	BPBD
01.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA															
Outcome	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana dan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	76,70 %	100 %	1.316.868.200	100 %	1.498.545.350	100 %	1.568.982.000	100 %	1.718.982.000	100 %	1.868.982.000	100 %	2.343.982.000	BPBD
Outcome	Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat	Persentase Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
Outcome	Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana	Persentase Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
01.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**10.321.894.685**		**13.000.000.000**		**13.100.000.000**		**13.300.000.000**		**13.500.000.000**		**14.200.000.000**	**Dinas Pemadam Kebakaran**
01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	BB	9.987.486.525	BB	12.315.000.000	BB	9.600.000.000	BB	9.650.000.000	BB	9.700.000.000	BB	9.900.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran
01.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN. PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN															
Outcome	Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Persantase Meningkatnya Kemampuan Penanganan dan Penyelamatan Terhadap Benacana Kebakaran	100 %	100 %	334.408.160,00	100 %	685.000.000	100 %	3.500.000.000	100 %	3.650.000.000	100 %	3.800.000.000	100 %	4.300.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran
		Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	50,00 %	63,00 %		75,00 %		88,00 %		100 %		100 %		100 %		
		Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	50,00 %	50,00 %		50,00 %		63,00 %		75,00 %		88,00 %		100 %		
		Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebakaran Dalam Kondisi Baik	25,00 %	25,00 %		40,00 %		50,00 %		60,00 %		70,00 %		80,00 %		
01.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**10.096.392.530**		**9.500.000.000**		**9.600.000.000**		**9.775.000.000**		**9.950.000.000**		**10.625.000.000**	**Dinas Sosial**
01.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	B	8.334.512.520	B	7.107.336.058	B	7.380.623.003	BB	7.352.371.414	BB	7.410.079.199	BB	7.977.091.226	Dinas Sosial
		Nilai Kepuasan Masyarakat	B	B		B		B		BB		BB		BB		
01.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL															

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Outcome	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di dalam Panti Rehabilitasi Sosial	100%	100%	539.988.060	100%	556.849.989	100%	456.849.989	100%	506.849.989	100%	505.947.382	100%	542.111.985	Dinas Sosial
		Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di dalam Panti Rehabilitasi Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/ AIDS dan NAPZA	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi/Kab/Kota pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
01.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL															
Outcome	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%	100%	283.860.610	100%	520.081.126	100%	249.058.483	100%	247.874.630	100%	249.431.866	100%	256.510.748	Dinas Sosial
		Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
01.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL															
Outcome	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	85,00 %	87,00 %	404.892.650	88,00 %	804.195.264	89,00 %	619.272.347	90,00 %	636.382.347	92,00 %	653.326.974	94,00 %	725.754.005	Dinas Sosial
		Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
		Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	8,00 %	8,00 %		8,00 %		10,00 %		10,00 %		15,00 %		15,00 %		

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
01.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA															
Outcome	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100%	100%	379.357.720	100%	330.200.000	100%	338.575.823	100%	332.012.231	100%	332.749.456	100%	327.398.855	Dinas Sosial
		Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial.	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
01.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN															
Outcome	Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik.	3 Taman Makan	3 Taman Makan	153.780.970	3 Taman Makan	181.092.613	3 Taman Makan	219.620.355	3 Taman Makan	175.761.944	3 Taman Makan	323.534.397	3 Taman Makan	383.133.181	Dinas Sosial
02	**URUSAN PEMERNTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**145.473.656.573**		**142.981.900.000**		**146.138.855.531**		**148.628.855.531**		**151.223.855.531**		**160.813.855.531**	
02. 07	**URUSAN PEMERINTAHAN TENAGA KERJA**				**6.913.018.357**		**8.000.000.000**		**8.100.000.000**		**8.300.000.000**		**8.500.000.000**		**9.200.000.000**	**Dinas Tenaga Kerja**
02.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	BB	4.394.287.547	BB	5.295.452.978	BB	5.362.294.218	BB	5.554.653.939	BB	5.600.334.498	BB	6.268.889.059	Dinas Tenaga Kerja
02.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA															
Outcome	Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	n/a	n/a	0	90,00 %	45.000.000	91,00 %	45.531.000	91,00 %	46.346.005	93,00 %	47.958.846	95,00 %	48.145.885	Dinas Tenaga Kerja
02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA															
Outcome	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	80,00 %	80,40 %	169.969.490	80,00 %	280.000.000	80,20 %	298.627.760	80,40 %	299.995.000	80,40 %	388.700.000	85,00 %	400.000.000	Dinas Tenaga Kerja
02.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															
Outcome	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	75,00 %	75,50 %	423.719.800	75,80 %	496.168.126	76,00 %	499.168.126	78,00 %	499.998.400	80,00 %	495.000.000	90,00 %	494.958.400	Dinas Tenaga Kerja

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
02.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL															
Outcome	Meningkatnya Pekerja Indonesia yang Terlindungi	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	2.116 Orang	2.328 Orang	1.925.041.520	2.515 Orang	1.883.378.896	2.742 Orang	1.894.378.896	2.934 Orang	1.899.006.656	3.110 Orang	1.968.006.656	3.577	2.750.000.000	Dinas Tenaga Kerja
02.08	**URUSAN PEMERINTAHAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**8.601.868.001**		**8.250.000.000**		**8.350.000.000**		**8.500.000.000**		**8.650.000.000**		**9.300.000.000**	**DPPPA**
02.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	B	5.679.251.611	B	5.470.210.209	B	5.598.642.688	B	5.703.277.892	BB	5.778.187.963	BB	6.406.219.396	DPPA
02.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN															
Outcome	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	10,00 %	20,00 %	64.913.770	30,00 %	45.000.000	30,00 %	100.000.000	40,00 %	100.000.000	40,00 %	100.000.000	50,00 %	100.000.000	DPPA
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	51,59%	54,59 %		57,5 9%		57,5 9%		63,59 %		63,59 %		69,59 %		
02.08.03	PROGRAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN															
Outcome	Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	95,55 %	95,75 %	207.341.000	96,32 %	230.000.000	96,78 %	230.000.000	97,00 %	230.000.000	97,84 %	230.000.000	98,65 %	230.000.000	DPPA
02.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA															
Outcome	Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	78,24 %	80,25 %	1.789.681.620	83,25 %	1.725.573.742	85,00 %	1.696.357.312	88,05 %	1.726.722.108	90.00 %	1.786.812.037	93,75 %	1.793.780.604	DPPA
02.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK															
Outcome	Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	78,35 %	80,00 %	140.000.000	83,2 7%	110.000.000	86,75 %	115.000.000	89,29 %	120.000.000	92,35 %	125.000.000	95,00 %	130.000.000	DPPA

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)															
Outcome	Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	100%	100%	341.800.000	100%	325.000.000	100%	305.000.000	100%	310.000.000	100%	315.000.000	100%	320.000.000	DPPA
02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK															
Outcome	Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	94,27 %	96,00 %	378.880.000	99,26 %	354.979.000	100 %	305.000.000	100 %	310.000.000	100 %	315.000.000	100 %	320.000.000	DPPA
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	84,14 %	85,14 %		86,14 %		86,64 %		86,74 %		87,24 %		87,74 %		
02.09	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PANGAN**				**6.820.319.577**		**7.400.000.000**		**7.500.000.000**		**7.675.000.000**		**7.850.000.000**		**8.525.000.000**	**Dinas Ketahanan Pangan**
02.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	B	5.741.096.309	BB	6.210.000.000	BB	6.485.000.000	BB	6.725.000.000	BB	6.595.000.000	BB	6.960.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
02.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN															
Outcome	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	n/a	n/a	0	n/a	0	11,75 %	100.000.000	12,29 %	50.000.000	12,98 %	50.000.000	13,47 %	150.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
02.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI PANGAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT															
Outcome	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	88,8 point	90,6 point	397.766.736	92,5 point	665.000.000	94,4 point	525.000.000	96,3 point	475.000.000	98,1 point	550.000.000	100 point	805.000.000	Dinas Ketahanan Panga
		Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	74,39 point	74,44 point		74,49 point		74,54 point		74,59 point		74,64 point		74,69 point		
		Persentase Koefisien Variasi (Cv) Pangan Strategis (Beras)	n/a	10,00 %		10,00 %		10,00 %		10,00 %		10,00 %		10,00 %		

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
02.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN															
Outcome	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	11,54 %	11,00 %	512.469.853	9 00 %	220.000.000	7,00 %	150.000.000	5,00 %	165.000.000	3,00 %	315.000.000	0 %	260.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
02.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN															
Outcome	Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	88,00 %	90,00 %	168.986.679	92,00 %	305.000.000	94,00 %	240.000.000	96,00 %	260.000.000	98,00 %	340.000.000	100 %	350.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
02.10	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN**				**6.245.942.500**		**4.441.900.000**		**6.250.000.000**		**6.320.000.000**		**6.390.000.000**		**6.960.000.000**	**Disperkim**
02.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM															
Outcome	Meningkatnya Ketersediaan Lahan untuk Kepentingan Umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	n/a	n/a	0	n/a	0	16,00 %	250.000.000	33,34 %	320.000.000	49,67 %	320.000.000	53,34%	320.000.000	Disperkim
02.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN															
Outcome	Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	67,00 %	78,00 %	5.916.042.500	89,00 %	3.776.700.000	75,00 %	4.500.000.000	75,00 %	4.500.000.000	75,00 %	4.500.000.000	75,00 %	4.700.000.000	Disperkim
02.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE															
Outcome	Meningkatnya Persentase Penerima Tanah (Subjek) dan Bidang Tanah yang Akan Didistribusikan.	Persentase Tanah yang Siap Didistribusikan	n/a	n/a	0	n/a	0	2,00 %	500.000.000	2,00 %	500.000.000	2,00 %	500.000.000	3,00 %	600.000.000	Disperkim

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
02.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG															
Outcome	Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	25 %	12,50 %	100.000.000,00	12,50 %	30.000.000	20,50 %	200.000.000	12,50 %	200.000.000	29,50 %	200.000.000	29,50 %	200.000.000	Disperkim
02.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH															
Outcome	Meningkatnya Tertib Pertanahan dan Kepastian Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	21,00 %	19,00 %	229.900.000	n/a	0	23,00 %	150.000.000	23,00 %	150.000.000	28,00 %	220.000.000	66,67 %	290.000.000	Disperkim
02.10.12	PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH															
Outcome	Meningkatnya Kejelasan Hak Tanah bagi Pemerintah	Ditetapkannya Hak atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	n/a	n/a	0	33,33 %	625.000.000	46,00 %	500.000.000	57,44 %	500.000.000	67,88 %	500.000.000	78,32 %	600.000.000	Disperkim
02.10.13	PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN															
Outcome	Meningkatnya Kejelasan Hak Tanah Bagi Pemerintah	Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah	n/a	n/a	0	8,00 %	10.200.000	16,67 %	150.000.000	33,00 %	150.000.000	33,00 %	150.000.000	33,00 %	250.000.000	Disperkim
02.11	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**30.481.648.268**		**32.000.000.000**		**32.100.000.000**		**32.450.000.000**		**32.800.000.00**		**33.650.000.000**	**Dinas Lingkungan Hidup**
02.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	CC	B	9.669.597.716	B	10.428.068.648	B	10.120.629.884	B	10.120.629.884	B	10.220.629.884	B	10.270.629.884	Dinas Lingkungan hidup
02.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP															
Outcome	Meningkatnya Efektifitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP	H	11,10 %	11,10 %	290.000.000,00	27,80 %	290.000.000	44,40 %	590.000.000	66,70 %	690.000.000	77,80 %	690.000.000	94,40 %	740.000.000	Dinas Lingkungan hidup
02.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP															
Outcome	Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	n/a	45,00 %	374.997.595	46,20 %	490.000.000	47,50 %	365.000.000	4,70 %	465.000.000	49,90 %	465.000.000	51,20 %	515.000.000	Dinas Lingkungan hidup

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
02.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)															
Outcome	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase RTH Publik	12,53 %	12,60 %	2.921.332.380	12,60 %	3.984.621.500	13,00 %	4.731.000.000	14,00 %	4.731.000.000	14,40 %	4.831.000.000	15,00 %	5.081.000.000	Dinas Lingkungan hidup
02.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)															
Outcome	Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	n/a	n/a	0	7,50 %	135.000.000	15,00 %	135.000.000	22,50 %	235.000.000	30,00 %	235.000.000	37,50 %	335.000.000	Dinas Lingkungan hidup
02.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)															
Outcome	Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/ atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan	Tingkat Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/ atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	4,00 %	4,01 %	765.124.500	4,50 %	100.000.000	4,70 %	110.000.000	4,90 %	160.000.000	5,10 %	260.000.000	5,30 %	310.000.000	Dinas Lingkungan hidup
02.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA). KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH															
Outcome	Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20,00 %	20,00 %	79.998.570	40,00 %	70.000.000	60,00 %	70.000.000	80,00 %	70.000.000	83,00 %	120.000.000	100 %	120.000.000	Dinas Lingkungan hidup

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
02.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT															
Outcome	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	11,00 %	17,00 %	129.991.740	20,00 %	120.000.000	39,00 %	130.000.000	59,00 %	130.000.000	79,00 %	130.000.000	99,00 %	130.000.000	Dinas Lingkungan hidup
02.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT															
Outcome	Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	50,00 %	5,000 %	31.759.390	50,00 %	35.000.000	50,00 %	85.000.000	75,00 %	85.000.000	75,00 %	85.000.000	100 %	85.000.000	Dinas Lingkungan hidup
02.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP															
Outcome	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/ Kasus tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	42,00 %	50,00 %	84.999.750	67,00 %	65.000.000	75,00 %	120.000.000	83,00 %	120.000.000	92,00 %	120.000.000	100 %	170.000.000	Dinas Lingkungan hidup
02.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN															
Outcome	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	n/a	55,00 %	16.133.846.627	57,00 %	16.282.309.852	59,00 %	15.643.370.116	61,00 %	15.643.370.116	63,00 %	15.893.370.116	65,00 %	15.893.370.116	Dinas Lingkungan hidup
		Persentase Pengurangan Sampah	10,88 %	30,00 %		40,00 %		50,00 %		60,00 %		70,00 %		80,00 %		
		Persentase Penanganan Sampah	70,00 %	70,00 %		75,00 %		80,00 %		85,00 %		95,00 %		100 %		
02.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**6.625.686.895**		**6.600.000.000**		**6.775.000.000**		**6.950.000.000**		**7.125.000.000**		**7.800.000.000**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
02.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB	BB	5.735.781.925	BB	5.827.247.600	BB	5.960.000.000	BB	6.045.000.000	A	6.220.000.000	A	6.874.590.849	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK															
Outcome	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	46,00 %	48,00 %	150.065.450	50,00 %	105.000.000	60,00 %	100.000.000	70,00 %	130.000.000	80,00 %	130.000.000	100 %	150.409.151	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	70,00 %	80,00 %		90,00 %		93 ,00%		95,00 %		97,00%		100 %		
02.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL															
Outcome	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100%	100%	148.125.640	100%	125.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	96,00 %	89,25%		89,30%		90,00%		90,00%		95,00%		100%		
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	99,25 %	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	99,50 %	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
02.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN															
Outcome	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	87,56 %	89,75 %	591.713.880	91,25 %	507.752.400	93,46 %	505.000.000	95,00 %	525.000.000	97,75 %	525.000.000	98,00 %	545.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
02.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN															
Outcome	Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	n/a	n/a	0	97,25 %	35.000.000	98,25 %	50.000.000	99,05 %	70.000.000	99,45 %	70.000.000	100%	50.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
02.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**11.150.424.125**		**11.150.000.000**		**11.250.000.000**		**11.425.000.000**		**11.600.000.000**		**12.275.000.000**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan KB**
02.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB	BB	5.473.534.125	BB	6.489.926.745	BB	6.736.722.314	BB	6.760.110.000	BB	6.485.110.000	BB	7.199.083.936	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
02.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK															
Outcome	Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR)	2,07 %	2,50 %	232.999.998	2,30 %	425.267.000	2,10 %	475.267.000	1,90 %	485.267.000	1,70 %	485.267.000	1,50 %	486.293.064	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19)	4,80 %	4,50 %		4,30 %		4,10 %		3,90 %		3,70 %		3,50 %		
02.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)															
Outcome	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Konstrasepsi Modern/*Modern Contraceptive* (mCPR)	87,60 %	90,05 %	4.347.290.002	91,15 %	3.093.023.000	92,25 %	2.893.023.000	93,27 %	2.893.023.000	94,00 %	3.333.023.000	95,02 %	3.273.023.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)	6,94 %	6,12 %		5,92 %		5,57 %		5,33 %		5,01 %		4,91 %		
02.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)															
Outcome	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	91,25 %	93,00 %	1.096.600.000	95,56 %	1.141.783.255	97,85 %	1.164.987.686	99,00 %	1.286.600.000	100 %	1.296.600.000	100 %	1.316.600.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
02.15	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN**				**16.870.006.366**		**13.500.000.000**		**13.600.000.000**		**13.900.000.000**		**14.200.000.000**		**15.000.000.000**	**Dinas Perhubungan**
02.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	B	13.872.423.666	BB	12.310.326.800	BB	12.310.326.800	BB	12.310.326.800	BB	12.310.326.800	BB	12.310.326.800	Dinas Perhubungan
02.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)															
Outcome	Meningkatnya Kualitas Layanan transportasi Darat	Persentase Konektivitas Darat	n/a	18,52	2.749.642.700	20,37	1.141.673.200	20,37	1.241.473.200	20,37	1.541.673.200	20,22	1.356.673.200	22,2	1.751.673.200	Dinas Perhubungan
		Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	n/a	8,73		9,17		9,62		10,11		10,61		11,14		
		Tingkat LoS (*Level of Sevice*)	n/a	C		B		B		B		B		B		
02.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN															
Outcome	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Persentase Konektivitas Laut	31,58%	34,21%	248.000.000	36,84%	48.000.000	38,68%	48.000.000	36,84%	48.000.000	39,47%	648.000.000	39,47%	448.000.000	Dinas Perhubungan
02.16	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**8.631.198.326**		**8.199.622.261**		**8.334.754.369**		**8.434.754.369**		**8.554.754.369**		**8.974.754.369**	**Diskomsandi**
02.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	B	4.470.402.090	B	5.284.317.507	BB	4.833.770.261	BB	4.833.770.261	BB	4.873.770.261	A	5.013.770.261	Diskomsandi

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
02.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK															
Outcome	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	n/a	55,00 %	574.981.677	55,00 %	546.705.000	65,00 %	538.642.835	75,00 %	588.642.835	80,00 %	628.642.835	95,00 %	768.642.835	Diskomsandi
02.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA															
Outcome	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Informatika yang Dikembangkan	60,00 %	25,00 %	3.585.814.559	35,00 %	2.368.599.754	55,00 %	2.962.341.273	75,00 %	3.012.341.273	85,00 %	3.052.341.273	90,00 %	3.192.341.273	Diskomsandi
02.17	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL DAN MENENGAH**				**7.399.960.349**		**7.400.000.000**		**7.500.000.000**		**7.650.000.000**		**7.800.000.000**		**8.450.000.000**	**Dinas Koperasi dan UMKM**
02.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	B	6.455.606.067	B	6.729.677.698	B	6.729.677.698	B	6.615.041.554	B	6.613.024.072	B	6.654.336.980	Dinas Koperasi dan UMKM
02.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM															
Outcome	Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	2,00 %	3,00 %	86.659.741	4,00 %	86.659.741	4,00 %	86.659.741	6,00 %	173.319.482	6,00 %	173.319.482	8,00 %	266.039.049	Dinas Koperasi dan UMKM
02.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI															
Outcome	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	2,00 %	2,00 %	86.659.741	4,00 %	86.659.741	4,00 %	86.659.741	7,00 %	100.000.000	7,00 %	65.000.000	8,00 %	150.000.000	Dinas Koperasi dan UMKM
02.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI															
Outcome	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	25,00 %	25,00 %	64.750.000	n/a	0	30,00 %	40.000.000	32,00 %	80.000.000	32,00 %	100.000.000	33,00 %	260.000.000	Dinas Koperasi dan UMKM
02.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN															
Outcome	Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	16,00 %	17,00 %	64.964.800	18,00 %	86.659.741	19,00 %	86.659.741	20,00 %	86.659.741	20,00 %	86.659.741	22,00 %	100.000.000	Dinas Koperasi dan UMKM

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI															
Outcome	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	n/a	n/a	0	9,00 %	86.659.741	10,00 %	146.659.741	11,00 %	138.319.482	11,00 %	200.000.000	13,00 %	236.039.049	Dinas Koperasi dan UMKM
02.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH. USAHA KECIL. DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
Outcome	Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Pertumbuhan Wirausaha	n/a	n/a	0	260 Unit	73.023.597	270 Unit	73.023.597	280 Unit	180.000.000	290 Unit	265.000.000	300 Unit	410.000.000	Dinas Koperasi dan UMKM
02.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM															
Outcome	Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UMKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	10 Orang	45 Orang	641.320.000	45 Orang	250.659.741	45 Orang	250.659.741	45 Orang	276.659.741	45 Orang	265.987.964	45 Orang	343.584.922	Dinas Koperasi dan UMKM
02.17.09	PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI															
Outcome	Meningkatnya Legalitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	n/a	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	14,00 %	31.008.741	16,00 %	30.000.000	Dinas Koperasi dan UMKM
02. 18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**6.451.028.300**		**6.500.000.000**		**6.600.000.000**		**6.735.000.000**		**6.870.000.0000**		**7.505.000.000**	**DPMPTSP**
02.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	B	5.316.806.000	B	5.415.000.000	B	5.440.000.000	BB	5.440.000.000	BB	5.465.000.000	BB	5.560.000.000	DPMPTSP
02.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL															
Outcome	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	243 M	n/a	0	285 M	230.000.000	300 M	230.000.000	325 M	230.000.000	350 M	275.000.000	379 M	525.000.000	DPMPTSP
02.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL															
Outcome	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	48,90 %	n/a	0	60,90 %	30.000.000	63,53 %	30.000.000	66,25 %	30.000.000	69,05 %	95.000.000	72,67 %	125.000.000	DPMPTSP

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
02.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL															
Outcome	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	92,00 %	94,65 %	524.994.550	96,23 %	300.000.000	98,75 %	300.000.000	100 %	435.000.000	100 %	435.000.000	100 %	450.000.000	DPMPTSP
02.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL															
Outcome	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha	88,02 %	87,75 %	279.475.250	89,05 %	175.000.000	93,00 %	175.000.000	95,75 %	175.000.000	98,35 %	175.000.000	100 %	300.000.000	DPMPTSP
02.18.06	PROGRAM PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL															
Outcome	Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	85,95 %	86,75 %	329.752.500	87,00 %	350.000.000	92,34 %	350.000.000	95,03 %	350.000.000	95,98 %	350.000.000	98,00 %	470.000.000	DPMPTSP
02.18.07	PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Kerja Sama Penanaman Modal	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti	n/a	n/a	0	n/a	0	100 %	75.000.000	100 %	75.000.000	100 %	75.000.000	100 %	75.000.000	DPMPTSP
02.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**11.670.536.315**		**11.500.000.000**		**11.600.000.000**		**11.800.000.000**		**12.000.000.000**		**12.700.000.000**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
02.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	CC	B	5.864.595.614	B	6.277.600.000	BB	6.653.346.150	BB	6.404.000.000	BB	6.623.000.000	BB	6.683.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
02.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN															
Outcome	Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	15,00 %	17,00 %	650.877.490	20,00 %	553.400.000	24,00 %	665.000.000	26,00 %	545.000.000	30,00 %	678.000.000	34,00 %	730.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
02.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN															
Outcome	Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	65,75 %	66,50 %	4.528.271.481	71,00 %	3.869.000.000	72,85 %	3.425.653.850	73,56 %	4.010.000.000	75,00 %	3.679.000.000	76,00 %	4.236.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
02.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN															
Outcome	Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	78,00 %	80,00 %	626.791.730	85,00 %	800.000.000	86,00 %	856.000.000	87,00 %	841.000.000	90.00 %	1.020.000.000	91,00 %	1.051.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
02.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**60.690.000**		**92.705.000**		**56.854.392**		**106.854.392**		**146.854.392**		**286.854.392**	**Diskomsandi**
02.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL															
Outcome	Tercapainya Kolaborasi Integrasi dan Standarisasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,86	3,22	60.690.000	3,52	92.705.000	3,72	56.854.392	3,85	106.854.392	4,20	146.854.392	4,50	286.854.392	Diskomsandi
02.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**115.703.724**		**207.672.739**		**208.391.239**		**258.391.239**		**298.391.239**		**438.391.239**	**Diskomsandi**
02.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI															
Outcome	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat kesiapan pengamanan informasi Pemerintah Daerah	50,00 %	60,00 %	115.703.724	50,00 %	207.672.739	60,00 %	208.391.239	70,00 %	258.391.239	80,00 %	298.391.239	95,00 %	438.391.239	Diskomsandi
02.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**10.573.898.565**		**11.240.000.000**		**11.313.855.531**		**11.388.855.531**		**11.568.855.531**		**12.243.855.531**	**Dinas Kebudayaan**
02.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	CC	B	9.773.489.725	B	9.365.000.000	B	8.790.177.504	BB	8.790.177.504	BB	8.970.177.504	BB	9.270.177.504	Dinas Kebudayaan
02.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN															
Outcome	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	82,30 %	84,75 %	516.117.000	85,80 %	1.155.067.498	86,00 %	1.278.745.525	87,65 %	1.278.745.525	89,35 %	1.278.745.525	92,10 %	1.278.745.525	Dinas Kebudayaan

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
02.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL															
Outcome	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	84,65 %	n/a	0	n/a	0	85,32 %	550.000.000	87,00 %	550.000.000	89,50 %	550.000.000	90,70 %	650.000.000	Dinas Kebudayaan
02.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH															
Outcome	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Informasi Sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	85,00 %	85,00 %	101.337.000	90,00 %	294.932.502	95,00 %	294.932.502	95,00 %	294.932.502	97,00 %	294.932.502	100 %	394.932.502	Dinas Kebudayaan
02.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA															
Outcome	Meningkatnya Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	87,55 %	90,00%	182.954.840	92,35 %	300.000.000	97,85 %	300.000.000	95,45 %	300.000.000	97,85 %	300.000.000	100%	400.000.000	Dinas Kebudayaan
		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	86,98 %	90,00%		100%		100%		100%		100%		100%		
02.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN															
Outcome	Meningkatnya Tata Kelola Museum	Tingkat Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke Museum	4,15 %	n/a	0	4,25 %	125.000.000	5,70 %	100.000.000	6,85 %	175.000.000	7,32 %	175.000.000	7,92 %	250.000.000	Dinas Kebudayaan
02.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**6.414.633.405**		**5.865.000.000**		**6.070.000.000**		**6.205.000.000**		**6.340.000.000**		**6.775.000.000**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah**
02.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	B	5.265.904.785	B	5.430.000.000	BB	5.425.000.000	BB	5.560.000.000	BB	5.595.000.000	BB	5.930.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B		B		BB		BB		BB		BB		
02.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN															
Outcome	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	63,59 %	64,96 %	1.020.700.970	65,78 %	335.000.000	67,98 %	366.913.925	69,05 %	366.913.925	71,45 %	466.913.925	73,65 %	666.913.925	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
02.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO															
Outcome	Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	82,25 %	83,75 %	128.027.650	85,05 %	100.000.000	87,00 %	278.086.075	89,28 %	278.086.075	93,00 %	278.086.075	92,36 %	178.086.075	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
02.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**447.033.500**		**635.000.00**		**530.000.000**		**530.000.00**		**530.000.000**		**730.000.000**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah**
02.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP															
Outcome	Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	83,92 %	85,55 %	356.804.300	86,73 %	510.000.000	88,05 %	340.000.000	91,27 %	340.000.000	93,48 %	340.000.000	95,78 %	440.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
02.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP															
Outcome	Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	95,05 %	96,75 %	90.229.200	98,00 %	125.000.000	100 %	190.000.000	100 %	190.000.000	100 %	190.000.000	100 %	290.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
03	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**52.069.794.779**		**50.000.000.000**		**50.400.000.000**		**51.200.000.000**		**52.000.000.000**		**54.800.000.000**	
03.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**11.762.506.127**		**11.000.000.000**		**11.100.000.000**		**11.300.000.000**		**11.500.000.000**		**12.200.000.000**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
03.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB	BB	8.050.511.747	BB	9.057.850.000	BB	8.609.850.000	BB	8.685.850.000	BB	8.714.850.000	BB	8.679.700.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
03.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP															
Outcome	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	30.125,11 Ton	30.668,15 Ton	2.089.000.000	30.951,67 Ton	1.131.150.000	31.112,33 Ton	1.208.150.000	31.533,78 Ton	1.317.150.000	31.892,51 Ton	1.497.150.000	31,892,51 Ton	1.921.300.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
03.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA															
Outcome	Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budaya	24,00 Ton	26,95 Ton	880.596.100	30,84 Ton	346.000.000	35,29 Ton	804.000.000	40,38 Ton	814.000.000	46,21 Ton	814.000.000	48,21 Ton	1.024.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
03.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN															
Outcome	Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	n/a	42,97 kg/ kapita	742.398.280	43,79 kg/ kapita	465.000.000	44,60 kg/ Kapita	478.000.000	45,43 kg/ kapita	483.000.000	46,24 kg/ kapita	474.000.000	46,24 kg/ kapita	575.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
03.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**9.519.914.086**		**10.500.000.000**		**10.600.000.000**		**10.800.000.000**		**11.000.000.000**		**11.700.000.000**	**Dinas Pariwisata**
03.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	B	7.422.115.646	B	8.025.000.000	B	8.030.000.000	B	8.430.000.000	B	8.285.000.000	B	8.255.000.000	Dinas Pariwisata
03.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA															
Outcome	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	3,32	3,56	1.360.430.500	3,60	1.595.000.000	3,63	1.610.000.000	3,67	1.450.000.000	3,70	1.640.000.000	3,74	2.235.000.000	Dinas Pariwisata
		Jumlah Tempat Wisata yang Dikembangkan dan Dilestarikan	5	5		5		6		6		6		6		
03.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA															
Outcome	Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	15,15	15,30	627.142.900	15,45	685.000.000	15,60	735.000.000	15,75	730.000.000	15,90	760.000.000	16,06	925.000.000	Dinas Pariwisata
03.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL															
Outcome	Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	n/a	n/a	0	4,51	20.000.000	4,55	25.000.000	4,60	70.000.000	4,64	75.000.000	4,69	75.000.000	Dinas Pariwisata
03.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF															
Outcome	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	39,60	40,00	110.225.040	40,40	175.000.000	40,80	200.000.000	41,10	120.000.000	40,60	240.000.000	42,00	210.000.000	Dinas Pariwisata

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
03.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**17.377.329.603**		**14.500.000.000**		**14.600.000.000**		**14.750.000.000**		**14.900.000.000**		**15.550.000.000**	**Dinas Pertanian**
03.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	BB	13.690.809.854	BB	9.636.000.000	BB	9.526.000.000	BB	9.620.000.000	BB	11.430.000.000	BB	11.999.186.761	Dinas Pertanian
03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN															
Outcome	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Komoditas Peternakan dan Perkebunan	2.522,2 Ton	2.680,5 Ton	3.078.286.769	2.876,5 Ton	4.480.000.000	3.161 Ton	4.580.000.000	3.324 Ton	4.636.000.000	3.580,5 Ton	3.300.000.000	3.743,3 Ton	3.380.813.239	Dinas Pertanian
03.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN															
Outcome	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan Menjadi LP2B	100 Ha	120 Ha	290.705.640	130 Ha	289.000.000	140 Ha	389.000.000	150 Ha	389.000.000	130 Ha	100.000.000	120 Ha	100.000.000	Dinas Pertanian
03.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER															
Outcome	Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	68,00 %	68,00 %	39.630.000	70,00 %	50.000.000	75,00 %	60.000.000	80,00 %	45.000.000	85,00 %	40.000.000	95,00 %	40.000.000	Dinas Pertanian
		Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikasi Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	30,00 %	70,00 %	43.200.000	80,00 %	45.000.000	90,00 %	45.000.000	96,00 %	45.000.000	99,00 %	30.000.000	99,00 %	30.000.000	
03.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN															
Outcome	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluhan Pertanian yang Ditingkatkan	60,00 %	70,00 %	234.697.340	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	Dinas Pertanian
		Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	60,00 %	70,00 %		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		
03.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**13.200.044.963**		**13.847.192.000**		**13.952.727.342**		**14.121.659.775**		**14.253.745.704**		**14.981.417.056**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
03.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	B	12.175.044.963	B	12.939.664.000	BB	13.197.336.456	BB	13.295.715.660	BB	13.287.446.043	BB	14.071.546.329	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
03.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN															
Outcome	Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	70,00 %	70,00 %	100.000.000	72,00 %	27.716.000	74,00 %	40.000.000	76,00 %	40.000.000	78,00 %	50.000.000	80,00 %	60.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
03.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN															
Outcome	Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata dan Terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	9,60 %	9,50 %	550.000.000	10,00 %	638.000.000	9,00 %	400.500.000	9,00 %	413.678.707	9,30 %	451.573.294	8,20 %	327.739.671	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
03.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING															
Outcome	Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting	100 %	100 %	100.000.000	100 %	53.576.000	100 %	66.186.886	100 %	93.209.408	100 %	146.625.186	100 %	152.791.370	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
03.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR															
Outcome	Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Fasilitas Promosi Dagang	10,20 %	10,40 %	125.000.000	10,80 %	129.056.000	12,60 %	138.704.000	14,50 %	149.056.000	16,40 %	145.880.000	18,20 %	182.232.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
03.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN															
Outcome	Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	90,33 %	92,76 %	150.000.000	76,71 %	59.180.000	82,73 %	90.000.000	87,62 %	110.000.000	91,73 %	147.221.181	94,73 %	157.107.686	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
03.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
Outcome	Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	n/a	n/a	0	n/a	0	5,00 %	20.000.000	5,00 %	20.000.000	5,00 %	10.000.000	5,00 %	30.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
03.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**210.000.000**		**152.808.000**		**147.272.658**		**228.340.225**		**346.254.296**		**368.582.944**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
03.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI															
Outcome	Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	4,00 %	5,00 %	140.000.000	6,00 %	93.528.000	6,00 %	63.962.886	7,00 %	90.985.407	8,00 %	144.405.146	9,00 %	170.567.371	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
03.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI															
Outcome	Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang diterbitkan	15,00 %	25,00 %	35.000.000	35,00 %	24.000.000	45,00 %	41.410.886	55,00 %	68.433.411	65,00 %	121.849.150	75,00 %	128.015.573	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
03.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL															
Outcome	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	1 Laporan	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	35.280.000	1 Laporan	41.898.886	1 Laporan	68.921.407	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	70.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
04	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**105.393.038.825**		**107.000.000.000**		**108.500.000.000**		**110.250.000.000**		**112.000.000.000**		**115.250.000.000**	
04.01	**UNSUR SEKRETARIAT DAERAH**				**54.689.385.625**		**57.000.000.000**		**58.000.000.000**		**59.250.000.000**		**60.500.000.000**		**62.250.000.000**	**Sekretariat Daerah**
04.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	B	41.525.835.061	B	42.456.920.351	B	45.234.519.976	B	46.484.519.976	B	47.734.519.976	B	49.484.519.976	Sekretariat Daerah

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
04.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT															
Outcome	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Dokumen LPPD	1 Laporan	1 Laporan	10.924.738.484	1 Laporan	11.556.993.345	1 Laporan	10.901.176.321	1 Laporan	10.901.176.321	1 Laporan	10.901.176.321	1 Laporan	10.901.176.321	Sekretariat Daerah
		Jumlah Fasilitasi Bantuan Sosial dan Keagamaan	4	4		5		5		6		6		7		
		Jumlah Perkada yang Diterbitkan	11	12		13		15		17		19		20		
04.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN															
Outcome	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomidan Pembangunan	Dokumen TPID	1 Laporan	1 Laporan	2.238.812.080	1 Laporan	2.986.086.304	1 Laporan	1.864.303.703	1 Laporan	1.864.303.703	1 Laporan	1.864.303.703	1 Laporan	1.864.303.703	Sekretariat Daerah
		Dokumen Monitoring dan Pengendalian	2	2		2		2		2		2		2		
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	79,20 %	80,45 %		84,00 %		87,65 %		90,23 %		93,75 %		95,65 %		
04.02	**UNSUR SEKRETARIAT DPRD**				**50.703.653.200**		**50.000.000.000**		**50.500.000.000**		**51.000.000.000**		**51.500.000.000**		**53.000.000.000**	**Sekretariat DPRD**
04.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	B	35.804.214.400	B	35.180.000.000	BB	25.250.000.000	BB	25.750.000.000	BB	26.250.000.000	BB	27.750.000.000	Sekretariat DPRD
04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD															
Outcome	Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat Waktu	Tepat Waktu	14.899.438.800	100% (Tepat Waktu)	14.820.000.000	100% (Tepat Waktu)	25.250.000.000	100% (Tepat Waktu)	25.250.000.000	100% (Tepat Waktu)	25.250.000.000	100% (Tepat Waktu)	25.250.000.000	Sekretariat DPRD
		Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	94,00 %	95,00 %		97,00 %		98,00 %		99,00 %		100%		100%		
Outcome	Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
05	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**109.350.492.549**		**98.076.305.699**		**98.930.933.159**		**101.631.610.414**		**104.332.287.669**		**108.974.760.237**	
05.01	**UNSUR PERENCANAAN**				**14.245.334.268**		**12.879.000.000**		**12.829.000.000**		**12.979.000.000**		**13.204.000.000**		**13.829.000.000**	**Bappelitbangda**
05.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB	BB	8.595.683.185	BB	9.081.513.034	BB	9.031.513.034	A	8.981.513.034	A	9.056.513.034	A	9.056.513.034	Bappelitbangda
05.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH															

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Outcome	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	86,87 %	87,00 %	4.184.857.011	90,00 %	2.727.486.966	92,00 %	2.727.486.966	94,00 %	2.927.486.966	96,00 %	3.077.486.966	97 %	3.702.486.966	Bappelitbangda
		Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	89,36 %	90,00 %		92,00 %		94,00 %		96,00 %		97,00 %		98 %		
		Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	86,18 %	87,00 %		90,00 %		92,00 %		94,00 %		96,00 %		97 %		
05.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA-PD dengan RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	35,21 %	65,00 %	1.464.794.072	70,00 %	1.070.000.000	75,00 %	1.070.000.000	80,00 %	1.070.000.000	85,00 %	1.070.000.000	90 %	1.070.000.000	Bappelitbangda
Outcome	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA-PD dengan RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	37,23 %	65,00 %		70,00 %		75,00 %		80,00 %		85,00 %		90 %		
Outcome	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA-PD dengan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	33,54 %	65,00 %		70,00 %		75,00 %		80,00 %		85,00 %		90 %		
05.02	**UNSUR KEUANGAN**				**33.970.416.746**		**36.076.305.699**		**36.380.933.159**		**37.981.610.414**		**39.337.287.669**		**41.254.760.237**	**BPKAD**
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	B	9.920.178.445	BB	12.026.067.397	BB	12.289.532.482	BB	12.808.381.732	BB	13.219.247.963	BB	13.393.540.141	BPKAD
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	18,98 %	19,05 %	22.510.994.667	19,12 %	22.510.994.667	19,19 %	22.536.764.608	19,26 %	23.587.499.892	19,33 %	24.477.286.130	19,40 %	26.204.058.986	BPKAD
Outcome	Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	90,03 %	90,10 %		90,17 %		90,31 %		90,38 %		90,45 %		90,52 %		
Outcome	Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	49,95 %	50,02 %		50,09 %		50,16 %		50,23 %		50,30 %		50,3 7%		

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	13,98 %	14,05 %	1.539.243.635	14,12 %	1.539.243.635	14,19 %	1.554.636.069	14,26 %	1.585.728.790	14,33 %	1.640.753.576	14,40 %	1.657.161.110	BPKAD
05.02	**UNSUR KEUANGAN**				**28.996.527.726**		**29.500.000.000**		**29.700.000.000**		**30.200.000.000**		**30.700.000.000**		**31.700.000.000**	**BP2RD**
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	B	26.771.072.496	B	26.918.000.000	B	26.982.560.000	B	27.415.000.000	B	28.090.000.000	B	28.712.000.000	BP2RD
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Rp. 76.736.334.616	88.818 Juta	2.225.455.230	97.699 Juta	2.582.000.000	107.469 Juta	2.717.440.000	118.216 Juta	2.785.000.000	130.038 Juta	2.610.000.000	143.042 Juta	2.988.000.000	BP2RD
		Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	Rp. 19.570.454.006	38.800 Juta		39.576 Juta		40.367 Juta		41,174 Juta		43.233 695Juta		45.395 Juta		
		Menurunnya Piutang Pajak Daerah	Rp. 11.593.928.418	5.217 Juta		2.318 Juta		1.739 Juta		1.159 Juta		695 Juta		463 Juta		
Outcome	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Nilai Survey Kepuasan Wajib Pajak terhadap Pelayanan Pajak Daerah (IKM)	0	78,35		78,90		79,45		80,00		80,55		81,10		
05.03	**UNSUR KEPEGAWAIAN**				**30.753.611.401**		**18.500.000.000**		**18.700.000.00**		**19.050.000.000**		**19.670.000.000**		**20.670.000.000**	**BKPSDMD**
05.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB	BB	24.038.922.421	BB	11.887.000.000	BB	11.562.000.000	A	11.562.000.000	A	11.962.000.000	A	12.612.000.000	BKPSDMD
05.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan Formasi	80,86 %	95,00 %	6.714.688.980	85,71 %	6.613.000.000	88,57 %	7.138.000.000	91,43 %	7.488.000.000	94,29 %	7.708.000.000	98,57 %	8.058.000.000	BKPSDMD
Outcome	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	95,00 %	95,00 %		35,80 %		36,42 %		36,54 %		32,97 %		33,52 %		
Outcome	Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya	95,00 %	78,03 %		78,03 %		83,62 %		89,20 %		94,66 %		98,91 %		
Outcome	Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	95,00 %	66,00 %		66,00 %		76,00 %		80,00 %		90,00 %		98,00 %		
05.05	**UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**1.384.602.407**		**1.121.000.000**		**1.321.000.000**		**1.421.000.000**		**1.421.000.000**		**1.521.000.000**	**Bappelitbangda**

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
05.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	93,35 %	95,50 %	1.384.602.407	95,75 %	971.000.000	96,00 %	1.171.000.000	96,25 %	1.271.000.000	96,50 %	1.271.000.000	97,00 %	1.371.000.000	Bappelitbangda
05.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	17,42 %	n/a	0	19,49 %	150.000.000	20,27 %	150.000.000	21,09 %	150.000.000	21,95 %	150.000.000	22,84 %	150.000.000	Bappelitbangda
06	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**12.668.522.180**		**15.000.000.000**		**15.200.000.000**		**15.700.000.000**		**16.200.000.000**		**17.200.000.000**	
06.01	**INSPEKTORAT DAERAH**				**12.668.522.180**		**15.000.000.000**		**15.200.000.000**		**15.700.000.000**		**16.200.000.000**		**17.200.000.000**	**Inspektorat**
06.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB	BB	8.186.546.650	BB	9.500.000.000	BB	9.540.000.000	A	9.810.000.000	A	10.124.450.000	AA	10.850.000.000	Inspektorat
06.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN															
Outcome	Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, baik yang Bersifat Anggaran atapun Proses dan Kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK-RI	76,00 %	80,00 %	2.561.970.000	84,00 %	4.850.000.000	88,20 %	4.980.000.000	92,61 %	5.190.000.000	97,24 %	5.355.550.000	100 %	5.600.000.000	Inspektorat
		Tindaklanjut Rekomendasi Inspektorat	46,84 %	60,00 %		63,00 %		66,15 %		69,46 %		72,93 %		76,58 %		
06.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI															
Outcome	Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tindaklanjut Rekomendasi BPK T.A N-1	Level 3	Level 3	1.920.005.530	Level 3	650.000.000	Level 3	680.000.000	Level 4	700.000.000	Level 4	720.000.000	Level 4	750.000.000	Inspektorat
07	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**111.756.355.520**		**116.950.000.000**		**117.750.000.000**		**118.825.000.000**		**119.900.000.000**		**124.775.000.000**	
07.01	**KECAMATAN**				**21.751.371.325**		**22.450.000.000**		**22.550.000.000**		**22.675.000.000**		**22.800.000.000**		**23.425.000.000**	**Kec. Ternate Utara**

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	BB	16.624.563.175	BB	17.228.000.000	BB	17.275.000.000	BB	17.300.000.000	BB	17.325.000.000	BB	17.325.000.000	Kec. Ternate Utara
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
Outcome	Meningkatnya Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Dilayani	75,00 %	80,00 %	61.200.000	85,00 %	72.000.000	90,00 %	90.000.000	95,00 %	115.000.000	97,00 %	140.000.000	100 %	140.000.000	Kec. Ternate Utara
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Outcome	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	47,00 %	100 %	3.022.608.150	100 %	3.018.000.000	100 %	3.018.000.000	100 %	3.043.000.000	100 %	3.068.000.000	100 %	3.068.000.000	Kec. Ternate Utara
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
Outcome	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Antar Masyarakat dan Terpeliharanya Situasi Kondusif Dalam Wilayah Kecamatan	Persentase Konflik yang Diselesaikan	85,00 %	100 %	6.000.000	100 %	10.000.000	100 %	30.000.000	100 %	55.000.000	100 %	80.000.000	100 %	80.000.000	Kec. Ternate Utara
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															
Outcome	Meningkatnya Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Forum-forum Pemerintahan	85,00 %	100 %	93.000.000	100 %	162.000.000	100 %	192.000.000	100 %	217.000.000	100 %	242.000.000	100 %	242.000.000	Kec. Ternate Utara
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA															
Outcome	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Tingkat Keaktifan Perangkat Kelurahan	85,00 %	100 %	1.944.000.000	100 %	1.960.000.000	100 %	1.945.000.000	100 %	1.945.000.000	100 %	1.945.000.000	100 %	2.570.000.000	Kec. Ternate Utara
07.01	**KECAMATAN**				**24.690.967.920**		**26.000.000.000**		**26.100.000.000**		**26.225.000.000**		**26.350.000.000**		**26.975.000.000**	**Kec. Ternate Tengah**
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	BB	19.086.373.861	BB	20.462.459.500	BB	20.464.500.000	BB	20.489.500.000	BB	20.514.500.000	BB	20.514.500.000	Kec. Ternate Tengah

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
Outcome	Meningkatnya Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Dilayani	78,44 %	n/a	0	93.75 %	67.540.500	100 %	105.500.000	100 %	130.500.000	100 %	155.500.000	100 %	155.500.000	Kec. Ternate Tengah
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Outcome	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	100 %	100 %	3.312.607.380	100 %	3.320.000.000	100 %	3.340.000.000	100 %	3.365.000.000	100 %	3.390.000.000	100 %	3.390.000.000	Kec. Ternate Tengah
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
Outcome	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Antar Masyarakat dan Terpeliharanya Situasi Kondusif Dalam Wilayah Kecamatan	Persentase Konflik yang Diselesaikan	n/a	n/a	0	100 %	43.000.000	100 %	70.000.000	100 %	95.000.000	100 %	120.000.000	100 %	120.000.000	Kec. Ternate Tengah
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															
Outcome	Meningkatnya Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Forum-forum Pemerintahan	88 %	88 %	89.986.680	100 %	142.000.000	100 %	155.000.000	100 %	180.000.000	100 %	205.000.000	100 %	205.000.000	Kec. Ternate Tengah
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA															
Outcome	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Tingkat Keaktifan Perangkat Kelurahan	100 %	100 %	2.202.000.000	100 %	1.965.000.000	100 %	1.965.000.000	100 %	1.965.000.000	100 %	1.965.000.000	100 %	2.590.000.000	Kec. Ternate Tengah
07.01	**KECAMATAN**				**25.775.635.150**		**26.250.000.000**		**26.350.000.000**		**26.550.000.000**		**26.750.000.000**		**27.250.000.000**	**Kec. Ternate Selatan**
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	B	19.629.358.150	BB	20.039.900.740	BB	20.059.900.740	BB	20.084.900.740	BB	20.109.900.740	BB	20.109.900.740	Kec. Ternate Selatan
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Dilayani	80,04 %	92.63 %	16.660.000	93.67 %	16.660.000	93.69 %	36.660.000	93.74 %	111.660.000	94.07 %	186.660.000	95.03 %	186.660.000	Kec. Ternate Selatan

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Outcome	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	50,00 %	100 %	3.550.000.000	100 %	3.579.500.000	100 %	3.599.500.000	100 %	3.624.500.000	100 %	3.649.500.000	100 %	3.649.500.000	Kec. Ternate Selatan
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
Outcome	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Antar Masyarakat dan Terpeliharanya Situasi Kondusif dalam Wilayah Kecamatan	Persentase Konflik yang Diselesaikan	85,00 %	n/a	0	n/a	0	100 %	40.000.000	100 %	90.000.000	100 %	140.000.000	100 %	140.000.000	Kec. Ternate Selatan
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															
Outcome	Meningkatnya Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Forum-forum Pemerintahan	85,00 %	100 %	80.000.000	100 %	117.499.260	100 %	117.499.260	100 %	142.499.260	100 %	167.499.260	100 %	167.499.260	Kec. Ternate Selatan
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA															
Outcome	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Tingkat Keaktifan Perangkat Kelurahan	100 %	100 %	2.499.617.000	100 %	2.496.440.000	100 %	2.496.440.000	100 %	2.496.440.000	100 %	2.496.440.000	100 %	2.996.440.000	Kec. Ternate Selatan
07.01	**KECAMATAN**				**9.406.168.160**		**9.800.000.000**		**9.900.000.000**		**10.025.000.000**		**10.150.000.000**		**10.775.000.000**	**Kec. Pulau Ternate**
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	BB	7.360.055.460	BB	7.729.000.000	BB	7.760.000.000	BB	7.785.000.000	BB	7.810.000.000	BB	7.810.000.000	Kec. Pulau Ternate
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Dilayani	75,00 %	80,00 %	34.378.520	85,00 %	40.000.000	90,00 %	70.000.000	95,00 %	95.000.000	97,00 %	120.000.000	100 %	120.000.000	Kec. Pulau Ternate

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Outcome	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	47,00 %	100 %	1.352.658.920	100 %	1.356.000.000	100 %	1.375.000.000	100 %	1.400.000.000	100 %	1.425.000.000	100 %	1.425.000.000	Kec. Pulau Ternate
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
Outcome	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Antar Masyarakat dan Terpeliharanya Situasi Kondusif dalam Wilayah Kecamatan	Persentase Konflik yang Diselesaikan	85,00 %	100 %	11.811.260	100 %	15.000.000	100 %	35.000.000	100 %	60.000.000	100 %	85.000.000	100 %	85.000.000	Kec. Pulau Ternate
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															
Outcome	Meningkatnya Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Forum-forum Pemerintahan	85,00 %	100 %	118.964.000	100 %	115.000.000	100 %	115.000.000	100 %	140.000.000	100 %	165.000.000	100 %	165.000.000	Kec. Pulau Ternate
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA															
Outcome	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Tingkat Keaktifan Perangkat Kelurahan	85,00 %	100 %	528.300.000	100 %	545.000.000	100 %	545.000.000	100 %	545.000.000	100 %	545.000.000	100 %	1.170.000.000	Kec. Pulau Ternate
07.01	**KECAMATAN**				**10.047.483.199**		**10.250.000.000**		**10.350.000.000**		**10.475.000.000**		**10.600.000.000**		**11.225.000.000**	**Kec. Ternate Barat**
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	B	7.612.677.059	BB	7.873.442.300	BB	8.031.980.540	BB	8.056.980.540	BB	8.081.980.540	BB	8.081.980.540	Kec. Ternate Barat
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Dilayani	75,00 %	78,00 %	26.704.200	80,00 %	32.434.200	85,00 %	46.355.560	87,00%	71.355.560	90,00 %	96.355.560	95,00 %	96.355.560	Kec. Ternate Barat

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Outcome	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	80,00 %	100 %	1.623.121.400	100 %	1.618.335.400	100 %	1.548.663.900	100 %	1.573.663.900	100 %	1.598.663.900	100 %	1.598.663.900	Kec. Ternate Barat
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
Outcome	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Antar Masyarakat dan Terpeliharanya Situasi Kondusif dalam Wilayah Kecamatan	Persentase Konflik yang Diselesaikan	85,00 %	100 %	24.842.100	100 %	20.562.500	100 %	70.000.000	100 %	95.000.000	100 %	120.000.000	100 %	120.000.000	Kec. Ternate Barat
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															
Outcome	Meningkatnya Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Forum-forum Pemerintahan	85,00 %	100 %	172.418.440	100 %	151.905.600	100 %	110.000.000	100 %	135.000.000	100 %	160.000.000	100 %	160.000.000	Kec. Ternate Barat
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA															
Outcome	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Tingkat Keaktifan Perangkat Kelurahan	100 %	100 %	587.720.000	100 %	553.320.000	100 %	543.000.000	100 %	543.000.000	100 %	543.000.000	100 %	1.168.000.000	Kec. Ternate Barat
07.01	**KECAMATAN**				**5.775.940.700**		**6.300.000.000**		**6.400.000.000**		**6.525.00.000**		**6.650.000.000**		**7.275.000.000**	**Kec. Pulau Hiri**
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	B	3.831.400.920	BB	4.399.000.000	BB	4.419.000.000	BB	4.444.000.000	BB	4.469.000.000	BB	4.469.000.000	Kec. Pulau Hiri
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
Outcome	Meningkatnya Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Dilayani	81,00 %	100 %	39.999.440	100 %	15.000.000	100 %	45.000.000	100 %	70.000.000	100 %	95.000.000	100 %	95.000.000	Kec. Pulau Hiri

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Outcome	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	n/a	100%	1.358.606.130	100 %	1.345.000.000	100 %	1.345.000.000	100 %	1.370.000.000	100 %	1.395.000.000	100 %	1.395.000.000	Kec. Pulau Hiri
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
Outcome	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Antar Masyarakat dan Terpeliharanya Situasi Kondusif dalam Wilayah Kecamatan	Persentase Konflik yang Diselesaikan	100 %	100%	19.998.640	100 %	20.000.000	100 %	50.000.000	100 %	75.000.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	Kec. Pulau Hiri
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															
Outcome	Meningkatnya Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Forum-forum Pemerintahan	100 %	100%	189.935.570	100 %	175.000.000	100 %	195.000.000	100 %	195.000.000	100 %	220.000.000	100 %	220.000.000	Kec. Pulau Hiri
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA															
Outcome	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Tingkat Keaktifan Perangkat Kelurahan	100 %	100%	336.000.000	100 %	346.000.000	100 %	346.000.000	100 %	371.000.000	100 %	371.000.000	100 %	996.000.000	Kec. Pulau Hiri
07.01	**KECAMATAN**				**7.299.504.565**		**8.100.000.000**		**8.200.000.000**		**8.325.000.000**		**8.450.000.000**		**9.075.000.000**	**Kec. Moti**
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	B	5.313.969.405	BB	6.041.268.110	BB	6.061.268.110	BB	6.086.268.110	BB	6.111.268.110	BB	6.111.268.110	Kec. Moti
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Dilayani	74,00 %	n/a	0	100 %	55.000.000	100 %	85.000.000	100 %	110.000.000	100 %	135.000.000	100 %	135.000.000	Kec. Moti

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Outcome	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	100 %	100 %	1.409.767.030	100 %	1.411.831.890	100 %	1.431.831.890	100 %	1.456.831.890	100 %	1.481.831.890	100 %	1.481.831.890	Kec. Moti
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
Outcome	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Antar Masyarakat dan Terpeliharanya Situasi Kondusif dalam Wilayah Kecamatan	Persentase Konflik yang Diselesaikan	100 %	100 %	34.776.000	100 %	18.900.000	100 %	48.900.000	100 %	73.900.000	100 %	98.900.000	100 %	98.900.000	Kec. Moti
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															
Outcome	Meningkatnya Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Forum-forum Pemerintahan	100 %	100 %	177.992.130	100 %	210.000.000	100 %	210.000.000	100 %	235.000.000	100 %	260.000.000	100 %	260.000.000	Kec. Moti
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA															
Outcome	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Tingkat Keaktifan Perangkat Kelurahan	100 %	100 %	363.000.000	100 %	363.000.000	100 %	363.000.000	100 %	363.000.000	100 %	363.000.000	100 %	988.000.000	Kec. Moti
07.01	**KECAMATAN**				**7.009.284.501**		**7.800.000.000**		**7.900.000.000**		**8.025.000.000**		**8.150.000.000**		**8.775.000.000**	**Kec. Batang Dua**
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	B	4.944.796.021	A	5.837.008.000	A	4.578.050.747	BB	4.603.050.747	BB	4.628.050.747	BB	4.628.050.747	Kec. Batang Dua
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Dilayani	80,04 %	92,63 %	51.896.000	93,67 %	22.000.000	93,69 %	200.704.727	93,74 %	225.704.727	94,07 %	250.704.727	95,03 %	250.704.727	Kec. Batang Dua

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Outcome	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kelurahan	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	50,00 %	100 %	1.396.733.740	100 %	1.390.000.000	100 %	2.078.959.606	100 %	2.103.959.606	100 %	2.128.959.606	100 %	2.128.959.606	Kec. Batang Dua
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
Outcome	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Antar Masyarakat dan Terpeliharanya Situasi Kondusif dalam Wilayah Kecamatan	Persentase Konflik yang Diselesaikan	85,00 %	100%	17.500.000	n/a	0	100 %	166.308.727	100 %	191.308.727	100 %	216.308.727	100 %	216.308.727	Kec. Batang Dua
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															
Outcome	Meningkatnya Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Forum-forum Pemerintahan	85,00 %	100%	249.366.740	100 %	202.000.000	100 %	526.984.193	100 %	551.984.193	100 %	576.984.193	100 %	576.984.193	Kec. Batang Dua
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA															
Outcome	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Tingkat Keaktifan Perangkat Kelurahan	100 %	100%	348.992.000	100 %	348.992.000	100 %	348.992.000	100 %	348.992.000	100 %	348.992.000	100 %	973.992.000	Kec. Batang Dua
08	**UNSUR PEMERNTAHAN UMUM**				**11.142.668.016**		**10.500.000.000**		**10.600.000.000**		**10.750.000.000**		**36.551.846.730**		**11.000.000.000**	
08.01	**UNSUR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**11.142.668.016**		**10.500.000.000**		**10.600.000.000**		**10.750.000.000**		**36.551.846.730**		**11.000.000.000**	**Badan Kesbangpol**
08.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Outcome	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	B	5.819.667.046	B	5.305.610.795	B	5.310.443.755	B	5.391.768.951	BB	5.625.560.309	BB	5.632.996.077	Badan Kesbangpol
08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN															
Outcome	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	89,30 %	90,00 %	1.859.173.190	92,30 %	1.850.000.000	93,50 %	1.571.504.052	94,25 %	1.500.000.000	95,00 %	1.500.000.000	96,20 %	1.648.951.730	Badan Kesbangpol

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah (Lanjutan)

KODE BIDANG URUSAN DAN PROGRAM	BIDANG / URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		PD PENANG-GUNG JAWAB
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK															
Outcome	Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	92,00 %	93,50 %	1.649.355.990	93,75 %	1.550.000.000	94,67 %	2.526.162.988	97,20 %	2.526.162.988	98,50 %	28.234.397.216	100 %	2.526.162.988	Badan Kesbangpol
08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN															
Outcome	Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	75,00 %	76,50 %	274.989.500	76,75 %	121.693.882	77,10 %	121.693.882	78,25 %	261.872.738	79,35 %	121.693.882	80,65 %	121.693.882	Badan Kesbangpol
08.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA															
Outcome	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100 %	100 %	139.896.080	100 %	377.500.000	100 %	75.000.000	100 %	75.000.000	100 %	75.000.000	100 %	75.000.000	Badan Kesbangpol
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL															
Outcome	Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	86,25 %	87,90 %	1.399.586.210	88,25 %	1.295.195.323	89,00 %	995.195.323	91,05 %	995.195.323	93,45 %	995.195.323	95,75 %	995.195.323	Badan Kesbangpol
JUMLAH					**1.101.982.939.130**		**1.115.526.305.699**		**1.122.255.933.159**		**1.134.551.610.414**		**1.172.499.134.399**		**1.181.134.760.237**	

4.4 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja daerah disusun untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Ternate. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026.

Selanjutnya indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota sesuai dengan kewenangan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program perangkat daerah yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama Kota Ternate disajikan pada tabel 4.2, sedangkan tabel Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah disajikan pada tabel 4.3.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Kota Ternate

No	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	75,03	75,85	76,87	76,93	76,97	77,00	77,12
2	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	46,92	47,90	47,92	47,96	47,99	48,00	49,21
3	Indeks Ketimpangan Infrastruktur	Indeks	n/a	0,316	0,300	0,285	0,270	0,255	0,240
4	Indeks Infrastruktur	Indeks	n/a	60	65	70	75	80	85
5	Indeks Konektivitas	Indeks	50,10	52,73	57,21	57,21	59,84	61,70	61,70
6	Indeks Pembangunan Manusia	Tahun	82,59	82,61	82,63	82,67	82,69	82,71	82,89
7	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	12	12,09	12,11	12,4	12,16	12,19	12,35
8	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,67	15,79	15,80	15,82	15,83	15,85	15,90
9	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,98	72,60	72,65	72,73	72.93	73,07	73,15
10	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	16,6	14,0	13,05	11,64	11,00	10,23	9,03
11	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,438	0,360	0,340	0,320	0,310	0,300	0,290
12	Kota Layak Anak	Nilai	860	865	869	873	878	880	891
13	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	59,17	60,05	62,13	62,85	62,997	63,01	64,21
14	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,02	63	65	68	70	72	74
15	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	80,04	92,63	93,67	93,69	93,74	94,07	95,03
16	Indeks Sistem Merit	Indeks	60,61	63,07	65,12	67,45	70,02	74,32	75,64
17	SAKIP	Nilai	B	B	BB	BB	BB	BB	BB
18	SPBE	Poin	1,89	1,96-2,10	2,24	2,38	2,52	2,66	2,80
19	Nilai MCP KPK	Nilai	80,05	80,20	80,51	80,63	80,73	80,85	81,05
20	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	81	80	81	81,54	81,65	81,75	81,93
21	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	Persen	90	92	95	96	98	98	98
22	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	100	100	100	100	100	100	100
23	Indeks Survei Penilaian Integritas	Nilai	59,88	66,58	67,00	67,08	67,11	67,43	67,65
24	Rasio PAD Terhadap PDRB	Persen	6,62	6,68	6,75	6,81	6,94	7,07	7,14
25	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	B (70,28)	B (72,36)	B (75,03)	B (75,20)	B (75,57)	B (75,90)	B (76,05)
26	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	8,83	8,57	8,76	8,87	8,89	9,03	9,06
27	Pendapatan Per Kapita	Rp. Juta	70,949	74,496	78,221	82,132	86,239	90,551	90,721
28	Indeks Gini	Indeks	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,16	0,14
29	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	2,31	2,90-2,91	3,06	3,21	3,37	3,54	3,74
30	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	0,8	0,10	0,12	0,14	0,17	0,20	0,23
31	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,42	5,20	4,86	4,80	4,76	4,70	4,73
32	Nilai Investasi (Miliar)	Rupiah	256	273	301	324	354	371	379
33	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	13,26	14,03	14,28	14,60	14,81	15,00	15,03
34	Tingkat Kemiskinan	Persen	3,14	3,00	2,98	2,97	2,85	2,82	2,74
35	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Persen	8,01	10,93	11,01	12,90	13,01	14,89	14,91
36	Penurunan Intensitas Emisi GRK	(Ton Co_2)	40,5	38	36,4	35,5	34,9	34,9	34,5
37	Indeks Kota Berkelanjutan	Indeks	n/a	2000-2500	2500-3000	3000-3500	3500-4000	4000-4500	4500-5000
38	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,34	79,66	79,83	80,00	80,17	80,35	80,52
39	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	91,97	100-99,11	98,21	97,31	96,41	95,52	94,62

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2025

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**								
1	Konsumsi Listrik per Kapita	(kWh/Kapita)	1.131,86	1.189,48	1.247,10	1.304,72	1.362,34	1.419,86	1.477,58
2	Kapasitas Air Baku	(m_3/detik)	0	525,6	613,2	700,8	788,4	876	963,6
3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	91,52	92,34	93,16	93,97	94,79	95,61	96,43
4	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	88,24	84,14	86,21	88,57	89,13	89,70	90,11
5	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	22,16	13,6	13,3	13,00	12,98	12,85	12,60
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,34	79,66	79,83	80	80,17	80,35	80,52
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	18,02	21	23,97	26,95	29,92	32,97	35,88
8	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen RT	70,18	71,39	72,61	73,82	75,03	76,25	77,46
9	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	98,43	98,50	98,58	98,65	98,73	98,80	98,88
10	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	91,97	100-99,11	98,21	97,31	96,41	95,52	94,62
11	Penurunan Intensitas Emisi GRK	(Ton CO_2)	40,5	38	36,4	35,5	34,9	34,9	34,5
12	Penduduk Kota Ternate	Ribu Jiwa	210,84	216,77	219,07	221,32	223,51	225,60	227,63
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	8,83	8,57	8,76	8,87	8,89	9,03	9,06
2	PDRB Per Kapita	Rp. Juta	70,940	74,496	78,221	82,132	86,239	90,551	90,721
3	Indeks Gini	Indeks	0,22	0,21	0,20	0,19	0,18	0,16	0,14
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	3,14	3,00	2,98	2,97	2,85	2,82	2,74
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,42	5,20	4,86	4,80	4,76	4,70	4,73
6	Indeks Pembangunan Manusia	Tahun	82,59	82,61	82,63	82,67	82,69	82,71	82,89
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,98	72,60	72,65	72,73	72.93	73,07	73,15
8	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,005	0,007	0,010	0,012	0,014	0,017	0,020
9	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	16,6	14,0	13,05	11,64	11,00	10,23	9,03
10	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan	Persen	79,82	93,11	94,05	95,23	96,45	97,12	98,45
11	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	12	12,09	12,11	12,4	12,16	12,19	12,35
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,67	15,79	15,80	15,82	15,83	15,85	15,90
13	Angka Literasi	Persen	58,02	58,25	58,62	58,83	59,01	59,23	59,56
14	Angka Numerasi	Persen	53,09	53,29	53,43	53,67	53,87	54,05	5428
15	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	72,16	72,24	72,67	72,86	72,92	73,01	73,25
16	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	42,51	47,58	52,64	57,71	62,77	67,84	72.90
17	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100	100
18	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen	0,1	0,5	0,6	0,8	0,9	0,10	0,11
19	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Persen	75,03	75,85	76,87	76,93	76,97	77,00	77,12
20	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	46,92	47,90	47,92	47,96	47,99	48,00	49,21
21	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,24	92,34	92,68	93,01	93,25	93,50	93,80
22	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	78,02	78,06	78,10	78,14	74,18	74,22	74,26
23	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,438	0,360	0,340	0,320	0,310	0,300	0,290
24	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Persen	66,75	66,82	66,85	66,88	66,91	66,94	66,96
25	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	86	86,21	86,25	86,30	86,35	86,40	86,45

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (Lanjutan)

No	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
1	Rasio Ketergantungan	Persen	41,36	42,75	43,88	44,70	45,04	45,51	45,84
2	Indeks Pendidikan	Persen	0,784	0,789	0,792	0,797	0,802	0,807	0,821
3	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	2,31	2,90-2,91	3,06	3,21	3,37	3,54	3,74
4	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Persen	0,88	1,02	1.05	1,08	1,11	1,14	1,17
5	Rasio Kewirausahaan	Persen	3,5	3,7	3,9	3,12	3,15	3,18	3,21
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	63,58	63,62	63,66	63,70	63,74	63,78	63,82
7	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	53,58	53,62	53,68	53,72	53,77	53,81	53,85
8	Rasio Kemandirian Daerah	Persen	9,57	9,59	9,61	9,63	9,66	9,69	9,72
9	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau	Persen	69,00	70,72	72,43	74,15	75,86	77,58	79,29
10	Jumlah Desa/Kelurahan Mandiri	Jumlah	4	5	5	6	7	7	7
11	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	5,04	5,08	5,12	5,18	5,24	5,32	5,38
12	Laju Inflasi	Persen	1,66	1,63	1,60	1,57	1,54	1,51	1,47
13	*Return on Asset* (RoA) BUMD	Persen	1,005	1,964	2,923	3,882	4,841	5,800	6,759
14	Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD)	Persen	n/a	7,04	7,07	7,10	7,13	7,16	7,20
15	Indeks Daya Saing Daerah	Skor	3,93	4,02	4,05	4,08	4,011	4,014	4,017
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
1	SPBE	Poin	1,89	1,96-2,10	2,24	2,38	2,52	2,66	2,80
2	Indeks Pelayanan Publik	Persen	80,04	92,63	93,67	93,69	93,74	94,07	95,03
3	Indeks Survei Penilaian Integritas	Nilai	59,88	66,58	67,00	67,08	67,11	67,43	67,65
4	Persentase Penegakan Perda	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Capaian Aksi HAM	Persen	22,20	22,50	22,80	22,11	22,14	22,17	22,21
6	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	81,00	80,00	81,00	81,54	81,65	81,75	81,93
7	Indeks Rasa Aman	Persen	85,00	85,05	85,10	85,15	85,25	85,30	85,35
8	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Persen	75,00	75,05	75,10	75,15	75,20	75,25	75,30
9	Rasio Penduduk Terkena Tindak Kejahatan	Persen	0	0	0	0	0	0	0
10	Indeks Daya Saing Daerah	Skor	3,93	4,02	4,05	4,08	4,011	4,014	4,017
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**								
1	**Bidang Pendidikan**								
1	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 tahun Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Persen	108,69	108,72	108,75	108,78	108,81	108,84	108,88
2	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 tahun Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Persen	107,48	107,52	107,55	107,58	107,62	107,65	107,68
3	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 tahun Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Persen	79,16	82,2	85,17	88,14	91,11	93,65	96,20
4	Pemerataan Distribusi Guru Sesuai Kebutuhan Sekolah	Persen	20,00	20,00	30,00	40,00	60,00	80,00	100
5	Angka Partisipasi Kasar SD	Persen	108,69	108,72	108,75	108,78	108,81	108,84	108,88
6	Angka Partisipasi Kasar SMP	Persen	107,48	107,52	107,55	107,58	107,62	107,65	107,68
7	Angka Partisipasi Murni SD	Persen	98,01	100	100	100	100	100	100
8	Angka Partisipasi Murni SMP	Persen	81,08	100	100	100	100	100	100
9	A.1 Skor Kemampuan Literasi (SD)	Skor	48,75	51,25	53,75	56,25	58,75	61,25	63,75
10	A.1 Skor Kemampuan Literasi (SMP)	Skor	65,38	66,48	67,58	68,68	69,78	70,88	71,98
11	A.2 Skor Kemampuan Numerasi (SD)	Skor	43,67	46,57	49,47	52,37	55,27	58,17	61,07

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (Lanjutan)

No	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	A.2 Skor Kemampuan Numerasi (SMP)	Skor	58,78	60,28	61,78	63,28	64,78	66,28	67,78
13	B.10 Angka Partisipasi Sekolah (5-6) (PAUD)	Persen	79,16	82,20	85,17	88,14	91,11	93,65	96,20
14	B.13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 15 (SD/SMP)	Persen	99,64	99,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	B.15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	Persen	13,71	17,81	21,91	26,01	30,11	34,21	38,31
16	B.8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Persen	77,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	C.1 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	Persen	62,69	69,05	69,80	70,55	71,30	72,05	72,80
18	D.10 Iklim Inklusivitas (SD)	Persen	53,52	56,02	58,52	61,02	63,52	66,02	68,52
19	D.10 Iklim Inklusivitas (SMP)	Persen	54,30	56,70	59,10	61,50	63,90	66,30	68,70
20	D.4 Iklim Keamanan (SD)	Persen	68,45	69,35	70,25	71,15	72,05	72,95	73,85
21	D.4 Iklim Keamanan (SMP)	Persen	67,53	69,03	70,53	72,03	73,53	75,03	76,53
22	D.8 Iklim Kebinekaan (SD)	Persen	68,08	69,08	70,08	71,08	72,08	73,08	74,08
23	D.8 Iklim Kebinekaan (SMP)	Persen	68,73	69,73	70,73	71,73	72,73	73,73	74,73
24	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	n/a	n/a	n/a	35,00	40,00	45,00	50,00
25	Persentase Pendidik Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) Atau S1 Atau Memiliki Sertifikat	Persen	82,20	86,00	100	100	100	100	100
26	Persentase Pendidik Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) Atau S1 Atau Memiliki Sertifikat	Persen	92,35	95,25	100	100	100	100	100
27	Persentase Pendidik Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) Atau S1 Atau Memiliki Sertifikat	Persen	94,55	96,65	100	100	100	100	100
28	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	Persen	n/a	n/a	n/a	20	23	25	30
29	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persen	95,65	97,00	98,75	99,86	100	100	100
2	**Bidang Kesehatan**								
1	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Persen Per 100.000 KH	63,16	63,16	65,73	67,82	69,02	69,92	72,52
2	Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	16,6	14,00	13,05	11,64	11,00	10,23	9,03
3	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen	91,00	90,00	91,00	93,00	96,00	99,00	100
4	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persen	87,00	89,00	91,00	93,00	94,00	94,00	97,00
5	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persen	87,00	88,00	89,00	91,00	93,00	94,00	96,00
6	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	Persen	n/a	n/a	68,00	70,00	71,00	73,00	74,00
3	**Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
1	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persen	50,07	54,21	57,65	61,41	65,25	69,23	73,33
2	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	Persen	23,24	23,61	24,29	25,03	25,79	26,57	27,38

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (Lanjutan)

No	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	79,84	81,43	86,06	89,38	91,25	92,91	94,92
4	Persentase Peningkatan Sampah yang dikelola di TPA/TPST Regional	Persen	n/a	20	35,00	50,00	75,00	85,00	100
5	Persentase Peningkatan Rumah tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Persen	74,52	76,44	77,81	81,00	83,71	86,04	88,89
6	Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik	Persen	59,83	64,45	69,18	73,94	78,81	83,71	88,89
7	Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik	Persen	54,03	58,06	60,48	62,90	65,32	67,74	70,16
8	Jumlah Capaian Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kawasan	2	1	4	1	1	1	1
9	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	83,44	83,65	87,51	89,69	91,85	93,88	95,76
10	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persen	n/a	15,00	30,00	30,00	30,00	45,00	60,00
11	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Persen	85,00	80,00	62,00	45,00	30,00	16,00	6,00
4	**Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**								
1	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	0	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Persen	18,00	26,00	34,00	41,00	48,00	53,00	58,00
3	Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani	Persen	50,00	16,00	21,00	1,63	1,63	3,22	6,450
4	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	15,00	15,00	10,00	17,00	25,00	33,00	15,00
5	**Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**								
	SATPOL PP								
1	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	50,00	50,00	60,00	70,00	75,00	80,00	90,00
2	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	100	98,00	96,00	92,00	93,00	92,00	92,00
3	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persen	45,00	45,00	45,00	51,00	51,00	58,00	59,00
4	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	24,00	26,00	26,00	51,00	51,00	77,00	77,00
	BPBD								
1	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana dan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	76,70	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Dinas Pemadam Kebakaran								
1	Persentase Meningkatnya Kemampuan Penanganan & Penyelamatan Terhadap Bencana Kebakaran & Non Kebakaran	Persen	27,00	40,00	60,00	73,00	87,00	100	100
2	Bencana Kebakaran & Non Kebakaran	Persen	50,00	63,00	75,00	88,00	100	100	100
3	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persen	50,00	50,00	50,00	63,00	75,00	88,00	100

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (Lanjutan)

No	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	25,00	25,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
6	**Bidang Sosial**								
1	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di dalam Panti Rehabilitasi Sosial	Persen	87,00	89,00	91,00	93,00	95,00	97,00	100
2	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/ AIDS dan NAPZA	Persen	77,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	90,00
3	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi/Kab/Kota pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	Persen	67,00	69,00	71,00	74,00	76,00	79,00	81,00
5	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	84,00	86,00	89,00	91,00	93,00	95,00	97,00
6	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	50,00	51,00	53,00	54,00	57,00	59,00	63,00
7	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	50,00	51,00	53,00	54,00	57,00	59,00	63,00
8	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	22,00	23,00	25,00	26,00	28,00	30,00	40,00
9	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	85,00	87,00	88,00	89,00	90,00	92,00	94,00
10	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	Persen	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Persen	8,00	8,00	8,00	10,00	10,00	15,00	15,00
12	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya	Persen	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial.	Persen	100	100	100	100	100	100	100
15	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola Dengan Baik	Taman Makam	3	3	3	3	3	3	3
7	**Bidang Tenaga Kerja**								
1	Persentase Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Persen	n/a	n/a	90,00	91,00	91,00	93,00	95,00

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (Lanjutan)

No	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Persen	80,00	80,40	80,00	80,20	80,40	80,40	85,00
3	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Orang	75,00	75,50	75,80	76,00	78,00	80,00	90,00
4	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Persen	2.116	2.328	2.515	2.742	3.934	3.110	3.577
8	**Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	10,00	20,00	30,00	30,00	40,00	40,00	50,00
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	51,59	54,59	57,99	60,59	63,59	66,59	69,59
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	95,55	95,75	96,32	96,78	97,00	97,84	98,65
4	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Persen	78,24	80,25	83,25	85,00	88,05	90,00	93,75
5	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persen	78,35	80,00	83,27	86,75	89,29	92,35	95,00
6	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	94,27	96,00	99,26	100	100	100	100
8	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Persen	84,14	86,14	86,14	86,64	86,74	87,24	87,74
9	**Bidang Pangan**								
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persen	n/a	n/a	n/a	11,75	12,29	12,98	13,47
2	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Po Persen in	88,80	90,60	92,50	94,40	96,30	98,10	100
3	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	Poin	74,39	74,44	74,49	74,54	74,59	74,64	74,69
4	Persentase Koefisien Variasi (Cv) Pangan Strategis (Beras)	Persen	n/a	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	11,54	11,00	9,00	7,00	5,00	3,00	0
6	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persen	88,00	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	100
10	**Bidang Pertanahan**								
1	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	Persen	n/a	n/a	n/a	16,00	33,34	49,67	53,34
2	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persen	67,00	78,00	89,00	75,00	75,00	75,00	75,00
3	Persentase Tanah yang Siap Didistribusikan	Persen	n/a	n/a	n/a	2,00	2,00	2,00	3,00
4	Persentase Tanah Kosong yang dikelola	Persen	25,00	12,50	12,50	20,50	12,50	29,50	29,50
5	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	Persen	21,00	19,00	n/a	23,00	23,00	28,00	66,67

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (Lanjutan)

No	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Persentase Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	Persen	n/a	n/a	33,33	46	57,44	67,88	78,32
7	Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah	Persen	n/a	n/a	8,00	16,67	33,00	33,00	33,00
11	**Bidang Lingkungan Hidup**								
1	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persen	11,10	11.10	27,80	44,40	66,70	77,80	94,40
2	Persentase Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persen	n/a	45,00	46,20	47,50	48,70	49,90	51,20
3	Persentase RTH Publik	Persen	12,53	12,60	12,60	13,00	14,00	14,40	15,00
4	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persen	n/a	n/a	7,5,00	15,00	22,50	30,00	37,50
5	Tingkat Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Persen	4,00	4,01	4,50	4,70	4,90	5,10	5,30
6	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	20,00	20,00	40,00	60,00	80,00	83,00	100
7	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	11,00	17,00	20,00	39,00	59,00	79,00	99
8	Persentase Partipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	50,00	50,00	50,00	50,00	75,00	75,00	100
9	Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persen	42,00	50,00	67,00	75,00	83,00	92,00	100
10	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Persen	n/a	55,00	57,00	59,00	61,00	63,00	65,00
11	Persentase Pengurangan Sampah	Persen	10,88	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
12	Persentase Penanganan Sampah	Persen	70,00	70,00	75,00	80,00	85,00	95,00	100
12	**Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil**								
1	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	46,00	48,00	50,00	60,00	70,00	80,00	100
2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	70,00	80,00	90,00	93,00	95,00	97,00	100
3	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	96,00	89,25	89,30	90,00	90,00	95,00	100
5	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	99,25	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	99,50	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persen	87,56	89,75	91,25	93,46	95,00	97,75	98,00
8	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	n/a	n/a	97,25	98,25	99,05	99,45	100
13	**Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
1	Angka Kelahiran Total *(Total Fertility Rate*/TFR)	Kelahiran	2,07	2,50	2,30	2,10	1,90	1,70	1,50
2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Rate* / ASFR 15-19)	Kelahiran	4,80	4,50	4,30	4,10	3,90	3,70	3,50
3	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / *Modern Contraceptive* (mCPR)	Persen	87,60	90,05	91,15	92,25	93,27	94,00	95,02
4	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)	Persen	6,94	6,12	5,92	5,57	5,33	5,01	4,91

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (Lanjutan)

No	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen	91,25	93,00	95,56	97,85	99,00	100	100
14	**Bidang Perhubungan**								
1	Persentase Konektivitas Darat	Persen	n/a	18,52	20,37	20,37	20,37	22,22	22,20
2	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	Persen	n/a	8,73	9,17	9,62	10,11	10,61	11,14
3	LoS (*Level of Service*)	Skor/Huruf	n/a	C	B	B	B	B	B
4	Persentase Konektivitas Laut	Persen	31,58	34,21	36,84	36,68	36,84	39,47	39,47
15	**Bidang Komunikasi dan Informatika**								
1	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	Persen	n/a	55,00	55,00	65,00	75,00	80,00	95,00
2	Persentase Aplikasi Informatika yang Dikembangkan	Persen	60,00	25,00	35,00	55,00	75,00	85,00	90,00
16	**Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**								
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	2,00	3,00	4,00	4,00	6,00	6,00	8,00
2	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaaan Koperasi	Persen	2,00	2,00	4,00	4,00	7,00	7,00	8,00
3	Persentase Koperasi Aktif	Persen	25,00	25,00	n/a	30,00	32,00	32,00	33,00
4	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Persen	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	20,00	22,00
5	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persen	n/a	n/a	9,00	10,00	11,00	11,00	13,00
6	Pertumbuhan Wirausaha	Unit	n/a	240	260	270	280	290	300
7	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Orang	n/a	45	45	45	45	45	45
8	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	Persen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	14,00	16,00
17	**Bidang Penanaman Modal**								
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Rupiah	243 M	n/a	285	300	325	350	379
2	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persen	48,90	n/a	60,90	63,53	66,25	69,05	72,67
3	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	92,00	94,65	96,23	98,75	100	100	100
4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persen	88,02	87,75	89,05	93,00	95,75	98,35	100
5	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persen	85,95	86,75	87,00	92,34	95,03	95,98	98,00
6	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti	Persen	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100
18	**Bidang Kepemudaan dan Olahraga**								
1	Rasio Wirausaha Pemuda	Persen	15,00	17,00	20,00	24,00	26,00	30,00	34,00
2	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Persen	65,75	66,50	71,00	72,85	73,56	75,00	76,00
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persen	78,00	80,00	85,00	86,00	87,00	90,00	91,00
19	**Bidang Statistik**								
1	Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	2,86	3,22	3,52	3,72	3,85	4,20	4,50

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (Lanjutan)

No	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
20	**Bidang Persandian**								
1	Persentase Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persen	50,00	60,00	50,00	60,00	70,00	80,00	95,00
21	**Bidang Kebudayaan**								
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persen	82,30	84,75	85,80	86,00	87,65	89,35	92,10
2	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persen	84,65	n/a	n/a	85,32	87,00	89,50	90,70
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Persen	85,00	85,00	90,00	95,00	95,00	97,00	100
4	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persen	87,55	90,00	92,35	97,85	95,45	97,85	100
5	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persen	86,98	90,00	100	100	100	100	100
6	Tingkat Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke Museum	Persen	4,15	n/a	4,25	5,70	6,85	7,32	7,92
22	**Bidang Perpustakaan**								
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Persen	63,59	64,59	65,78	67,98	69,05	71,45	73,65
2	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persen	82,25	83,75	85,05	87,00	89,28	93,00	92,36
23	**Bidang Kearsipan**								
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persen	83,92	85,55	86,73	88,05	91,27	93,48	95,78
2	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persen	95,05	96,75	98,00	100	100	100	100
24	**Bidang Kelautan dan Perikanan**								
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	30.125,11	30.668,15	30.951,67	31.112,33	31.533,78	31.892,51	31.892,51
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	24,00	26,95	30,84	35,29	40,38	46,21	48,21
3	Jumlah Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Kg/Kapita	n.a	42,97	43,79	44,60	45,43	46,24	46,24
25	**Bidang Pariwisata**								
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	3,52	3,56	3,60	3,63	3,67	3,70	3,74
2	Jumlah Tempat Wisata yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Lokasi	5	5	5	6	6	6	6
3	Persentase Media Pemasaran Pariwisata	Persen	15,15	15,30	15,45	15,60	15,75	15,90	16,06
4	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persen	n/a	4,51	4,55	4,60	4,64	4,69	4,73
5	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persen	39,60	40,00	40,40	40,80	41,10	41,60	42,00
26	**Bidang Pertanian**								
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Tanaman Perkebunan Serta Komoditas Peternakan	Ton	2.522,2	2.680,5	2.876,5	3.161	3.324	3.580,5	3.743
2	Cakupan Luas Lahan yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	0	120	130	140	150	130	120
3	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persen	68,00	67,00	70,00	75,00	80,00	85,00	95,00

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (Lanjutan)

No	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat PRA NKV atau NKV	Persen	30,00	70,00	80,00	90,00	96,00	99,00	99,00
5	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persen	60,00	70,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Persen	60,00	70,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
27	**Bidang Perdagangan**								
1	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persen	70,00	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00
2	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persen	9,60	9,50	9,60	9,30	9,10	9,40	8,20
3	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Fasilitas Promosi Dagang	Persen	10,20	10,40	10,80	12,60	14,50	16,40	18,20
5	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Persen	90,33	92,76	76,71	82,73	87,62	91,73	94,73
6	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	Persen	n/a	n/a	n/a	5,00	5,00	5,00	5,00
28	**Bidang Perindustrian**								
1	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persen	4,00	5,00	6,00	6,00	7,00	8,00	9,00
2	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persen	15,00	25,00	35,00	45,00	55,00	65,00	75,00
3	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Laporan	1	1	1	1	1	1	1
29	**Sekretariat Daerah**								
1	Dokumen LPPD	Laporan	1	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah Fasilitasi Bantuan sosial dan Keagamaan	Jumlah	4	4	5	5	6	6	7
3	Jumlah Perkada yang Diterbitkan	Perkada	11	12	13	15	17	19	20
4	Dokumen TPID	Laporan	1	1	1	1	1	1	1
5	Dokumen *Monitoring* dan Pengendalian	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2
6	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Persen	79,20	80,45	84,00	87,65	90,23	93,75	95,65
30	**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**								
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Ketentuan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persen	94,00	95,00	97,00	98,00	99,00	100	100
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
31	**Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**								
1	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	86,87	87,00	90,00	92,00	94,00	96,00	97,00
2	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persen	89,36	90,00	92,00	94,00	96,00	97,00	98,00
3	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	86,18	87,00	90,00	92,00	94,00	96,00	97,00

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (Lanjutan)

No	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA-PD dengan RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	35,21	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
5	Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA-PD dengan RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persen	37,23	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
6	Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA-PD dengan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	33,54	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
32	**Bidang Keuangan Daerah**								
	BPKAD								
1	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	18,98	19,05	19,12	19,19	19,26	19,33	19,40
2	Persentase Realisasi Anggaran Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	90,03	90,10	90,17	90,31	90,38	90,45	90,52
3	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persen	49,95	50,02	50,09	50,16	50,23	50,30	50,37
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	13,98	14,05	14,12	14,19	14,26	14,33	14,40
	BP2RD								
1	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Juta Rp.	76.736	88.818	97.699	107.469	118.216	130.038	143.042
2	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	Juta Rp	19.570	38.800	39.576	40.367	41,174	43.233	45.395
3	Menurunnya Piutang Pajak Daerah	Juta Rp	11.593	5.217	2.318	1.739	1.159	695	463
4	Nilai Survey Kepuasan Wajib Pajak terhadap Pelayanan Pajak Daerah (IKM)	Persen	n/a	78,35	78,90	79,45	80,00	80,55	81,10
33	**Bidang Kepegawaian**								
1	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan Formasi	Persen	80,06	95,00	85,71	88,57	91,43	94,29	98,57
2	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	95,00	95,00	35,80	36,42	36,54	32,97	33,52
3	Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya	Persen	95,00	78,03	78,03	83,62	89,20	94,66	98,91
4	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persen	95,00	66,00	66,00	76,00	80,00	90,00	98,00
34	**Bidang Penelitian dan Pengembangan**								
1	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	95,35	95,50	95,75	96,00	96,25	96,50	97,00
2	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	17,42	n/a	19,49	20,27	21,09	21,95	22,84
35	**Bidang Pengawasan**								
1	Tindaklanjut Rekomendasi BPK-RI	Persen	76,00	80,00	84,00	88,20	92,61	97,24	100
2	Tindaklanjut Rekomendasi Inspektorat	Persen	46,84	60,00	63,00	66,15	69,46	72,93	76,75
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tindaklanjut Rekomendasi BPK T.A N-1	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (Lanjutan)

No	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
36	**Bidang Kewilayahan**								
	Kecamatan Ternate Utara								
1	Persentase Masyarakat yang Dilayani	Persen	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	97,00	100
2	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	Persen	47,00	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Konflik yang Diselesaikan	Persen	85,00	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Forum-Forum Pemerintahan	Persen	85,00	100	100	100	100	100	100
5	Tingkat Keaktifan Perangkat Kelurahan	Persen	85,00	100	100	100	100	100	100
	Kecamatan Ternate Tengah								
1	Persentase Masyarakat yang Dilayani	Persen	78,44	n/a	93,75	100	100	100	100
2	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Konflik yang Diselesaikan	Persen	n/a	n/a	100	100	100	100	100
4	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Forum-Forum Pemerintahan	Persen	88,00	88,00	100	100	100	100	100
5	Tingkat Keaktifan Perangkat Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Kecamatan Ternate Selatan								
1	Persentase Masyarakat yang Dilayani	Persen	80,04	92,63	93,67	93,69	93,74	94,07	95,03
2	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	Persen	50,00	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Konflik yang Diselesaikan	Persen	85,00	n/a	n/a	100	100	100	100
4	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Forum-Forum Pemerintahan	Persen	85,00	100	100	100	100	100	100
5	Tingkat Keaktifan Perangkat Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Kecamatan Pulau Ternate								
1	Persentase Masyarakat yang Dilayani	Persen	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	97,00	100
2	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	Persen	47,00	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Konflik yang Diselesaikan	Persen	85,00	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Forum-Forum Pemerintahan	Persen	85,00	100	100	100	100	100	100
5	Tingkat Keaktifan Perangkat Kelurahan	Persen	85,00	100	100	100	100	100	100
	Kecamatan Ternate Barat								
1	Persentase Masyarakat yang Dilayani	Persen	75,00	78,00	80,00	85,00	87,00	90,00	95,00
2	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	Persen	80,00	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Konflik yang Diselesaikan	Persen	85,00	100	100	100	100	100	100

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (Lanjutan)

No	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Forum-Forum Pemerintahan	Persen	85,00	100	100	100	100	100	100
5	Tingkat Keaktifan Perangkat Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Kecamatan Pulau Hiri								
1	Persentase Masyarakat yang Dilayani	Persen	81,00	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Konflik yang Diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Forum-Forum Pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Tingkat Keaktifan Perangkat Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Kecamatan Moti								
1	Persentase Masyarakat yang Dilayani	Persen	74,00	n/a	100	100	100	100	100
2	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Konflik yang Diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Forum-Forum Pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Tingkat Keaktifan Perangkat Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Kecamatan Batang Dua								
1	Persentase Masyarakat yang Dilayani	Persen	80,04	92,63	93,67	93,69	93,74	94,07	95,03
2	Persentase Usulan Masyarakat yang Disetujui	Persen	50,00	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Konflik yang Diselesaikan	Persen	85,00	100	n/a	100	100	100	100
4	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Forum-Forum Pemerintahan	Persen	85,00	100	100	100	100	100	100
5	Tingkat Keaktifan Perangkat Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
37	**Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik**								
1	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	89,30	90,00	92,30	93,50	94,25	95,00	96,02
2	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persen	92,00	93,50	93,75	94,67	97,20	98,50	100
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	75,00	76,50	76,75	77,10	78,25	79,35	80,65
4	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persen	86,25	87,90	88,25	89,00	91,05	93,45	95,75

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2025

BAB 5
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate Tahun 2025-2029 yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran, merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Ternate selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. RPJMD ini juga menjadi acuan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ternate.

Penyusunan RPJMD Kota Ternate Tahun 2025-2029 ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Ternate, serta terpadu dan searah dengan pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun mendatang. RPJMD Kota Ternate Tahun 2025-2029 menjadi pendorong membangun gerakan bersama menuju **TERWUJUDNYA TERNATE YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN – "TERNATE ANDALAN" JILID II.**

5.1 PEDOMAN TRANSISI

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2030-2034 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah periode berikutnya dan mengacu pada RPJPD Kota Ternate Tahun 2025-2045 serta RPJMD Provinsi Maluku Utara yang berlaku.

5.2 KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Ternate serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RPJMD Kota Ternate Tahun 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Walikota dan Wakil Walikota Ternate dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Ternate;
2. Walikota dan Wakil Walikota berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;
3. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Walikota Ternate dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kota Ternate;
4. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Ternate dan pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
5. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Ternate dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
6. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Ternate dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD;
7. BAPPELITBANGDA Kota Ternate melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD, mengkoordinasikan hasil evaluasi RENSTRA Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Ternate.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate disusun sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota ke dalam program-program pembangunan secara selaras dengan kebijakan dan program pembangunan nasional dan provinsi, sinergi antar program dan sumber daya, serta terukur ketercapaian target kinerjanya. Dengan konsep pemikiran semacam ini, diharapkan, pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh Kota Ternate ke dalam sistem pembangunan daerah akan lebih tepat sasaran dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum, peningkatan daya saing daerah, serta pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dokumen RPJMD secara langsung ataupun tidak langsung pada dasarnya adalah pengejawantahan janji politik yang disampaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota Ternate kepada rakyat pada saat kampanye. Dalam prosesnya, arah kebijakan, strategi, dan juga program pembangunan daerah beserta indikatornya dibahas bersama dengan anggota DPRD yang juga representasi dari rakyat. Kesepakatan politik yang muncul dan tertuang ke dalam dokumen RPJMD ini kemudian menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan tahunan oleh Perangkat Daerah. Oleh karena itu, pada akhir periode jabatan, Walikota dan Wakil Walikota mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan rakyat melalui mekanisme Pemilihan Kepala Daerah. Selain itu, sebagai bagian dari penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonesia, Walikota dan Wakil Walikota juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar, maka perlu adanya kesungguhan dan komitmen yang kuat, agar pada gilirannya mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kota Ternate. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Ternate ini, tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin para penyelenggara pemerintahan, khususnya kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah. Maka dengan memanjatkan Do'a kepada Allah SWT, kita semua berharap semua penjabaran Visi dan Misi yang ada dalam dokumen RPJMD ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Ternate di masa yang akan datang.



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KOTA TERNATE TAHUN 2025